



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana APBD pada tahun mendatang yang akan dibahas dan disahkan menjadi APBD.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) di Provinsi Kepulauan Riau.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 1 (satu) tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (2) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman bagi PD Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021;
 - b. acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Penyusunan RAPBD Tahun 2021, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
- b. PD Provinsi Kepulauan Riau menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA~PD) Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4

- (1) OPD Provinsi Kepulauan Riau membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD Provinsi Kepulauan Riau yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran PD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.

Pasal 6

Jika terjadi perbedaan dalam pembahasan RAPBD Tahun 2021 antara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD Tahun 2021 dan semua aspek yang mempengaruhi penetapan RAPBD.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 Juli 2020

**Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
WAKIL GUBERNUR**



ISDIANTO

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal : 17 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



T. S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020 NOMOR 688



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-6
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	I-11
1.5 Sistematika RKPD.....	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-23
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum (per urusan)	II-41
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-134
2.2 Permasalahan Pembangunan	II-141
2.2.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (Isu strategis)	II-141
2.2.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	II-150
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Arah kebijakan ekonomi nasional.....	III-1
3.1.2 Arah kebijakan ekonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	III-5
3.2 Kerangka Pendanaan dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-14
3.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	III-14
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	III-17
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III- 20
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.....	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021	IV-13
4.3. Arah Kebijakan Tahun 2021 berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD tahun 2016-2021	IV-19
4.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021	IV-20
4.5. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	IV-58
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V-1
5.1 Dukungan Program RKPD Terhadap Prioritas Nasional	V-1



5.2	Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SPM	V-20
5.3	Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SDGs	V-23
5.4	Dukungan Program RKPD Terhadap Sasaran Pembangunan	V-27
5.5	Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah.....	V-29
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....		VI-1
6.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-1
6.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	VI-4
BAB VII PENUTUP		VII-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran agar efektif, efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan, penyusunan dokumen RKPD berorientasi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran dan hasil program yang sudah tercantum dalam dokumen RPJMD. Dalam hal penganggaran, penyusunan APBD disusun dengan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (*Money follow program*). Pada tahap pelaksanaan, penetapan anggaran diikuti Perjanjian Kinerja (PK) di semua level. Pada tahap pertanggungjawaban, setiap program dan kegiatan dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi akuntabilitas keuangan, tetapi juga dari sisi pencapaian kinerja pembangunan. Dalam hal evaluasi kinerja, dokumen evaluasi kinerja pembangunan disusun untuk mendukung aspek perencanaan pembangunan.

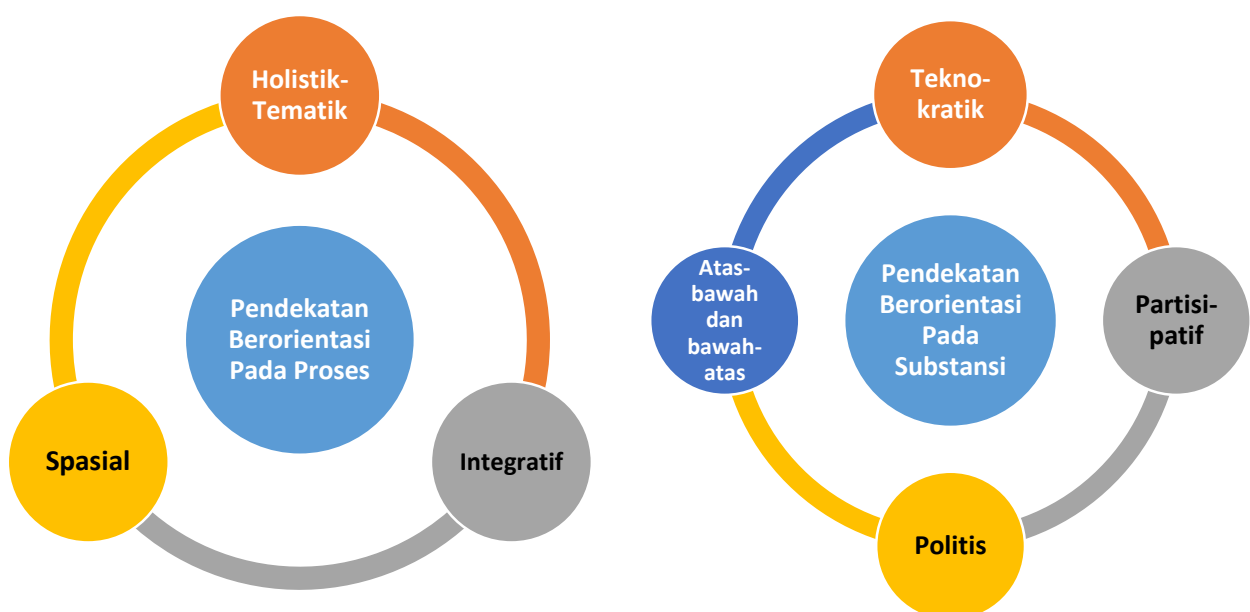
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan sebagai penjabaran atas dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. RKPD memuat tentang kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dengan partisipasi masyarakat. RKPD tahun 2021 merupakan periode terakhir RPJMD Tahun 2016-2021 yang diarahkan pada **“Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”**, kemudian disepakati dan diubah menjadi **“Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim Melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan”**.

Penyusunan RKPD ditujukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Secara substansi penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dan RKP tahun 2021. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah termasuk peraturan perundangan mengenai SPM dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penyusunan prioritas dan kebijakan RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja

pembangunan daerah tahun 2019, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2021, pokok-pokok pikiran DPRD, dan usulan stakeholder terkait.

Isu strategis dimaksud termasuk di dalamnya adalah dampak Pandemi COvid-19, dimana sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid- 19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat ancaman tumbulnya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan oleh negara Indonesia pad aseluruh provinsi juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan tersendatnya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah dan Pemeritnaqh Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2021.

Sesuai PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dilaksanakan menggunakan pendekatan baru serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan pendekatan **money follows program melalui penganggaran berbasis kinerja**, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial dari berbagai Program Prioritas yang sejalan dengan visi misi Kepala Daerah. Tujuan dari pelaksanaan *money follow program* adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.



Gambar 1.2 Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Kepulauan Riau Tahun 2021



Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dilaksanakan melalui beberapa pendekatan berorientasi pada proses yaitu:

- 1) Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
- 2) Pendekatan Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten/kota. Dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2019, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau.
- 3) Pendekatan Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Komitmen ini telah dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2020 dimana Program dan Kegiatan Prioritas yang tertuang didalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau dibahas dan diselaraskan dengan Program, Kegiatan dan Proyek Strategis Nasional.
- 4) Pendekatan Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan di akomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dan konsultasi Rancangan Pegub RKPD dengan DPRD.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

- 1) Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- 2) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- 3) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RKPD sudah



memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah.

- 4) Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja yang merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan Kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian Kinerja tersebut. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran (output) dan/atau hasil, dari kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui e-Planning. Seluruh usulan perencanaan Perangkat Daerah, Masyarakat, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui e-planning.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dilaksanakan dengan tahapan mulai

1. Persiapan penyusunan RKPD

Tahapan ini meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja, penyiapan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi perencanaan pembangunan daerah;

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

Tahapan ini merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun rancangan Rencana Kerja perangkat daerah. Proses-proses penyusunan tersebut antara lain: Penelaahan tentang prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD pada tahun 2021, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, serta Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD.

3. Penyusunan rancangan RKPD

Tahapan ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD dengan prioritas nasional dan RKP Tahun 2021,. Rancangan RKPD disusun dengan memperhatikan Rakor Teknis tek, dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Tahapan ini merupakan forum untuk menghasilkan sinergisitas rancangan RKPD dengan aspirasi masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Proses Musrenbang ini melibatkan berbagai *stakeholders*, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, termasuk pelibatan kaum perempuan dan anak secara partisipatif.

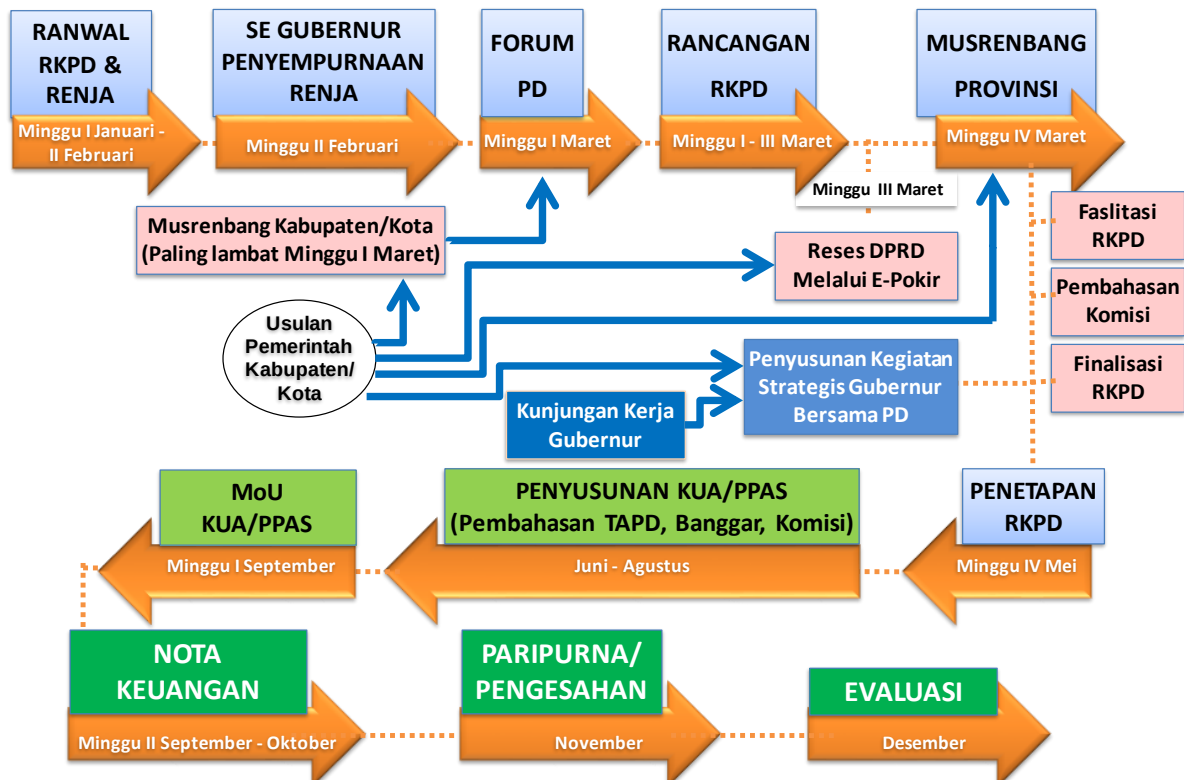
5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Tahapan ini merupakan perbaikan rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional.

6. Penetapan RKPD

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Skema penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:



Gambar 1. 1. Bagan Alir Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan penganggaran pembangunan tahunan. RKPD Tahun 2021 setelah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. RKPD juga menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2021 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2021. Dengan adanya prioritas dan arah kebijakan tahunan pembangunan daerah tercipta kepastian mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

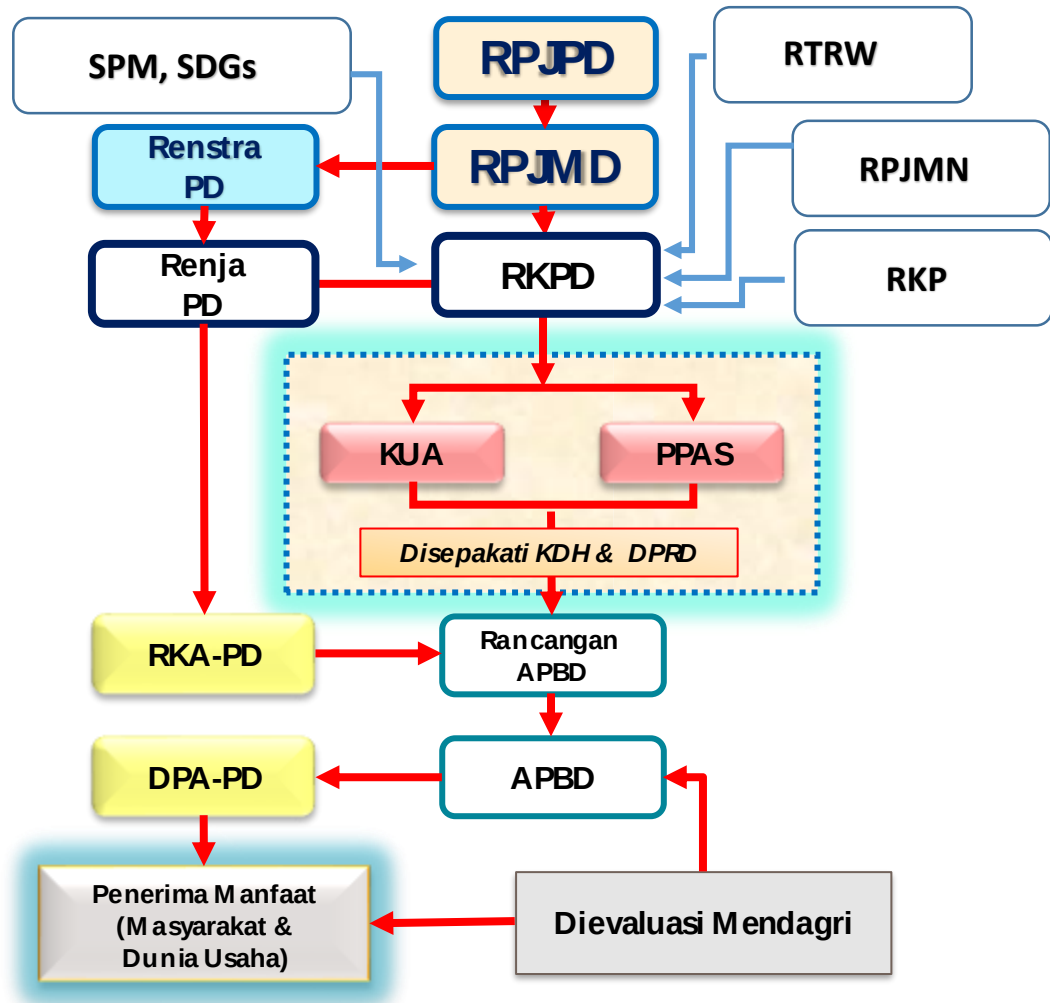


24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021;
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
29. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 berpedoman kepada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2. Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penjelasan keterkaitan erat antara RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

1. Hubungan RKPD Tahun 2021 dengan Perubahan RPJMD tahun 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD Tahun 2021 merupakan RKPD tahun kelima dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. Dengan demikian RKPD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.

Dalam dokumen perubahan RPJMD tahun 2016-2021, pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 diarahkan pada **“Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”** yang



kemudian disepakati dan berubah menjadi **“Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim Melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan”** dengan prioritas pada:

- a. Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu
- b. Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat
- c. Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas
- d. Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman
- e. Pemantapan tata kelola pemerintahan

2. Hubungan RKPD Tahun 2021 dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 juga disusun dengan memperhatikan pada kebijakan RKP tahun 2021. RKP sebagai acuan untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional. Substansi dari dokumen RKP Tahun 2021 yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2021.

Tema RKP Tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan fokus pembangunan yang diarahkan kepada:

1. Pemulihan Industri,
2. Pariwisata dan Investasi,
3. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
4. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan
5. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Sedangkan prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah terdiri dari tujuh aspek sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.



3. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya Rencana Kerja PD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD.

4. Hubungan RKPD dengan KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen RKPD adalah untuk merumuskan program prioritas pembangunan daerah pada tahun 2021 berdasarkan penjabaran dari misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan mengacu pada program prioritas yang ada dalam RKP Nasional, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 adalah sebagai :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan KUA, PPAS dan dasar dalam membuat kerangka acuan kerja penyusunan RAPBD Tahun 2021.
3. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).
4. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pada saat pelaksanaan dan evaluasi pada saat akhir perencanaan.

1.5 Sistematika RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, terdiri dari enam (6) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup uraian tentang latar belakang penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, rumusan maksud dan



tujuan, penjelasan tentang hubungan RKPD Tahun 2021 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, serta Sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang aspek kewilayahan Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai target sesuai tahun perencanaan di RPJMD Tahun 2016-2021.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah yaitu tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah serta proyeksi kondisi keuangan daerah dan kerangka pendanaan pembangunan serta arah kebijakan pendapatan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Menjelaskan tentang visi dan misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, isu-isu strategis pembangunan tahun 2021, tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021

Menjelaskan tentang rencana kerja kegiatan-kegiatan program prioritas, pencapaian visi dan misi dalam perubahan RPJMD tahun 2016-2021 dan rencana kerja pembangunan tahun 2021.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisi tentang Indikator Kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta target kinerja yang akan dicapai tahun 2021.

BAB VII PENUTUP

Berisi tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD serta tindak lanjut yang diperlukan dalam implementasi RKPD Tahun 2021 sebagai acuan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

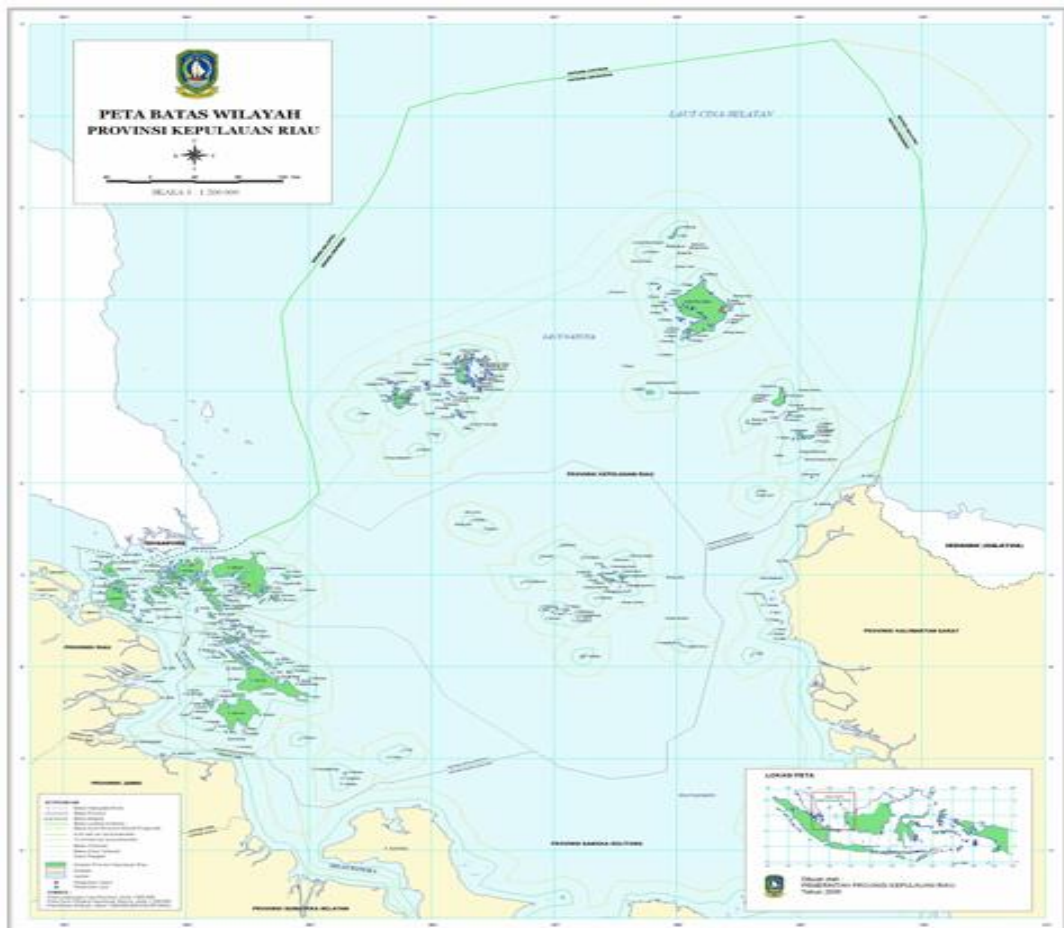
2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau



Gambar 2.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau

Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, dan lima kabupaten, yaitu : Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km², dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

NO	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)
1.	Kabupaten Karimun	912,75
2.	Kabupaten Bintan	1.318,21
3.	Kabupaten Natuna	2.009,04
4.	Kabupaten Lingga	2.266,77
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14
6.	Kota Batam	960,25
7.	Kota Tanjungpinang	144,56
	Total	8.201,72

Sumber: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Terkait dengan luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan
Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km ²)
1	Kabupaten Karimun	4.698,09
2	Kabupaten Bintan	102.964,08
3	Kabupaten Natuna	216.113,42
4	Kabupaten Lingga	43.339,00
5	Kabupaten Kep. Anambas	46.074,00
6	Kota Batam	3.675,25
7	Kota Tanjungpinang	149,13
	Total	417.012,97

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007



2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, letak astronomis kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
2.	Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3.	Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
4.	Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
5.	Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT
6.	Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
7.	Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT

Sumber: Biro Pemerintahan dan Perbatasan (Kepulauan Riau dalam Angka 2020)

Setelah terbitnya Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk identifikasi data pulau-pulau yang belum bernama dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian "Pulau" menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada diatas air pada saat air pasang. Adapun hasil Verifikasi Tim Nasional dimaksud terdapat 1.795 pulau yang sudah bernama, kecuali satu pulau yaitu Pulau Berhala dimana saat itu masih dalam sengketa dengan Provinsi Jambi. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, maka pulau Provinsi Kepulauan Riau bertambah 1 (satu) buah menjadi 1.796 pulau, dengan perincian terlihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi
Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni
1	Kota Batam	371	133
2	Kota Tanjungpinang	9	2
3	Kabupaten Bintan	241	48
4	Kabupaten Karimun	251	73
5	Kabupaten Natuna	392	62
6	Kabupaten Lingga	532	76
	Jumlah	1.796	394

Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Perkembangan terakhir pulau di Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 125.1/4275/BAK, tanggal 12 Oktober 2015 perihal penyampaian data pulau, ada penambahan pulau di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 122 pulau. Namun demikian belum ada rincian penambahan pulau tersebut.

2.1.1.3 Kondisi Topografi

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.



4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Ketinggian wilayah menurut kabupaten/kota sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 posisi depan kantor pemerintah daerah, diperoleh hasil dengan rincian terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
1	Karimun	5 m
2	Bintan	6 m
3	Natuna	14 m
4	Lingga	6 m
5	Kepulauan Anambas	7 m
6	Batam	8 m
7	Tanjungpinang	65 m

Sumber: BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020)

Di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat sebanyak 15 gunung dengan ketinggian bervariasi, tertinggi Gunung Daik di Kabupaten Lingga setinggi 1.272 m, selanjutnya Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, kemudian Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
1	Karimun	Gunung Jantan	478
2	Bintan	Gunung Bintan	380
3	Natuna	Gunung Ranai	959
		Gunung Datuk	510
		Gunung Tukong	477
		Gunung Selasih	387
		Gunung Lintang	610
4	Lingga	Gunung Daik	1.272
		Gunung Sepincan	800
		Gunung Tanda	343
		Gunung Lanjut	519



No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
5	Kepulauan Anambas	Gunung Muncung	415
		Gunung Punjang	443
		Gunung Kute	232
		Gunung Pelawan	405
		Condong	

Sumber: BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020)

2.1.1.4 Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama "paparan sunda" atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di Kepulauan Riau diantaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batulanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batupasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau dan kerakal.

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara dan sebagian kecil dataran yang terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur.

Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit. Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran yang menempati di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Demikian juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi yang berupa lipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa dan konglomerat polemik.

Geomorfologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarang juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit. Geomorfologi Pulau Bunguran

berupa perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis.

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau yang relatif besar yaitu Pulau Matak, Pulau Siantan dan Pulau Jemala. Ketiga pulau tersebut disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya- timur laut seperti di Pulau Jemaja. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai potensi tambang granit, sedangkan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.

Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar, sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari *organosol*, *glei* humus, *podsolik* merah kunicng, *latosol* dan *aluvial*. Jenis tanah *Organosol* dan *glei* humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir. Kepadatan atau *bulk density* kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanah *Organosol* tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Jenis lainnya adalah tanah *Latosol*, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanah *Aluvial* yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecokelatan, mengandung *glei* dan bertotol kuning, merah dan coklat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau-pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata.



Daerah Aliran Sungai mencakup sebanyak tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Lingga. Mata air sebagai sumber air permukaan terdapat di lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Tanjungpinang dan Lingga. DAM/Waduk tersebar di seluruh kabupaten/kota. Beberapa DAM/Waduk/Embung yang direncanakan dibangun pada yaitu Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus di Kota Batam, dan DAM/Waduk/Embung Dompok di Kota Tanjungpinang. Sementara itu Kolong terdapat di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga.

Secara rinci data mengenai potensi sumberdaya air di Kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Persebaran Potensi Sumberdaya Air Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/ Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/ Embung	Kolong
1	Batam	Terong, Gading, Ladi, Pesung, Bukit Jodoh, Tiban Lama, Tiban Lama, Balo, Nongsa, Gata, Medang, Galang Baru, Galang, Kangka, Sembulang, Abang Besar	-	Duriangkang, Muka Kuning, Sei Ladi, Nongsa, Sei Harapan, Rempang, Sekanak I, Sekanak 2, Sei Tembesi, Rempang Utara, Sei Gong, Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus	-
2	Natuna	Midai, Kampung Hilir, Pajang, Serasan, Lagong, Batang, Tiga Sedanau, Selor, Segeram, Kelarik, Cinak, Cinak Besar, Kelarik Hulu, Hulu, Bunguran Timur, Binjai.	Nuraja, dan Gunung Datuk	Balau Sedanau, Ranai Darat, Selat Lampa, Kelarik, Tapau, Sebayar.	-
3	Kepulauan Anambas	Air Abu, Nyamuk, Telaga, Siantan, Batu Belah, Air Asuk, Wampu, Ladan, Mubur, Matak, Anambas, Panai	Tarempa, Temurun, Gunung Bini, dan Gunung Kesayana	Batu Tambun, Gunung Lintang, Batu Tabir, dan Gunung Samak	-
4	Bintan	Logo, Ekan, Bintan, Cikolek, Sumpai,	Gunung Lengkuas	Waduk Tanjung Uban/Sei Jeram,	Danau Kolong Gunung



No	Kabupaten/ Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/ Embung	Kolong
		Angus, Sopor, Mapor, Katubi, Pengibu, Tambelan, Benuwa, Tambang Besar.		Waduk Sei Jago, Waduk Lagoi, Waduk Gesek, Kolong Enam, Busung, Galang Batang, Kawal, Anculai, Kangboi, dan Sekuning	Kijang, Danau Belakang Mesjid Raya, Ex. Galian Pasir Galang Batang, Ex. Galian Pasir Simpang Busung, Ex. Galian Pasir Pengujan, Bloreng, Katen, Nyirih, Tembeling dan Mantang
5	Karimun	Gemuruh, Urung, Ungar, Sawang, Teluk Radang, Bela, Rapit, Papan, Buru, Lebu, Pauh, Durian, Tjitim, Sebesi, Karimun, Moro, Sugi, Combol, Alai, Sanglar, Durai, Terong	-	Waduk Sei Bati, Pongkar 1, Pongkar 2, Sentani, Paya Manggis, Sei Gunung Jantan (Pulau Karimun Besar), Waduk Tempan, Sawang (Pulau Kundur) dan Waduk Sidodadi, Sidomoro (Pulau Moro)	Ex. Galian Timah Perayon, Ex. Galian Pasir Kobel, Galian Pasir Tempan
6	Tanjungpinang	Dompok, Jang	Hutan Lindung (Pancur)	Waduk Sei Pulau, Sei Timun, Dompok	-
7	Lingga	Durslin, Selamak, Musai, Pengok, Sekarim, Buluh, Bidai, Posik, Mamut, Tjempah, Mentuda, Telok, Ketam, Canot, Selapan, Jelutung, Kredong, Awak, Duara, Resun, Tembok, Kerasing, Lieng, Dabo, Sergong, Kumbang, Langkap, Maroktua, Bajau, Ara, Temiang, Sebangka, Penuba, Air Merah	Gunung Daik, Gunung Muncung, Batu Ampar, Kampung Menserai, dan Kampung Tanjung Tinggi	Gemuruh	Ex. Galian Timah Singkep



Sumber: Kepmen PU No. 4/PRT/M/2015; BWSS IV Kepulauan Riau dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, 2016

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Terdapat 6 Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kepulauan Riau, di antaranya yaitu: Stasiun BMKG Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun; Stasiun BMKG Ranai; Stasiun BMKG Dabo Singkep; Stasiun BMKG Tarempa; Stasiun BMKG Hang Nadim Batam; dan Stasiun BMKG Kijing Tanjungpinang.

Rata-rata suhu udara selama tahun 2019 terbesar terjadi di Kabupaten Karimun dengan suhu 28,18oC dan kondisi suhu udara terendah terjadi di Kota Tanjungpinang yaitu sekitar 27,43oC. Sementara itu untuk rata-rata kelembaban udara tertinggi di Kabupaten Natuna dengan Kelembaban 86,17% dan terendah di Kota Batam 79,58%. Curah hujan tertinggi selama tahun 2019 terjadi di Kabupaten Lingga yaitu 202,71 mm3 dan terendah di Kota Batam yaitu 102,29 mm3.

Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di 6 stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2019

No	stasiun	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	Rata-rata Tekanan Udara (mb)	Rata-rata Kecepatan Angin (m/s)	Curah Hujan (mm ³)	Penyinaran Matahari (%)
1	Karimun	28,18	81,28	1.010,08	2,1	164,96	47,57
2	Bintan	-	-		-	-	-
3	Natuna	27,70	86,17	1.010,98	1,37	123,16	65,33
4	Lingga	27,72	84,33	1.010,62	2,53	202,71	59,67
5	Kepulauan Anambas	28,00	80,00	1.010,10	1,03	149,00	51,00
7	Batam	28,01	79,58	1.012,22	3,67	102,29	24,89
8	Tanjungpinang	27,43	82,50	1.011,10	3,09	195,70	62,00

Sumber : BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020).

2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu: Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 164.662 hektar, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebanyak 49.439 hektar, Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas 252.940.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas lebih kurang 231.441 hektar. Selain itu Kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 23.872 hektar. Non DPCLS seluas 207.569 hektar. Selanjutnya perubahan fungsi kawasan hutan seluas 60.299 hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 536 hektar.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 227.682,63 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

Sementara itu kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (*backyard farming*). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah *hinterland*. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Potensi perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah laut dan perairan umum Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah pengelolaan perikanan yang ada sudah termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terkendala arah angin utara selama tiga bulan dalam setahun terjadi sehingga nelayan berhenti melaut.

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau

membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 13.759,28 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan dan Lingga; Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas; Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini berbasiskan potensi daerah dan tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Arahkan Pengembangan Kawasan Industri ditekankan pada pengembangan kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang, dengan berbasiskan potensi daerah yang berwawasan lingkungan. Rencana kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau seluas 28.434,12 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

- a. Kawasan industri besar, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri-industri unggulan yang terdiri dari industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika.
- b. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Rencana kawasan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau seluas 37.929,83 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Adapun arahan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan kooperatif terdiri dari:

- a. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;
- b. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
- c. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
- d. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
- e. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus;
- f. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
- g. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rencana kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 84.208,26 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

8. Pemanfaatan Ruang Laut

Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki *comparative advantage* yang tinggi karena posisi geografisnya. Indonesia belum memiliki kedaulatan negara ditandai dengan kapal-kapal yang melewati ruang laut Indonesia, tetapi melapor dan membayar retribusi ke Malaysia dan Singapura. Juga potensi 37 kapal tenggelam (harta karun) di sekitar Pulau Bintan, ditengah Laut Natuna, serta adanya kawasan laut tertutup sebagai tempat pembuangan amunisi militer. Selain itu perairan lau Provinsi

Kepulauan Riau juga memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral.

2.1.1.7 Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kerawanan bencana, meliputi sebagai berikut :

a. Kawasan Rawan Tanah Longsor/Gerakan Tanah

Kawasan rawan tanah longsor / gerakan tanah adalah kawasan yang memiliki kriteria berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran. Kawasan tanah longsor ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang penurunan muka tanahnya sedang sampai tinggi. Kawasan ini tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan tingkat bahaya sedang. Kawasan ini terdapat di area dan kawasan bekas tambang dan kawasan terkena pemotongan lereng di Pulau Karimun dan Pulau Kundur di Kabupaten Karimun, Pulau Singkep di Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara total luas bahaya tanah longsor sebesar 149.798 hektar. Berikut ini disajikan potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau. Secara rinci potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	13.397	Tinggi
2	Bintan	3.061	Sedang
3	Natuna	26.919	Tinggi
4	Lingga	49.963	Tinggi
5	Kepulauan Anambas	48.922	Tinggi
6	Batam	7.468	Tinggi
7	Tanjungpinang	68	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		149.798	TINGGI

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

Berdasarkan Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020 diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat bahaya gempa bumi dengan luas bahaya mencapai 799,838 hektar. Tabel 2.10 berikut ini disajikan perincian potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.10
Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	88,931	Rendah
2	Bintan	130,314	Rendah
3	Natuna	196,386	Rendah
4	Lingga	214,712	Rendah
5	Kepulauan Anambas	59,014	Rendah
6	Batam	96,025	Rendah
7	Tanjungpinang	14,456	Rendah
Provinsi Kepulauan Riau		799,838	Rendah

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi

Kawasan rawan gelombang pasang berada sekitar pantai rawan terhadap gelombang pasang akibat angin kencang dengan kecepatan tinggi atau gravitasi bulan atau matahari. Kriteria kawasan ini adalah kawasan yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai 100 kilometer per jam yang timbul akibat kecepatan angin atau gravitasi bulan dan matahari. Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan ketentuan kawasan permukiman yang berada di sekitar pantai atau pesisir. Arah kebijakan kawasan rawan gelombang pasang adalah melalui pengamanan pantai dan penanaman *mangrove* untuk meredam dan agar terlindung dari gelombang pasang (rob). Gelombang pasang ini juga mengakibatkan terjadinya abrasi pantai.

Kawasan rawan abrasi meliputi kawasan yang mengalami perubahan bentuk pantai yang diakibatkan oleh gelombang laut, arus laut dan pasang surut laut terutama yang berada di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar. Pantai-pantai yang rawan terhadap abrasi antara lain:

- Pulau Karimun: Pantai Tanjung Balai sepanjang ± 4 km, Pantai Pelawan sepanjang ± 3 km, Pantai Pongkar sepanjang ± 6 km, Pantai Tanjung Sebatok sepanjang ± 4 km dan Pantai Sepedas sepanjang ± 4 km.
- Pulau Kundur: Pantai Timur sepanjang ± 5 km, Pantai Selat Beliah sepanjang ± 7 km, Pantai Urung sepanjang ± 3 km dan Pantai Parit Jepang sepanjang ± 3 km.
- Pulau Bintan: Pantai Trikora sepanjang ± 10 km, Pantai Tanjung Uban sepanjang ± 5 km, Pantai Sei Kecil - Sakera sepanjang ± 10 km, Pantai Lobam sepanjang ± 4 km, Pantai Senggarang sepanjang ± 4 km, Pantai Penyengat sepanjang ± 8 km, Pantai Barat Tanjungpinang sepanjang ± 8 km, Pantai Pulau Dompak, Pantai Dompak Seberang sampai Tanjung Mochong serta pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang dan Tambelan.



- d. Pulau Singkep: Pantai Kota Dabo sepanjang ± 4 km, Pantai Kote sepanjang ± 3 km, Pantai Jagoh sepanjang ± 2 km dan Pantai Kebun Nyiur sepanjang ± 4 km Pulau Batam: Pantai Jodoh sepanjang ± 3 Km, Pantai Punggur sepanjang ± 500 m, Pantai Nongsah sepanjang ± 5 Km dan Pantai Melayu sepanjang ± 10 km.
- e. Pulau Ranai: Pantai Kota Ranai sepanjang ± 8 km, Pantai Tanjung sepanjang ± 4 km.

Luas kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 125.040 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan bahaya kategori Sedang, dengan perincian pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi
di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	16.310	Sedang
2	Bintan	16.016	Sedang
3	Natuna	16.024	Sedang
4	Lingga	32.359	Sedang
5	Kepulauan Anambas	19.817	Sedang
6	Batam	22.745	Sedang
7	Tanjungpinang	1.769	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		125.040	Sedang

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Prov. Kepri 2016-2020

c. Kawasan Rawan Banjir dan Banjir Bandang

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan banjir terutama terdapat di kawasan tangkapan air yang daerah resapan airnya sudah mengalami kerusakan lingkungan (berubah fungsi lahan) seperti reklamasi dan wilayah dengan drainase yang kurang berfungsi secara baik, sehingga sungai tidak mampu lagi menampung jumlah aliran permukaan dan air meluap dari badan sungai. Kawasan rawan banjir tersebar di 7 kabupaten/kota dengan luasan mencapai 478.906 hektar. Untuk Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan termasuk kategori tinggi, sedangkan Kabupaten Karimun, Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas termasuk kategori sedang. Kabupaten Anambas dan Natuna termasuk kategori ringan. Potensi luas bahaya banjir terlihat pada Tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.12
Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	60.696	Sedang
2	Bintan	95.717	Tinggi
3	Natuna	151.087	Sedang
4	Lingga	103.560	Sedang
5	Kepulauan Anambas	1.162	Sedang
6	Batam	54.975	Tinggi
7	Tanjungpinang	11.709	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		478.906	Tinggi

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

Potensi bencana banjir bandang terdapat di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas, dengan luasan mencapai 6.886 hektar, dengan perincian tercantum pada Tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.13
Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Natuna	6.327	Tinggi
2	Kepulauan Anambas	559	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		6.886	Tinggi

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

d. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Kawasan rawan angin puting beliung ditetapkan dengan ketentuan kawasan permukiman yang berada di sekitar pantai atau pesisir. Semua kabupaten/kota menjadi kawasan rawan bencana angin puting beliung.

e. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan kategori tinggi dengan luasan mencapai 409.760 hektar, dengan perincian pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	20.051	Tinggi
2	Bintan	51.372	Tinggi
3	Natuna	120.376	Tinggi
4	Lingga	155.443	Tinggi
5	Kepulauan Anambas	39.773	Tinggi
6	Batam	20.789	Tinggi
7	Tanjungpinang	1.956	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		409.760	Tinggi

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

2.1.1.8 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Database Hasil Konsolidasi 31 Desember 2019 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau) tahun 2019 sebanyak 1.970.437 jiwa dengan komposisi sebanyak 1.0004.500 laki-laki dan 965.937 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 693.087 KK.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2019 Berdasarkan Database Kependudukan
Provinsi Kepulauan Riau

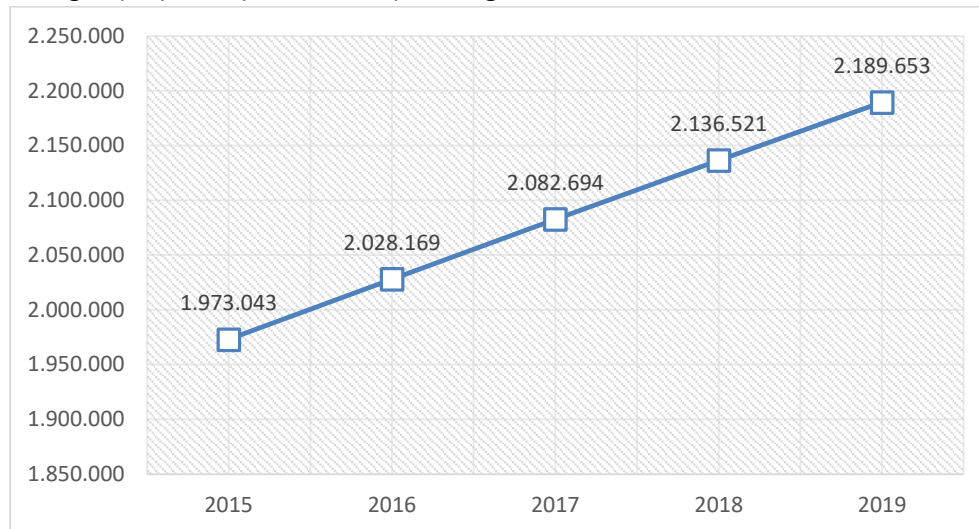
KODE WILAYAH	Kabupaten/Kota	LAKI-LAKI (Jiwa)	% (Laki-Laki)	PEREMPUAN (Jiwa)	% (Perempuan)	JUMLAH (Jiwa)	JUMLAH KEPALA KELUARGA	JUMLAH JIWA PER KELUARGA
01	BINTAN	80.429	51	76.174	49	156.603	48.371	3,2
02	KARIMUN	128.344	51	122.167	49	250.511	80.900	3,1
03	NATUNA	41.910	51	40.042	49	81.952	24.648	3,3
04	LINGGA	52.125	52	49.010	48	101.135	32.256	3,1
05	KEPULAUAN ANAMBAS	23.979	51	22.862	49	46.841	13.933	3,4
71	BATAM	566.502	51	546.081	49	1.112.583	422.184	2,6
72	TANJUNG PINANG	111.211	50	109.601	50	220.812	70.795	3,1
21	Jumlah Provinsi Kepulauan Riau	1.004.500	51	965.937	49	1.970.437	693.087	3

Keterangan : Data Berdasarkan Database Hasil Konsolidasi 31 Desember 2019 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau)

** Data tersebut sudah dibersihkan Oleh Kementerian Dalam Negeri cq Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai Undang-Undang 24 Tahun 2013

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 hingga 2019 selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 1.973.043 jiwa dan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 2.189.653 jiwa. Perkembangan jumlah

penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 hingga tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020).

Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yakni pada tahun 2019 sebanyak 1.376.009 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 42.309 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 (Data BPS)

No	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Karimun	225.298	227.277	229.194	231.145	232.797
2	Bintan	153.020	154.584	156.313	157.927	159.403
3	Natuna	74.520	75.282	76.192	76.968	77.771
4	Lingga	88.591	88.971	89.330	89.501	89.781
5	Kepulauan Anambas	40.414	40.921	41.412	41.927	42.309
6	Kota Batam	1.188.985	1.236.399	1.283.196	1.329.773	1.376.009
7	Kota Tanjungpinang	202.215	204.735	207.057	209.280	211.583
	Provinsi Kepulauan Riau	1.973.043	2.028.169	2.082.694	2.136.521	2.189.653

Sumber: BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020).

Jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau menurut jenis kelamin dimana laki-laki sebanyak 1.115.765 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 1.073.888 jiwa. Jumlah penduduk lebih banyak penduduk laki-laki, terlihat dari sex ratio sebesar 103,90%, yang berarti ada 103 orang laki-laki di antara 100 perempuan.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
Karimun	118.401	114.396	232.797	103,50
Bintan	81.908	77.495	149.403	105,69
Natuna	39.987	37.784	77.771	105,83
Lingga	45.666	44.115	89.781	103,52
Kepulauan Anambas	21.784	20.525	42.309	106,13
Batam	701.240	674.769	1.376.009	103,92
Tanjungpinang	106.779	104.804	211.583	101,88
Kepulauan Riau	1.115.765	1.073.888	2.189.653	103,90

Sumber: BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020).

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data BPS pada tahun 2019 tergolong tinggi. Kota Batam menjadi daerah dengan laju pertumbuhan tertinggi 3,73%. Pertumbuhan penduduk yang besar di Kota Batam lebih disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Batam yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain. Laju Pertumbuhan penduduk terkecil berada di Kabupaten Lingga dengan rata-rata sebesar 0,37%. Secara rinci pertumbuhan penduduk per kabupaten/kota tercantum pada Tabel berikut.

Tabel 2.18
Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

No	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Karimun	0,98	0,88	0,84	0,85	0,87
2	Bintan	1,26	1,02	1,12	1,03	1,09
3	Natuna	1,43	1,02	1,21	1,02	1,14
4	Lingga	0,36	0,43	0,40	0,19	0,37
5	Kepulauan Anambas	1,31	1,25	1,20	1,24	1,18
6	Kota Batam	4,13	3,99	3,78	3,63	3,73
7	Kota Tanjungpinang	1,25	1,25	1,13	1,07	1,17
	Provinsi Kepulauan Riau	2,90	2,79	2,69	2,58	2,61

Sumber: BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020).

Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 266,97 jiwa/km² naik dibandingkan tahun 2018 sebesar 260 jiwa/km². Dilihat dari persebarannya pada tahun 2019, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Tanjungpinang sebesar 1.463,63 jiwa/km² selanjutnya Kota Batam sebesar 1.432,97 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Natuna



dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 38,71 jiwa/km² diikuti Kabupaten Lingga 39,61 jiwa/km². Secara rinci kepadatan penduduk per kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 (Jiwa/km²)

No	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Karimun	148	149	251,10	253	255,05
2	Bintan	88	89	118,58	120	120,92
3	Natuna	26	27	37,92	38	38,71
4	Lingga	42	42	39,41	39	39,61
5	Kepulauan Anambas	68	69	70,17	71	71,69
6	Batam	755	787	1.336,31	1.385	1.432,97
7	Tanjungpinang	843	855	1.432,33	1.448	1.463,63
	Provinsi Kepulauan Riau	186	191	253,93	260	266,97

Sumber: BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020).

Dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2019 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Jumlah penduduk kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 644.297 jiwa, kemudian penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 1.486.370 jiwa dan kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif) berjumlah 58.986 jiwa. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun ini mencapai 47,32%. Artinya setiap 100 orang yang berusia produktif (angkatan kerja) mempunyai tanggungan 47 penduduk tidak produktif (usia 0-14 tahun ditambah usia 65 tahun keatas). Semakin tinggi rasio ketergantungan mengindikasikan semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup usia tidak produktif.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

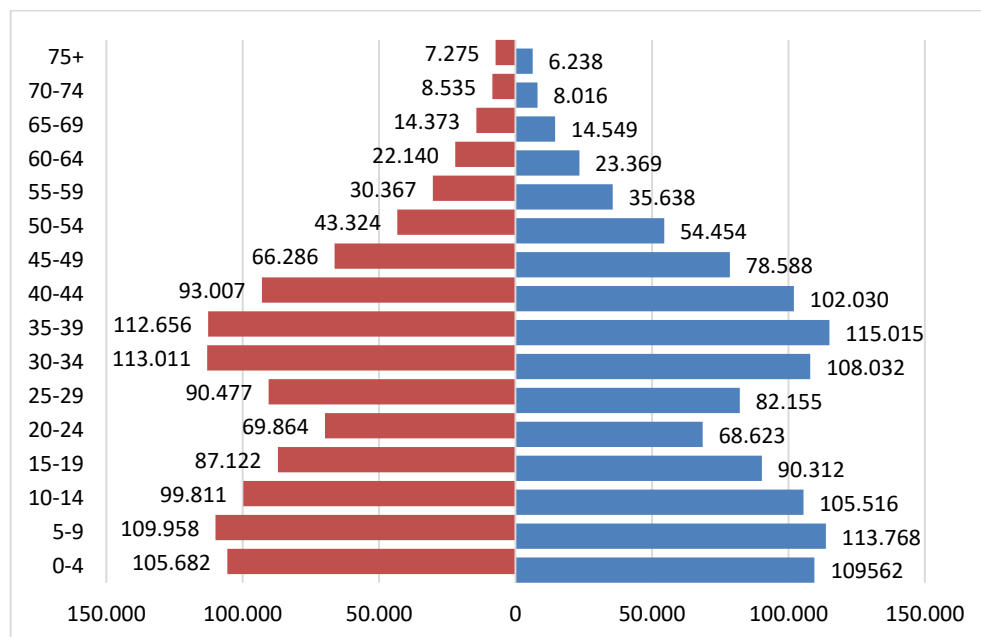
Kelompok Umur	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	109.562	105.682	215.244
5-9	113.768	109.958	223.726
10-14	105.516	99.811	205.327
15-19	90.312	87.122	177.434
20-24	68.623	69.864	138.487
25-29	82.155	90.477	172.632



Kelompok Umur	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
30-34	108.032	113.011	221.043
35-39	115.015	112.656	227.671
40-44	102.030	93.007	195.037
45-49	78.588	66.286	144.874
50-54	54.454	43.324	97.778
55-59	35.638	30.367	66.005
60-64	23.369	22.140	45.409
65-69	14.549	14.373	28.922
70-74	8.016	8.535	16.551
75+	6.238	7.275	13.513
Jumlah	1.115.765	1.073.888	2.189.653

Sumber: BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020).

Dari grafik piramida penduduk Provinsi Kepulauan Riau 2019 terlihat persentase penduduk terbanyak pada kelompok umur 35-29 tahun diikuti pada kelompok umur 30-34 tahun untuk penduduk laki-laki dan perempuan.



Sumber: BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020).

Gambar 2.3 Piramida penduduk provinsi kepulauan



2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Evaluasi pencapaian aspek Kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari beberapa indikator, meliputi: Pertumbuhan Ekonomi; Laju inflasi; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Persentase Penduduk Miskin; Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Indikator Gini; Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Nilai Keterbukaan informasi publik; dan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri.

Terlihat sebanyak 5 indikator telah mencapai target tahun 2019 meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Laju inflasi, Persentase Penduduk Miskin, Indikator Gini, dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sementara itu sebanyak 5 indikator lainnya belum mencapai target tahun 2019, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik, Nilai Keterbukaan informasi publik, dan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Evaluasi Capaian Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2018

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019		
						Target	Realisasi	% Capaian Target
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	2,01	4,56	4+1	4,89	100
2.	Laju inflasi	%	3,53	4,32	3,47	3,50±1	2,03	100
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,69	7,16	7,12	6,88	6,91	99,56
4.	Persentase Penduduk Miskin	%	5,84	6,13	5,83	5,98	5,80	103,01
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	73,99	74,23	74,55	74,71	74,55*	99,79
6.	Indikator Gini	Indeks	0,35	0,359	0,339	0,35±0,01	0,337	106,39
7.	Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik	Skor	NA	76,09	76,81	76,61 – 88,30 (B)	67,00	87,46
8.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100
9.	Nilai Keterbukaan	Skor	59,5	13,03	53,87	65	43,24	66,52



No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019		
						Target	Realisasi	% Capaian Target
	informasi publik							
10.	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Skor	60	64,18	64,18	70	65,83	94,04

Keterangan: *sementara menggunakan kinerja tahun 2018.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Mulai tahun 2014 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan tahun dasar tahun 2010.

Nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku pada 2019 mencapai 268.079,99 miliar rupiah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 249.075,50 miliar rupiah. Kategori PDRB ADHB yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Pertambangan dan Penggalian.

Tabel 2.22

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 (Miliar rupiah)

Kategori	uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018*	2019 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.087,96	7.729,47	7.981,53	8.126,82	8.250,04
B	Pertambangan dan Penggalian	31.400,49	33.038,03	32.061,78	35.215,93	35.151,42
C	Industri Pengolahan	74.966,24	80.842,35	84.404,23	91.794,56	100.707,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.218,91	2.468,48	2.689,97	2.653,58	2.772,78
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	233,26	252,52	282,71	290,08	291,79
F	Konstruksi	36.456,42	38.848,43	41.409,19	46.628,25	52.239,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	15.424,15	17.716,68	19.653,11	22.074,79	24.314,35
H	Transportasi dan	6.260,55	6.953,59	7.471,82	7.648,63	7.219,02



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Kategori	uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018*	2019 **
	Pengudangan					
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.951,43	4.346,14	5.061,47	5.628,20	6.259,11
J	Informasi dan Komunikasi	3.603,55	3.969,12	4.485,79	5.041,52	5.654,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.301,54	5.800,41	6.254,65	6.796,81	7.293,13
L	Real Estate	2.863,61	3.131,44	3.415,73	3.474,26	3.520,70
M,N	Jasa Perusahaan	9,15	10,10	11,34	12,54	11,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.627,75	5.106,64	5.914,07	6.415,58	6.843,65
P	Jasa Pendidikan	2.569,03	2.931,37	3.415,20	3.722,02	3.877,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.737,40	1.882,15	2.119,21	2.231,91	2.329,11
R,S,T,U	Jasa lainnya	858,96	980,77	1.075,07	1.320,01	1.345,37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		199.570,39	216.007,66	227.706,88	249.075,50	268.079,99

* Angka sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020).

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 182.183,73 miliar rupiah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 173.684,30 miliar rupiah. Sub sektor PDRB yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan dan penggalian.

Tabel 2.23

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 (Miliar rupiah)

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.689,22	6.018,41	5.945,61	5.776,42	5.736,00
B	Pertambangan dan Penggalian	25.417,33	26.883,19	25.648,83	26.045,16	26.177,52
C	Industri Pengolahan	59.498,19	61.497,86	62.436,28	65.019,40	69.081,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.400,52	1.523,11	1.621,70	1.606,42	1.660,25
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah Konstruksi	193,11	203,26	222,66	226,21	226,06
F	Konstruksi	26.871,95	28.073,93	13.665,03	14.523,51	15.408,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	11.738,60	12.858,55	4.654,49	4.696,77	4.280,15
H	Transportasi dan Pengudangan	4161,12	4413,81	3.536,02	3.925,06	4.305,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.002,93	3.159,14	3.736,38	4.158,75	4.650,20
J	Informasi dan Komunikasi	3.230,70	3.469,62	466,53	4.736,03	4.964,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.105,52	4.335,03	2.549,27	2.546,96	2.556,78



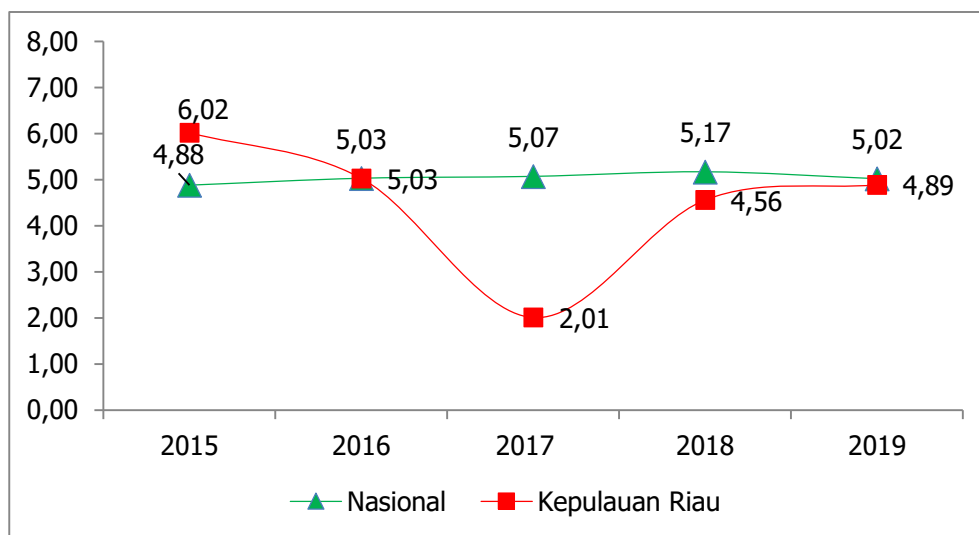
RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
L	Real Estate	2.340,43	2.443,35	8,88	9,54	8,70
M,N	Jasa Perusahaan	7,80	8,28	3.750,53	4.033,68	4.095,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3.386,49	3.583,27	2.418,96	2.459,73	2.474,91
P	Jasa Pendidikan	2.022,48	2.201,37	1618,9	1669,95	1719,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.405,32	1.467,87	758,86	904,87	912,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	659,67	712,98	5.945,61	5.776,42	5.736,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		155.131,35	162.853,04	166.081,68	173.684,30	182.183,73

* Angka sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020).

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 2,01%. kemudian pada tahun 2018 perekonomian Provinsi Kepulauan Riau mulai menunjukkan peningkatan mencapai sebesar 4,56%, dan pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi sebesar 4,89%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



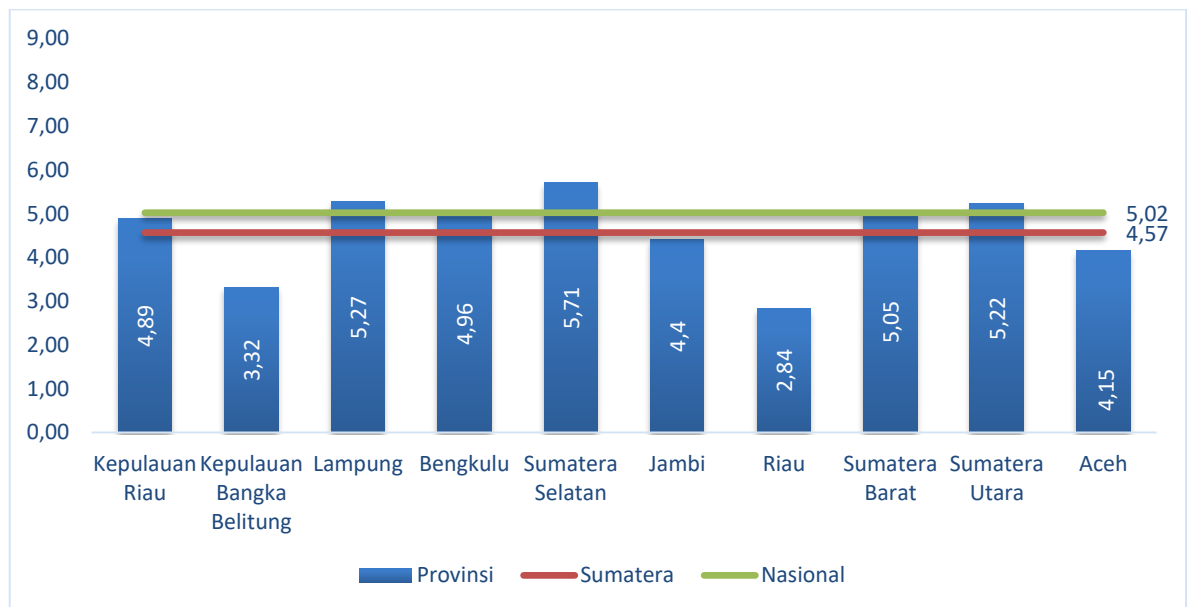
Sumber: BPS Provinsi Kepri (BRS "Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan IV-2019")

Gambar 2.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2015-2019

Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 sebesar 4,89% berada di atas rata-rata Pulau Sumatera sebesar 4,57% namun



di bawah capaian Nasional sebesar 5,02%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2019, Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi terendah ke-5 setelah Riau (2,84%); Kepulauan Bangka Belitung (3,32%); Aceh (4,15%); dan Jambi (4,4%). Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

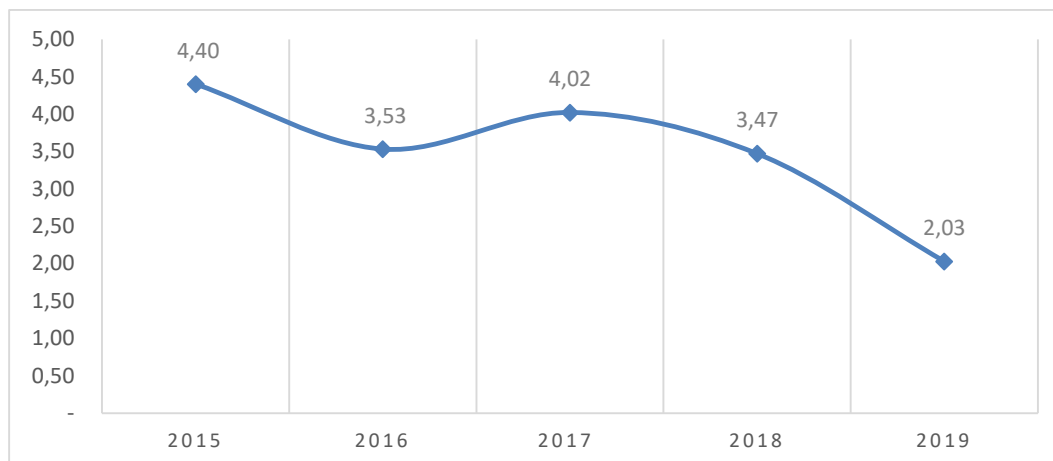


Sumber: BPS Provinsi Kepri (BRS "Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan IV-2019")

Gambar 2.5 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2019

2. Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dan kegiatan industri. Selama kurun waktu 2015 hingga 2019 laju inflasi tahunan menunjukkan penurunan dari sebesar 4,40% dan tahun 2019 menjadi sebesar 2,03%. Perkembangan laju inflasi gabungan dua kota dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

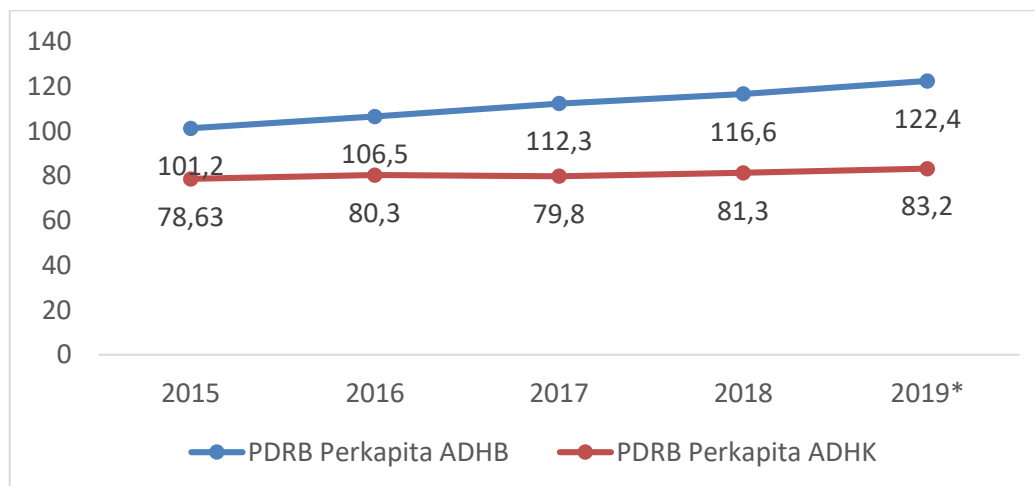


Sumber: BPS Provinsi Kepri (BRS Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kepulauan Riau Desember 2019)

Gambar 2.6 Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

3. PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan dari 101,2 juta rupiah hingga mencapai 122,4 juta rupiah. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 juga mengalami peningkatan dari sebesar 78,63 juta rupiah menjadi sebesar 83,2 juta rupiah, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepri (Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 2014-2018) dan Hasil Perhitungan

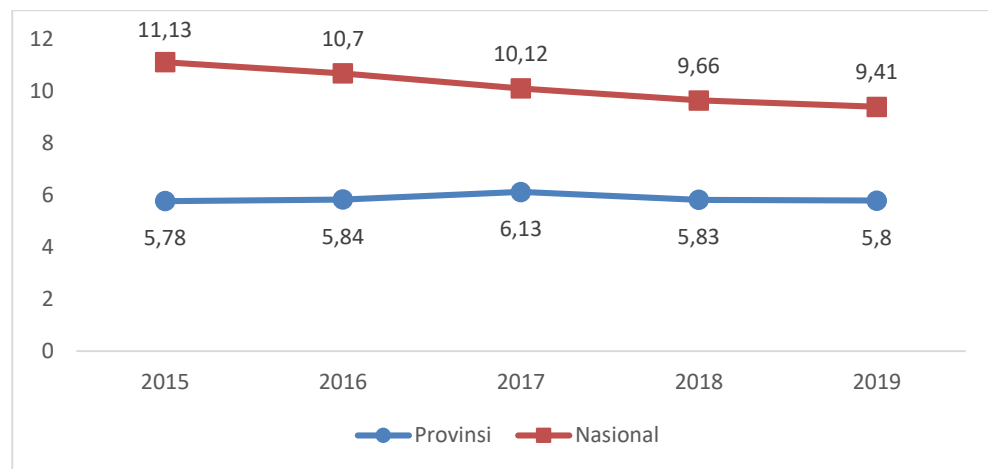
Gambar 2.7 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

4. Persentase Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka fluktuatif dari sebesar 5,78% pada tahun 2015 menjadi 6,13% pada tahun 2017 kemudian menurun menjadi 5,80% pada tahun 2019. Trend perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu lima tahun berbeda dengan kondisi



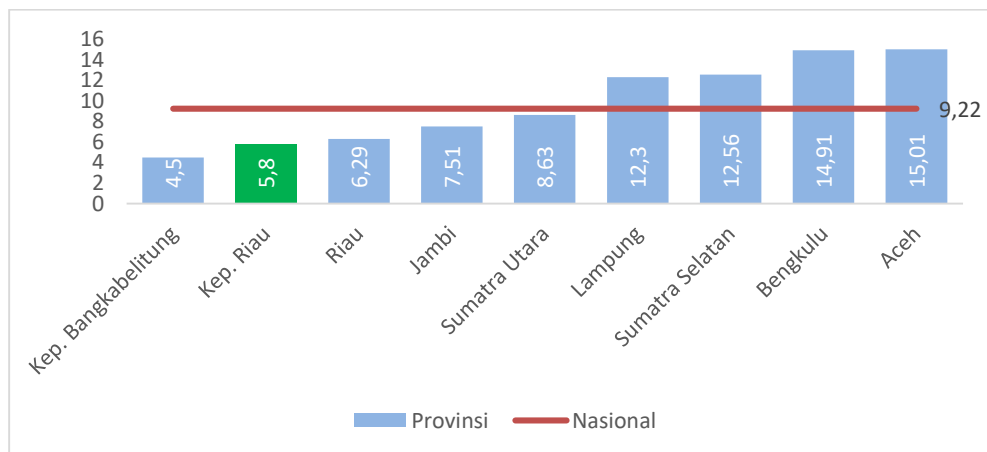
nasional yang menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.8 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 (September)

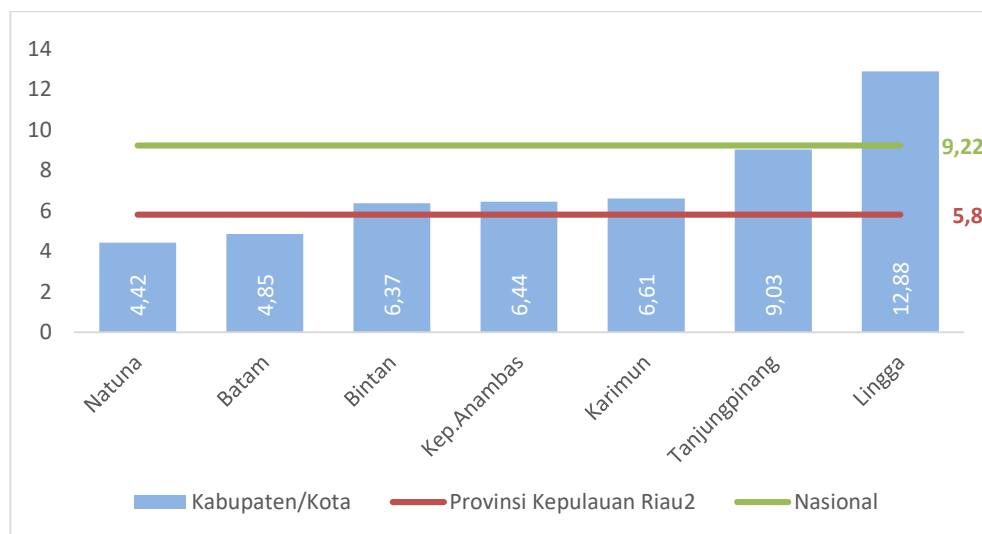
Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 sebesar 5,80% berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional sebesar 9,22%. Jika dilihat berdasarkan provinsi di wilayah Sumatera, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi terendah kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4,50%). Posisi relatif tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dikemukakan pada gambar berikut.



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Nasional, 2020

Gambar 2.9 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera dan Nasional Tahun 2019 (September)

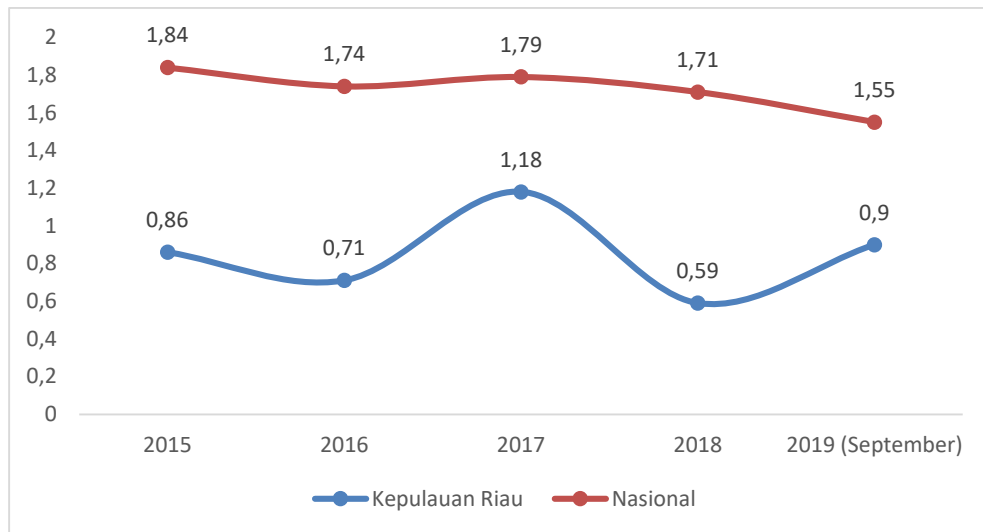
Kabupaten Lingga menempati posisi tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota se-provinsi Kepulauan Riau sebesar 12,88%. Sementara itu tingkat kemiskinan terendah berada di Kabupaten Natuna sebesar 4,42%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.10 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Maret 2019

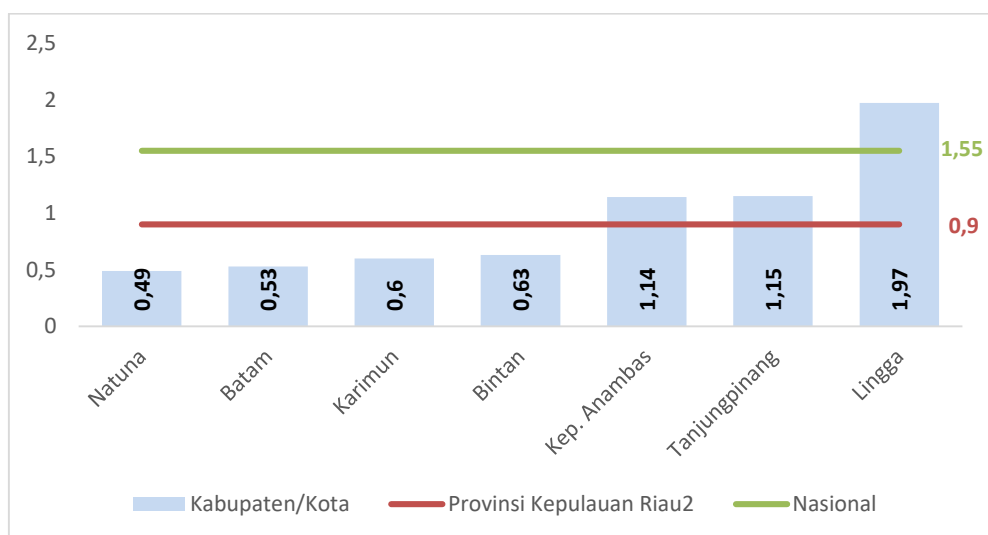
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*). Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka yang sangat tinggi. P1 Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari 0,86 pada tahun 2015 menjadi 0,90 pada tahun 2019 (September). Meningkatnya P1 di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.11 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 (September)

Posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada periode Maret tahun 2019, diketahui Kabupaten Lingga sebesar 1,97 menempati posisi tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu indeks kedalaman kemiskinan terendah berada di Kabupaten Natuna sebesar 0,49. Perbandingan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.

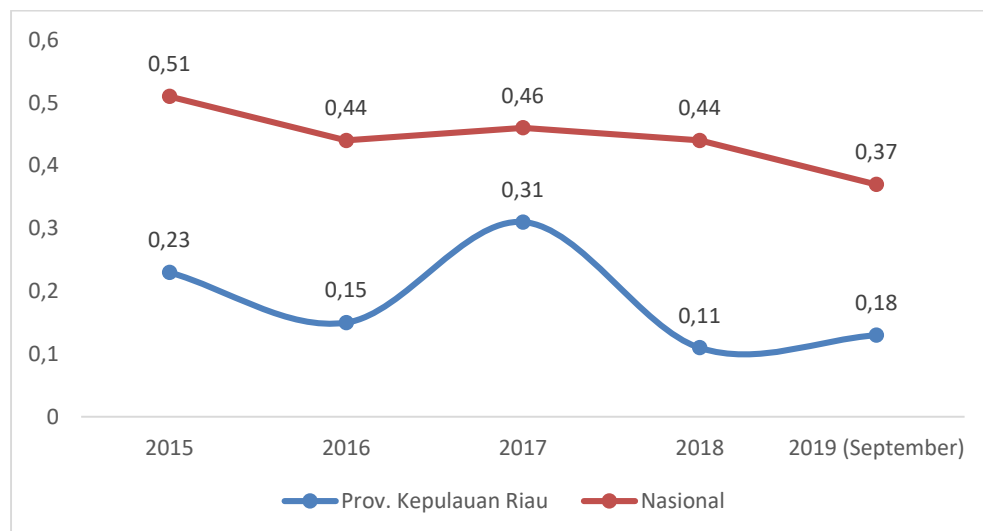


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2019



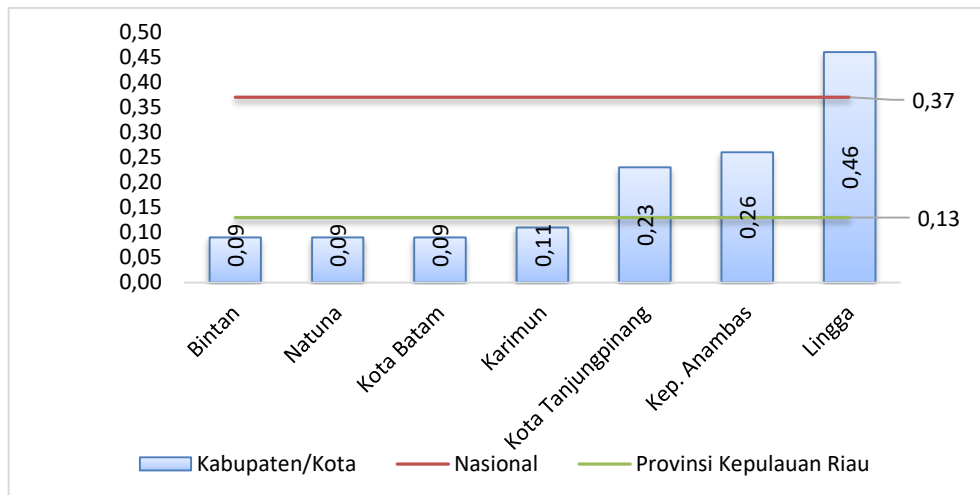
Sebaran pengeluaran penduduk di antara penduduk miskin itu sendiri diukur dengan menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index – P2*), yaitu ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama kurun waktu 2015-2019 (Maret), indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun dari sebesar 0,23 pada tahun 2015 menjadi 0,18 pada periode September tahun 2019. Penurunan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan ada pergeseran penurunan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin itu sendiri. Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif rendah. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.13 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015–2019 (September)

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada periode Maret tahun 2019, diketahui Kabupaten Lingga sebesar 0,46 menempati posisi tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan terendah berada di Kabupaten Bintan sebesar 0,09. Penyebaran Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

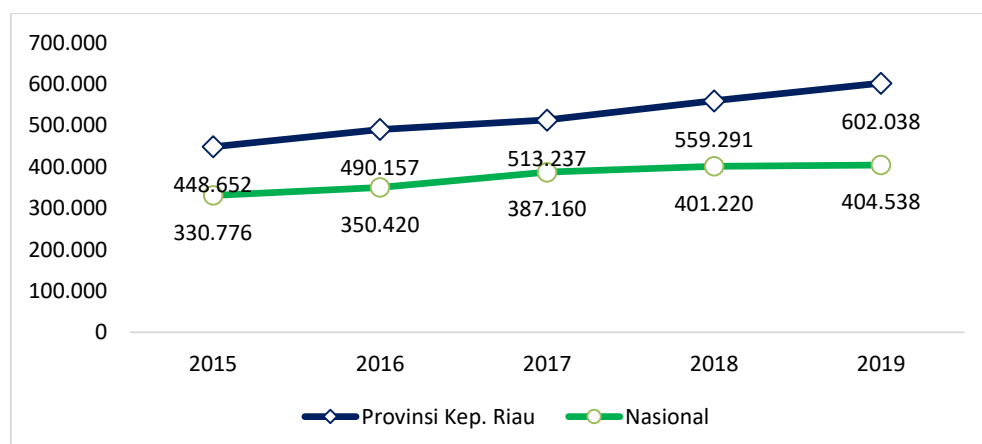


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.14Perbandingan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2019

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan garis kemiskinan yaitu nilai rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum pangan dan non-pangan esensial. Garis Kemiskinan adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya.

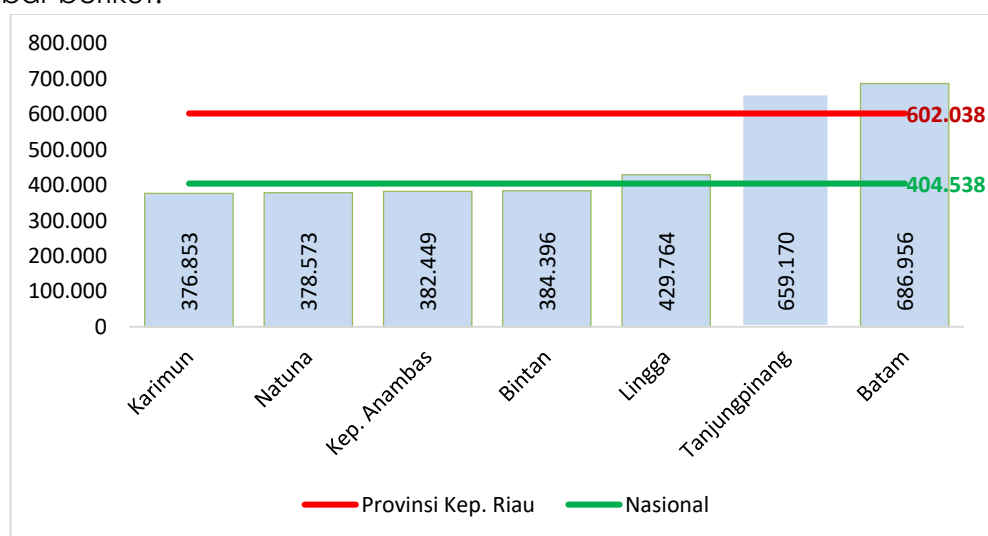
Tren garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan. Tahun 2015 garis kemiskinan sebesar Rp 448.652,-/kapita/bulan meningkat menjadi sebesar Rp 602.038,-/kapita/bulan pada tahun 2019 per September. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Nasional sebesar Rp 404.538,-/kapita/bulan maka garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih tinggi. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber : BPS, Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, September 2019

Gambar 2.15Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015–2019 (September) (Rupiah)

Penyebaran garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada periode Maret tahun 2019, diketahui Kota Batam sebesar Rp 686.956,-/kapita/bulan menempati posisi tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota se provinsi Kepulauan Riau dan berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 602.038,-/kapita/bulan, serta di atas Nasional sebesar Rp 404.538,-/kapita/bulan. Sementara itu garis kemiskinan terendah berada di Kabupaten Karimun sebesar Rp 376.853,-/kapita/bulan, dan berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 602.038,-/kapita/bulan, serta di atas Nasional sebesar Rp 404.538,-/kapita/bulan. Penyebaran garis kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

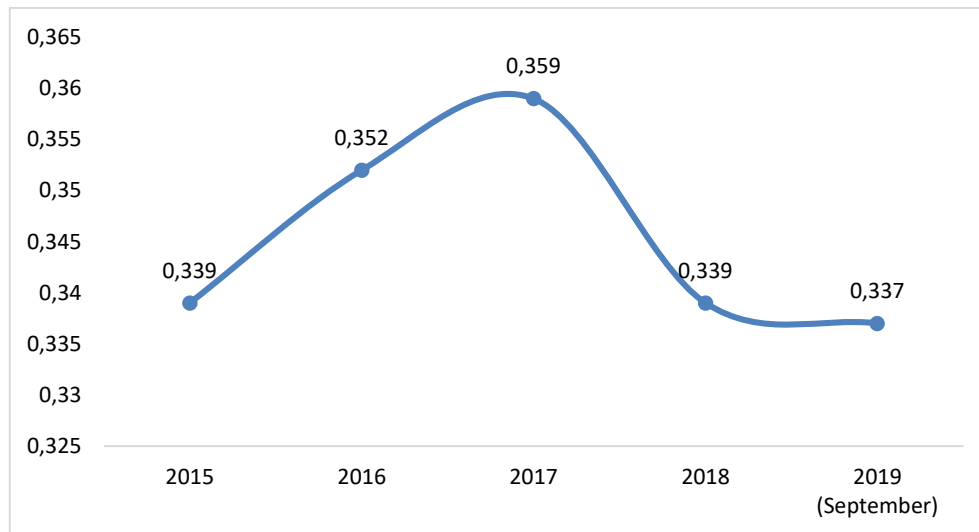


Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Nasional, 2019

Gambar 2.16 Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 (September)

5. Indeks Gini

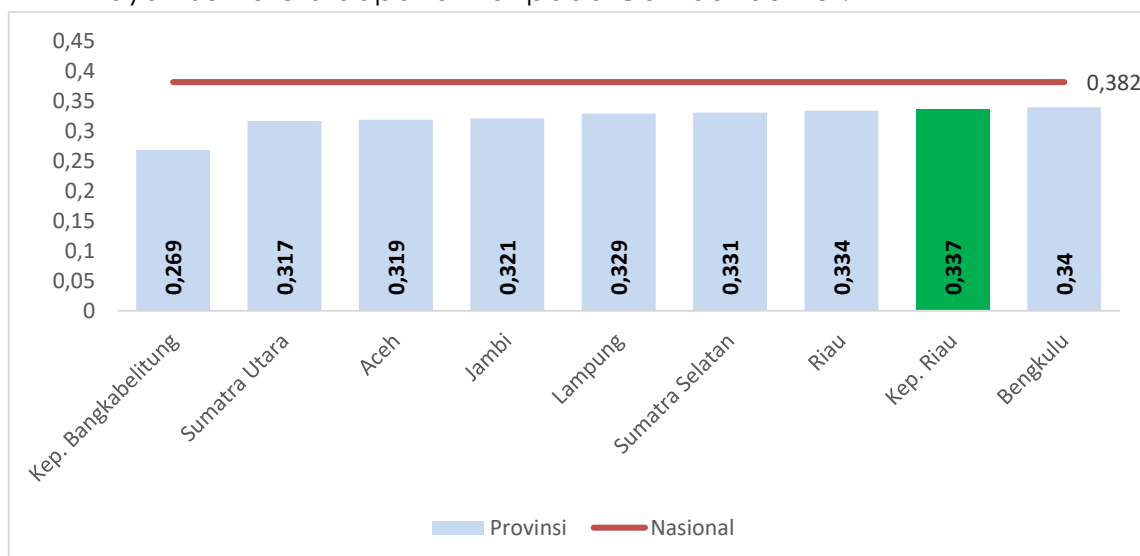
Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan "Rendah" bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan "Sedang" bila Indeks Gini antara > 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan "Tinggi" bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dari 0,339 pada tahun 2015 menjadi 0,337 pada tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepri (Berita Resmi statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2020)

Gambar 2.17Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

Dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2019, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,337 menempati posisi tertinggi kedua setelah Provinsi Bengkulu. Secara rinci perbandingan Indeks Gini provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS

Gambar 2.18Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2019

2.1.3 Fokus Kesejahteraan Sosial

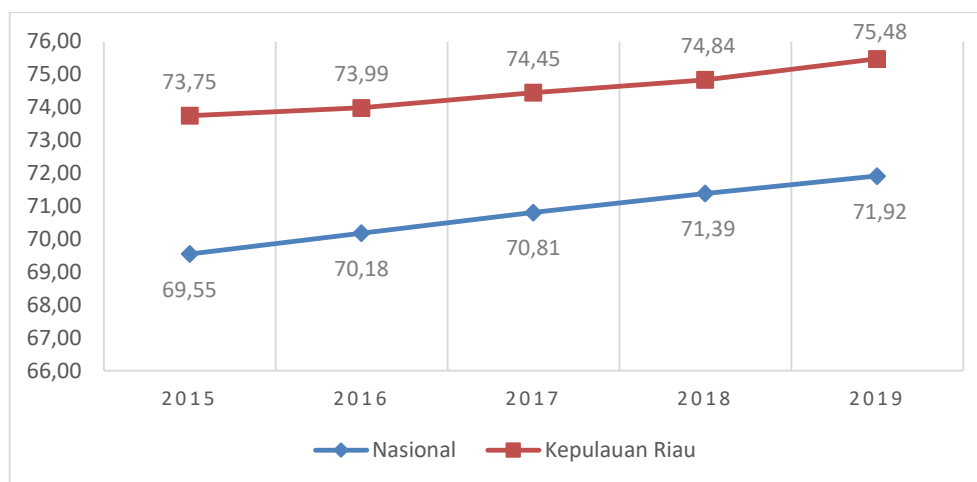
1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar (komponen pembentuk): (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan



(knowledge); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

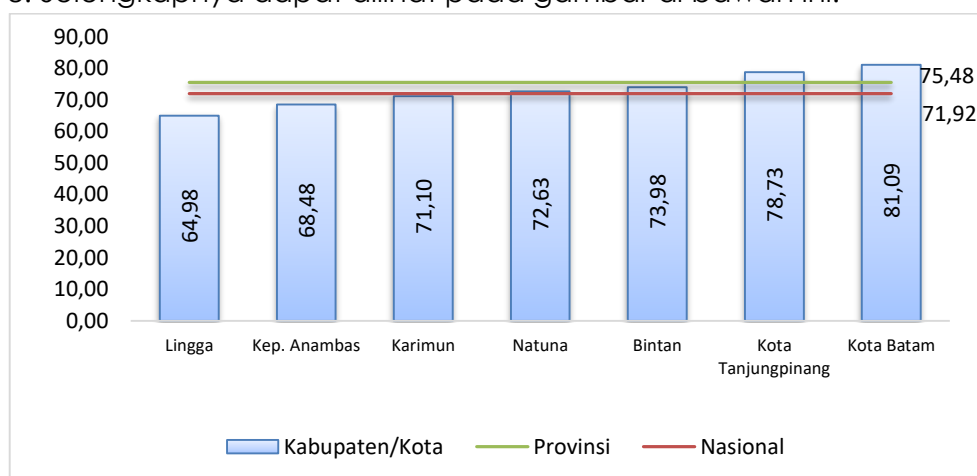
IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 73,75 meningkat menjadi 75,48 pada tahun 2019. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS (Indeks Pembangunan Manusia 2019)

Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau cukup bervariasi. IPM tertinggi dicapai oleh Kota Batam sebesar 81,09, diikuti oleh Kota Tanjungpinang sebesar 78,73. Sementara capaian IPM terendah terdapat di Kabupaten Lingga sebesar 64,98. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



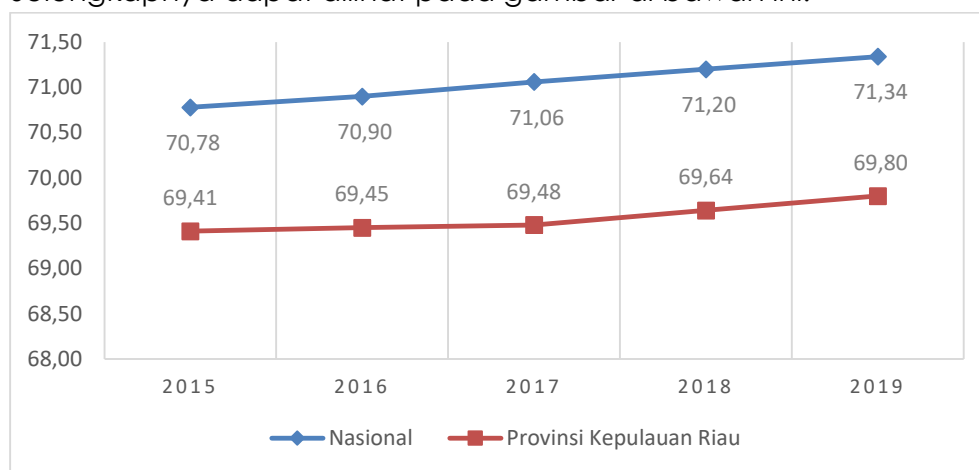
Sumber: BPS (Indeks Pembangunan Manusia 2019)

Gambar 2.20 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2019

Gambaran komponen pembentuk IPM Provinsi Kepulauan Riau secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Angka Harapan Hidup

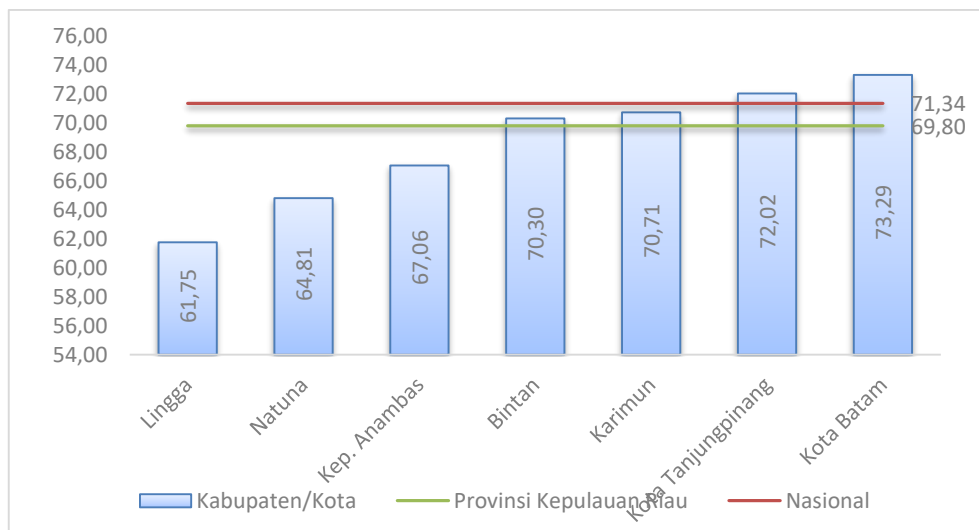
Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usai harapan hidup yang semakin panjang. Angka harapan hidup terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2015 sebesar 70,78 tahun dan tahun 2019 menjadi 71,34 tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS (Indeks Pembangunan Manusia 2019)

Gambar 2.21 Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2019 (Tahun)

Pada tahun 2019, Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 69,80 tahun. Dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Batam sebesar 73,29 tahun, diikuti oleh Kota Tanjungpinang sebesar 71,02 tahun. Sementara angka harapan hidup terendah berada di Kabupaten Lingga sebesar 61,75 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

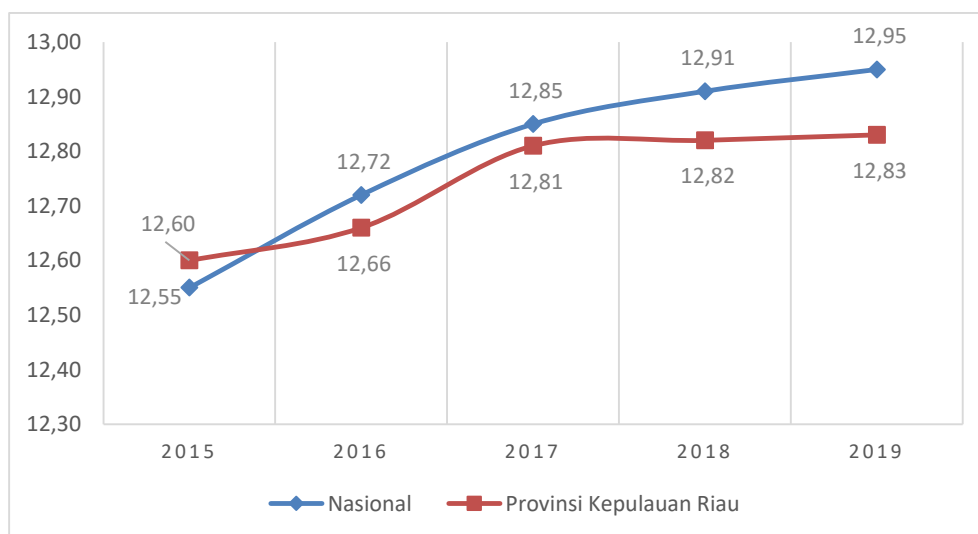


Sumber: BPS (Indeks Pembangunan Manusia 2019)

Gambar 2.22 Perbandingan Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2019

b) Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah Provinsi kepulauan Riau terus meningkat dari sebesar 12,60 tahun pada tahun 2015 menjadi sebesar 12,83 tahun pada tahun 2019. Meningkatnya HLS menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah.

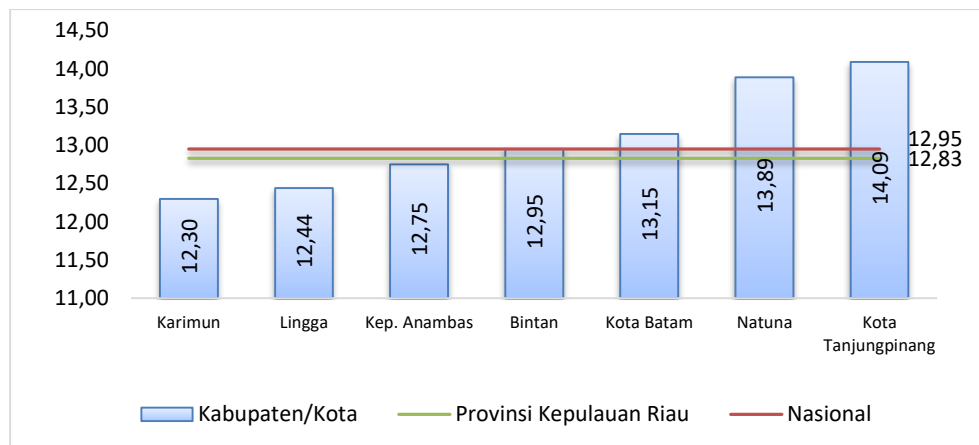


Sumber: BPS (Indeks Pembangunan Manusia 2019)

Gambar 2.23 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2019 (Tahun)



Dilihat pada level Kabupaten/Kota capaian harapan lama sekolah tertinggi berada di Kota Tanjungpinang (14,09 tahun) dan terendah di Kabupaten Karimun (12,30 tahun). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

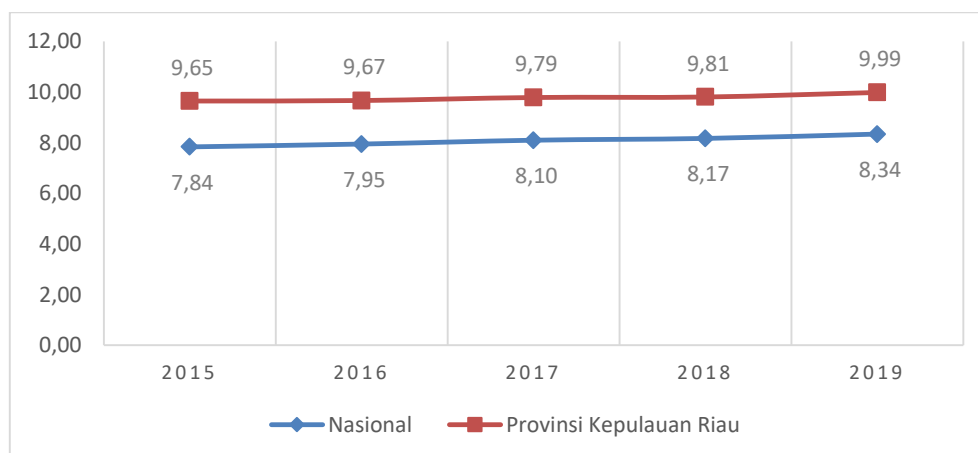


Sumber: BPS (Indeks Pembangunan Manusia 2019)

Gambar 2.24 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2019

c) Rata-rata Lama Sekolah

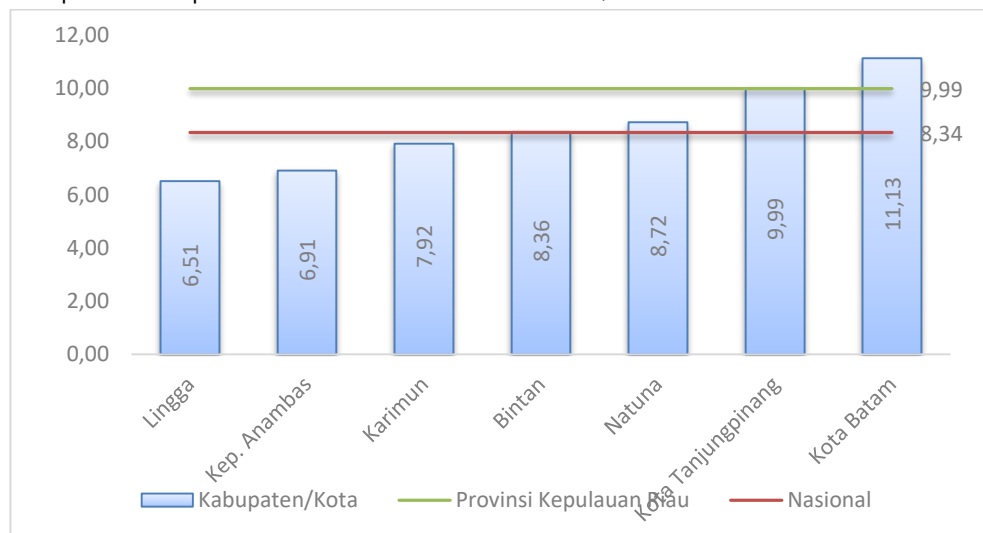
Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dari sebesar 9,65 tahun pada tahun 2015 menjadi sebesar 9,99 tahun pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kepulauan Riau usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III).



Sumber: BPS (Indeks Pembangunan Manusia 2019)

Gambar 2.25 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2019

Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota tertinggi di Provinsi kepulauan Riau berada di Kota Batam sebesar 11,13 tahun, sedangkan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 6,51 tahun, diikuti Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 6,91 tahun.

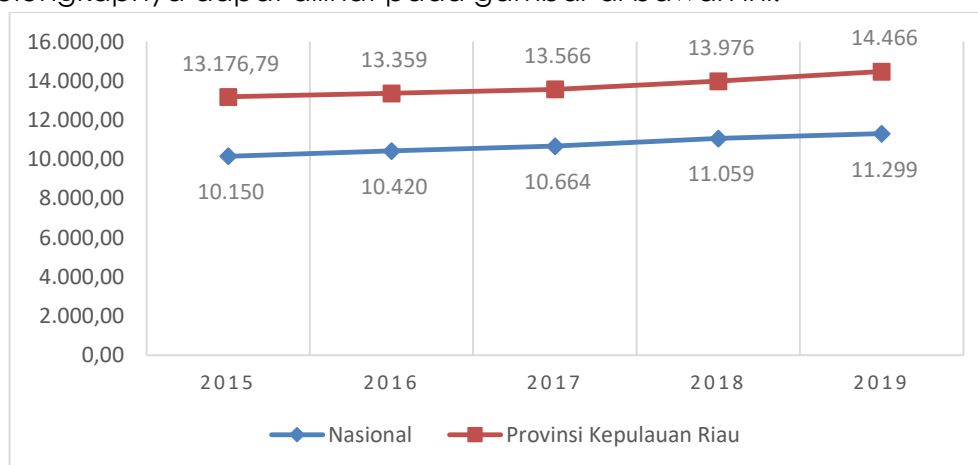


Sumber: BPS (Indeks Pembangunan Manusia 2019)

Gambar 2.26 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2019

d) Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan

Selama kurun waktu 2015 hingga 2019, pengeluaran perkapita Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 pengeluaran per kapita sebesar 13.176,79 ribu rupiah dan naik menjadi sebesar 14.466 ribu rupiah pada tahun 2019. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

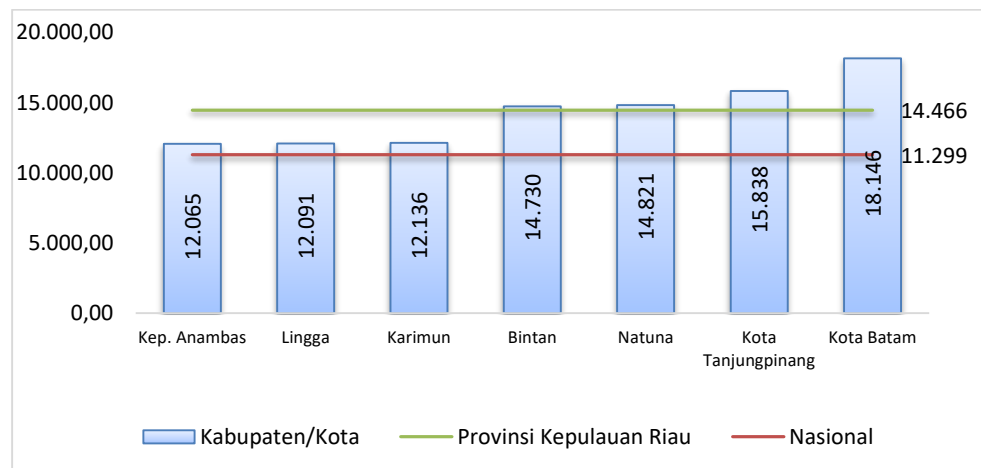


Sumber: BPS (Indeks Pembangunan Manusia 2019)

Gambar 2.27 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2019



Pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2019 tertinggi berada di Kota Batam sebesar 18.146 ribu rupiah dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 12.065 ribu rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS (Indeks Pembangunan Manusia 2019)

Gambar 2.28 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pelayanan pendidikan yang berkualitas akan memiliki kontribusi yang tinggi dalam perwujudan sumberdaya manusia yang berulalitas. Pelaksanaan urusan pendidikan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Pengelolaan pendidikan menengah; Pengelolaan pendidikan khusus; Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus; Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi; Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan pendidikan dilihat dari sisi ketersediaan pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK sudah baik, antara lain terlihat dari capaian Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 92,12%, Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 77,3%, Angka Putus Sekolah sebesar 0,41%. Sementara itu capaian Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMA/MA/SMK/MAK telah mencapai target tahun 2019, karena baru mencapai sebesar 95,84% dari target 88%. Pada



jenjang SLB, Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) telah mencapai sebesar 72% telah mencapai target tahun 2019. Sementara itu capaian Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik telah mencapai 100% dari target sebesar 88,00%.

Dilihat dari sisi mutu pendidikan, Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4 pada tahun 2019 mencapai 96,11% telah melampaui target. Begitu juga dengan indikator Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi dengan capaian sebesar 56,3%, dan Persentase lulusan SMK/MAK yang diterima di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha sebesar 56,87%. Indikator Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B belum mencapai target dengan capaian sebesar 62,5% dari target sebesar 80,00%. Begitu juga dengan Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) SMA/MA/SMK/MAK baru mencapai 52,31% dari target sebesar 54,40%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pendidikan ditunjukkan melalui 14 Indikator yang tersebar pada 4 program (program pembangunan). Dari ke 14 indikator yang telah rilis data tahun 2019, terdapat sebanyak 10 indikator telah mencapai target tahun 2019, dan 4 indikator tidak mencapai target tahun 2019. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut ini.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1)	Program Pendidikan Menengah dan Khusus									
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,69	9,69	9,69	9,79 (tahun 2017)	10,15	9,81	96,65	Tidak tercapai
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK	%	85,17	85,17	87,11	92,12	88,00	92,12	104,68	Tercapai
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	NA	NA	70,12	72,00	70,00	72	102,86	Tercapai
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/MAK	%	74,59	74,59	75,87	77,300	76,50	77,3	101,05	Tercapai
	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/MAK	%	0,5	0,5	0,44	0,42	0,42	0,41	102,38	Tercapai
	Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK	%	86,68	86,68	85,1	92,10	88,00	95,84	108,91	Tercapai



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Dalam Kondisi Baik									
	Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	%	NA	NA	70	94,00	88,00	100	113,64	Tercapai
	Jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	Unit	18	18	112	60,00	50,00	43	86,00	Tidak tercapai
	Rasio siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	Rasio	1:40	1:40	1:35	1:33	01:36	01:33	108,33	Tercapai
2)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
	Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	%	80	84	90,15	95,99	94,00	96,11	102,24	Tercapai
3)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (2018-2021)/ Penggabungan dari 4 Program tahun 2017 yaitu: Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Non Formal									
	Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B	%	75	75,8	72,81	74,00	80,00	62,5	78,13	Tidak tercapai
4)	Program Peningkatan Mutu Pendidikan									
	Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi	%	NA	15	35,42	43,00	50,00	56,3	112,60	Tercapai
	Persentase lulusan SMK/MAK yang diterima di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	%	NA	15	50	50,00	50,00	56,87	113,74	Tercapai
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional(UN)	Angka	53,14	53,87	53,87	50,59	54,40	52,31	96,16	Tidak tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	SMA/MA/SMK/MAK									

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

2) Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat tergambarkan dari Angka kematian ibu di Kepri dengan capaian sebesar 98 per 100.000 KH, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 13 per 1.000 KH, persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 mencapai sebesar 111,9%, dan Cakupan Kabupaten/Kota Sehat sebesar 100%. Capaian Angka kematian ibu, Angka kematian bayi, dan persentase kekurangan gizi (underweight) pada tahun 2019 menunjukkan penurunan dari tahun 2017.

Kasus kematian Ibu di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan sulitnya menjangkau akses pelayanan kesehatan. Kematian ibu dikarenakan oleh keputusan dalam penyelamatan kehamilan. Keputusan tertinggi berada pada suami, pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Selain itu penyebab non medis adalah rendahnya kapasitas perempuan untuk mengambil sementara suami yang memiliki mata pencaharian nelayan tidak selalu mendampingi istri dalam persiapan kelahiran.

Kematian pada bayi antara lain disebabkan oleh asfeksia, BBLR, Tetanus Neonatorum (TN), Sepsis, kelainan congenital, dan Icterus. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang adalah ketersediaan bahan pangan pada tingkat rumah tangga, salah satunya disebabkan oleh kemiskinan, dan faktor geografis kepulauan yang menghambat dalam mengakses bahan pangan. Dalam penanganannya, kasus gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi dilakukan dengan kerjasama lintas sektor antar instansi pemerintah.

Berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, kinerja ditunjukkan beberapa indikator, antara lain Insidens rate DBD per 100.000 penduduk pada tahun 2019 sebesar 91. Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB 316 per 100.000 penduduk, belum mencapai target tahun 2019 sebesar 165 per 100.000 penduduk.

Kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan, terlihat dari Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi mencapai sebesar 100%; Persentase Puskesmas terakreditasi hanya sebesar 96,54%, Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS 86,1%; Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri



Tanjungpinang (Versi KARS) tingkat Paripurna dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 80,6; Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS) tingkat Paripurna dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,5; Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 77%; Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang 73,68%; Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD dan Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang 82,2%; dan Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa sebesar 93,33%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kesehatan ditunjukkan melalui 25 indikator yang tersebar pada 7 program (program pembangunan). Dari ke 25 indikator yang telah rilis data tahun 2019, terdapat sebesar 25 indikator dengan telah mencapai target tahun 2019. Secara rinci realisasi kinerja indikator program pembangunan urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Kesehatan Masyarakat									
	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 KH	per 100,000 KH	144	120	131	130	130	98	124,35	Tercapai
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1,000 KH	per 1,000 KH	35*	35	18	15	32	13	159,97	Tercapai
	Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	17,07	17,7	16,4	13	16,8	11,9	129,41	Tercapai
	Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	%	14,3	43	57	71	57	100	175,44	Tercapai
2	Program pencegahan dan pengendalian penyakit									
	Prevalensi HIV	%	0,38	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	100,00	Tercapai
	Case Notification Rate	per 100,000	139	171	181	177	165	316	191,71	Tercapai



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	(CNR) Semua Kasus TB per 100,000 penduduk	penduduk								
	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)	%	41	78,6	88	81	82	87,7	106,89	Tercapai
	Insidens rate DBD Per 100,000 penduduk	Per 100,000 penduduk	98	102	38,2	56	94	91	102,69	Tercapai
	API (Annual Paracite Incidence) per 1,000 penduduk	per 1,000 penduduk	0,41 (*rata-rata 2011-2015)	0,37	0,2	0,14	0,31	0,1	157,24	Tercapai
	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	74,5	88,7	94	91	92	96,9	105,34	Tercapai
	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	35	22,4	27	27,4	28,30	28,2	100,25	Tercapai
3	Program pelayanan kesehatan									
	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi	%	9,09	28,6	71,4	100	57,14	100	175,01	Tercapai
	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	0	6,49	19,48	79,30	38	96,5	253,98	Tercapai
	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	61	63	71,49	82,6	72	86,1	119,56	Tercapai
	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS)	Status	-	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100,00	Tercapai



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS)	Status	-	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100,00	Tercapai
4	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan									
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	75	77,9	78	80,42	80	80,6	100,81	Tercapai
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban	%	67	71,7	76,5	80	77	85,5	111,04	Tercapai
5	Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan									
	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	58	53	50	56,32	60	77	128,35	Tercapai
	Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang	%	59	54,5	58	73,68	63	73,7	116,96	Tercapai
	Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	55	61	70,2	84,04	67	82,2	122,75	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa	%	0	0	26,7	53,33	65	93,3	143,59	Tercapai
6	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan									
	Persentase ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar	%	77	75,5	88,5	93,10	82	92	111,90	Tercapai
7	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya									
	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai
	Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik	%	99	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

3) Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya) mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Sumber Daya Air (SDA); Air Minum; Persampahan; Air Limbah; Drainase; Permukiman; Bangunan Gedung;



Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Jalan; Jasa Konstruksi; dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sebagian besar sudah mencapai 100% yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 45,64% terealisasi sebesar 46,50%; Persentase jalan provinsi berkondisi baik, ditargetkan sebesar 71,49% terealisasi pada tahun 2019 sebesar 73,64%; panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi ditargetkan sebesar 38,47% terealisasi 45,80%.

Untuk indikator yang belum tercapai antara lain: Persentase jembatan Provinsi berkondisi baik di targetkan sebesar 82,30% baru terealisasi 80,11%; dan Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda di targetkan sebanyak 2 perda namun belum terealisasi di tahun 2019.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan melalui 12 Indikator yang tersebar pada 8 program (program pembangunan). Dari ke-12 indikator yang telah rilis data tahun 2019 yang tercapai sebanyak 10 indikator, sedangkan yang tidak tercapai sebanyak 2 indikator. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air									
	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	33,64	36,64	35,05	46,5	45,64	46,50	101,88	Tercapai
	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	62,6	64,1	64,82	70,42	73,10	73,13	100,04	Tercapai
	Jumlah titik rawan	Lokasi	32	30	28	25	22,00	22,00	100,00	Tercapai



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	banjir									
2	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan									
	Persentase jalan Provinsi berkondisi baik	%	71,37	66,22	67,3	70,31	71,49	73,64	103,01	Tercapai
	Persentase jembatan Provinsi berkondisi baik	%	71,27	78,67	80,11	80,11	82,30	80,11	97,34	Tidak Tercapai
3	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan									
	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis)	km	2,89	4,65	6,97	16,2	24,99	25,96	103,88	Tercapai
	panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi	km	8,81	14,59	25,47	28,67	38,47	45,80	119,05	Tercapai
4	Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi									
	Persentase Pemenuhan Nilai Layanan Dasar SIPJAKI	%	0	0	30	80	80,00	80,00	100,00	Tercapai
5	Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi									
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi (tenaga ahli konstruksi)	Orang	NA	NA	60	147	150,00	223,00	148,67	Tercapai
6	Program Layanan Pengujian Jasa									



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Konstruksi									
	Persentase capaian kontribusi retribusi laboratorium pengujian jasa konstruksi terhadap total retribusi daerah	%	0	1,6	1,26	1,6	0,07	3,18	4.255,23	Tercapai
7	Program pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang									
	persentase kab/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya	%	NA	NA	14,28	28,57	57,14	57,14	100,00	Tercapai
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang									
	Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda	perda	0	0	0	0	2,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, 20120

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu adanya adanya penciptaan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman. Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Perumahan; Kawasan Permukiman; Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Gambaran perkembangan indikator tahun 2019 untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kurang baik, hal ini dapat



dilihat dari capaian realisasi kerja yang sebagian besar masih belum mencapai 100%. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mengurangi luasan kawasan kumuh, dimana target tahun 2019 dengan luasan kumuh 549,53 Ha menjadi 476,85 Ha. Untuk penanganan kawasan kumuh, setelah dilaksanakan identifikasi kawasan kumuh maka ada penambahan luasan wilayah kumuh. Untuk Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman, belum mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 96,76%, baru terealisasi sebesar 92,47%.

Indikator Cakupan pelayanan Sanitasi, dibagi menjadi air limbah, persampahan dan drainase, ketiga komposit sanitasi tersebut pada tahun 2019 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu persampahan dari target 61% tercapai 59,99%, indikator air limbah dari target 92,72% baru tercapai 87,06%; dan drainase dari target 42,4% baru tercapai 37,26%. Indikator cakupan pelayanan sanitasi perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terkait target universal acces limbah yang harus tercapai pada tahun 2019.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ditunjukkan melalui 6 Indikator yang tersebar pada 4 program (program pembangunan). Dari ke-6 indikator yang telah rilis data tahun 2019 bahwa 2 indikator telah tercapai dan 4 indikator tidak tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.27

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan									
	Luas kawasan kumuh	ha	823,44	823,44	752,62	529,82	549,53	476,85	115,24	Tercapai
2	Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum									
	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman	%	72,01	72,01	89,44	92,15	96,79	92,47	95,54	Tidak Tercapai
3	Program Peningkatan Pemenuhan Akses									



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
							Tahun 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Sanitasi									
	Cakupan pelayanan Sanitasi :									
	Air Limbah	%	81,81	81,81	86,41	86,62	92,72	87,06	93,90	Tidak Tercapai
	Persampahan	%	54	54	56	59,93	61	59,99	98,34	Tidak Tercapai
	Drainase	%	27,24	27,24	32,24	36,48	42,4	37,26	87,88	Tidak Tercapai
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan									
	Persentase fasilitas bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun per Tahun	%	0	0	15	18	20,00	20	100,00	Tercapai

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi (1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, (2) Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur, (3) Pembinaan PPNS provinsi, (4) Penanggulangan bencana provinsi, dan (5) Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.

Terkait dengan ketentram dan ketertiban umum, capaian kinerja indikator-indikator kuncinya masih belum optimal. Indikator Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur masih belum mencapai target, terlihat masih terdapat 235 kasus pelanggaran padatahun 2019. Selanjutnya jumlah indikator Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri juga masih belum mencapai target capainnya baru sebesar 63,89% di tahun 2019. Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan juga belum mencapai target di ahun 2019 persentase realisasi capaian masih 61,43%. Indikator Persentase Kab/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran, realisasi capaiannya baru 59,99% di tahun 2019. Dari lima indikator yang ada hanya satu indikator yang dapat memenuhi



target yang ditetapkan, yakni persentase demo yang berjalan aman realisasi capainnya sebesar 106,38%.

Secara lengkap kinerja ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM									
	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Kasus	NA	272	240	240	200	235	85,11	Tidak tercapai
	Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri	Orang	NA	16	16	22	36	23	63,89	Tidak Tercapai
2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal									
	Persentase demo yang berjalan aman	%	90	91	92	100	94,00	100	106,38	Tercapai
3	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan									
	Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan	%	7,3	55	41	42	70,00	43	61,43	Tidak Tercapai
4	Program Penanggulangan Kebakaran									
	Persentase Kab/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran	%	0	0	29	0	71,43	42,85	59,99	Tidak Tercapai

Sumber: Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau , 2020



Selain mengenai ketentraman dan ketertiban, kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga dapat dilihat dari sisi wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat. Dilihat dari wawasan kebangsaan, dapat dilihat kinerja yang baik karena indikator persentase konflik yang tertangani trennya positif karena semua dapat ditangani dengan baik. Hal tersebut sama dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Adapun untuk kinerja pendidikan politik masyarakat, pada tahun 2019 dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pemilik hak suara dalam memberikan suara pada pemilihan legislative dan pemilihan presiden sebesar 82%. Untuk indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan aturan, kinerjanya semakin baik karena mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Wawasan Kebangsaan dan pendidikan Politik Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan									
	Persentase Konflik Sosial Tertangani	%	100	100	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai
2	Program Pendidikan Politik Masyarakat									
	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES)	%	Pilgub (2015): 55,25; Pileg (2014): 71,65; Pilpres (2014): 59,43	0	0	59	Pileg : 73,50; Pilpres : 64,75	Pileg : 82,00; Pilpres : 82,00	Pilpres: 111,56 ; Pilpres : 126,64	Tercapai
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan aturan	Ormas	0	0	18,00	163,64	82,35	158,80	192,84	Tercapai

Sumber: Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, 2020



Selain indikator kinerja tersebut di atas, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga dapat dilihat kinerjanya dari permasalahan kebencanaan yang tertangani dengan baik. Kinerja pengelolaan bencana di Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2016-2019 menunjukkan kondisi yang semakin membaik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja masing-masing indikator yang semuanya sudah sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Kebencanaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Pencapaian Target Kinerja Program				
						Tahun 2019				
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana									
	Persentase desa/kel tangguh bencana	%	NA	NA	1,2	1,2	3,61	3,61	100	Tercapai
2	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana (2018-2021) / Program Penanggulangan Bencana (2017)									
	Persentase kejadian bencana kab/kota yang tertangani dengan baik	%	100	100	100	100	100	100,00	100	Tercapai
3	Program Pemulihan Pasca Bencana (2018-2021) / Program Penanggulangan Bencana (2017)									
	Jumlah wilayah pasca bencana yang terpulihkan	Jumlah	NA	NA	1	2	4	2	50	Tidak Tercapai

Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 11 Indikator yang tersebar pada 9 program (program pembangunan). Dari ke 11 indikator yang telah rilis data tahun 2018, terdapat sebanyak 6 indikator yang telah tercapai, dan 5 indikator yang belum tercapai targetnya.



6) Sosial

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Sosial seperti yang termuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: (1) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi; (3) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal; (4) Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti; (5) Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; (6) Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi; (7) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.

Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019 keluarga miskin yang telah mendapatkan bantuan melalui mekanisme usaha ekonomi produktif terlihat meningkat, meskipun capaiannya masih sangat kecil yakni 0,81%. Sedangkan untuk keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya kondisinya fluktuatif, yakni dari 5,59% di tahun 2015 meningkat menjadi 51,53% di tahun 2017, lalu turun lagi menjadi 38,09% pada tahun 2019.

Permasalahan lain yang ditangani dalam urusan sosial adalah penanganan PMKS (Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial). Penanganan PMKS didasarkan atas jenis-jenis PMKS yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian kinerja penanganan PMKS belum begitu optimal dikarenakan rata-rata capaiannya masih rendah dibandingkan dengan total PMKS yang ada.

Sementara itu, untuk menunjang kinerja penanganan PMKS, pemerintah Provinsi juga melibatkan lembaga-lembaga penyelenggara pemberdayaan sosial, dan juga tenaga-tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Lembaga/organisasi sosial yang bergerak dalam penanganan PMKS tersebut secara rutin dan berkala selalu mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Frekuensi pembinaan terhadap lembaga tersebut selalu meningkat dari tahun ketahun. Demikian pula terkait dengan tenaga kesejahteraan sosial kemasayarakatan yang dibina, perenstasinya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun.



Secara lengkap kinerja urusan sosial sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Penanggulangan Kemiskinan									
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	0,27	0,37	0,61	0,61	1,00	0,81	81,34	Tidak Tercapai
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,39	250,00	Tercapai
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	5,59	26,88	51,53	38,09	39,64	38,09	96,09	Tidak Tercapai
2	Program Rehabilitasi Sosial									
	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,1	0,19	0,24	0,27	0,28	0,29	102,31	Tercapai
	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,13	2,1	4,91	6,03	7,94	7,02	88,44	Tidak Tercapai
	Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	%	0,56	1,4	23,06	23,76	26,97	25,86	95,85	Tidak Tercapai



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	berbasis lembaga (panti dan LKS)									
	Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,68	0,85	1,3	1,42	1,75	1,57	89,56	Tidak Tercapai
	Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	78,37	78,37	44,76	9,81	78,37	15,88	20,26	Tidak Tercapai
	Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	26,49	35,68	38,92	43,78	57,30	49,73	86,79	Tidak Tercapai
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial									
	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	0	19,67	19,33	25,00	25,00	25,83	103,33	Tercapai
	Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi	%	30,36	30,36	30,36	39,37	60,35	37,71	62,48	Tidak Tercapai



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	kesejahteraan sosial									
4	Program Pemberdayaan Sosial									
	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	8,03	11,04	20,4	28,43	40,47	42,81	105,79	Tercapai
	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	0	0	8,12	32,49	47,72	49,24	103,19	Tercapai
	Persentase pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai
5	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial									
	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan	unit	1	1	1	1	1,00	1	100,00	Tercapai
	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara	unit	1	1	1	1	3,00	1	33,33	Tidak Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
6	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya									
	Persentase pemangku kepentingan yang mendapat penyuluhan sosial	%	1,44	1,44	7,22	9,42	9,87	13,91	140,91	Tercapai
	Persentase kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendapat monitoring dan evaluasi	%	28,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	Tercapai

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2019

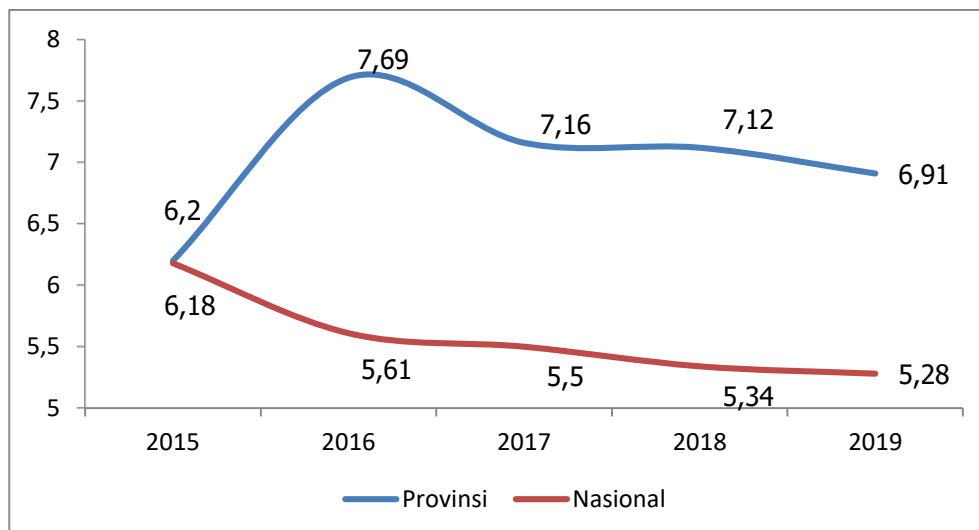
Kinerja indikator program pembangunan pada urusan sosial di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 18 Indikator yang tersebar pada 6 program (program pembangunan). Dari ke 18 indikator yang telah rilis data tahun 2019, terdapat sebanyak 9 indikator yang telah tercapai, dan 9 indikator yang tidak tercapai targetnya.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga kerja

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi pada urusan tenaga kerja memiliki kewenangan terkait dengan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial.

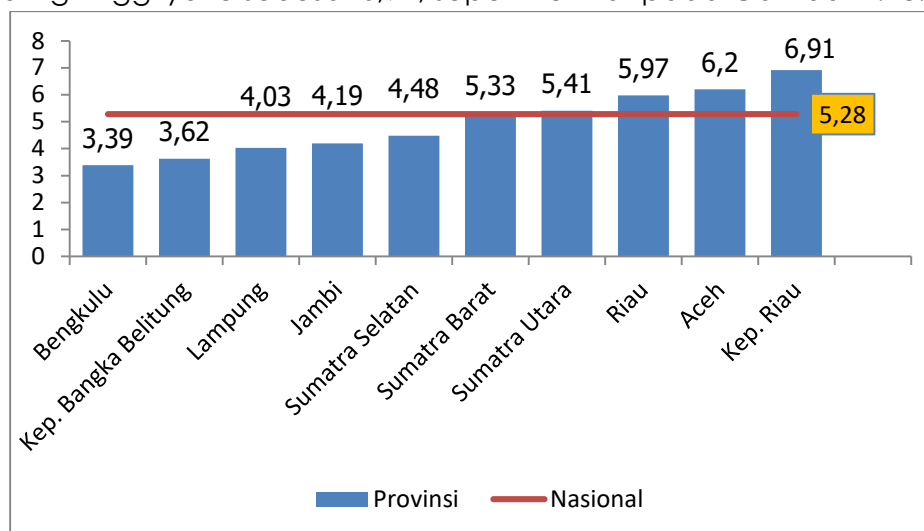
Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 (agustus) mencapai sebanyak 1.039.132 orang. Dari angkatan kerja tersebut, penduduk yang bekerja pada tahun 2019 sebanyak 972.575 orang dan penganggur sebanyak 66.557 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus 2019 mencapai 6,91 persen, mengalami penurunan TPT jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2018 sebesar 7,12 persen. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT Nasional yaitu sebesar 5,28%.



Sumber : BPS Prov. Kepulauan Riau, 2019

Gambar 2.29 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 mencapai 6,91% menurun dibandingkan tahun 2018, namun cenderung fluktuatif meningkat selama kurun waktu 2015-2019. Dibandingkan dengan Provinsi lain di Wilayah Sumatera pada Tahun 2019 (Agustus), tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau paling tinggi yaitu sebesar 6,91, seperti terlihat pada Gambar 2.18.



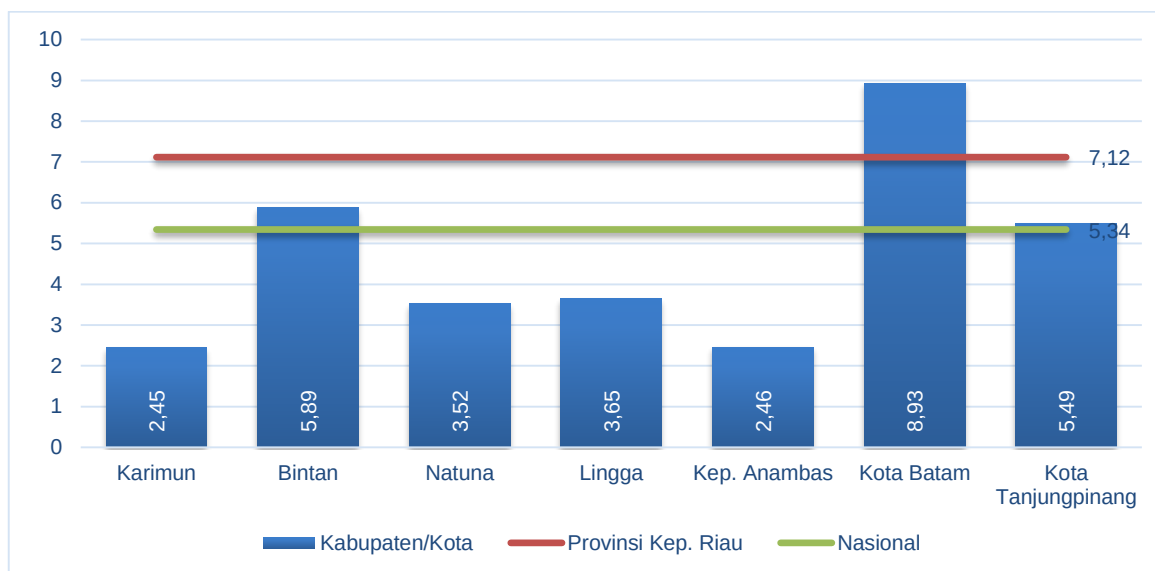
Sumber: BPS, berita resmi statistik nasional, 2019

Gambar 2.30 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2019 (Agustus) (%).

Posisi relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018, ditunjukkan bahwa Kota Batam (8,93%) berada di atas Provinsi Kepulauan Riau (7,12) dan Nasional (5,34%). Kabupaten Bintan (5,89%) dan Kota Tanjungpinang (5,49%)



berada di bawah Provinsi Kepulauan Riau (7,12) dan di atas Nasional (5,34%). Sedangkan 4 kabupaten lainnya berada di bawah Provinsi Kepulauan Riau (7,12) dan Nasional (5,34%), secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Nasional, 2020

Gambar 2.31 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Kinerja urusan tenaga kerja dalam kurun waktu 2015-2019 di Provinsi Kepulauan Riau dapat dikatakan cukup baik karena banyak indikator yang capaiannya membaik. Terkait dengan kualitas tenaga kerja, dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan pelatihan dan penyiapan calon tenaga kerja mengalami peningkatan. Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi menurun dari 47,63% di 2016 menjadi 40% di 2019. Indikator calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan juga mengalami penurunan dari 42,63% menjadi 40,53%. Dan lulusan BLK yang diterima di dunia kerja juga menurun menjadi 70% dari sebelumnya 80%.

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan dari 66% menjadi 64,76%. Hal yang sama juga terjadi pada indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau yang juga mengalami penurunan dari 7,69% di 2016 menjadi 6,91% di 2019. Capaian indikator Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan mengalami peningkatan menjadi 60,69% dari sebelumnya hanya 54% di tahun 2016. Indikator Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan menjadi 88,72%; Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 juga mengalami peningkatan menjadi 2,74%; Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani realisasinya sebesar 83,72%; dan Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang



diselesaikan capaiannya sebesar 100%. Capaiannya meningkat dari tahun ke tahun. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja									
	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	95	47,63	100	48,49	48,00	79,79	166,13	Tercapai
	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	85	42,63	0	52,3	43,00	40,53	94,26	Tidak Tercapai
	Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja	%	80	80	75	86,04	87,00	70	80,46	Tidak Tercapai
	Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman	orang	0	0	32	20	16,00	40	250,00	Tercapai
2	Program Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja									
	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	52	54	48,8	60,5	60,00	60,69	101,15	Tercapai
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,07	66	66,41	64,72	67,05	64,76	96,58	Tidak Tercapai
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,2	7,69	7,16	7,12	6,88	6,91	99,56	Tidak Tercapai
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja.									



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	42,75	70	70	89%	85,00	88,72	104,38	Tercapai
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3	%	0,7	1	1,2	12%	2,50	2,74	109,60	Tercapai
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	65	65	62	100	80,00	83,72	104,65	Tercapai
4	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja									
	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	%	20	23	97,4	100	26,00	100	384,62	Tercapai

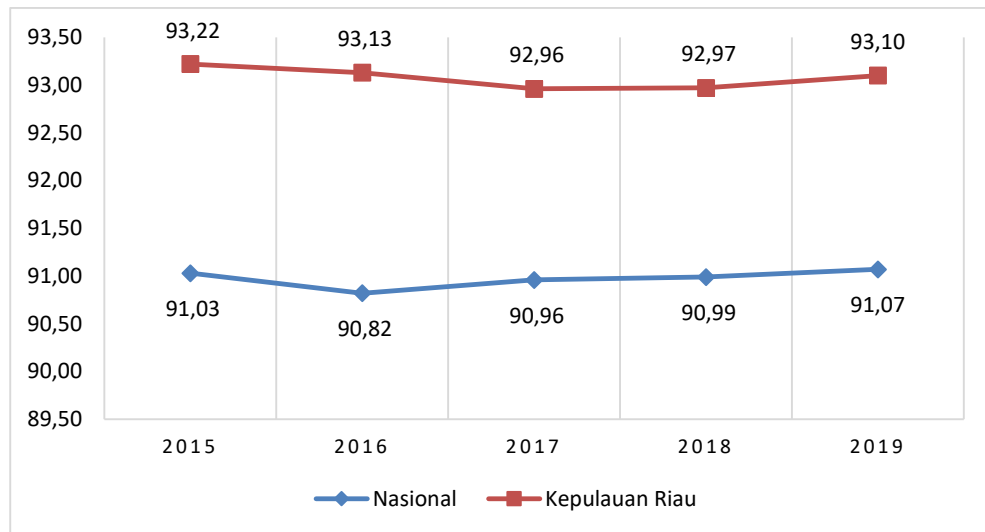
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2020

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 11 Indikator pada 4 program (program pembangunan). Dari 11 indikator yang telah rilis data tahun 2019, terdapat 4 indikator yang belum tercapai targetnya yakni Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan; Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Kinerja pemberdayaan perempuan antara lain dapat diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender (perbandingan laki-laki dengan perempuan). Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

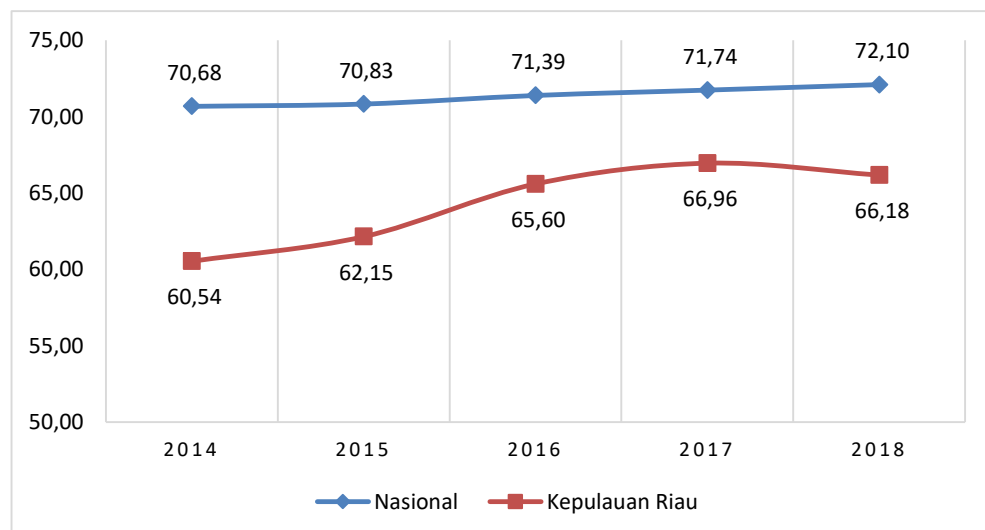
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan sedikit penurunan dari tahun 2015 sebesar 93,22 menjadi sebesar 93,10 pada tahun 2019. Kondisi tersebut tidak relevan dengan Nasional yang mengalami kenaikan selama 5 tahun.



Sumber : BPS, 2020

Gambar 2.32 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Perkembangan IDG Provinsi Kepulauan Riau cenderung meningkat dari sebesar 60,54 pada tahun 2015 menjadi sebesar 66,18 pada tahun 2018. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Kementerian PPPA (Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018)

Gambar 2.33 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2018



Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerjanya yang semakin membaik. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui komitmen pengarusutamaan gender di dalam penyusunan program dan kegiatan responsif gender semakin membaik, dilihat dari semakin meningkatnya proporsi anggaran yang responsif gender dibandingkan dengan belanja langsung APBD. Pada tahun 2015 proporsinya hanya 4,1%, di tahun 2019 meningkat menjadi 11,24%.

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan juga semakin membaik. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO meskipun angkanya fluktuatif namun secara keseluruhan trennya menurun. Jika pada tahun 2015 terjadi 33,19 kasus per 100.000 perempuan, maka di tahun 2019 turun menjadi 30,52 kasus per 100.000 perempuan. Demikian pula dengan kasus kekerasan terhadap anak, turun dari 4,28 kasus per 10.000 anak menjadi 3,09 kasus per 10.000 anak.

Secara lengkap kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak									
	Persentase anggaran responsif gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	%	4,10	4,68	6,4	9,32	6	11,24	187,33	Tercapai
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan									
	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000 Perempuan	33,19	33,18	27,7	28,08	31,49	30,52	103,08	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
3	Program Perlindungan Anak									
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	%	28,57	28,57	57	71,43	57,14	100	175,01	Tercapai
	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Per 10.000 anak	4,28	4,22	3,4	2,56	3,8	3,09	118,68	Tercapai
4	Program Kualitas Keluarga									
	Persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill	%	0,44	0,59	0,76	1,13	1,16	1,16	100,00	Tercapai

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 5 Indikator yang tersebar pada 4 program (program pembangunan). Dari ke 5 indikator yang telah rilis data tahun 2018, semua sudah mampu tercapai targetnya.

3) Pangan

Pelaksanaan urusan ketahanan pangan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: sub urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian meliputi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi. Sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi, Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. Sub urusan



Penanganan Kerawanan Pangan meliputi Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, Penanganan kerawanan pangan provinsi, Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Sub urusan Keamanan Pangan meliputi Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap warga. Ketahanan pangan mencakup sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi pangan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis yang sangat luas dengan jumlah pulau berpenghuni yang cukup banyak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di masing-masing wilayah kabupaten/kota. Dalam rangka menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan dan keamanan pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Perum BULOG Sub Divre Tanjungpinang dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2014. Kerjasama diarahkan pada pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan keterjangkauan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, kekurangan pangan, kerawanan pangan sebesar 200 ton ekuivalen beras. Pemerintah mendorong agar seluruh kabupaten/kota memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (lumbung pangan masyarakat desa).

Gambaran capaian kinerja urusan ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 sudah baik. Dilihat dari 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2019, semua indikator memiliki status telah tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan,									
	(1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	87,76	88	83,09	82,29	91,00	99,19	109,00	Tercapai



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	(2) Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	15,2	12,6	9,2	9,2	CV < 10	9,26	107,40	Tercapai
2	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan									
	(1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	skor	83,8	84,5	88,4	87	88,00	89,1	101,25	Tercapai
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan									
	(1) Angka Rawan Pangan	%	18,58	17,58	10,07	11,32	17,19	11,32	134,15	Tercapai
4	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan									
	(1) Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	70	75	76	82,61	80,00	94	117,50	Tercapai
5	Program Pengembangan SDM dan Penyuluh pertanian									
	(1) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya/kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	30,91	30,91	31	34,55	36,36	37,28	102,53	Tercapai

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2020

4) Pertanahan

Kewenangan pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan meliputi: Pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi; Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah



kabupaten/kota; Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi; Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; dan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; serta Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota.

Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Urusan Pertanahan ditunjukkan dengan indikator Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi. Capaian indikator ini sampai dengan tahun 2019 sebesar 0% dibandingkan dengan target tahun 2019 realisasi tersebut belum mampu mencapai target secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah									
	(1) Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi	%	NA	NA	100	100	100,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan

5) Lingkungan hidup

Lingkungan dengan kualitas baik sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia. Pelaksanaan urusan lingkungan hidup di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait pengelolaan: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu RPPLH provinsi; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP provinsi; 3)



Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; (4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); (7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; (8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan (11) Persampahan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sebagian besar sudah mencapai 100% yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5%; Persentase Kab/Kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu sebesar 71,43%; Persentase pelaku usaha/ industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar sebesar 20,3%; Persentase Kab/Kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai Baku Mutu sebesar 85,71%. Jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional Untuk indikator Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu belum mencapai target yang ditetapkan, dari target 2019 sebesar 30 sekolah telah tercapai 39 sekolah. Indikator Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar nominasi Adipura telah mencapai target yang ditetapkan, dari target tahun 2019 sebesar 85,71 telah tercapai sesuai target 85,71.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan lingkungan hidup ditunjukkan melalui 9 Indikator yang tersebar pada 3 program (program pembangunan). Dari ke 9 indikator yang telah rilis data tahun 2018, terdapat 2 indikator yang belum mencapai target yakni indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan indikator Persentase pelaku usaha /industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Program Dan Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Pengendalian Pencemaran dan									



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program Dan Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
								Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Perusakan Lingkungan Hidup										
	1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,97	66,97	70,19	70,34	68,90	66,5	96,52	Tidak Tercapai
	2)	Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	%	63,64	63,64	80	100,00	81,82	100	122,22	Tercapai
	3)	Persentase Kab/Kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu	%	57,14	57,14	57,14	57,14	71,43	71,43	100,00	Tercapai
	4)	Persentase pelaku usaha /industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar	%	15	19	20,6	22,02	20,60	20,3	98,54	Tidak Tercapai
	5)	Persentase Kab/Kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai Baku Mutu	%	57,14	57,14	78,6	100,00	85,71	85,71	100,00	Tercapai
	6)	Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar nominasi Adipura	%	71,43	71,43	71,43	85,71	85,71	85,71	100,00	Tercapai
2	Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam										
	7)	Jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional	Sekolah	8	10	25	51	30	39	130,00	Tercapai
	8)	Luas Kawasan mangrove	Ha	1	5	2	5	4	4	100,00	Tercapai



No	Program Dan Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
								Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
		yang terehabilitasi									
3	Program peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup										
	9)	Program peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kewenangan provinsi pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu penyusunan profil kependudukan provinsi. Kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyusun profil kependudukan. Selain penyusunan profil kependudukan, pemerintah provinsi juga mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain: rasio penduduk ber-KTP, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah dan Persentase kepemilikan kartu keluarga.

Perkembangan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan sebanyak 2 indikator kinerja program dengan pencapaian kedua kategori sudah mencapai target. Rasio penduduk ber-KTP pada tahun 2019 terealisasi sebesar 98,05%; sedangkan Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran mencapai sebesar 88,91%. Walaupun telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2019, namun masih perlu ada peningkatan kinerja agar lebih optimal. Secara rinci kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan									
	Rasio penduduk ber-KTP	%	85,4	89,68	90,7	94,71	95,00	98,05	103,21	Tercapai
	Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran	%	64	75,00	83,19	86,63	79,00	88,91	112,55	Tercapai

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif dengan realisasi sebesar 64,48%; Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif sebesar 80 unit; Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat sebesar 16,67%; dan Jumlah Desa Cepat Berkembang sebanyak 30 desa.

Kinerja program pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan melalui 4 indikator yang tersebar pada 4 program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari ke 4 indikator yang ditargetkan pada tahun 2019, realisasinya telah mampu mencapai target tahun 2019. Pada indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif, beberapa Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Perdes tentang kelembagaan. Sehingga pembinaan, penguatan kapasitas kelembagaan, konsolidasi data kelembagaan ke kabupaten dan dukungan dana APBD agar lebih ditingkatkan.

Pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Tahun 2019 realisasi Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif telah melampaui target yang ditetapkan. Namun terdapat beberapa kendala yaitu dalam pembentukan BUM Desa masih didominasi intervensi dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Selain itu belum optimalnya kemampuan Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa dalam mendayagunakan potensi desa, Masih



lemahnya dukungan lintas program/lintas sektor dalam mendukung pengembangan BUM Desa, dan juga lemahnya kualitas SDM di Desa. Terkait permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu dengan terus memberikan penyadaran bahwa keberadaan BUM Desa sangat penting untuk peningkatan ekonomi desa, dan memperkuat kapasitas Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa terkait pendayagunaan potensi desa. serta memperkuat koordinasi lintas program/lintas sektor (contoh : setiap sarana/prasarana yang dibangun oleh lintas sektor/lintas program yang mempunyai nilai ekonomis agar dapat diserahkan kepada BUM Desa untuk dikelola oleh BUM Desa, dan meningkatkan kualitas SDM di desa melalui pelatihan dan Bimtek oleh OPD terkait serta didukung oleh lintas program/lintas sektor lainnya.

Pada indikator Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat tahun 2019 realisasi pencapaian dalam persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat telah melebihi target yang ditetapkan. Namun terdapat beberapa kendala yaitu partisipasi masyarakat dalam penggunaan TTG dan penyebarluasan informasi TTG masih minim, serta dalam penggunaan TTG yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkait permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu dengan mengadakan sosialisasi penggunaan TTG dan pelatihannya.

Secara rinci realisasi kinerja indikator program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan									
	(1) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif	%	0	36,62	40	46,63	48,64	64,48	132,57	Tercapai
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan									



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	(1) Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Unit BUMDesa	0	0	35	80	45,00	108	240,00	Tercapai
3	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna									
	(2) Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat	%	0	0	16,67	33,33	16,67	16,67	100,00	Tercapai
4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (2017)									
	(1) Jumlah Desa Cepat Berkembang	Desa	0	0	15	28	30	30	100,00	Tercapai

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: (1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; (2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi; (3) Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local; (4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; (5) Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan (6) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Implementasi program Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang belum begitu baik. Tahun 2019 persentase



penggunaan alat kontrasepsi baru sebesar 78,60%. Angka tersebut meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 46,2%. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah karena dibentuknya kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh pemerintah dan masyarakat. Tahun 2019 baru ada 1 kampung KB yang difasilitasi untuk dibentuk.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 2 Indikator pada 1 program (program pembangunan). Dari 2 indikator yang telah rilis data tahun 2019, semuanya sudah tercapai targetnya. Secara lengkap kinerja urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
							Tahun 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Keluarga berencana									
	Pembentukan Kampung KB	Angka	NA	NA	NA	1	1,00	1,00	100,00	Tercapai
	Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR)	%	46,2	46,5	46,73	79,81	48,73	78,60	161,30	Tercapai

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2020

9) Perhubungan

Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan mendukung terciptanya kemadiriian ekonomi suatu negara. Pelaksanaan urusan Perhubungan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); (2) Pelayaran; dan (3) Perkeretaapian.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sebagian sudah mencapai



100% yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro) capainnya sebesar 88,89%; Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyebrangan perintis sebesar 76,92%; Persentase pelabuhan penyebrangan terkelola dengan baik sebesar 90,91%; Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis sebesar 71,43%; Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis sebesar 88,89%; Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut sebesar 82,35%; Persentase pelabuhan laut terkelola dengan baik sebesar 91,67%; dan indikator Persentase peningkatan retribusi pendapatan dari urusan perhubungan realisasinya sebesar 143,8 Untuk indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan antara lain Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro) capainnya baru sebesar 71,43% dari target 85,71%; Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan capainnya baru sebesar 75,50% dari target 83,27%; Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas capaiannya baru sebesar 9,67% dari target 14,33%; Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara realisasinya sebesar 0%; Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut realisasinya baru sebesar 55,56% dari target 77,78%; dan Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis realisasinya baru sebesar 55,56% dari target 77,78%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perhubungan ditunjukkan melalui 15 Indikator yang tersebar pada 7 program (program pembangunan). Dari ke 15 indikator yang telah rilis data tahun 2019, terdapat sebanyak 9 indikator tercapai, dan 6 indikator belum tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perhubungan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat									
	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	%	57,14	57,14	71,43	71,43	85,71	71,43	83,33	Tidak Tercapai
	Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	77,78	77,78	77,78	77,78	88,89	88,89	100,00	Tercapai



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyebrangan perintis	%	46.15	46,15	53,85	53,85	76,92	76,92	100,00	Tercapai
	Persentase pelabuhan penyebrangan terkelola dengan baik	%	70	70	72,73	72,73	90,91	90,91	100,00	Tercapai
2	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas									
	Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	39.94	64,32	67,27	70,88	83,27	75,50	90,67	Tidak Tercapai
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan									
	Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas	%	6.67	6,67	7,67	9,67	14,33	9,67	67,48	Tidak Tercapai
	Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis	%	7.14	21,43	42,86	71,43	71,43	71,43	100,00	Tercapai
4	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara									
	Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis	%	66.67	66,67	75	91,67	91,67	91,67	100,00	Tercapai
	Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara	%	NA	NA	NA	0,00	50,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai
	Persentase ketersediaan Bandar Udara	%	66.67	66,67	77,78	88,89	88,89	88,89	100,00	Tercapai



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut									
	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	58.82	58,82	58,82	73,53	82,35	82,35	100,00	Tercapai
6	Program Pembangunan Transportasi Laut									
	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	%	44.44	44,44	55,56	55,56	77,78	55,56	71,43	Tidak Tercapai
	Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis	%	33.33	33,33	55,56	55,56	77,78	55,56	71,43	Tidak Tercapai
	Persentase pelabuhan laut terkelola dengan baik	%	58.33	75	75	83,33	91,67	91,67	100,00	Tercapai
7	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah									
	Persentase peningkatan retribusi pendapatan dari urusan perhubungan	%	NA	NA	0	216,00	20,00	69,47	347	Tercapai

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

10) Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika sangat berkaitan dengan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi maupun informasi bertujuan untuk dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi; pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan



Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.

Kinerja urusan Komunikasi dan informatika dilihat dari akses dan kualitas informasi publik, terlihat capaian nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepri mengalami fluktuasi tetapi cenderung menurun yaitu capaian pada tahun 2015 sebesar 59,5 menurun menjadi sebesar 43,24 pada tahun 2019.

Sedangkan dilihat dari E-Government mengalami perkembangan yang cukup baik yaitu Nilai e-government provinsi kepri/nilai indeks SPBE mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 1,85 kemudian naik menjadi 2,4 pada tahun 2019. Dan indikator Persentase Domain dan Sub Domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang Telah Dimanfaatkan cainya sebesar 68,08% telah melampaui target tahun 2019 sebesar 45%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan melalui 3 Indikator yang tersebar pada 2 program (program pembangunan). Dari ke 3 indikator yang telah rilis data tahun 2019, 1 indikator tersebut tidak mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1)	Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik									
	Nilai keterbukaan informasi provinsi Kepri	skala nilai 0-100	59,5	59,5	13,03	53,87	65,00	43,24	66,52	Tidak Tercapai
2)	Program e-government									
	Nilai e-government provinsi kepri/nilai indeks SPBE	skala nilai 1-4	1,85	1,85	2,1	2,1*	2,3	2,4	104,35	Tercapai
	Persentase domain dan subdomain di lingkungan pemerintah provinsi kepri yang telah dimanfaatkan	%	-	-	25	47,82	45	68,08	151,29	Tercapai

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

**11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)**

Pelaksanaan urusan koperasi usaha kecil dan menengah di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang: (1) Izin Usaha Simpan Pinjam; (2) Pengawasan dan Pemeriksaan; (3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; (5) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; (6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (7) Pengembangan UMKM.

Kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilihat dari kualitas kelembagaan koperasi sudah cukup baik yaitu persentase koperasi aktif di Provinsi Kepulauan Riau mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung menurun dimana pada tahun 2015 sebesar 49,00% menurun menjadi sebesar 39,93% pada tahun 2019, sedangkan pertumbuhan koperasi di Provinsi Riau pada tahun 2019 sebesar 7,82%. Dilihat dari daya saing UKM dan koperasi di Kepulauan Riau yaitu Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi mengalami perkembangan yang meningkat dari sebesar 17,80% pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 19,85% pada tahun 2019, namun memiliki status belum mencapai target tahun 2019.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah ditunjukkan melalui 5 Indikator yang tersebar pada 3 program (program pembangunan). Dimana 5 indikator urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah pada tahun 2019 terdapat 2 indikator yang belum mencapai target yakni indikator persentase koperasi aktif dan indikator Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1)	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi									
	Persentase Koperasi Aktif	%	49,00	49,04	51,80	54,95	55,80	39,93	71,56	Tidak Tercapai
	Persentase KSP/USP sehat	%	NA	7,60	8,40	36,11	30,60	38,19	124,80	Tercapai



No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Pertumbuhan koperasi	%	NA	NA	3,30	5,10	2,00	2.72	136,00	Tercapai
2)	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan									
	Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif	%	0	0,21	0,33	0,41	0,48	0,55	114,67	Tercapai
3)	Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi									
	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	NA	17,8	19,8	19,3	20,19	19,85	98,32	Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2020

12) Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan penanaman modal di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Gambaran perkembangan indikator urusan penanaman modal, secara umum capaian kinerjanya tergolong cukup baik. Dilihat dari nilai investasi (PMA) pada tahun 2019 sebesar Rp 14.525 milyar dengan jumlah investor berskala nasional sebesar 493 investor. Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN) sebesar 4.561 milyar pada tahun 2019 dengan jumlah investor sebanyak 23.784 investor. Distribusi investasi di Provinsi Kepulauan Riau belum merata, dengan kecenderungan investasi terbesar di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Beberapa upaya peningkatan investasi terus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan promosi investasi, baik secara nasional maupun internasional.

Kinerja pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ditunjukkan dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP) sebesar 82,34% dari target sebesar 86%; dan Persentase Pelayanan Sesuai SOP dengan capaian sebesar 92,88%. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan penanaman modal melalui 6 indikator yang tersebar pada 3 program pembangunan.



Dari ke 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2018, 1 indikator memiliki status belum tercapai dan 5 indikator memiliki status telah tercapai. Indikator yang memiliki status belum tercapai diantaranya yaitu : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP).

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									
	1) Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp Milyar	10.065	7.108	13.823	11.139	7.700	20.450	265,58	Tercapai
	2) Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp Milyar	1.384	492,5	1.398	4.385	700	5.656	808,00	Tercapai
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									
	3) Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	160	191	291	157	145	4.365	3.010,34	Tercapai
	4) Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	226	175	203	120	104	493	474,04	Tercapai
3	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan									
	5) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	nilai	NA	81	76,61	77,2	86,00	82,34	95,74	Tidak Tercapai
	6) Persentase Pelayanan Sesuai SOP	%	80	100	100	100	82,00	92,88	113,27	Tercapai

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

**13) Kepemudaan dan Olah Raga**

Urusan kepemudaan dan olahraga, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan untuk: Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan (SLTA) yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi; dan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi .

Kinerja terkait dengan kepemudaan terlihat dari pemuda pelopor semakin meningkat yaitu pada tahun 2015 sebanyak 650 orang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat menjadi sebesar 988 orang pada tahun 2019, dan jumlah pemuda yang berwirausaha masih terbilang sedikit yaitu sebanyak 12 orang tahun 2015 meningkat menjadi 60 orang pada tahun 2019. Hal ini relatif kecil dibandingkan dengan jumlah pemuda di Provinsi Kepulauan Riau diperkirakan sebanyak 15 – 20% dari jumlah penduduk.

Kinerja terkait dengan olahraga prestasi terlihat dari indikator jumlah prestasi olahraga tingkat nasional, dengan capaian sebanyak 35 penghargaan pada tahun 2019. Dalam rangka memacu prestasi olahraga, jumlah event olahraga yang diselenggarakan masyarakat pada tahun 2019 sebanyak 14 event. Sedangkan dari sisi jumlah kader pemuda anti narkoba pada tahun 2019 berjumlah 60 orang.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan melalui 6 Indikator yang tersebar pada 5 program pembangunan. Dari ke 6 indikator yang telah rilis data tahun 2019, semuanya telah mampu mencapai target tahun 2019. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan									



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Jumlah pemuda pelopor	Orang	672	650	2.287	557	800	988	123,50	Tercapai
2	Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda									
	Jumlah pemuda yang berwirausaha	Orang	56	12	22	25	30	60	200,00	Tercapai
3	Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga									
	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional	Penghargaan	6	5	21	17	17	35	205,88	Tercapai
	Jumlah event olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan masyarakat	Event	10	3	16	17	14	14	100,00	Tercapai
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga									
	Persentase sarana dan prasarana yang dibangun terhadap kebutuhan masyarakat	%	14,29	14,29	76	90,48	61,90	104,76	169,23	Tercapai
5	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba									
	Jumlah kader pemuda anti narkoba	Orang	50	100	34	55	60	60	100,00	Tercapai

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2020

14) Statistik

Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan, mengembangkan sistem yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan urusan statistik di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi.



Kinerja urusan statistik dapat dilihat dari persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepulauan Riau yang pada tahun 2019 mencapai 99,67% dimana pada tahun-tahun sebelum masih belum ada data statistik sektoral di Provinsi Kepulauan Riau.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan statistik ditunjukkan melalui 1 Indikator pada 1 program (program pembangunan). Dimana 1 indikator urusan statistik pada tahun 2019 telah mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan statistik dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1)	Program pengembangan data/informasi statistik sektoral									
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral provinsi kepri	%	NA	NA	NA	25	30,00	99,67	398,67	Tercapai

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

15) Persandian

Pelaksanaan urusan persandian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi; dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah provinsi.

Kinerja urusan persandian di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi yang mengalami perkembangan kenaikan cukup signifikan yaitu pada tahun 2017 sebesar 2,5% meningkat menjadi sebesar 100% pada tahun 2019.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Persandian ditunjukkan melalui 1 Indikator pada 1 program (program pembangunan). Dimana 1 indikator urusan persandian pada tahun 2019 telah mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan persandian dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1)	Program persandian untuk pengamanan informasi									
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	%	NA	NA	2,5	20	30	100	333,33	Tercapai

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

16) Kebudayaan

Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya Melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar merata hampir di seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar yang layak dijual. Disamping itu peninggalan seni dan budaya Melayu menjadi nilai tambah dari objek wisata yang ditawarkan di masing-masing daerah.

Pelaksanaan urusan kebudayaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota Pembinaan sejarah lokal provinsi; Penetapan cagar budaya peringkat provinsi; Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi; Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi dan Pengelolaan museum provinsi.

Gambaran perkembangan indikator dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Indikator Presentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Terlihat capaian pada tahun 2016 sebesar 4,87% meningkat menjadi 40,46% pada tahun 2019. Pada gambaran kinerja pada indikator Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju, dalam kurun waktu tahun



2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Capaian pada tahun 2017 sebesar 14,49% meningkat menjadi 94,2 pada tahun 2019.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kebudayaan melalui 5 indikator yang tersebar pada 3 program pembangunan. Dari ke 5 indikator yang ditargetkan pada tahun 2019, 4 indikator memiliki status telah tercapai dan 1 indikator memiliki status tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu Persentase bangunan yang berciri khas melayu, hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dan kendala di lapangan dalam penyusunan perda bangunan berciri khas melayu ini salah satu nya perda ini baru disahkan pada tanggal 08 agustus 2019 dan pada tahun 2019 APBD-P dinas kebudayaan melaksanakan sosialisasi perda bangunan berciri khas melayu dan kurang pemahaman baik itu pemerintah dan swasta terkait isi didalam perda bangunan berciri khas melayu. Maka dari itu pada tahun 2020 akan di buat pergub bangunan berciri khas melayu dan surat himbauan terkait bangunan berciri khas melayu kepada pihak pemerintah dan swasta dan ditahun 2020 juga dilakukan sosialisasi perda bangunan berciri khas melayu dan inventarisasi data bangunan berciri khas melayu.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Pengembangan Nilai Budaya									
	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	NA	5,28	8,28	11,68	32,33	14,32	44,29	Tidak Tercapai
	Persentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi	%	NA	4,87	10,2	19,98	32,78	40,46	123,43	Tercapai
2	Program pengelolaan kekayaan budaya									
	Persentase warisan budaya tangible yang	%	14,97	18,53	19,58	19,93	20,98	22,03	105,01	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	lestari									
3	Program pengelolaan keragaman budaya									
	Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju	%	NA	0	14,49	37,68	43,48	94,2	216,65	Tercapai
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	A	3,1	6,49	13,29	35,62	66,02	185,35	Tercapai

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2019

17) Perpustakaan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Dari fakta tersebut, perpustakaan diharapkan sebagai pusat kegiatan pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Perpustakaan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap peningkatan dan pengembangan minat dan kegemaran membaca. Hal ini dilatari oleh peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pengembangan minat baca. Pelaksanaan urusan Perpustakaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi; (2) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi; (3) Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi; (4) Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah; (5) Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi; dan (6) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sudah mencapai



100% yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase peningkatan bahan pustaka dari target yang ditetapkan sebesar 53,55% pada tahun 2019, realisasi capaian sebesar 52,96%; IKM pelayanan perpustakaan tahun 2019 sebesar 84,60% dan persentase peningkatan pengunjung perpustakaan terealisasi sebesar 28,64% dari target 26,58% pada tahun 2019.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perpustakaan ditunjukkan melalui 3 Indikator yang tersebar pada 2 program (program pembangunan). Dari ke 3 indikator yang telah rilis data tahun 2019, ada 2 indikator yang tidak tercapai. Yaitu indikator Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan IKM Pelayanan Perpustakaan. Masalah tidak tercapainya indikator Peningkatan bahan pustaka, karena jenis kriteria Bahan Pustaka sudah ditetapkan pada DPA, namun pada saat pelaksanaan kegiatan kriteria bahan pustaka yang up to date sulit dicari dan Bahan pustaka terbitan terbaru masih kurang tersedia. Untuk mengatasi permasalahan ini maka Memperkecil jumlah judul Bahan Pustaka yang diadakan. Pada indikator IKM pelayanan perpustakaan di tahun 2019 juga tidak tercapai, berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan, banyaknya masukan dari para pemustaka untuk dapat meningkatkan kualitas dan jenis kriteria bahan pustaka dan meningkatkan sarana prasarana perpustakaan. Maka Pihak perpustakaan terus berkomitmen dalam peningkatan mutu dan kualitas pelayanan; Melakukan peningkatan sarana dan prasana serta bahan pustaka yang up to date sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemustaka.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2017	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan									



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2017	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	-	20,25	27,65	28	26.58	28,64	107,74	Tercapai
	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka	%	-	26,72	41,32	45,88	53.55	52,96	98,90	Tidak Tercapai
2	Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola perpustakaan									
	IKM Pelayanan Perpustakaan	poin	-	75	81,94	84,35	86	84,60	98,37	Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2020

18) Kearsipan

Arsip mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Manfaat arsip bagi suatu organisasi antara lain berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah dan juga dapat dijadikan alat pertanggungjawaban manajemen serta dapat dijadikan alat transparansi birokrasi. Arsip dapat bermanfaat secara optimal bagi organisasi apabila dikelola dengan tertib dan teratur, namun sebaliknya apabila arsip dikelola dengan tidak tertib akan menimbulkan masalah bagi suatu organisasi.

Pelaksanaan urusan Kearsipan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah provinsi dan BUMD provinsi; (2) Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi; (3) Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi; (4) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; (5) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi; (6)



Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah Kabupaten/kota; (7) Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi; (8) Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip; (9) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sudah mencapai 100% yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan dari target yang ditetapkan sebesar 1,66 terealisasi sebesar 1,70% dan Persentase perangkat daerah provinsi dan BUMD provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku dari target sebesar 82,98% pada tahun 2019 terealisasi sebesar 85,11%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Kearsipan ditunjukkan melalui 2 Indikator yang tersebar pada 2 program (program pembangunan). Dari ke-2 indikator yang telah rilis data tahun 2019 semuanya tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2018	Tahun 2019			
						Target	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja	Capaian
1	Program Pengelolaan dan Pengolahan Arsip								
	Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan	%	10.439 arsip	0,22	1,21	1,66	1,70	102,41	Tercapai
2	Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola Kearsipan								



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2018	Tahun 2019			
						Target	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja	Capaian
	Persentase perangkat daerah provinsi dan BUMD provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku	%	42,55	48,94	74,47	82,98	85,11	102,57	Tercapai

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2020

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: pada sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yaitu Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi., Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pada sub urusan Perikanan Tangkap meliputi Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, pada sub urusan Perikanan Budidaya meliputi Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, pada sub urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pada sub urusan Pengolahan dan Pemasaran meliputi Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar karena memiliki 96% wilayah berupa laut dan merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang potensial. Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumberdaya laut-dalam dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan



perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut (seaweed), ikan dan biota laut bernilai ekonomi tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.

Gambaran perkembangan indikator dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik. Pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap, capaian kinerja nya cenderung fluktuatif. Terlihat pada tahun 2019 sebesar 309.287,15 ton menurun jika di bandingkan dengan tahun 2015 sebesar 375.411,66 ton. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya persentase kapal penangkap ikan bermotor berbanding armada perikanan tangkap yang ada termasuk kapal tanpa motor (perahu nelayan tradisional). Produksi perikanan budidaya mengalami penurunan dari 33.515,48 ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 33.003,11 ton pada tahun 2019. Hal ini di sebabkan karena potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar yaitu sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan, luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km² dengan panjang garis pantai 2.367,6 km sedangkan luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km². Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari berbagai hasil perikanan laut (perikanan tangkap dan budidaya) wisata bahari dan pantai, ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut serta beragam jenis biota laut lainnya.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kelautan dan perikanan melalui 10 indikator yang tersebar pada 7 progam pembangunan. Dari ke 10 indikator yang ditargetkan pada tahun 2019, 3 indikator memiliki status belum tercapai dan 7 indikator memiliki status telah tercapai. Indikator yang belum tercapai yaitu Jumlah produksi perikanan budidaya; Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI); Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kelautan Dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Kelautan Dan perikanan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja	Status
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan									



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja	Status
	Perikanan Tangkap									
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	375.411,66	303.411,28	304.038,71	304.975,02	305.239,05	309.287,15	101,33	Tercapai
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		107,14	109,36	110,70	115,26	110,08	117,42	106,66	Tercapai
2	Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya									
	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.515,48	77.746,10	34.302	34.399,86	33.784,95	33.003,11	97,69	Tidak Tercapai
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)		108,43	107,28	107,23	108,20	107,99	126,77	117,39	Tercapai
3	Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan									
	Jumlah produk olahan Hasil perikanan	Ton	1.315,67	1.318,30	1.902,48	1.336,82	1.326,23	1.803,55	135,99	Tercapai
4	Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan									
	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US \$	30.789.629	31.766.987	27.371.747	70.168.692,13	31.786.051	33.994.231,2	106,95	Tercapai
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
	Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III	Kawasan	-	-	1	1,00	4	1	25,00	Tidak Tercapai
	Produk peraturan perundang-undangan tentang	Dokumen/Peraturan			1 (dok. penduku ng RZWP3K)	-	1 (Pergub Rencana pengelola an wp3K)	-	-	Tidak Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja	Status
	pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan									
6	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan									
	% Jumlah kasus Iuu Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	75	100	89	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan									
	Persentase kelompok (KUB, Poklamsar, Pokdakan) yang dibina disuluh	%	7,20	9,00	10,42	12,00	13,13	13,3	101,29	Tercapai

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2020

2) Pariwisata

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup : Pengelolaan daya tarik wisata provinsi ; Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi; Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi; Penyediaan sarana dan prasarana



kota kreatif; Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.

Gambaran perkembangan urusan pariwisata dari tahun 2015-2019 menunjukkan kinerja cukup baik. Dengan luas wilayah yang didominasi oleh lautan (sebesar 94% wilayah), menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi pariwisata kemaritiman/bahari. Terdapat beberapa potensi yang belum dikembangkan sebagai pariwisata bahari, seperti: (1) potensi keindahan alam bawah laut di Kabupaten Kepulauan Anambas; (2) keindahan pasir putih di beberapa kawasan di Kabupaten Natuna dan Lingga; (3) dan kawasan industri pariwisata taraf dunia di Kabupaten Bintan. Kedepan potensi wisata bahari perlu dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik dan memiliki daya saing, sehingga kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara semakin meningkat.

Dilihat dari indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau dari tahun 2015-2019 mempunyai kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 2,07 juta orang dengan rata-rata tingkat hunian hotel sebesar 52,65% meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 2,86 juta orang dengan rata-rata tingkat hunian hotel sebesar 50,87%. Namun pada indikator rata-rata lama tinggal wisatawan di kepulauan Riau masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan kurangnya objek-objek wisata baru di Kepulauan Riau dan jadwal kepastian penyelenggaraan even yang masih sering berubah. Untuk mengatasi hal ini maka kedepannya akan di berikan kepastian jadwal pelaksanaan event. Karena Sebagian besar wisatawan telah merencanakan jauh-jauh hari untuk menghabiskan waktu liburannya. Untuk itu perlu memperbanyak pelaksanaan event-event wisata daerah di Kepulauan Riau dan bersifat annual, serta terjadwal dengan pasti, sehingga wisatawan bisa dengan baik menjadwalkan kunjungannya. Selain itu perlu mendorong untuk memperbanyak pengembangan dan perintisan objek wisata baru.

Indikator Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau pada tahun 2019 tidak mencapai target yang telah ditetapkan walaupun wisatawan nusantara dan mancanegara mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan wisatawan (terutama Wisnus) lebih memilih untuk tinggal di rumah teman/ saudaranya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (*passenger exit survey*) yang menyebutkan bahwa wisatawan nusantara yang datang ke Kepulauan Riau 83,17% menginap di rumah teman/ saudara, komersil lainnya 2,62% dan hanya 11,80% yang menginap di hotel. Untuk meningkatkan hunian hotel di Kepulauan Riau diharapkan program hot deals pemerintah pusat bisa diarahkan untuk membantu memberikan diskon besar-besaran kepada pengelola hotel (subsidi), sehingga wisatawan akan memiliki banyak pilihan untuk menginap di hotel.



Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pariwisata ditunjukkan melalui 7 indikator yang tersebar pada 5 program pembangunan. Dari 7 indikator yang ditargetkan pada tahun 2019, terdapat sebanyak 6 indikator dengan status telah tercapai dan 1 indikator dengan status tidak tercapai. Beberapa indikator kinerja yang capaiannya perlu dioptimalkan karena persentase capaian targetnya belum mencapai angka 100%, yaitu indikator: Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau; dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata									
	(1) Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau	hari	1,84	1,9	2,09	1,87	2,10	1,96	93,33	Tidak Tercapai
2	Program Pengembangan Industri Pariwisata									
	(1) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,16	2,34	2,2	2,32	2,45	2,46	100,41	Tercapai
3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata									
	(1) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	Juta orang	2,03	2,1	2,07	2,6356	2,30	2,8648	124,56	Tercapai
	(2) Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau	Juta orang	NA	1,48	2,89	3,547	1,57	4,227	269,28	Tercapai
	(3) Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	NA	NA	NA	14.299	13.409	19.625	146,36	Tercapai
4	Program Pengembangan									



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Kelembagaan Pariwisata									
	(1) Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	%	49,15	48,19	52,66	53,75	51,00	50,87	99,75	Tidak Tercapai
5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif									
	(1) Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif aktif	%	-	-	2,73	13,3	20,00	24,21	121,05	Tercapai

Sumber: Dinas Pariwisata, 2020

3) Pertanian

Pelaksanaan urusan pertanian di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup sub urusan: (1) Sarana Pertanian; (2) Prasarana Pertanian; (3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; (4) Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; dan (5) Perizinan Usaha Pertanian.

Sebagian kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan. Sektor pertanian menjadi sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Disamping palawija dan hortikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas, cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit.

Gambaran capaian indikator dari urusan pertanian dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 relatif baik. Pada Sektor pertanian memberikan kontribusi kecil terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau, yaitu hanya 2,5%. Tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Kepulauan Riau tergolong baik namun belum optimal, ditandai dengan Nilai Tukar Petani sebesar 99,45% pada tahun 2015 meningkat menjadi 101,41% pada tahun 2019.

Pada Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan, pada indikator Produksi padi mengalami peningkatan terlihat pada tahun 2015 sebanyak 959 ton, menurun menjadi sebesar 1.167,8 ton pada tahun 2019. Dalam sektor pertanian di Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2019 telah berkembang dengan optimal.

Di bidang peternakan, pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak terdapat 1 indikator yang capaiannya



belum tercapai, yaitu indikator Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar yang pada tahun 2019 masih mencapai 0,04% dari target yang telah ditetapkan yaitu 0,025%. Tidak tercapainya target kinerja disebabkan oleh terjadinya peningkatan kejadian kasus penyakit helminthiasis (cacingan) di lapangan, terbatasnya ketersediaan obat-obatan hewan untuk melakukan pengobatan terhadap ternak yang sakit. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka akan dilakukan surveilans dan pengobatan terhadap ternak yang terserang penyakit, dengan menambah obat-obatan untuk pengobatan ternak.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pertanian melalui 12 indikator yang tersebar pada 5 program pembangunan. Dari ke 12 indikator yang ditargetkan pada tahun 2019, 2 indikator memiliki status tidak tercapai dan 10 indikator memiliki status telah tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program peningkatan kesejahteraan Petani									
	(1) Nilai Tukar Petani (NTP)	%	99,45	98,16	97,98	97,02	98,70	101,41	102,75	Tercapai
	(2) Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	1,21	1,16	1,16	1,2	1,21	1,2	99,17	Tidak Tercapai
2	Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan									
	(1) Jumlah Produksi Padi (ton)	ton	959	627	601	833	1.020	1.167,8	114,49	Tercapai
	(2) Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.637	12.637	19531,5	14.957	12.679	19.482,46	153,66	Tercapai
	(3) Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	ton	14.000	38.338	40301	55.055	43.239	72.654,90	168,03	Tercapai



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	(4) Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	ton	21.694	21.694	47930	40.916	31.796	33.946,80	106,76	Tercapai
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak									
	(1) Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar	%	0,042	0,042	0,04	0,032	0,025	0,04	40,00	Tidak Tercapai
	(2) Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Kecil	%	0,0045	0,0035	0,0035	0,0027	0,002	0,002	100,00	Tercapai
	(3) Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	51,27	76,34	78,84	85,71	56,20	57,31	101,98	Tercapai
4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan									
	(1) Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	5,98	5,98	4,67	5,05	5,00	5,32	106,40	Tercapai
5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan									
	(1) Persentase Peternak yang memanfaatkan teknologi tepat guna	%	3,11	3,11	3	5	5,28	5,28	100,04	Tercapai
	(2) Persentase Kelompok Tani Menerapkan Teknologi pertanian /perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	%	3,28	3,28	4,53	4,63	4,63	6,85	147,85	Tercapai

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2020

**4) Kehutanan**

Perkembangan indikator kinerja pada urusan kehutanan Provinsi Riau dapat dilihat pada 5 indikator, terdapat 3 indikator yang mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019 yaitu: Presentase terbentuk dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau; Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dan Luas lahan kritis terehabilitasi.

Dari ke lima indikator tersebut terdapat 1 indikator yang belum mampu mencapai target tahun 2019 dan mengalami perkembangan yang cenderung menurun yakni indikator Presentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB dengan capaian 0,01% sedangkan target tahun 2019 sebesar 0,03%. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018

No	Program Dan Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program pengembangan dan pemanfaatan kawasan hutan									
	1) Persentase terbentuknya dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau	Angka	0	0	66,66	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	2) Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,03	0,03	0,01	0,01	0,03	0,01	33,33	Tidak Tercapai
	3) Luas lahan kritis terehabilitasi	Ha	200	313	243	335	225	400	177,78	Tercapai
	4) Persentase KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat	%	0	19	20,6	100	20,60	100	149,99	Tercapai
	5) Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan	%	70	72,73	75	87,5	85,00	85,00	100,00	Tercapai



No	Program Dan Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan									

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumberdaya mineral sebagai salah satu sumberdaya alam, merupakan sumber yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Bahkan beberapa jenis mineral, yakni minyak dan gas bumi, pernah menjadi soko guru perekonomian Pemerintah. Dalam skala global, mineral khususnya penghasil energi utama; bahkan berperan strategis dalam menentukan peta geopolitik dunia. Sementara mineral dalam bentuk logam mulia emas juga memiliki posisi penting dalam perekonomian dunia. Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait sub urusan: (1) geologi; (2) mineral dan batubara; (3) Energi Baru Terbarukan; dan (4) Ketenagalistrikan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sudah cukup baik, dilihat pada masing-masing indikator antara lain: Persentase pelayanan perizinan IUP mineral logam, bukan logam dan batuan sesuai SOP sebesar 90%; rasio elektrifikasi sebesar 92,59 dan rasio desa/ kelurahan berlistrik sebesar 89,9%. Untuk indikator yang tidak tercapai adalah: 1). Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan dari target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 50% baru terealisasi 33,33%. 2) Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah dari target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 4 kab/kota baru terealisasi sebanyak 3 kab/kota. 3) Rasio desa/ kelurahan berlistrik dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 95,45% baru terealisasi 89,9%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan melalui 9 Indikator yang tersebar pada 5 program (program pembangunan). Dari ke 9 indikator yang telah rilis data tahun 2019, terdapat sebanyak 4 indikator tercapai, dan 5 indikator tidak tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan ESDM Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah									
	(1) Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	%	-	13	20	23	50,00	33,33	66,66	Tidak Tercapai
	(2) Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Kab/Kota	-	-	-	3,00	4,00	3,00	75,00	Tidak Tercapai
2	Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara									
	(1) Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	%	-	65	70	100	80,00	90	112,50	Tercapai
	(2) Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	-	65	70	85,71	80,00	90,00	112,50	Tercapai
	(3) Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah	%	-	0,84	1,91	1,28	1,40	1,35	96,43	Tidak Tercapai
3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan									
	(1) Rasio Elektrifikasi	%	83,72	89,14	91,44	91,50	91,50	92,59	101,19	Tercapai
	(2) Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	-	74,6	78,61	85,1	95,45	89,9	94,19	Tidak Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
4	Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan									
	(1) Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan	%	-	5	21,58	32,10	64,00	70,79	110,61	Tercapai
5	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi									
	(1) Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0,0005	0,0005	0,0006	0,0007	0,0008	0,0007	87,50	Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019

6) Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; (2) Sarana Distribusi Perdagangan; (3) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; (4) Pengembangan Ekspor; dan (5) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Kinerja urusan perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari efisiensi perdagangan dalam negeri yaitu pada indikator Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk setiap tahun mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 80% meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 163%. Sedangkan dilihat pada perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yaitu pada indikator persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi standar nasional indonesia (SNI) menurun yaitu pada tahun 2015 sebesar 40% menurun menjadi sebesar 25% pada tahun 2019, sedangkan pada indikator Pesentase penyelesaian kasus pengaduan perlindungan konsumen (melalui BPSK) mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2015 sebesar 42% meningkat menjadi 100% pada tahun 2019.

Dilihat dari sisi peningkatan dan pengembangan ekspor di Provinsi Kepulauan Riau yaitu terutama pada indikator Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepulauan Riau selalu meningkat pada tahun



2015 sebesar US \$.1.112,40 meningkat menjadi sebesar US \$.2.727,48 pada tahun 2019.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan perdagangan ditunjukkan melalui 9 Indikator yang tersebar pada 3 program (program pembangunan). Dari ke 9 indikator yang telah rilis data tahun 2018, terdapat sebanyak 7 indikator dengan status Tercapai, dan 2 indikator dengan status Belum Tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perdagangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1)	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (2018-2021)									
	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	Persen	7,2	7,6	7,5	2,54	< 10%	8,33	116,70	Tercapai
	Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	Persen	80	80	83	84	89,00	163	183,15	Tercapai
2)	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan									
	Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Persen	40	38	37	34	31,00	25	80,65	Tidak Tercapai
	Persentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen	%	42	40	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai



No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	(melalui BPSK)									
3)	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor									
	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	juta US \$	1.112,40	1.185,67	2.915,73	3.034,45	1.405,48	2.727,48	194,06	Tercapai
	Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribu US \$	8.657.953	8.019,70	8.654.142	8.489.050,00	9.100.000	7.793.311	85,64	Tidak Tercapai
	Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA	6.879	7.962	27.721	28.725	10.000	28.418	284,18	Tercapai
	Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor	Jenis	21	22	23	23	23	23	100,00	Tercapai
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	7,73	8,34	7	8,56	8,35	9,07	108,62	Tercapai

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

7) Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Pelaksanaan urusan perindustrian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penetapan rencana pembangunan industri Provinsi; Penerbitan IUI besar; Penerbitan IPUI bagi industri besar; Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Besar dan Izin perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.

Kinerja urusan perindustrian dilihat dari sentra-sentra industri potensial yaitu indikator jumlah sentra industri dilengkapi Infrastruktur penunjang sejumlah 8 sentra pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dilihat dari penataan struktur industri yaitu pada indikator jumlah kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau sejumlah 26



kawasan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 kemudian pada indikator jumlah kelompok klaster industri mengalami penurunan pada tahun 2017 sejumlah 2 klaster kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 1 klaster.

Dilihat dari pengembangan industri kecil dan menengah yaitu pada indikator jumlah industri Kecil dan menengah yang mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sejumlah 1.632 unit meningkat menjadi sejumlah 2.400 unit pada tahun 2019 kemudian pada indikator peningkatan omset industri pengolahan berbahan baku lokal juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 11,57% meningkat menjadi sebesar 12,10% pada tahun 2019.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan perindustri ditunjukkan melalui 10 Indikator yang tersebar pada 5 program (program pembangunan). Dari ke 10 indikator yang telah rilis data tahun 2018, terdapat sebanyak 9 indikator dengan status Tercapai, dan 1 indikator dengan status Belum Tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perindustrian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1)	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial									
	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	2	4	6	8	8	8	100,00	Tercapai
2)	Program Penataan Struktur Industri									
	Jumlah Industri Besar	Unit	751	761	779	553	785	554	70,57	Tidak Tercapai
	Jumlah kawasan industri	kawasan	26	26	26	26	26	26	100,00	Tercapai
	Jumlah Kelompok Klaster Industri	Klaster	0	0	2	1	1	1	100,00	Tercapai
3)	Program Pengembangan Industri Unggulan									
	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	38,60	38,60	37,00	36,12	37,50	37,57	100,19	Tercapai
	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas	orang	125.575	125.575	137.396	121.026	133.060	133.060	100,00	Tercapai



No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
4)	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah									
	Jumlah industri kecil dan Menengah	unit	1.632	1.723	2.000	2.200	2.400	2.400	100,00	Tercapai
	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	1.251	1.276	1.750	1.850	1.969	1.969	100,00	Tercapai
	Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal	%	11,57	11,60	11,60	11,85	12,10	12,10	100,00	Tercapai
5)	Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi									
	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Industri yang bersertifikasi di Provinsi Kepri	Persen	-	0,013	0,026	0,058	0,091	0,091	100,00	Tercapai

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

8) Transmigrasi

Salah satu urusan wajib pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah urusan ketenagakerjaan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan terkait dengan ketenagakerjaan adalah (1) Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan (3) Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan.

Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat dari dua indikator, yakni Jumlah KK yang sudah bertransmigrasi di Kepri, dan Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang tertata. Capaian untuk indikator Jumlah KK yang sudah bertransmigrasi di Kepri sudah sesuai dengan target, dimana jumlahnya tetap 1.471 KK dari tahun 2015-2019. Sedangkan untuk indikator Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang tertata, capaiannya juga sama yakni sudah memenuhi target dengan jumlah kawasan 2 dari tahun 2015-2019.



Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi									
	Jumlah KK yang sudah bertransmigrasi di Kepri	KK	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	100,00	Tercapai
	Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang tertata	Kawasan	2	2	2	2	2	2	100,00	Tercapai

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2020

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 2 Indikator pada 1 program (program pembangunan). Dari 2 indikator yang telah rilis data tahun 2019, semuanya sudah mampu mencapai target yang ditetapkan.

2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Upaya-upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin ditingkatkan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021, dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018



tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021. Perencanaan pembangunan tahunan berupa RKPD disusun setiap tahunnya. Selain itu untuk mendukung perencanaan yang komprehensif, dilakukan pula penyusunan beberapa dokumen perencanaan multi sektoral.

Untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya. Setiap tahun Bapeltbang Provinsi Kepulauan Riau melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Kinerja dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan kedepannya masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Indikator Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD hanya memiliki capaian 100% pada tahun 2019. Selain itu Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD memiliki capaian sebesar 85%, dan keselarasan Renstra PD dengan RPJMD memiliki capaian 100% sesuai dengan target tahun 2019. Dilihat dari persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir di tahun 2019 sebesar 33%.

Di sisi lain untuk indikator persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah; Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah; Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup sesuai amanat pemerintah; Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pemerintahan sesuai amanat pemerintah; dan Persentase kerjasama yang diimplementasikan telah memiliki realisasi 100% sesuai dengan target tahun 2019. Sedangkan indikator Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki realisasi capaian sebesar 80%

Penyelenggaraan fungsi Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui 8 program dan 12 indikator secara keseluruhan telah mencapai target tahun 2019 dan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58

Capaian Kinerja Fungsi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program perencanaan									



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Pembangunan Daerah									
	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	%	84	90	80	91,57	100,00	100	100,00	Tercapai
	Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	NA	NA	NA	83,87	85,00	85	100,00	Tercapai
	Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	%	71	73	100	100	00,00	100	100,00	Tercapai
	Persentase kegiatan prioritas yang didanai	%	NA	NA	80	80	81,00	81	100,00	Tercapai
	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	%	25	28	86,25	87,15	>33,00	33	100,00	Tercapai
2	Program perencanaan Perekonomian									
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	Tercapai
3	Program Perencanaan sosial budaya									
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	Tercapai
4	Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan lingkungan									



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
							Tahun 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Hidup									
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	Tercapai
5	Program Perencanaan Pemerintahan									
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pemerintahan sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	Tercapai
6	Program Kerjasama Pembangunan									
	Persentase kerjasama yang diimplementasikan	%	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	Tercapai
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang									
	Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	0	20	100	100,00	80,00	80	100,00	Tercapai
8)	Program Pengendalian dan Evaluasi									
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan	%	NA	NA	NA	100,00	100,00	100	100,00	Tercapai



Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2020

2) Penelitian dan Pengembangan

Kewenangan pemerintah daerah provinsi pada fungsi Penelitian dan Pengembangan mencakup menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, menyusun program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah provinsi, pelaksanaan inovasi daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan berada dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Kinerja penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan dilihat dari persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder. Capaian pada tahun 2019 sebesar 55% sesuai dengan target tahun 2019, dengan realisasi capaian target 100%. selain itu indikator Persentase Jumlah Inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah memiliki realisasi sebesar 5% sesuai dengan target tahun 2019 yang juga 5%. Secara lebih rinci capaian kinerja penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan									
	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%	NA	NA	59	55	55	55	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pengembangan Inovasi Daerah									
	Persentase Jumlah Inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah	%	NA	NA	NA	0	5	5	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2020

3) Keuangan

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah dan



pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan, dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Kewenangan dalam menjalankan fungsi keuangan meliputi kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Fungsi Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dijalankan oleh dua perangkat daerah yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

Kinerja Fungsi Keuangan Daerah dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan sudah 100% perangkat daerah yang menyampaikan laporan. Namun persentase kepuasan pelayanan masih bernilai 97% pada tahun 2019. Persentase aset (barang milik daerah) Pemerintah daerah hanya sebesar 55%. Namun rata-rata nilai hasil evaluasi APBD dan LPP APBD Kabupaten Kota masih belum diketahui skor nilai yang telah dicapai .

Selain itu dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan dari 1.013 Triliun Rupiah pada tahun 2015 menjadi 1.306 triliun rupiah pada tahun 2019. Kondisi realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2019 kurang dari target tahun 2019 sebesar 1.330 triliun rupiah. Sejauh dalam tahapan optimalisasi teknologi untuk meningkatkan kinerja fungsi keuangan daerah telah menggunakan E-samsat dan E-payment untuk mengurangi adanya korupsi dan mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Meskipun telah menggunakan teknologi namun dilihat dari persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat masih sangat sedikit, dilihat dari realisasi kinerja pada tahun 2019 hanya 80% saja masyarakat yang menggunakan layanan inovasi teknologi samsat. Kondisi tersebut perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan pengenalan secara lebih luas kepada masyarakat terkait inovasi teknologi samsat yang telah digunakan.

Kinerja indikator urusan keuangan ditunjukkan melalui 13 indikator yang tersebar pada 7 program. Dari 13 indikator tersebut terdapat 7 indikator dengan status telah mencapai target tahun 2019; dan 6 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program urusan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.60
Capaian Kinerja Fungsi Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi	Status
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	80	82	88	90	93,55	100	106,90	Tercapai
	Persentase kepuasan pelayanan	%	80	80	82	85	90,00	97	107,78	Tercapai
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah									
	Persentase aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dilengkapi dengan bukti legalitas kepemilikan	%	3,54	46,5	71,43	68,93	74,07	70	94,51	Tidak Tercapai
	Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah yang tidak bergerak yang dilakukan pengamanan (pagar,patok,papan nama)	%	17,78	24,44	41,95	55,56	71,11	70	98,44	Tidak Tercapai
3	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota									
	Rata-rata Nilai hasil evaluasi APBD dan LPP APBD Kabupaten/Kota	Skor	NA	NA	BB	BB	BB	BB	100,00	Tercapai
4	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah									



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi	Status
	Realisasi pendapatan asli daerah	Triliun Rupiah	1.013	1.079	1.091	1.229	1.330	1.306	98,20	Tidak Tercapai
	Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah	%	40,3	37,03	33,59	34,68	37,76	35,19	93,19	Tidak Tercapai
	Persentase tunggakan pajak daerah yang tertagih	%	NA	9	17,17	17	18,00	32	177,78	Tidak Tercapai
5	Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Daerah									
	Persentase realisasi penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun berjalan	%	88,45	90	97,04	93,99	90,00	107,25	119,17	Tercapai
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi									
	Jumlah jenis inovasi pelayanan berbasis Teknologi Informasi	Jenis layanan	Samsat online	Samsat Link	Samsat Link	E-Samsat dan e-payment	e Samsat dan e payment	e Samsat dan e payment	100,00	Tercapai
	Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat	%	2	6	7	10	20,00	3	15,00	Tidak Tercapai
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi Publik									
	Rata- rata lamanya waktu pelayanan Samsat (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor)	Waktu (menit)	-	35	30	20	25	10	250,00	Tercapai
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SAMSAT	Kategori (scoring)	Baik (7,25)	-	7,5	7,75	8	8	100,00	Tercapai

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020



4) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peran dan fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 salah satunya adalah fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan dan pelatihan meliputi penyusunan formasi; pengangkatan ASN daerah; penetapan kenaikan pangkat ASN daerah, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN; Pemberhentian sementara dari jabatan; dan penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kompetensi ASN. Dalam penyelenggaraan fungsi kepegawaian dan diklat di Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDM).

Kinerja fungsi kepegawaian dan diklat masih belum bisa memenuhi kebutuhan ASN di daerah Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut dilihat dari indikator persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan yang hanya memiliki realisasi capaian 58,02% pada tahun 2019. Dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 60%, sehingga persentase realisasi indikator persentase ketersediaan ASN hanya sebesar 96,70% dengan status belum mencapai target tahun 2019. Selain itu indikator penurunan kasus indisipliner pegawai tingkat sedang dan berat mengalami penurunan pada tahun 2019 yang realisasinya hanya 12 kasus dibandingkan tahun 2019 sebanyak 12 kasus dengan persentase realisasi sebesar 100%. Kondisi penurunan kasus indisipliner tersebut memperlihatkan kinerja yang baik dari penyelenggaraan fungsi kepegawaian dan diklat.

Fungsi Kepegawaian memiliki 2 program dan 6 indikator, dari 6 indikator tersebut terdapat 1 indikator yang belum mencapai target dan 5 indikator lainnya telah mencapai target tahun 2019. Secara lebih rinci capaian kinerja indikator program sebagai berikut.



Tabel 2.61
Capaian Kinerja Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
	Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	50	52	55,87	55,13	60,00	58,02	96,70	Tidak Tercapai
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan	%	NA	NA	97,02	84,80	82,00	93,80	114,39	Tercapai
	Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat	Kasus	13	8	15	13	12	12	100,00	Tercapai
	Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik	%	62	70	92,7	100	93,00	100	107,53	Tercapai
	Indeks Kepuasan Pelayanan ASN	indeks	B	B	B	B	B (70)	B (77.70)	111,00	Tercapai
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi	%	5,3	8,5	17,17	13,68	25,21	31,20	123,76	Tercapai

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, 2020

5) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan rancangan Perda, dan menyusun serta menetapkan RKPD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah



Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau memiliki 3 program yakni Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat; Program Penantuan Peraturan Perundang-Undangan; dan Program Peningkatan Publikasi, komunikasi dan informasi.

Kinerja penyelenggaraan fungsi kesekretariatan DPRD sejauh ini dapat dikatakan cukup baik. Dilihat dari Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD capaiannya sudah 100% sesuai SOP. Hal yang sama juga terjadi pada persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD yang sudah 100% sesuai SOP pada tahun 2019. Namun dilihat dari Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD masih berada pada skor 66. Meskipun kondisi tersebut telah mencapai target tahun 2019 namun masih perlu adanya peningkatan capain skor di tahun selanjutnya

Penataan peraturan perundang-undangan juga menunjukan perkembangan yang bik dilihat dari persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah SPRD sudah 100% sesuai SOP. Namun terkait dengan Jumlah Reses Anggota SPRD masih belum menunjukan perkembangan yang baik karena belum mampu mencapai target tahun 2019 sebesar 135 orang/kali.

Penyelenggaraan Fungsi Sekretariat DPRD di lakukan melalui 3 program dan 7 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2019 keseluruhan telah mencapai target tahun 2019. Secara lebih rinci capaian kinerja fungsi sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									
	Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP	%	85	87	100	100	92,00	100	108,70	Tercapai
	Persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD sesuai SOP	%	85	87	100	100	92,00	100	108,70	Tercapai
	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan	Skor	-	60	62	64	66,00	66	100,00	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Sekretariat DPRD.									
	Persentase Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan									
	Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP	%	85	87	100	100	92,00	100	108,70	Tercapai
3	Program Peningkatan Publikasi, Komunikasi dan Informasi									
	Jumlah Media Massa yang berkerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	MoU				163	95	183	192,63	Tercapai
	Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi	Orang Kali				135	135	135	100,00	Tercapai

Sumber: Sekretariat DPRD, 2020

6) Sekretariat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213 Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 9 biro penunjang yakni Biro Pemerintahan dan Perbatasan; Biro Hukum; Biro Administrasi Pembangunan; Biro Administrasi Layanan Pengadaan; Biro Umum; Biro Kesejahteraan Rakyat; Biro Administrasi Perekonomian; Biro Organisasi dan Korpri; dan Biro Humas, Protokol, dan Penghubung.

Secara keseluruhan dalam Biro Pemerintahan dan Perbatasan pada tahun 2019 telah mencapai indikator kinerja dengan capaian 100% sesuai target baik indikator peringkat LPPD dengan Status Sangat Tinggi;



indikator Persentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dengan capaian 100%; Indikator Persentase Fasilitas Penyelesaian Batas Darat Kab/Kota dengan capaian 100%; dan indikator Persentase Lokalisasi prioritas dan PKSB dengan capaian 100%.

Kinerja Biro hukum pada tahun 2019 masih harus terus ditingkatkan meskipun capainnya sudah mencapai target tahunan, dilihat dari Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan baru terealisasi 4 dokumen masih belum mampu memenuhi target tahun 2019. Selain itu jumlah kasus masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum oleh pemrpov kepri hanya ada 10 kasus, sudah memenuhi target. Sedangkan Jumlah MoU antara Gubernur Kepri dengan LBH dan atau OBH yang terverifikasi pada tahun 2019 sudah teralisasi 3 MoU dan telah melampaui target tahun 2019 sebesar 2 MoU. Kinerja Biro administrasi Pembangunan juga perlu di tingkatkan kedepannya.

Dilihat dari Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN secara fisik belum mencapai target pada tahun 2019 yakni realisasi fisik sebesar 97,37% sedangkan realisasi keuangan sudah mencapai 100,32%. Indikator Jumlah Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah juga belum mencapai target tahunan dengan realisasi hanya sebesar 75%. Selanjutnya kinerja Biro Layanan Pengadaan juga perlu di tingkatkan dilihat dari indikator Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang realisasinya baru 94,24%.

Kinerja Biro Umum masih perlu meningkatkan kinerjanya dilihat dari indikatornya Skor Kepuasan Masyarakat yang capaiannya baru 90% dari target yang ditetapkan. Sedangkan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Perekonomian dan Biro humas, Protokol dan Penghubung sudah mampu mencapai target pada setiap indikatornya. Biro Organisasi dan Koopri perlu meningkatkan kinerjanya yang masih belum optimal dilihat dari indikator Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya capainnya masih 72% dari target 90%; Persentase Perangkat daerah yang telah memiliki dokumen evaluasi jabatan realisasi capaiannya sebesar 61% dari target 76%; Persentase jabatan struktural yang telah disusun standar kompetensi Jabatan managerial sesuai ketentuan belum memiliki capaian di tahun 2019; dan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri persentase realisasi capaian baru 90%.

Penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah dilakukan melalui 25 program dan 48 indikator kinerja. Dilihat dari capaian tahun 2019 terdapat 7 indikator yang belum mencapai target tahun 2019 dan 39 indikator yang telah mencapai target tahun 2019, dan sebanyak 2



indikator belum tersedia data. Secara lebih rinci dapat dilihat apada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Biro Pemerintahan dan Perbatasan									
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah									
	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Peringkat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	100,00	Tercapai
	Presentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	%	100	100	94,21	100	100,00	100	100,00	Tercapai
2	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan									
	Presentase Fasilitas Penyelesaian Batas Darat Kab/Kota	%	80	80	85	95	100,00	100	100,00	Tercapai
	Presentase Lokasi Prioritas dan PKSB yang di data/dikaji/diedukasi dalam pengembangan kawasan perbatasan	%	9,76	34,15	N/A	100	100,00	100	100,00	Tercapai
	Biro hukum									
3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan									
	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,	Jumlah	NA	NA	10	6	7	4	57,14	Tidak Tercapai



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	kepentingan umum dan atau kesusilaan									
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum									
	Persentase Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi	%	16	49	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai
3	Program Pembinaan Hukum									
	Persentase ranperda yang diusulkan pemrakarsa yang diakomodir dalam propemperda	%	21	15	67	73	76,00	80	105,26	Tercapai
4	Program Fasilitas Bantuan dan Layanan Hukum									
	persentase perkara perdata dan TUN yang dihadapi oleh pemprov yang tertangani	%	2	5	57	48	40,00	120	300,00	Tercapai
	jumlah kasus masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum oleh pemprov kepri	Kasus	NA	NA	NA	4	5	10	200,00	Tercapai
	Jumlah MoU antara Gubernur Kepri dengan LBH dan atau OBH yang terverifikasi	Dokumen	NA	NA	NA	2	3	3	100,00	Tercapai
	Biro Administrasi Pembangunan									
5	Program e-Government									
	Jumlah sistem informasi administrasi pembangunan yang terintegrasi	Unit Sistem	NA	NA	2	3	5	5	100,00	Tercapai
6	Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan									
	Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	%	Fisik 93,00 Keu 90,00	Fisik 94,00 Keu 89,00	Fisik 84,55 Keu 88,04	Fisik 98,50 Keu 95,98	Fisik 100,00 Keu 95,00	Fisik 97,37 Keu 95,31	Fisik 97,37 Keu 100,32	Tidak Tercapai



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
7	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan									
	Persentase dokumen administrasi pembangunan tersusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai
8	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi									
	Jumlah Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah	Kab/Kota	NA	NA	1	3	4	3	75,00	Tidak Tercapai
	Biro Administrasi Layanan Pengadaan									
9	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah									
	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	%	NA	NA	65,26	69,64	80,00	75,39	94,24	Tidak Tercapai
10	Program e-procurement									
	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (E-Procurement)	%	NA	NA	82,76	74,58	75,00	89,69	119,59	Tercapai
	Biro Umum									
11	Program Pelayanan KDH/WKDH yang di fasilitasi (2018-2021)									
	Jumlah layanan kedinasan KDH/WKDH yang sesuai prosedur	layanan	2	2	2	2	2	2	100,00	Tercapai
	Jumlah layanan rumah tangga KDH/WKDH yang dilayani sesuai prosedur	layanan	2	2	2	2	2	2	100,00	Tercapai
12	Program Dukungan Pelayanan Umum									



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Persentase pelaksanaan pelayanan umum sesuai SOP	%	50	50	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai
	Skor Kepuasan Masyarakat	Skor	NA	NA	NA	75	80	79,94	90,00	Tidak Tercapai
13	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan sekretariat daerah									
	Persentase barang milik daerah dilingkungan sekretariat daerah yang terjamin keamanannya	%	80	100	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai
	Persentase barang milik daerah dilingkungan sekretariat daerah yang dikelola sesuai dengan standar	%	80	90	100	90	90,00	90	100,00	Tercapai
	Biro Kesejahteraan Rakyat									
14	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan									
	Persentase pelaksanaan hari-hari besar keagamaan	%	NA	NA	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai
	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	%	NA	NA	Na	25	50,00	50	100,00	Tercapai
15	Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat									
	Persentase Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat tingkat provinsi	%	100	100	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai
	Persentase Pembinaan , Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai
	Persentase Pembinaan , Pemantauan dan	%	100	100	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
	Biro Administrasi Perekonomian									
16	Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Asistensi Pembangunan									
	Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan	rekomendasi	NA	NA	13	13	6	6	100,00	Tercapai
	Jumlah koordinasi bidang perekonomian yang terlaksana	Angka	NA	NA	13	18	14	14	100,00	Tercapai
	Jumlah monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian yang dilaksanakan	Laporan	NA	NA	NA	7	7	7	100,00	Tercapai
17	Program Peningkatan Kinerja BUMD									
	Rata-rata Tingkat Kesehatan BUMD	Skor	NA	NA	0	*56,06	35,00	33,33	95,23	Tidak Tercapai
	Biro Organisasi dan Korpri									
18	Program kelembagaan organisasi pemerintah daerah									
	Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	%	NA	NA	116	90	90,00	72	80,00	Tidak Tercapai
19	Program pembinaan dan pengembangan aparatur									
	Persentase Jabatan yang telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja	%	63	66	56	68,3	76,00	76	100,00	Tercapai
	Persentase Perangkat daerah yang telah memiliki dokumen evaluasi jabatan	%	53	53	67	68,3	76,00	80	105,26	Tercapai
	Persentase jabatan struktural yang telah disusun standar	%	50	58	99	99	99,00	99,00	100,00	Tercapai



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
							Tahun 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	kompetensi Jabatan managerial sesuai ketentuan									
20	Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik									
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan standar pelayanan publik	%	55	71	74,83	77,42	85,00	85	100	Tercapai
	Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh kementerian	%	NA	NA	4	4	46,00	46	100,00	Tercapai
	Persentase SOP pada seluruh Opd yang tersusun.	%	NA	NA	NA	62,28	71,00	71	100,00	Tercapai
	Persentase SOP pada seluruh OPD yang telah diimplementasikan	%	66	71	78	88,88	95,00	95	100,00	Tercapai
	Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik	Skor SKM	NA	NA	76,09	NA	67,00	67	100,00	Tercapai
21	Program pembentukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih									
	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Angka	41,15	60	64,18	NA	67,00	65,83	94,04	Tidak Tercapai
22	Program Kesejahteraan Anggota Korpri									
	Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Provinsi	Angka	NA	NA	11	NA	70			



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Nasional	Angka	NA	NA	2	NA	4			
	Biro humas, Protokol dan Penghubung									
23	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH									
	Persentase Pelayanan KDH/WKDH Bidang Kehumasan, Keprotokolan, dan Penghubung dan Kerjasama Yang Sesuai Dengan SOP	%	18	81	100	100	100	100	100	Tercapai
24	Program Pengembangan Publikasi, Komunikasi dan Informasi									
	Jumlah Media Massa Yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Media Massa	NA	NA	128	172	10	159	1590	Tercapai
	Persentase Media Informasi Yang Digunakan	%	NA	NA	142,86	100	100	100	100	Tercapai
25	Program Fasilitas dan Kerjasama dengan Berbagai Pihak									
	Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri yang Difasilitasi di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri	Kegiatan	7	2	4	4	4	4	100	Tercapai
	Jumlah Kerjasama Yang Difasilitasi Oleh Bagian Penghubung dan Kerjasama di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri	Mou	-	-	8	9	10	10	100	Tercapai

Ket: *) Nilai BUMD PDAM Tirta Kepri, sehubungan 2 BUMD lainnya belum memenuhi syarat untuk dilakukan penilaian yang berpedoman pada Modul penilaian BUMD yang dikeluarkan oleh



Mendagri pada Oktober 2017.

Sumber: Sekretariat Daerah, 2020

7) Pengawasan

Kinerja indikator program pembangunan pada fungsi pengawasan ditunjukkan melalui 9 indikator yang tersebar pada 4 program (program pembangunan). Dari ke 9 indikator yang telah rilis data tahun 2019, terdapat 1 indikator yang belum mencapai target yakni indikator Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau capaiannya baru sebesar 71,43% dari target 100%.

Sedangkan indikator yang telah mencapai target meliputi: Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang memiliki sertifikasi 100%; Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Level 3; Persentase Pelaksanaan Tugas pada Inspektorat yang memiliki SOP yang memadai sebesar 92%; Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri dengan status WTP; Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Level 3; Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Zona Hijau; Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P sebesar 100%; dan Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri Status Hijau.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan fungsi pengawasan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
							Tahun 2019			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.									
	1) Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang memiliki sertifikasi	%	100	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai



RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	2) Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	Level	1	2	3	3	3	3	100,00	Tercapai
	3) Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se- Provinsi Kepulauan Riau	%	100	85,71	116	100	100	71,43	71,43	Tidak Tercapai
2	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan									
	4) Persentase Pelaksanaan Tugas pada Inspektorat yang memiliki SOP yang memadai	%	30	30	60	92	50	92	184,00	Tercapai
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah									
	5) Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	Tercapai
	6) Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	1	2	3	3	3	3	100,00	Tercapai
	7) Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi	Zona	Hijau	Kuning	Kuning	Hijau	Hijau	Hijau	100,00	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja		Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
							Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Kepulauan Riau									
4	Program Pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri									
	8) Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P	%	60	60	100	96	85	100	117,65	Tercapai
	9) Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri	Status	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	100,00	Tercapai

Sumber: Inspektorat Daerah, 2020

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Nilai rata-rata konsumsi penduduk Provinsi Kepulauan Riau selama satu tahun, yang diukur melalui konsumsi rumah tangga per kapita, selama kurun waktu 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Nilai rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita riil pertahun tahun 2011 sebesar 25.008,07 ribu rupiah menjadi 28.922,11 ribu rupiah pada tahun 2015, artinya selama kurun waktu 5 tahun konsumsi rumah tangga per kapita Kepulauan Riau meningkat sebesar 15,65 persen, seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.65

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	43.734,37	46.714,29	49.858,73	53.284,03	57.063,33
2.	Persentase Pengeluaran	36,10	34,81	34,77	35,51	36,50



No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
	konsumsi rumah tangga per kapita terhadap PDRB					

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi salah satu indikator produksi untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Dengan kata lain, NTP menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Pada Juni 2019, NTP di Provinsi Kepulauan Riau tercatat 98,63 mengalami kenaikan sebesar 1,46 persen dibanding NTP tahun 2018. NTP subsektor Tanaman Pangan tercatat sebesar 95,25; NTP subsektor Hortikultura sebesar 103,92; NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 71,43; NTP subsektor Peternakan sebesar 104,44; dan NTP subsektor Perikanan sebesar 115,15.

Dari lima subsektor yang menyusun NTP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019, tercatat sektor yang melebihi 100 yaitu pertanian hortikultura, peternakan dan perikanan, sedangkan sektor pertanian tanaman pangan, Perkebunan rakyat, dan umum (NTP) kurang dari 100, seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.66
Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-P)	99,50	98,57	97,27	96,41	95,25
2.	Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTP-H)	102,68	102,53	98,41	93,74	103,92
3.	Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-Pr)	85,49	80,15	80,15	72,99	71,43
4.	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTP-Pt)	104,66	104,05	104,76	104,68	104,44
5.	Nilai Tukar Petani Perikanan (NTP-Pi)	107,39	108,98	111,7	116,13	115,15
6.	Nilai Tukar Petani (NTP) umum	99,45	98,16	97,98	96,08	97,54

Sumber : BPS Kepri 2020, Berita Resmi Statistik "Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau 2019



2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan

Di Provinsi Kepulauan Riau terjadi peningkatan panjang jalan Provinsi dari 679,49 km pada tahun 2011 meningkat menjadi sepanjang 896,46 km pada tahun 2019. Sementara itu jumlah kendaraan mencapai sebanyak 1.242.891 unit, terdiri dari sejumlah 151.443 mobil penumpang; sebanyak 2.897 unit bus; dan sebanyak 1.088.551 unit sepeda motor. Jumlah kendaraan terbanyak di Kota Batam; Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Gambaran jumlah kendaraan bermotor dikemukakan pada tabel berikut ini.

2. Jumlah Bank dan Kantor Cabang

Keberadaan lembaga keuangan/perbankan sangat penting dalam menjaga kelangsungan perekonomian daerah dan ketersediaan dana bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Tidak saja sebagai sarana penyaluran dana tetapi juga berfungsi sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Terdapat sebanyak 479 unit Bank Umum di Kepulauan Riau pada tahun 2019, dengan perincian tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.67

Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Jenisnya Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Jenis	Kantor Pusat	Kantor Cabang dan Cabang Pembantu	Kantor Kas	Jumlah
1.	Bank Umum Pemerintah	0	204	117	321
2.	Bank Umum Syariah	0	20	4	24
3.	Unit Usaha Syariah	0	8	41	49
4.	Bank Perkreditan Rakyat	43	29	9	81
5.	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	2	2		4
	Jumlah	45	263	171	479

Sumber: BPS Kepri, Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2020

3. Jumlah Penginapan dan Hotel

Perkembangan jumlah perhotelan di Provinsi Kepri terdiri dari hotel berbintang dan hotel non-bintang. Banyaknya hotel pada tahun 2017 sebanyak 429 hotel meningkat dari sebanyak 410 unit tahun 2014. Demikian pula jumlah kamar dari sebanyak 16.851 kamar pada tahun 2014 meningkat menjadi sebanyak 23.821 unit pada tahun 2017. Secara rinci jumlah hotel dan jumlah kamar hotel berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.68
Jumlah Hotel dan Kamar Hotel di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2014-2017

No	Kabupaten/Kota	Hotel				Kamar			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.	Karimun	68	69	72	65	1.099	1.174	2.355	2230
2.	Bintan	35	36	38	42	1.308	1.416	2.339	2921
3.	Natuna	41	44	42	39	283	320	532	523
4.	Lingga	20	22	20	23	311	360	451	513
5.	Kepulauan Anambas	20	21	20	16	90	100	323	263
6.	Batam	182	190	191	203	12.183	13.388	12.983	15.146
7.	Tanjungpinang	44	44	46	45	1.577	1.660	2.211	2.225
	Kepulauan Riau	410	426	429	433	16.851	18.418	21.194	23.821

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2018

4. Jumlah Restoran

Jumlah restoran di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dari sebanyak 825 unit pada tahun 2016 menjadi sebanyak 966 unit pada tahun 2018, dengan perincian dan penyebaran restoran tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69
Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
1.	Karimun	39	49	67	69
2.	Bintan	70	72	72	...
3.	Natuna	57	37	50	57
4.	Lingga	78	78	144	152
5.	Kepulauan Anambas	40	40	36	56
6.	Batam	500	531	544	...
7.	Tanjungpinang	41	41	53	...
	Kepulauan Riau	825	848	966	...

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2018

5. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Penggunaan air minum yang disalurkan oleh PDAM Tirta Kepulauan Riau Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 sebanyak 90.442.713,00 m³. Di samping itu, dibangun pula sarana dan prasarana air bersih berbasis masyarakat. Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman menunjukkan peningkatan dari sebesar 72,01% pada tahun



2015 menjadi 92,47% pada tahun 2019 seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.70
Persentase Pelayanan Akses Air Bersih/Minum yang Aman di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)	%	72,01	72,01	89,44	92,15	92,47

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman

6. Ketersediaan daya listrik

Pembangunan suatu wilayah yang cukup pesat seperti di Provinsi Kepulauan Riau tentu membutuhkan sarana pendukung seperti ketersediaan sumber energi. Berdasarkan data yang diperoleh dari PLN, di tahun 2019 daya terpasang yang tersedia sebesar 887.408 KWh. Produksi listrik sebesar 3.530.198.463 KWh dengan listrik terjual sebanyak 3.335.579.325 KWh. Kebutuhan listrik sangat besar, sehingga perlu ada penambahan daya terpasang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Daya Terpasang (KWh)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
1	Karimun	74.600.	244.543.724.	218.419.826.	306.928.	14.139.229
2	Bintan	35.024.	139.590.168	224.684.294	645.754	9.044.040
3	Natuna	27.175.	58.052.046	52.639.161	127.579	4.809.404
4	Lingga	12.979.	40.076.116	37.240.017	61.291	2.603.535
5	Kepulauan Anambas	11.585.	28.070.832	25.455.656	55.170	1.495.508
6	Batam	686.028.	3.017.106.622	2.460.987.735	23.844.232	114.190.527
7	Tanjungpinang	40.017.	2.758.954.	316.152.636	579.131	19.765.274
	Kepulauan Riau	887.408	3.530.198.463	3.335.579.325	25.620.086	166.047.518

Sumber: BPS Kepri, Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2020

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Jumlah Tindak Pidana

Jumlah tindak pidana menggambarkan jumlah kasus tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu di suatu daerah. Jumlah



tindak pidana menunjukkan penurunan dari sebanyak 5.220 kasus pada tahun 2015 menjadi 3.909 kasus pada tahun 2019. Hal ini perlu mendapatkan perhatian untuk penanganan. Gambaran penyebaran berdasarkan kabupaten/kota dengan perincian sebagai berikut ini.

Tabel 2.72
Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

No	Kepolisian Resort	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Karimun	535	529	382	330	326
2.	Bintan	220	166	144	225	132
3.	Natuna	148	104	90	50	64
4.	Lingga	74	66	70	109	48
5.	Kepulauan Anambas	-	-	21	13	24
6.	Batam	4.270	3.701	2.925	2.602	2.694
7.	Tanjungpinang	685	673	519	396	396
	POLDA Kepulauan Riau	252	235	199	283	225
	Jumlah Total	6.184	5.474	4.350	4.008	3.909

Sumber: BPS Kepri, Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2018

2. Pelayanan Perizinan

Pelayanan Perizinan di Provinsi Kepulauan Riau secara bertahap dipindahkan dari perangkat daerah ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), sebagai suatu kemudahan pelayanan dan keterpaduan pelayanan. Jumlah Izin dan non perizinan yang dilayani sampai dengan tahun 2016 sebanyak 928 jenis perizinan/ non perizinan. Sedangkan jenis izin dan non perizinan yang diterbitkan oleh BPMPTSP hanya sebanyak 107 jenis. Masih terdapat beberapa jenis perizinan yang ditangani oleh PD sektoral. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2019 sebesar 82,34% seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.73
Pelayanan Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Izin dan nonperizinan yang dilayani oleh Pelayanan terpadu satu pintu	izin	450	1.264	1.264	1.264	1.264
2	Jumlah jenis Izin dan non Izin yang diterbitkan BPMPTSP	jenis	104	110	110	110	110
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	%	80	81,25	76,61	77,2	82,34

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

3. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penyerapan tenaga kerja (hingga february 2019) terbesar adalah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar ke bawah sebanyak 293.788 orang (28,27 persen) dan Sekolah Menengah Atas Umum sebanyak 282.694 orang (27,20 persen). Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) menurun dari 353.581 orang (41,12 persen) pada Agustus 2016 menjadi 337.386 orang (37,62 persen) pada Agustus 2017. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) mengalami peningkatan dari sebanyak 140.516 orang (16,34 persen) pada Agustus 2016 meningkat menjadi sebanyak 147.268 orang (16,42 persen) pada Agustus 2017.

Tabel 2.74

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan tahun 2015-2019

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2015	2016	2017	2019 (feb)
1	SD Ke bawah	190.044	219.943	205.942	293.788
2	Sekolah Menengah Pertama	138.202	133.638	131.444	145.025
3	Sekolah Menengah Atas Umum	265.733	229.176	259.131	282.694
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	115.422	136.540	153.146	156.356
5	Perguruan Tinggi	127.269	140.516	147.268	161.269
	Jumlah	836.670	859.813	896.931	1.039.132

Sumber : BPS, berita resmi statistik "Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, Agustus 2017", 2020

b. Rasio ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 diketahui sebesar 47,32 %. Perincian angka ketergantungan terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.75

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk Usia Tidak Produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas)	328846	315451	644297
2	Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	758.216	728.254	1.486.370
3	Jumlah penduduk	28.803	30.183	58.986



No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4	Rasio Ketergantungan	47,17	47,46	47,32

Sumber: BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020).

2.2 Permasalahan Pembangunan

2.2.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (Isu strategis)

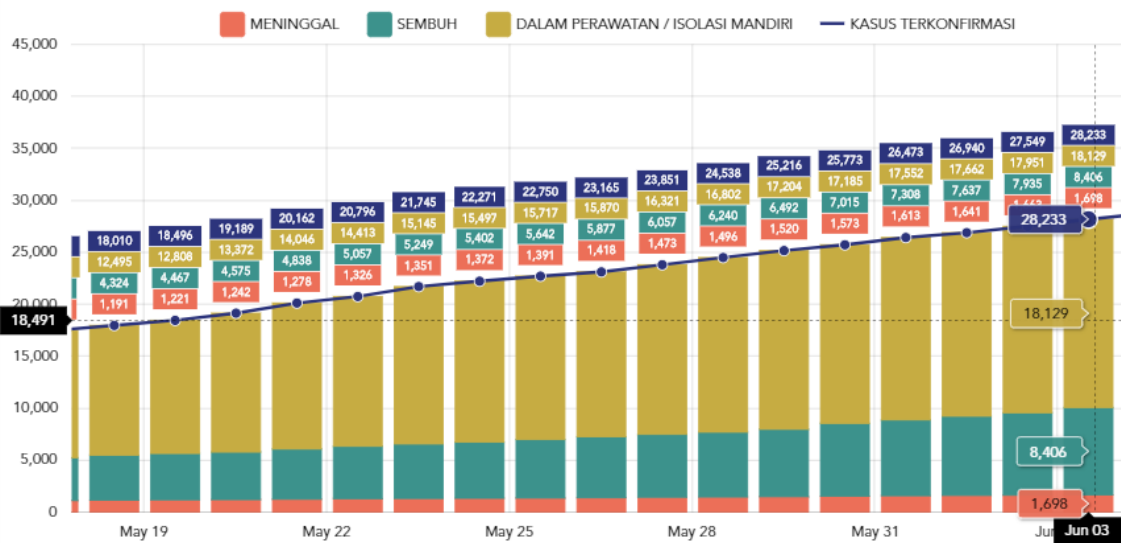
Secara khusus kondisi lingkungan strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan isu strategis Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 adalah terkait Dampak Pandemi Covid-19, secara rinci diuraikan berikut ini.

Corona Virus Disease atau Covid-19 dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia, ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa, ditetapkan menjadi pandemi global pada tahun 2020. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina. Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah (belajar di rumah/*school from home*) dan bekerja dari rumah (*work from home*) kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Sampai dengan tanggal 3 Juni 2020, kasus warga yang terinfeksi Covid-19 nasional cukup besar, jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 28.233 orang, dalam perawatan/isolasi mandiri 18.129 orang, sembuh sebanyak 8.406 orang (29,77%) dan meninggal sebanyak 1.698 orang (6,01%), seperti diperlihatkan oleh grafik berikut ini .



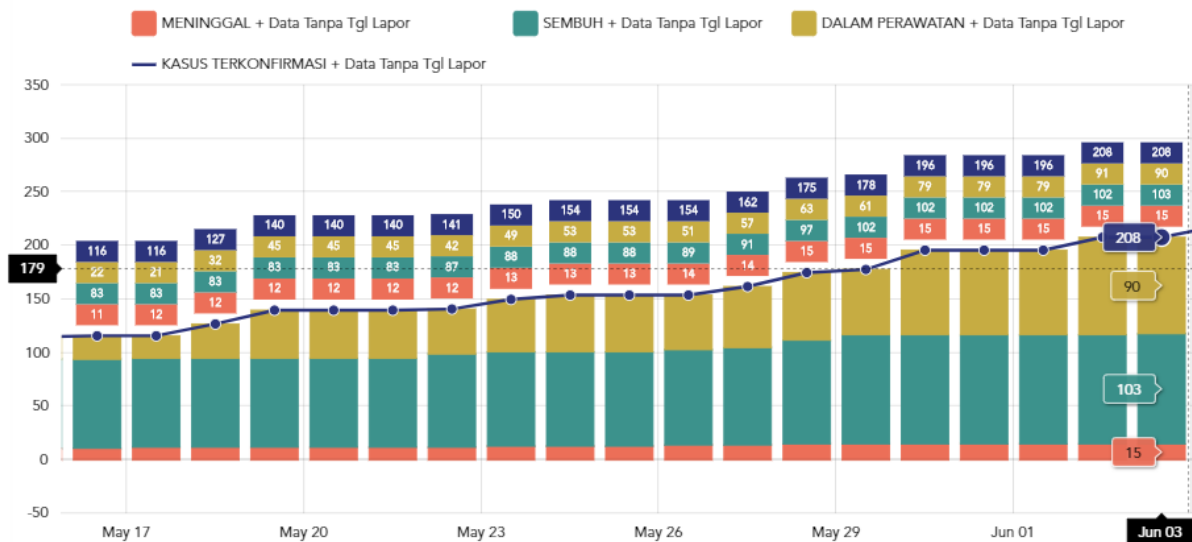
RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



Gambar 2.34 Jumlah Kasus Covid-19 Nasional Tanggal 3 Juni 2020

Sumber : <https://covid19.go.id>, diunduh 4 Juni 2020.

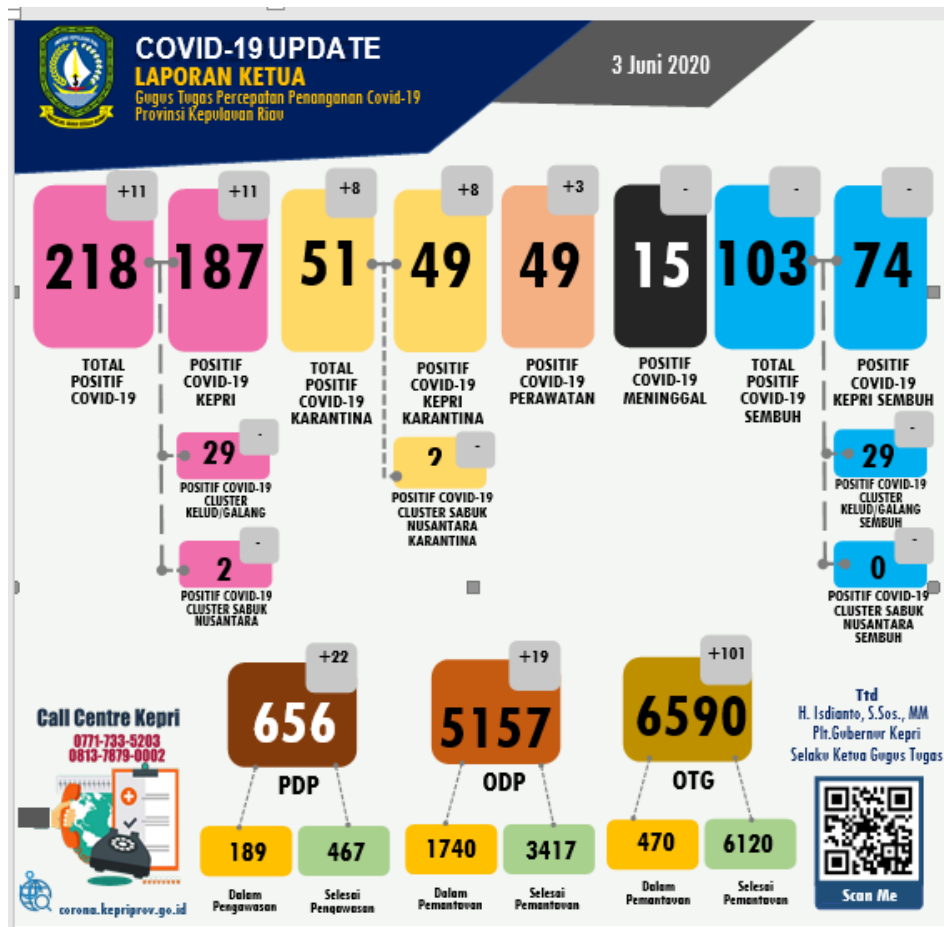
Untuk provinsi Kepulauan Riau, sampai dengan tanggal 3 Juni 2020, jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 208 orang, dalam perawatan/isolasi mandiri 90 orang, sembuh sebanyak 103 orang (49,51%) dan meninggal sebanyak 15 orang (7,21%), seperti diperlihatkan oleh grafik berikut ini .



Gambar 2.35 Grafik Jumlah Kasus Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 3 Juni 2020

Sumber : <https://covid19.go.id>, diunduh 4 Juni 2020.

Perincian jumlah kasus Positif Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.36 Perincian Jumlah Kasus Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 3 Juni 2020

Sumber : <https://covid19.go.id>, diunduh 4 Juni 2020.

Sedangkan data persebaran masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepri, kasus terkonfirmasi Covid 19 terbanyak di Kota Batam sebanyak 150 orang, dan berikutnya di Kota Tanjungpinang 27 orang, untuk Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas dan Lingga tidak ditemukan kasus positif Covid-19.

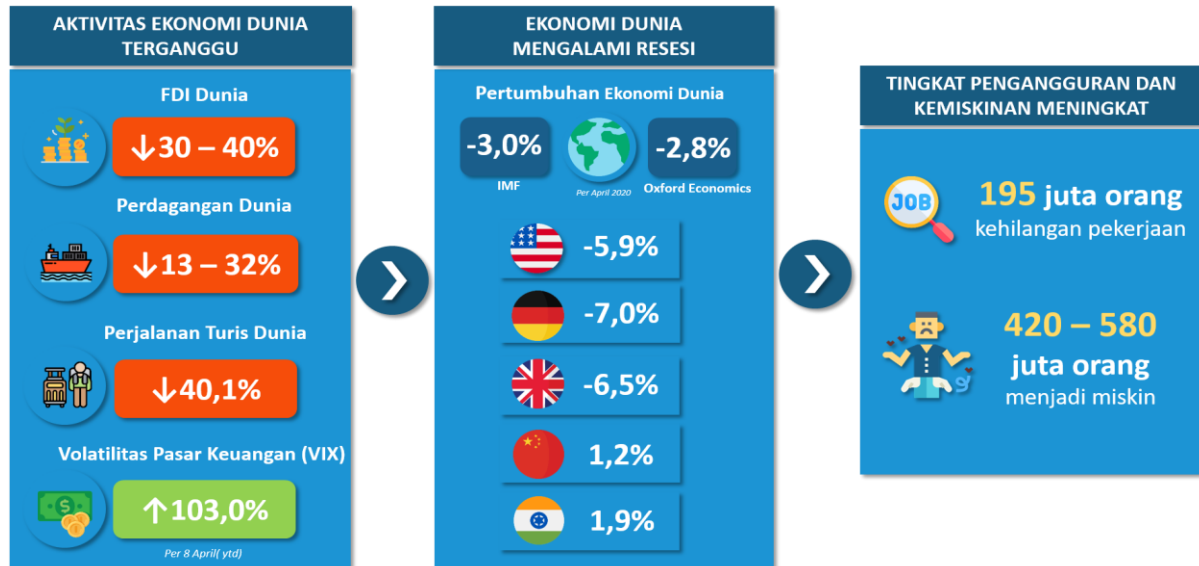


Gambar 2.1 Data Persebaran Covid-19 Masing-Masing-Masing Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepri

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan (Gambar 2.3). Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan

berbentuk huruf V), dampak Covid-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar -0,1 persen.



Gambar 2.2 Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Dunia

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.



Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah Covid-19, Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau setara devisa sebesar US\$3,6-4,0 serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem *online* memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal.

Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat. Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi (World Bank, 2020).

Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kebijakan pengetatan bahkan pelarangan mobilitas warga negara Indonesia (WNI) dari dan ke luar negeri. Berbagai protokol keamanan dilakukan untuk mencegah impor penyakit Covid-19. Upaya ini diambil untuk membendung lonjakan kasus Covid-19 yang pada akhirnya melemahkan sistem pertahanan dan keamanan sebagai dampak dari krisis ekonomi dan sosial. TNI-Polri turut mengawal pelaksanaan berbagai protokol keamanan serta menyiapkan fasilitas kesehatan di kawasan isolasi bagi WNI yang datang dari luar negeri.

Covid-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk ekspor, karena keterbatasan pasokan. Pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara maupun pelaku pasar untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan

pascapandemi Covid-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipatif agar dapat lebih berdaya tahan (*resilience*) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang. Pascapandemi Covid- 19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (*new normal*), dimana proses transformasi diperkirakan akan terjadi di empat area.

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. *Tele-medicine* dan *e-commerce* merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pascapandemi Covid-19. Ilustrasi transformasi struktural ekonomi dan digital seperti Gambar 2.4 berikut.



Gambar 2.3 Gambar Ilustrasi Transformasi Struktural Ekonomi dan Digital

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, *mall-online*, konsultasi dokter *online*, dan pertemuan/pembelajaran *online*.

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (*digital supply network*), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui *platform* digital Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi 4.0, seperti *Artificial Intelligence*, *Internet of Things*, *Cloud Computing*, *3D Printing*, dan *Robotics*.

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (*inward-looking policies*) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya. Sementara itu, paradigma pembangunan negara- negara



utara-selatan pun akan mengalami pergeseran, sebagai implikasi kebijakan Amerika yang menghentikan bantuannya untuk WHO, sementara China berperan aktif membantu WHO dan negara-negara lain yang membutuhkan dalam penanganan Covid-19.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan dapat melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah pusat telah mengambil respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19, yang perlu diikuti oleh daerah, kebijakan mitigasi dampak tersebut dapat dibagi menjadi empat tahap:

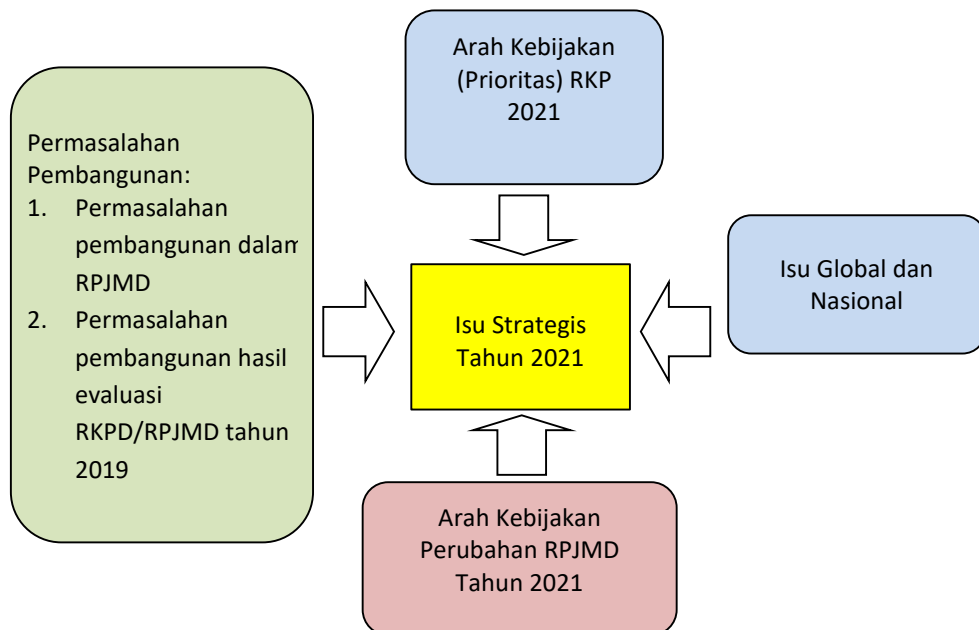
1. Memperkuat sektor kesehatan
2. Melindungi masyarakat dan dunia usaha
3. Mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan
4. Pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi Covid-19.

Tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Dalam Perpu ini, pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang sebelumnya di bawah 3,0 persen PDB, untuk dapat meningkatkan alokasi kesehatan, memberikan stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan mencegah dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif. Selain stimulus fiskal, langkah-langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi tekanan di sektor keuangan dan meringankan beban dunia usaha di antaranya melalui restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran bunga.

Untuk mewujudkan tahap keempat berjalan efektif maka arah kebijakan pembangunan dalam RKP 2021 difokuskan untuk (1) pemulihan industri pariwisata dan investasi, (2) reformasi sistem kesehatan nasional, (3) reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan (4) reformasi sistem ketahanan bencana.

Perumusan isu strategis tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik yang bersumber dari tiga (3) aspek penting, yaitu: (1) Hasil Evaluasi capaian indikator RPJMD tahun 2019, (2) rumusan isu strategis berdasarkan hasil Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-

2021, dan isu global dan nasional. Secara skematik dikemukakan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.4 Skema Perumusan Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021

Hasil perumusan isu strategis dalam pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Perumusan Isu Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Prioritas RKPD Tahun 2021	Prioritas RPJMD Tahun 2021	Isu Global dan Nasional	Isu Strategis Provinsi Kepri Tahun 2021
4. Refolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu		Belum Optimalnya Pelestarian Budaya Melayu
1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 3. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat	- Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital - SDGs - Pandemi covid-19	- Kualitas Pembangunan Manusia Belum Optimal - Kesetaraan dan Keadilan Gender Masih Rendah - Pengangguran Cukup Tinggi - Kemiskinan Perlu Terus Diturunkan



Prioritas RKPD Tahun 2021	Prioritas RPJMD Tahun 2021	Isu Global dan Nasional	Isu Strategis Provinsi Kepri Tahun 2021
			• Kesenjangan Antar Kelompok Pendapatan • Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi
5. Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas	• SDGs • Zero waste to energi • Ketahanan Bencana dan Iklim • Keterbatasan daya tampung dan daya dukung lingkungan	• Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai • Konektivitas Antar Pulau dan Antar Kabupaten/Kota • Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Ancaman Bencana • Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal
7. Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan	• Reformasi birokrasi • Big Data • SDGs	• Kapasitas Fiskal Daerah yang Terbatas dan Tata kelola pemerintahan belum optimal

2.2.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan penyajiannya dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan. Perumusan permasalahan dilakukan dengan mendasarkan pada data hasil evaluasi RKPD tahun 2019.

2.2.2.1 Urusan Pemerintahan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk menempuh pendidikan menengah. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya APM SMA/MA/SMK pada tahun 2019, APM SMA/MA/SMK baru mencapai sebesar 77,30%.



- b. Masih terdapatnya ruang kelas SMA/SMK/MA dalam kondisi rusak. Hal ini ditunjukkan dengan persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK dalam kondisi baik baru mencapai sebesar 95,84% dan kurang baik/rusak sebesar 4,16%, hal ini belum mencapai target tahun 2019.
- c. Masih terbatasnya SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B, hanya 62,5% yang sudah terakreditasi minimal B.
- d. Relatif rendahnya rata-rata Nilai UN untuk jenjang SLTA, capaian tahun 2019 baru sebesar 52,31 hal ini perlu mendapatkan perhatian.
- e. Adanya permasalahan lahan dalam pengusulan kegiatan yang tidak diikuti dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi.

2) Kesehatan

- a. Masih rendahnya bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, pada tahun 2019 masih terdapat 12,1% yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
- b. Persentase Puskesmas minimal dengan 5 jenis tenaga kesehatan masih terbatas, hanya 77% dari total keseluruhan puskesmas.
- c. Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi serta balita.
- d. Pandemi Covid-19 yang memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan bidang kesehatan dan memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian dan sosial masyarakat.

3) Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

- a. Masih kurangnya penyediaan air baku untuk penambahan debit air, realisasi pada tahun 2019 hanya sebesar 70,77%
- b. Belum adanya program perbaikan jembatan, sebanyak 19,89% jembatan masih dalam kondisi rusak
- c. Belum adanya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda, karena lamanya proses penetapan perda RTR KSP;

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih luasnya kawasan kumuh di perkotaan yang harus segera ditangani yaitu sedang yang baru tertangani baru sebesar 529,82 Ha;
- b. Terbatasnya ketersediaan dan pasokan air bersih bagi masyarakat, masih terdapat 7,85% masyarakat yang belum dapat mengakses air bersih/minum yang aman;
- c. Belum optimalnya pelayanan sanitasi.
- d. Belum tertatanya Bangunan dan Lingkungan di kawasan strategis Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota.



5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

- a. Masih terbatasnya jumlah PPNS yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dimana tahun 2019 baru ada sebanyak 23 orang dari 36 orang yang ditargetkan;
- b. Masih tingginya kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan juga Peraturan Gubernur. Tahun 2019 masih terjadi 235 kasus pelanggaran, masih di atas target yang ditetapkan yakni 200 kasus;
- c. Masih terbatasnya personil Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam bidang pengendalian dan kenyamanan lingkungan. Tahun 2019 baru 43% dari total personil Satlinmas yang memiliki kompetensi tersebut;
- d. Masih adanya kabupaten/kota yang belum memiliki peta rawan kebakaran. Dari total 7 kabupaten/kota yang ada, baru 42,85% atau 4 kabupaten/kota yang telah memiliki peta rawan kebakaran;
- e. Masih sedikitnya desa/kelurahan yang terbentuk menjadi desa/kelurahan tangguh bencana, sampai tahun 2019 baru sebesar 3,61% dari total desa/kelurahan yang telah menjadi desa/kelurahan tangguh bencana.

6) Sosial

- a. Masih rendahnya keluarga miskin yang mendapatkan bantuan, baik melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun bantuan sosial lainnya. Tahun 2019 hanya 0,81% dan 38,09%.

2.2.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga kerja

- a. Masih rendahnya calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2019 hanya 40% saja;
- b. Masih minimnya calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, hanya 40,53% di tahun 2019;
- c. Masih rendahnya lulusan BLK yang diterima kerja;
- d. Belum optimalnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
- e. Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), belum mencapai target tahun 2018, dengan sumbangan pengangguran didominasi oleh Lulusan SMK.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a. Belum optimalnya PUG dalam perencanaan dan penggaran daerah. Dapat dilihat dari persentase anggaran responsif gender dibandingkan dengan belanja daerah yang baru mencapai 11,24%.
- b. Masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, yakni kekerasan terhadap perempuan sebesar menjadi 30,52 kasus per 100.000 perempuan. Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak, sebanyak 3,8 kasus per 10.000 anak.
- c. Rendahnya Persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill, tahun 2019 hanya 1%.



3) Pangan

- a. Kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan belum memadai;
- b. Masih rendahnya ketersediaan pangan di Kepulauan Riau, terlihat dari ketersediaan Beras sebagai komoditas utama yang masih tergantung dari daerah lain;
- c. Masih rendahnya Kualitas konsumsi pangan, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat;
- d. Masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan buah;
- e. Masih terbatasnya Pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu. Diharapkan Kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan secara terstruktur dan komprehensif guna mendorong percepatan diversifikasi pangan.

4) Pertanian

- a. Rendahnya fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota;
- b. Belum optimalnya pengadaan dan sertifikat tanah.

5) Lingkungan hidup

- a. Masih rendahnya ndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), capainnya masih 66,5;
- b. Rendahnya pelaku usaha / industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar, pada tahun 2019 hanya 20,60% saja yang memiliki;
- c. Belum semua waduk memenuhi standart kualitas air sesuai baku mutu, masih terdapat 18,18% waduk yang belum memenuhi standar kualitas air sesuai baku mutu;
- d. Belum semua kab/kota memenuhi standart nominasi adipura, capaian tahun 2019 baru 85,71%

6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- a. Terbatasnya kewenangan dan komunikasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi disebabkan oleh ketimpangan SOTK.
- b. Terbatasnya anggaran APBD dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya partisipasi kader LKMD dalam mengikuti Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel.
- b. Pembentukan BUM Desa masih didominasi intervensi dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.



- c. Belum Optimalnya kemampuan Kepala Desa dan Pengurus BUM Desa dalam mendayagunakan potensi desa.
- d. Masih Lemahnya dukungan lintas program/lintas sektor dalam mendukung pengembangan BUM Desa.
- e. Lemahnya kualitas SDM di Desa.
- f. Belum Optimalnya Pembinaan PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap Posyantek.
- g. Belum optimalnya pembinaan, penguatan kapasitas kelembagaan, konsolidasi data kelembagaan ke kabupaten, dilihat dari adanya kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang belum memiliki Perdes tentang kelembagaan.
- h. Kurangnya dukungan dana APBD.
- i. Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan TTG dan penyebarluasan informasi TTG, serta dalam penggunaan TTG yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya fasilitasi pembentukan kampung KB. Tahun 2019 baru 1 kampung KB yang terfasilitasi.
- b. Masih rendahnya cakupan masyarakat yang memakai kontrasepsi untuk menunjang program KB. Tahun 2019 baru 78,60%.

9) Perhubungan

- a. Masih terbatasnya ketersediaan pelabuhan penyebrangan (roro) pada tahun 2019 baru sebesar 71,43%;
- b. Masih terbatasnya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tahun 2019 baru sebesar 75%;
- c. Masih terbatasnya Prasarana lalu lintas, pada tahun 2019 baru tersedia 9,67%;
- d. Terbatasnya prasarana sisi darat perhubungan udara;
- e. Rendahnya ketersediaan Kapal Angkutan Laut pada tahun 2019 hanya sebesar 55,56%;
- f. Masih Terbatasnya ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis yang baru tersedia 55,56% di tahun 2019.

10) Komunikasi dan Informatika

- a. Belum diumumkannya peraturan dan rancangan peraturan yang terkait dengan keterbukaan informasi public maupun peraturan yang dihasilkan oleh badan public, guna peningkatan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan public, misalnya perda/pergub tentang keterbukaan informasi public.
- b. Belum semuanya informasi berkala dan informasi terbuka diumumkan pada website PPID provinsi kepri seperti Rencana kerja dan anggaran badan publik tahun 2019, kalender kegiatan yang berisi rencana



pelaksanaan program kerja tahun 2019 dan ringkasan informasi public yang berisi alasan penolakan permohonan informasi publik, LHKPN, LAKIP 2018 Provinsi kepri, laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2018

- c. Masih banyaknya OPD melakukan hosting di luar
- d. Belum adanya regulasi yang mengatur tata kelola domain dan sub domain Pemerintah Provinsi Kepri
- e. Kurangnya SDM di bidang programmer dan ilmu komputer

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Masih terbatasnya koperasi aktif di Provinsi Kepulauan Riau, dilihat pada tahun 2019 koperasi aktif hanya 39,93%.
- b. Kualitas sumber daya pengurus koperasi kurang dan kurangnya pengawas koperasi yang dapat memeriksa, menilai dan membina koperasi.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian KSP/USP sehat, dikarenakan keterbatasan anggaran.
- d. Masih minimnya Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi.
- e. Masih rendahnya UKM yang mengakses modal dari perbankan dan kelompok UKM terbina.
- f. Terbatasnya klaster UKM yang telah dibina dan difasilitasi pengembangannya.

12) Penanaman modal

- a. Masih rendahnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP), capaiannya baru 82,34% di tahun 2019;
- b. Belum optimalnya pengawasan aparat dan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM) dari kalangan pelaku usaha;
- c. Belum optimalnya promosi dan pameran pengembangan penanaman modal yang dilakukan;
- d. Masih kurangnya sarana dan prasana pendukung pelayanan perizinan melalui pelayanan PTSP;
- e. Masih terdapat kekurangan dalam memberikan pelayanan terhadap perizinan dan non perizinan, baik itu SDM maupun Sarana dan Prasarana pelayanan.

13) Kepemudaan dan olah raga

- a. Kurangnya kemampuan pemuda dalam pengembangan kewirausahaan;
- b. Kurangnya prestasi pemuda dan olahraga tingkat nasional/internasional;
- c. Terbatasnya SDM pelatih secara kuantitas dan kualitas untuk menyiapkan bibit unggul penyumbang prestasi keolahragaan;



- d. Rendahnya budaya berolahraga pada masyarakat secara umum;
- e. Masih rendahnya jumlah kader pemuda anti narkoba.

14) Statistik

- a. Data Sektoral Provinsi pada masing-masing OPD masih terbatas serta sering terjadi perbedaan data BPS dengan OPD
- b. Belum optimalnya pelaksanaan forum data serta Kurangnya SDM yang menguasai ilmu statistik.
- c. Keanggotaan belum mencakup seluruh OPD dan tidak permanen
- d. Konsistensi data statistik lintas sektor, pelaksanaan survey yang tumpang tindih dan penyebaran SDM yang tidak memadai
- e. Kurangnya koordinasi yang baik antara OPD, BPS tingkat provinsi dan kab/kota, LSM, dan perguruan tinggi dengan dinas kominfo provinsi kepri
- f. Data-data statistik yang disajikan melalui kerjasama dengan BPS merupakan data tahun sebelumnya (baru tersaji pada bulan Juli-agustus) sehingga belum bisa melihat data kondisi terkini.

15) Persandian

- a. Masih kurangnya SDM yang memahami tentang persandian;
- b. Belum optimalnya pegawai di lingkungan Pemerintah provinsi Kepulauan Riau yang memanfaatkan email Aksara yang sudah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi.

16) Kebudayaan

- a. Belum optimalnya bangunan berciri khas melayu, terlihat dari capaian indikator Persentase warisan budaya tangible yang lestari sampai dengan tahun 2019 masih sebesar 14,32%.
- b. Belum oprimalnya warisan budaya tangible yang lestari, di tahun 2019 capaiannya baru 22,03%.

17) Perpustakaan

- a. Peningkatan Bahan pustaka pada tahun 2019 hanya sebesar 52,96%.
- b. Kurangnya minat baca dan promosi perpustakaan bagi masyarakat secara umum.
- c. IKM pelayanan perpustakaan yang baru mencapai nilai 84,60 pada tahun 2019.

18) Kearsipan

- a. Belum semua perangkat daerah provinsi dan BUMD provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku, tahun 2019 baru 85,11%.
- b. Belum optimalnya pemeliharaan arsip dinamis dan statis.



2.2.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

- a. Menurunnya produksi perikanan budidaya dari tahun ke tahun;
- b. Belum tersedianya SDM dalam unit organisasi pengelola pada 3 kawasan konservasi yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai level 3 (kawasan konservasi dikelola minimum)
- c. Ranperda dan Dokumen Final RZWP3K telah disampaikan ke DPRD Prov. Kepri- Ranperda dan Dokumen Final RZWP3K telah disampaikan ke DPRD Prov. Kepri. Saat ini sedang menunggu Proses Pembahasan di DPRD.

2) Pariwisata

- a. Belum dimilikinya Grand Desain Pengembangan Pariwisata Provinsi Kepri.
- b. Kunjungan wisatawan asing dan wisatawan nusantara terpusat di Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun serta kurangnya promosi dan pemasaran potensi wisata di Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas. Hal ini dilihat dari rata-rata lama tinggal wisatawan pada tahun 2019 hanya 1,96 hari
- c. Belum tercapainya target kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi Kepri, disebabkan pelaku usaha pariwisata, kemitraan pelaku usaha, perhotelah, travel biro dan restoran belum optimal. Hal ini terlihat dari capaian indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB sampai dengan tahun 2018 baru sebesar 2,32%
- d. Belum optimalnya pengembangan Wisata Bahari andalan Provinsi Kepulauan Riau, paket wisata dan pembinaan pemangku kepentingan pariwisata.
- e. Budaya sadar pariwisata belum melekat pada sikap dan perilaku masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
- f. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata bahari untuk menunjang daya tarik wisata di Provinsi Kepulauan Riau.
- g. Belum optimalnya kunjungan wisatawan di hari-hari kerja/ weekdays dibandingkan dengan padatnya kunjungan wisman Singapura dan Malaysia di akhir pekan.
- h. Rendahnya kompetensi SDM pariwisata bahari dalam manajemen dan pengelolaan obyek wisata dan kerjasama antar pelaku usaha wisata.
- i. Masih kurangnya objek-objek wisata baru di Kepulauan Riau dan jadwal kepastian penyelenggaraan even yang masih sering berubah .

3) Pertanian

- a. Belum optimalnya produksi bibit bersertifikasi untuk pemenuhan kebutuhan bibit di Provinsi Kepulauan Riau, hal ini terlihat dari capaian indikator Jumlah Produksi Padi (ton) masih rendah yaitu 1.167 ton pada tahun 2019.



- b. Tingginya resiko Kepulauan Riau terkena virus/penyakit tanaman akibat dari banyaknya bibit/benih atau produk pertanian yang masuk Kepulauan Riau dari luar negeri.
- c. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung transportasi produk-produk pertanian
- d. Banyaknya tanaman tua, sehingga produksi dan produktivitas mengalami penurunan;
- e. Tidak adanya peremajaan tanaman, baik secara swadaya masyarakat maupun dukungan anggaran dari pemerintah (APBD/APBN);
- f. Terjadinya peningkatan kejadian kasus penyakit helminthiasis (cacingan) dilapangan, terbatasnya ketersediaan obat-obatan hewan untuk melakukan pengobatan terhadap ternak yang sakit;
- g. Rendahnya NTP Sektor Perkebunan yang hanya mencapai 77,17, karena tingginya indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi.

4) Kehutanan

- a. Penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditinklanjuti masih sangat rendah, dilihat dari capainnya pada tahun 2019 hanya 85% saja yang ditangani.
- b. Masih banyaknya lahan kritis yang belum terehabilitasi, hanya 400 Ha lahan kritis yang telah terehabilitasi.

5) Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Belum semua desa/ kelurahan di Provinsi Kepri berlistrik, baru sekitar 89,9% desa/ kelurahan yang berlistrik pada tahun 2019.
- b. Terjadinya kerusakan lahan akibat pertambangan bauksit.

6) Perdagangan

- a. Rendahnya jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- b. Menurunnya nilai ekspor non migas Kepulauan Riau yang dapat diterima pasar internasional.
- c. Belum optimalnya peran sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.
- d. Belum optimalnya pengawasan terhadap pasar tradisional yang dapat berakibat pada inflasi dan tidak terlindunginya konsumen.
- e. Masih banyaknya pasar yang belum memenuhi standar.

7) Perindustrian

- a. Terbatasnya jumlah industry besar, pada tahun 2019 hanya sebanyak 554 unit.
- b. Kurangnya kemampuan teknologi produksi, manajerial dan pemasaran produk industri kecil dan menengah.



- c. Belum optimalnya pengembangan kawasan industri dan sarana prasarana pendukung diseluruh kabupaten/kota kecuali Batam.
- d. Lemahnya sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengelola (BP) Batam dalam pengelolaan sektor industri.
- e. Kurang memadainya infrastruktur yang menunjang berkembangnya industri.

8) Transmigrasi

- a. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai instansi pembina dalam hal ketransmigrasian.

2.2.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

- a. Belum 100% keselarasan program Renja PD dengan Renstra PD (hanya 85); demikian juga program RKPD dengan RPJMD dan Renstra PD dengan RPJMD.
- b. Masih rendahnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang, hanya 33% saja.
- c. Masih belum lengkapnya ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi; dokumen perencanaan sosial budaya; dokumen perencanaan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup; dan dokumen perencanaan pemerintahan.
- d. Masih rendahnya kerjasama yang telah diimplementasikan.
- e. Masih belum optimalnya informasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

2) Penelitian dan Pengembangan

- a. Hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder belum mampu dimanfaatkan secara keseluruhan oleh stakeholder, hanya 55% saja yang dimanfaatkan.
- b. Masih rendahnya inisiatif inovasi yang menjadi inovasi daerah, tercatat pada tahun 2019 hanya 5% saja.
- c. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan untuk menunjang pembangunan daerah.
- d. Belum terimplementasikannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan.

3) Keuangan

- a. Masih rendahnya asset Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan bukti legalitisa kepemilikan baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
- b. Masih minimnya pengamanan asset Pemerintah Daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
- c. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan teknologi inovasi Samsat. Hal ini dilihat dari persentase wajib pajak



yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi Samsat hanya 8% saja, sedangkan 92% lainnya masih menggunakan pelayanan manual.

- d. Belum optimalnya intensifikasi pemungutan pendapatan asli daerah, sehingga diperlukan upaya sinergis untuk peningkatan PAD.
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Belum optimalnya pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi (TI).
- g. Masih rendahnya penerimaan retribusi daerah dibandingkan potensinya.
- h. Belum optimalnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual.

4) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- a. Kurangnya pemenuhan ASN sesuai kebutuhan, hal tersebut dilihat dari masih rendahnya persentase ketersediaan ASN sesuai kebutuhan yang realisasinya sebesar 58,02%.
- b. Masih rendahnya ASN yang memiliki penilaian kinerja baik.
- c. Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi yang masih rendah, sehingga perlu adanya peningkatan pengembangan kompetensi ASN.
- d. Belum adanya inovasi sistem kepegawaian daerah untuk mewujudkan transparansi dan pengawasan ASN daerah.

5) Sekretariat DPRD

- a. Masih rendahnya Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dilihat dari skornya yang masih 66.
- b. Masih rendahnya realisasi jumlah reses Anggota DPRD yang difasilitasi.
- c. Perlunya ada peningkatan kerjasama Media Massa dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan publikasi dan komunikasi
- d. Perlunya adanya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyelarasan atau penataan peraturan perundang-undangan.
- e. Belum optimalnya pelayanan untuk menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

6) Sekretariat Daerah

- a. Masih sedikitnya pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan peraturan produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan kesusilaan. Hal tersebut dilihat dari capaian pada tahun 2018 hanya sebesar 6 produk hukum.
- b. Masih rendahnya realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBD. Pada tahun 2019 realisasi fisiknya hanya 97,04%.



- c. Masih sedikitnya Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah.
- d. Masih rendahnya ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari realisasinya hanya 75,39% saja.
- e. Masih rendahnya skor Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah.
- f. Masih rendahnya rata-rata tingkat kesehatan BUMD, dilihat tahun 2018 skor yang dicapai hanya 33,33 skor.
- g. Masih rendahnya Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya, pada tahun 2019 capaiannya baru 72%
- h. Masih rendahnya Nilai reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2019 nilai yang diperoleh baru sebesar 65,83.
- i. Rendahnya anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Provinsi dan Nasional dimana pada tahun 2019 belum memiliki capaian

7) Pengawasan

- a. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas organisasi inspektorat;
- c. Belum optimalnya pengawasan kebijakan Kepala Daerah;
- d. Belum optimalnya sistem pengawasan internal dalam upaya pencegahan penyimpangan pada pengelolaan pemerintahan daerah.



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan daerah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi makro nasional, dan perkembangan kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau.

3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan tetap melanjutkan momentum perbaikan. Namun demikian, risiko ketidakpastian ekonomi global masih diperkirakan menjadi tantangan bagi kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan. Peningkatan efisiensi dari negara berkembang lainnya juga memberikan tantangan bagi kinerja perdagangan internasional sehingga menuntut peningkatan produktivitas domestik. Pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi landasan pembangunan ekonomi sehingga mampu menopang dan mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor strategis dan produktif, seperti investasi dan ekspor serta didukung oleh konsumsi masyarakat yang terjaga.

Arah kebijakan pembangunan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik seperti perbaikan kualitas infrastruktur, namun juga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM sehingga dapat meningkatkan iklim investasi dan teknologi yang nantinya mampu meningkatkan produktivitas. Peningkatan aktivitas ekonomi di sisi penawaran melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan mendukung kinerja ekonomi dari sisi pengeluaran sehingga konsumsi masyarakat juga akan mengalami perbaikan dan memberikan prospek ekonomi yang tinggi bagi pelaku usaha. Dengan mempertimbangkan potensi dan risiko tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 diperkirakan dalam kisaran 5,3-5,7 persen

b. Inflasi

Dalam jangka menengah, laju inflasi akan terus diupayakan berada dalam tren menurun dan rendah dalam rangka mendukung pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi pencapaian tersebut dilakukan sesuai dengan koridor inflation targeting framework agar dapat



menjaga ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang relatif rendah. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil guna menjaga inflasi tetap berada dalam rentang sasaran. Peningkatan koordinasi dan sinergi kebijakan akan dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah melalui kerangka Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Penguatan partisipasi aktif Pemerintah Daerah juga akan terus didorong melalui inovasi program-program pengendalian inflasi dengan memperhatikan karakteristik permasalahan inflasi di masing-masing daerah. Strategi pengendalian inflasi akan tetap berfokus pada kebijakan utama 4K, yaitu menciptakan Keterjangkauan Harga, menjamin Ketersediaan Pasokan, memastikan Kelancaran Distribusi, dan melakukan Komunikasi Efektif dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut, Pemerintah memperkirakan laju inflasi pada tahun 2021 dapat terkendali pada kisaran 2,0 – 4,0 persen.

c. Suku Bunga SPN 3 Bulan

Pasar keuangan global sangat fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, terutama disebabkan oleh kebijakan moneter di negara maju dan selanjutnya berdampak pada pasar keuangan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Melihat kecenderungan berubahnya arah normalisasi kebijakan moneter yang akan dilakukan AS ke depan, tekanan terhadap pasar keuangan domestik, termasuk pasar surat berharga negara, diperkirakan akan sedikit melonggar.

Dari sisi domestik, beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan antara lain yaitu stabilitas perekonomian nasional yang akan tetap terjaga dengan baik dengan laju inflasi yang cukup rendah dan terkendali serta nilai tukar yang relatif stabil. Laju inflasi yang terkendali memberikan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial semakin besar. Di sisi lain, kondisi fiskal yang sehat dan disiplin fiskal yang terus dijalankan Pemerintah akan memperkuat fundamental perekonomian domestik agar semakin kondusif, sehingga diharapkan mampu menjaga permintaan terhadap surat berharga negara, termasuk SPN 3 bulan. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2021 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 4,5-5,5 persen.

d. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam jangka menengah dipengaruhi oleh faktor fundamental permintaan dan penawaran di pasar keuangan dan faktor nonfundamental seperti sentimen dan

psikologis pasar. Penawaran valuta asing dalam jangka menengah bersumber antara lain dari pendapatan valuta asing dari kegiatan ekspor, arus modal masuk (baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun portofolio), dan pihak-pihak yang memiliki tagihan akan pinjaman dalam bentuk valuta asing. Sementara dari sisi permintaan, kebutuhan impor barang-barang modal dan input kegiatan produksi (antara lain mesin-mesin dan bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri), serta pembayaran utang dalam denominasi valuta asing, akan menentukan besarnya permintaan akan valuta asing terutama dolar AS. Perekonomian global yang bergerak stabil pada tingkat yang rendah, masih tingginya arus modal masuk ke negara berkembang, serta pasar keuangan global yang relatif stabil turut mempengaruhi stabilitas perekonomian domestik. Kondisi tersebut menggambarkan rendahnya risiko tekanan gejolak eksternal, khususnya pada nilai tukar. Perubahan arah kebijakan moneter Amerika Serikat juga berpotensi mengurangi tekanan pada nilai tukar Rupiah. Dengan iklim investasi yang membaik, perekonomian domestik diharapkan dapat terus tumbuh. Pertumbuhan ekonomi domestik berimplikasi pada masih tingginya kebutuhan barang modal dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan aktivitas pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi serta potensi peningkatan konsumsi domestik, termasuk terhadap barang-barang impor. Hal tersebut diperkirakan menjadi salah satu faktor utama yang akan mendorong permintaan valas. Kehati-hatian pembiayaan APBN melalui pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing dari Pemerintah, semakin meluasnya penerapan skema hedging untuk pinjaman valuta asing oleh BUMN dan sektor swasta, dan ketersediaan cadangan devisa yang memadai akan mengurangi risiko tekanan nilai tukar yang berlebihan.

Pemerintah juga akan menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah agar dapat memperkuat daya saing produk dalam negeri, khususnya ekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi yang akan memberikan dampak positif bagi ketersediaan valas di dalam negeri. Dengan fundamental perekonomian yang kuat, kondisi fiskal yang sehat dan iklim investasi yang semakin kondusif diharapkan mampu menciptakan insentif bagi arus modal masuk, baik dalam bentuk penanaman modal asing jangka panjang maupun arus modal dalam bentuk portofolio. Di sisi sektor keuangan, upaya pendalaman pasar keuangan diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperluas sumber pendanaan bagi kegiatan sektor riil dan investasi yang dibutuhkan. Perbaikan-perbaikan ini pada gilirannya akan mendorong perbaikan efisiensi ekonomi dan mendorong semakin tingginya kapasitas produksi nasional. Dengan melihat berbagai potensi global dan perkembangan fundamental



perekonomian domestik, nilai tukar Rupiah pada tahun 2021 diperkirakan akan bergerak di kisaran Rp13.600-15.000 per dolar AS.

e. Harga Minyak Mentah Indonesia

Mengikuti perkembangan harga minyak dunia yang dipengaruhi oleh faktor permintaan-penawaran dan nonfundamental seperti geopolitik, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan bergerak pada kisaran US\$60- 70 per barel. Beberapa faktor yang cukup mempengaruhi pergerakan minyak jangka menengah adalah perkembangan perekonomian global yang diperkirakan mengalami pemulihan dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini diperkirakan turut mendorong peningkatan permintaan minyak mentah dunia. Sementara itu, kebijakan OPEC dalam pemangkasan produksi akan menekan jumlah pasokan. Beberapa faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pergerakan harga adalah faktor geopolitik di daerah Timur Tengah dan beberapa negara produsen minyak di Afrika. Di sisi lain, tren peningkatan pasokan minyak mentah, terutama dari negara Non-OPEC akan menahan terjadinya kenaikan harga. Naiknya tren penggunaan energi alternatif juga akan berdampak pada penurunan permintaan minyak yang juga dapat menahan kenaikan harga. Mempertimbangkan kondisi tersebut, harga minyak mentah dunia, untuk jenis Brent diperkirakan bergerak pada kisaran US\$65-75 per barel sehingga pada tahun 2021 ICP diperkirakan berada pada kisaran US\$60-70 per barel.

f. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Produksi dan lifting minyak bumi dalam jangka menengah diperkirakan masih akan menghadapi tren penurunan, pada tahun 2021 Lifting Minyak Mentah diperkirakan berada pada rentang 627-699 ribu barel per hari. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan menurunnya produksi minyak bumi, diantaranya kondisi sumur produksi minyak bumi yang sebesar 72 persen sudah berproduksi lebih dari 30 tahun sehingga secara alamiah mempengaruhi penurunan produksi minyak bumi, sementara penemuan cadangan migas baru yang mampu berproduksi lebih banyak menghasilkan gas alam, sedangkan penambahan produksi minyak dan kondensat relatif sedikit. Di sisi lain, produksi dan lifting gas bumi sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan hingga pada kisaran 1.116-1.195 ribu barel setara minyak per hari.

Untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, Pemerintah terus berupaya mendorong investasi untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan teknologi produksi secara berkelanjutan. Usaha dalam melakukan eksplorasi secara masif dilakukan untuk mengidentifikasi area eksplorasi dengan potensi cadangan migas

yang besar (*giant field*). Sejalan dengan kegiatan eksplorasi yang masif, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi guna mampu menarik minat investor, termasuk memperbaiki payung hukum regulasi di sektor tersebut. Selain itu, peran institusi seperti Indonesia Oil and Gas Institute (IOGI) ke depannya akan dioptimalkan sebagai sumber data penemuan *giant field* dan informasi untuk investor.

Asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2021

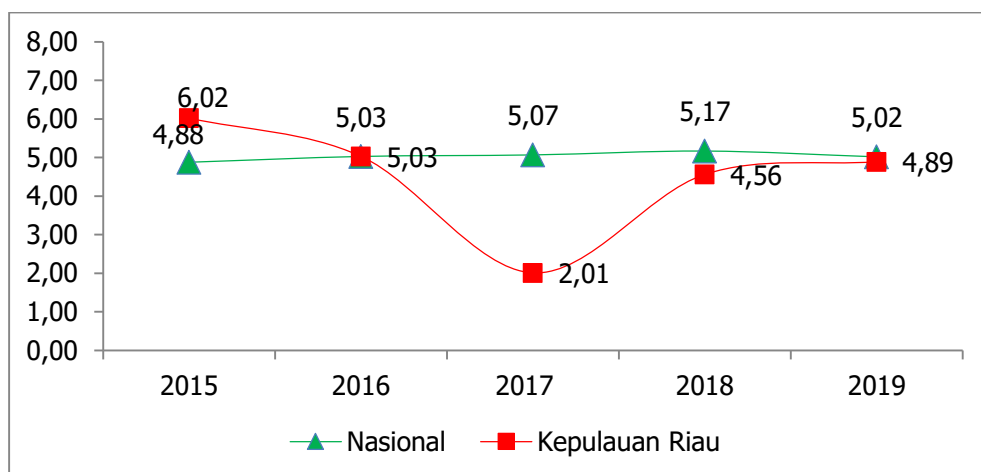
No	Indikator	Proyeksi Tahun 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,3-5,7
2	Inflasi (%yoy)	2,0-4,0
3	Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	4,4-5,4
4	Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.600-15.000
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	60-70
6	Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	627-699
7	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.116-1.195

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

1. Perkembangan Kondisi Perekonomian Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 2,01%. kemudian pada tahun 2018 perekonomian Provinsi Kepulauan Riau mulai menunjukkan peningkatan mencapai sebesar 4,56%, dan pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi sebesar 4,89%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BRS "Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan IV-2019", BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2015-2019

Investasi (PMA) di Kepri tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018. Pada tahun 2019 Nilai Realisasi Investasi (PMA) mencapai sebesar 20.450 milyar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 11.138 milyar rupiah. Sementara itu Nilai Realisasi Investasi (PMDN) meningkat dari sebesar 4.385 milyar rupiah pada tahun 2018 menjadi sebesar 5.656 milyar rupiah pada tahun 2019.

Tabel 3.2
Nilai Realisasi Investasi Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp Milyar	10.065	7.108	13.823	11.138	20.450
2	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp Milyar	1.384	492,5	1.398	4.385	5.656

Angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kepri pada tahun 2019 mencapai sebanyak 2,84 Juta orang, meningkat dari tahun 2018 sebanyak 2,31 juta orang. Kunjungan Wisatawan Nusantara tahun 2019 sebanyak 4,227 orang, meningkat dari tahun 2017 sebanyak 3,547 juta orang.

Tabel 3.3
Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2015-2019

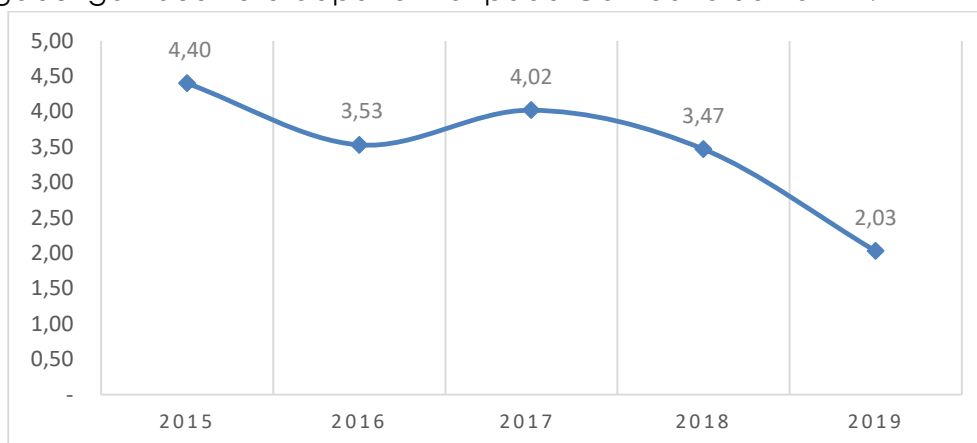
No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	Juta orang	2,03	2,1	2,07	2,635	2,864



No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau	Juta orang	NA	1,48	2,89	3,547	4,227

b. Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dan kegiatan industri. Selama kurun waktu 2015 hingga 2019 laju inflasi tahunan menunjukkan penurunan, dari sebesar 4,40% pada tahun 2015 menjadi sebesar 2,03% pada tahun 2019. Perkembangan laju inflasi gabungan dua kota dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



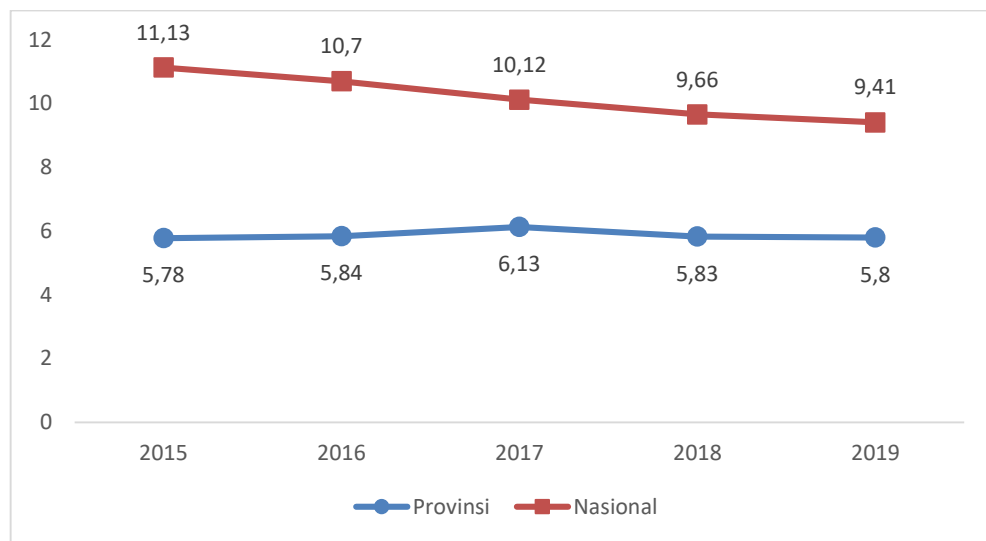
Sumber: Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kepulauan Riau Desember

2019 (Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau)

Gambar 3.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

c. Kemiskinan

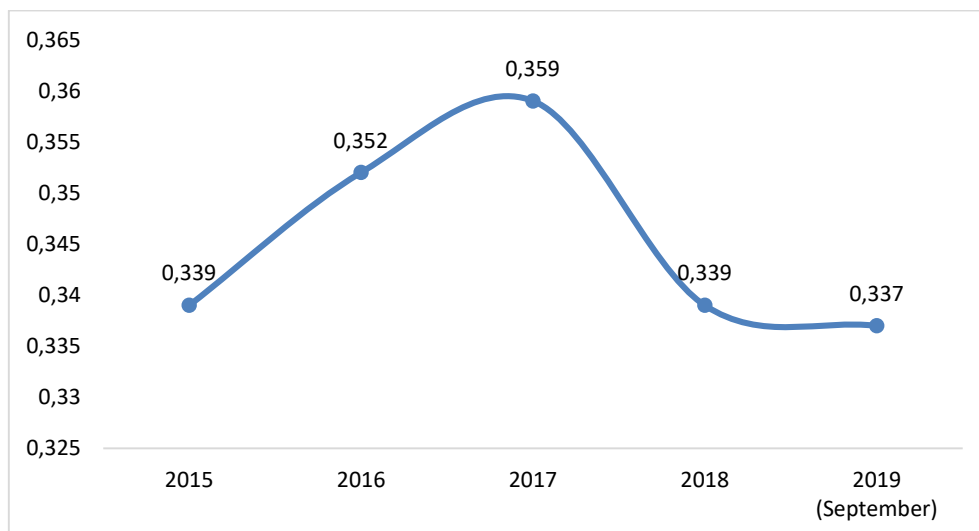
Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka fluktuatif dari sebesar 5,78% pada tahun 2015 menjadi 6,13% pada tahun 2017 kemudian menurun menjadi 5,80% pada tahun 2019. Trend perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu lima tahun berbeda dengan kondisi nasional yang menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 3.3 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dari 0,339 pada tahun 2015 menjadi 0,337 pada tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.

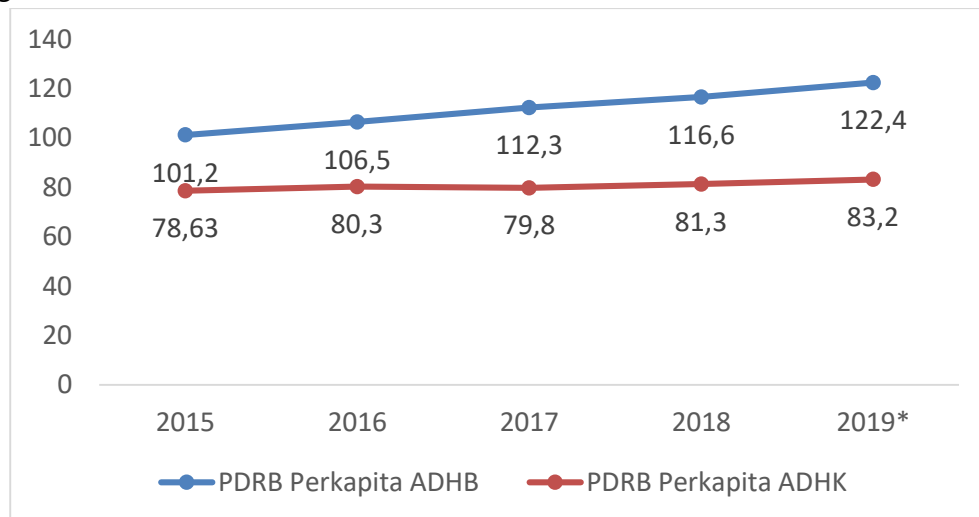


Sumber : BPS, Berita Resmi statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 3.4 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2019

d. PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan dari 101,2 juta rupiah hingga mencapai 122,4 juta rupiah. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 juga mengalami peningkatan dari sebesar 78,63 juta rupiah menjadi sebesar 83,2 juta rupiah, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



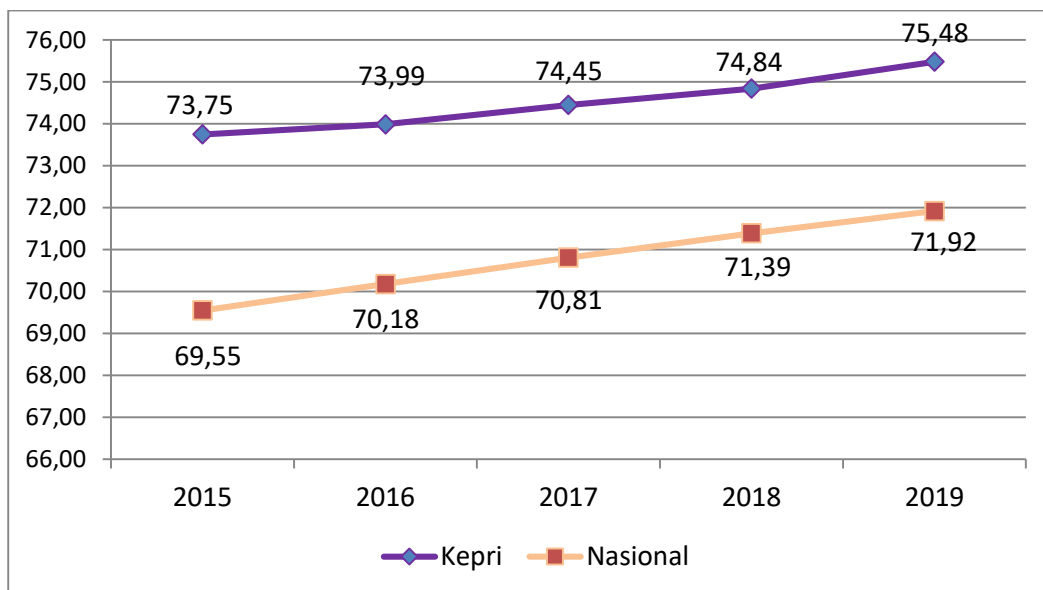
Sumber: BPS Provinsi Kepri (Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 2014-2018) dan Hasil Perhitungan

Gambar 3.5 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2018 (%)

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar (komponen pembentuk): (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 73,40 meningkat menjadi 74,84 pada tahun 2018. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2019 (Bps Nasional, 2020)

Gambar 3.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

2. Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2021

Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dunia dan nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan RPJMD pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 5+1%, dan inflasi dijaga pada kisaran angka 3,50±1, Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan sebesar 6,60%, Persentase penduduk miskin ditargetkan sebesar 5,65%, dan Indeks Gini diproyeksikan sebesar 0,34±0,01. Seiring dengan Pandemi Covid-19, dilakukan perubahan proyeksi indikator makro sesuai dengan arah pengembangan wilayah Sumatera, khususnya pada indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 3,9–5,1%, Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat menjadi sebesar 7,2%; dan Persentase penduduk miskin meningkat menjadi sebesar 5,78%.

Target indikator makro ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi				Proyeksi			
			2016	2017	2018	2019	2020 RPJMD	2020 (Penyesuaian Covid-19)	2021 RPJMD	2021 (Penyesuaian Covid-19)
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	2,01	4-4,4	4,89	5±1	-0,3–2,6	5±1	3,9–5,1
2	Laju Inflasi	%	3,53	4,02	3,47	2,03	3,50±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1
3	Tingkat	%	7,69	7,16	7,12	6,91	6,74	7,6	6,60	7,2



No	Indikator	Satuan	Realisasi				Proyeksi			
			2016	2017	2018	2019	2020 RPJMD	2020 (Penyesuaian Covid-19)	2021 RPJMD	2021 (Penyesuaian Covid-19)
	Pengangguran Terbuka									
4	Indeks Gini	Indeks	0,350	0,359	0,339	0,337	0,35±0,01	0,35±0,01	0,34±0,01	0,35±0,01
5	Persentase penduduk miskin	%	5,84	6,13	5,83	5,80	5,52	5,82	5,68	5,78
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,18	70,81	71,39	74,71	74,95	74,95	75,19	75,19

Sumber: Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

3. Strategi dan Arah kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka mendorong ekonomi daerah, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 diarahkan pada:

a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui:

- 1) Penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah agar efisien serta terciptanya keuangan inklusif dan kesehatan fiskal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Mengoptimalkan realisasi APBD dan APBN Provinsi maupun masing-masing wilayah di Kepri khususnya untuk belanja modal serta melaksanakan dan memonitor perkembangan proyek pembangunan infrastruktur agar dapat berjalan dengan baik sebagai pendorong perekonomian untuk mendukung perkembangan investasi swasta dan kinerja ekspor Kepri;
- 3) Menjaga iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui percepatan reformasi struktural terutama terkait dengan aspek kemudahan perizinan serta stabilitas keamanan di wilayah Kepri untuk menarik investasi baru ke Kepri khususnya pada LU industri pengolahan sebagai dampak perang dagang AS-Tiongkok dimana sejumlah perusahaan asal Tiongkok merelokasi investasinya ke kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia;
- 4) Mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur penunjang industri seperti pembangunan Jalan Tol Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim yang termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Perpres No. 56 Tahun 2018, pengembangan pelabuhan Batu Ampar dalam hal peningkatan kapasitas pelabuhan dan modernisasi peralatan dan perbaikan sistem bongkar muat, peningkatan akses jalan dari/ke Kawasan Industri serta pengembangan pembangkit listrik di Kepri;
- 5) Penguatan kerja sama antara dunia industri dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan di lokasi produksi (*teaching factory*) disertai perbaikan fasilitas pembelajaran dan



penyusunan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri prioritas nasional serta kebutuhan pasar tenaga kerja;

- 6) Mendorong kegiatan Research & Development (R&D) khususnya untuk industri unggulan berbasis ekspor agar dihasilkan produk bernilai tambah tinggi (dapat bekerja sama dengan universitas lokal);
- 7) Memaksimalkan potensi maritim Kepri untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Pengembangan industri maritim bersifat lintas sektor mencakup industri perkapalan, pelayaran, perikanan, pariwisata bahari, pelayanan dan bahkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan kemaritiman membutuhkan koordinasi lintas sektor serta strategi kebijakan yang terintegrasi dan konsisten;
- 8) Mendorong percepatan realisasi dari investasi investasi baik PMA maupun PMDN yang telah didaftarkan agar dapat mendorong kinerja investasi Kepri serta membuka lapangan kerja baru;
- 9) Pengembangan bidang pendidikan menuju SDM yang unggul juga menjadi modal dasar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
- 10) Mengembangkan Wisata Belanja, Kuliner dan Spa serta jasa pendukungnya sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui:
 - a) Penguatan program Hot Deals dengan cara pengembangan variasi paket pariwisata sesuai target pasar (yang dapat berwisata pada weekdays) yaitu turis luar Singapura dan Malaysia, elderly people, millenial, dan ibu rumah tangga, penempatan media promosi Hot Deals di lokasi yang tepat dengan target pasar yang ingin dituju (a.l. bandara, pelabuhan, sekolah/ universitas, dan apartemen), serta penguatan kerjasama dengan Singapore Tourism Board termasuk kerjasama teknis dengan travel agent dan tour operator yang beroperasi di Singapura;
 - b) Pembenahan kualitas dan layanan transportasi umum serta transportasi penunjang pariwisata melalui penambahan armada transportasi dan diversifikasi penggunaan sarana transportasi dengan mengadakan rute bus pariwisata pada lokasi-lokasi strategis;
 - c) Penguatan promosi wisata terutama saluran digital dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM penunjang pariwisata (kuliner dan souvenir), dengan cara menciptakan rencana pemasaran pariwisata (fokus pada atraksi/aktivitas spesifik) serta menciptakan materi promosi antara lain dengan cara membuat tourist guide dan memanfaatkan media sosial. Selain itu,



- peningkatan kapasitas pelaku UMKM dapat dilakukan dengan cara membangun desa wisata dan klaster kerajinan serta meningkatkan frekuensi pameran UMKM di pusat perbelanjaan;
- d) Pembinaan serta peningkatan layanan atraksi seperti adanya pusat kuliner nusantara yang memadai dengan standarisasi kualitas dan higienitas terutama bagi UMKM;
 - e) Pengembangan program hiburan sebagai pendukung atraksi;
- 11) Pengembangan Marine dan Sport Tourism sebagai Destinasi Wisata Prioritas Baru, melalui: Penguatan program Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE) dengan memperkenalkan konsep BLEISURE (Business with Leisure); dan Pengembangan konsep BLEISURE memanfaatkan potensi Marine dan Sport Tourism
- 12) Penciptaan Event/Atraksi Strategis Berskala Internasional

b. Pengendalian Inflasi agar tetap terjaga dengan meneruskan kebijakan

4K sebagai berikut:

1) Keterjangkauan Harga

- a. Penyelenggaraan kegiatan pasar murah
- b. Pelaksanaan kegiatan sidak pasar
- c. Mendorong perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- d. Pembuatan mapping produksi komoditas bahan pangan secara berkala bersama kelompok tani agar jumlah produksi dapat terukur sehingga pasokan bahan pangan dari daerah lain tidak melebihi permintaan

2) Ketersediaan Pasokan

- a. Mendorong Pemerintah untuk membuka potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD) baru dengan daerah pemasok aneka cabai selain Sumatera Utara dan Jawa Tengah sebagai langkah mitigasi risiko terbatasnya pasokan akibat perubahan cuaca atau pergeseran masa tanam pada daerah pemasok serta menjadi alternatif sumber pasokan
- b. Mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) untuk secara aktif melakukan pemantauan kelancaran pasokan bahan makanan di Pelabuhan serta pengembangan lahan produksi pertanian
- c. Melakukan pemantauan pasokan bahan makanan secara berkala bekerjasama dengan Satgas Pangan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan serta menghindari penimbunan
- d. Mendorong Rumah Pangan Kita (RPK) dan klaster-klaster pertanian bahan pangan lokal untuk menekan inflasi dari kelompok bahan makanan
- e. Dalam rangka mengendalikan inflasi komoditas aneka cabai, Pemerintah dapat menggalakan urban farming dengan skala yang lebih luas berupa penanaman aneka cabai di

pot/polybag maupun memanfaatkan tanah-tanah yang tidak terpakai

- f. Penguatan peran UMKM khususnya yang bergerak pada usaha berbasis komoditas ketahanan pangan dari sisi kelembagaan, peningkatan akses, maupun penambahan waktu monitoring pengembangan
- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penyediaan tenaga penyuluh dan pendamping untuk meningkatkan skill dan kapasitas petani dan nelayan

3) Kelancaran Distribusi

- a. Mendorong percepatan proses revitalisasi Pasar Induk Jodoh, Batam agar dapat digunakan sebagai pusat distribusi bahan makanan di Batam
- b. Mendorong perluasan implementasi Rumah Pangan Kita dan e-warong
- c. Menjaga kelancaran arus bongkar muat dan distribusi untuk bahan pangan baik melalui pelabuhan laut maupun udara
- d. Mendorong penambahan kapasitas gudang penyimpanan bahan pangan
- e. Menghimbau otoritas pelabuhan dan bandara untuk memprioritaskan bongkar muat bahan pangan dan kebutuhan pokok

4) Komunikasi Efektif

- a. Mendorong percepatan proses revitalisasi Pasar Induk Jodoh, Batam agar dapat digunakan sebagai pusat distribusi bahan makanan di Batam
- b. Mendorong perluasan implementasi Rumah Pangan Kita dan e-warong
- c. Menjaga kelancaran arus bongkar muat dan distribusi untuk bahan pangan baik melalui pelabuhan laut maupun udara
- d. Mendorong penambahan kapasitas gudang penyimpanan bahan pangan
- e. Menghimbau otoritas pelabuhan dan bandara untuk memprioritaskan bongkar muat bahan pangan dan kebutuhan pokok

3.2 Kerangka Pendanaan dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Sesuai dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2021 diproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp 4.067.088.636.088,00; belanja daerah sebesar Rp 4.100.730.388.651,00; dan Penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp 33.641.752.563,00. Hasil proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tercantum pada Tabel 3.2.



Tabel 3.2
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2019	RKPD 2020	RKPD 2021
A	Pendapatan Daerah	3.935.818.264.392	3.763.708.865.241	4.067.088.636.088
1	Pendapatan Asli Daerah	1.306.787.565.187	1.457.807.050.027	1.624.054.466.154
a	Pajak Daerah	1.185.272.421.309	1.233.244.612.527	1.361.940.073.779
b	Retribusi Daerah	6.840.468.960	121.649.162.500	148.365.290.625
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.322.863.340	3.472.875.000	3.646.518.750
e	Lain-Lain PAD Yang Sah	112.351.811.578	99.440.400.000	110.102.583.000
2	Dana Perimbangan	2.573.155.268.205	2.299.677.695.215	2.436.797.808.733
a	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	737.447.035.580	406.265.528.398	452.941.832.015
b	Dana Alokasi Umum	1.190.057.596.000	1.220.583.268.876	1.257.200.766.943
c	Dana Alokasi Khusus	645.650.636.625	672.828.897.941	726.655.209.776
				6.236.361.200
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55.875.431.000	6.224.120.000	6.236.361.200
a	Hibah	2.568.000.000	1.224.120.000	1.236.361.200
b	Dana Penyesuaian	53.307.431.000	5.000.000.000	5.000.000.000
c	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0
B	Belanja Daerah	3.654.368.866.589	3.809.237.353.418	4.100.730.388.651
1	Belanja Tidak Langsung	1.751.454.274.875	1.713.525.272.935	1.882.646.163.705
a	Belanja Pegawai	871.199.679.011	709.951.563.255	739.890.122.569
b	Belanja Bunga	376.030.275.000		-
c	Belanja Hibah	1.619.120.000	422.444.525.781	495.970.500.000
d	Belanja Bantuan Sosial	500.921.438.771	13.685.882.994	13.713.254.760
e	Belanja Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota	1.683.762.093	552.781.313.847	618.410.299.317
f	Belanja Bantuan Keuangan	-	12.661.987.059	12.661.987.059
g	Belanja Tidak Terduga		2.000.000.000	2.000.000.000



No	Uraian	Realisasi 2019	RKPD 2020	RKPD 2021
2	Belanja Langsung	1.902.914.591.714	2.095.712.080.483	2.218.084.224.946
a	Belanja Pegawai	127.134.600.087	272.442.570.463	288.350.949.243
b	Belanja Barang dan Jasa	1.141.278.812.426	1.404.127.093.924	1.486.116.430.714
c	Belanja Modal	634.501.179.200	419.142.416.097	443.616.844.989
	Surplus/Defisit	281.449.397.803	(45.528.488.177)	(33.641.752.563)
III	Pembiayaan			
1	Penerimaan Pembiayaan	-	45.528.488.177	33.641.752.563
a	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-		0
b	Penerimaan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi			0
c	Penerimaan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir			0
d	Penggunaan SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya		45.528.488.177	33.641.752.563
e	Pencairan Dana Cadangan			0
2	Pengeluaran Pembiayaan	-		0
a	Pembentukan Dana Cadangan			0
b	Penyertaan Modal Pemerintah			0
c	Pembayaran Pokok Utang			0
d	Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			0
e	Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan			0
	Pembiayaan Netto	0	45.528.488.177	33.641.752.563
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	281.449.397.803	0	0

Sumber: Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Secara umum pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran wajib pajak khususnya pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo
- b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembayaran pajak dengan menambah kantor samsat keliling, samsat bergerak (berkantor pada tiap-tiap kantor kecamatan), pembayaran dengan online system dan mengupayakan kerjasama pembayaran pajak melalui perbankan.
- c. Melakukan kebijakan-kebijakan berkenaan denda pajak.
- d. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan retribusi daerah
- e. Meningkatkan koordinasi dan kepastian hukum dalam proses pemungutan khususnya sektor Retribusi Labuh Tambat.
- f. Meningkatkan kompetensi SDM personil pemungutan di Unit Pelayanan Teknis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan perangkat daerah Penghasil dalam menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Meningkatkan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat khususnya yang berkenaan dengan teknis setoran penerimaan Dana Perimbangan ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja pegawai terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai akan menampung kebutuhan:

- a) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.
- b) Penghitungan kebutuhan gaji dari segi jumlah PNS berdasarkan pertumbuhan Zero Growth.
- c) Gaji DPRD Provinsi Kepri.
- d) Tambahan Penghasilan PNS.
- e) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.



2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

- a) Pemulihan Pasca Covid-19.
- b) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- c) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- d) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021.
- e) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah, ditambah bunga rencana pinjaman daerah Tahun 2021.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

- a) Pemulihan Pasca Covid-19.
- b) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah guna mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan

dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Mulai Tahun Anggaran 2021 pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan.

6) Belanja Bantuan Sosial

- a) Pemulihan Pasca Covid-19.
- b) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Mulai Tahun Anggaran 2021 pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pemenuhan infrastruktur dasar dan perkotaan yang mengarah pada:

- a) Pemulihan Pasca Covid-19.
- b) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- c) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- d) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021.
- e) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Penerimaan daerah terdiri dari: Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi, Penerimaan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir dan Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya. Sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari: Penyertaan Modal Pemerintah, Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan. Kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya.
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah terutama untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 didahului dengan pengkajian terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, arah kebijakan pembangunan tahun 2021, prioritas nasional tahun 2021, dan isu strategis daerah tahun 2021.

4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah: ***"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"***.

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sebagai Bunda Tanah Melayu

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.

b. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).

c. Berakhlak Mulia

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.



d. Ramah Lingkungan

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.

e. Unggul di Bidang Maritim

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama sektor kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata didukung dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan berorientasi pada kemaritiman (*maritim oriented*). Pembangunan kemaritiman diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengembangan pariwisata bahari.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi **"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"**, misi yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut.

- a. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
- b. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
- d. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- e. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan



- f. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- g. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
- h. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
- i. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

3. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2021 dikelompokkan sesuai dengan Misi sebagai berikut.

Misi 1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.

- 1. Melestarikan Budaya Melayu dan Nilai – nilai Agama, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah.
 - b. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama.
- 2. Meningkatkan ketertiban dan keamanan di masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat

Misi 2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.

- 1. Meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik
 - b. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi
- 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi
 - b. Meningkatnya akses pelayanan air bersih.
 - c. Berkurangnya kawasan kumuh.
 - d. Meningkatnya rasio elektrifikasi.

Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.

- 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia, dengan sasaran:



- a. Meningkatnya kualitas pendidikan
- b. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja.

Misi 4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

- 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
 - b. Angka kemiskinan menurun.
- 2. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Misi 5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan

- 1. Meningkatkan pengembangan perekonomian pariwisata dan kemaritiman, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan
 - b. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
- 2. Meningkatkan Produksi Pertanian dan ketahanan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya produksi pertanian
 - b. Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan

Misi 6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

- 1. Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing koperasi dan UKM.

Misi 7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

- 1. Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri memanfaatkan bahan baku lokal, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal
 - b. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan

Misi 8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

- 1. Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran:
 - a. Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan.



Misi 9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

1. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah.
 - b. Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Secara rinci keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 tercantum pada Tabel 4.1



Tabel 4.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau
dan target Kinerja Sasaran Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Tahun 2021
	Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.	Melestarikan Budaya Melayu dan nilai-nilai agama	Tingkat Kelestarian Budaya Melayu	%	11,16	48,41	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	1. Persentase bangunan yang berciri khas melayu	Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta yang berciri khas melayu dibagi Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta dikali 100	%	70,75
								2. Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	Jumlah warisan budaya yang lestari dibagi jumlah warisan budaya dikali 100	%	22,38
			Indeks kerukunan antar umat beragama	%	67,9	70,00	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama	3. Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	Jumlah mubaligh yang lulus kompetensi dibagi mubaligh yang dibina x 100	%	100
								4. Persentase santri yang menjadi hafiz	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di kepulauan riau dikali 100	%	100
		Meningkatkan ketertiban dan keamanan di masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	%	72,84	75,00	Meningkatnya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat	5. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	150
								6. Angka kriminalitas	Jumlah kasus kriminalitas	Kasus	4.860



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Tahun
											2021
	Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.	Meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota	Tingkat Konektivitas antar kab/kota	%	60,88	95	Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	7. Persentase jalan provinsi berkondisi baik	Panjang jalan provinsi berkondisi baik dibagi panjang jalan dikali 100	%	75,00
							Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi	8. Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang tersedia dibagi Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang seharusnya tersedia dikali 100	%	100,00
								9. Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	Jumlah Kapal Penyeberangan (roro) yang tersedia dikali 100	%	100
								10. Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Laut yang tersedia dibagi jumlah Pelabuhan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	100,00
								11. Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	Jumlah Kapal Angkutan Laut yang tersediadibagi Kapal Angkutan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	100,00



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Tahun
											2021
		Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	%	65,21	88,48	Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi	12. Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	Luas wilayah yang memiliki Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan) layak dibagi Luas wilayah dikali 100	%	88,48
							Meningkatnya akses pelayanan air bersih	13. Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	Luas wilayah yang memperoleh akses air bersih dibagi Luas wilayah dikali 100	%	100
							Berkurangnya kawasan kumuh	14. Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	Ha	255,09
							Meningkatnya rasio elektrifikasi	15. Rasio Elektrifikasi	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	93,50
	Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia	Indeks Pendidikan dalam IPM	In	0,62	0,68	Meningkatnya kualitas pendidikan	16. Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 ke atas	tahun	10,47
								17. Persentase SMA/SMK/SLB yang terakreditasi minimal B	Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB yang terakreditasi B dibagi Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB dikali 100	%	84,00
		Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) (%)		%	9,03 (2016)	7,03	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja.	18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja dibagi Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja yang terdaftar dikali 100	%	67,8
								19. Pencari kerja	Jumlah Pencari kerja	%	64



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Tahun 2021
								terdaftar yang ditempatkan	terdaftar yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari kerja yang terdaftar dikali 100		
	Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,99	75,19	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	20. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Jumlah Kematian Ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000	per 100.000 KH	128
								21. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	Jumlah Kematian Bayi (AKB) dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000	per 1.000 KH	30
								22. Persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita)	Jumlah bayi usia 0-59 bulan 29 hari dengan statis gizi kurus (<i>underweight</i>) dibagi jumlah Jumlah bayi usia 0-59 bulan 29 hari dikali 100	%	16,2
							Angka kemiskinan menurun	23. Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	5,68
		Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,20	94,75	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	24. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,75
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	60,79	62,5		25. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,5
	Meneruskan pengembang	Meningkatkan pengembang	Nilai Tukar Nelayan	%	109,36	110,57	Meningkatnya produksi perikanan	26. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	306.463



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Tahun 2021
	an ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.	an perekonomian pariwisata dan kemaritiman					dan olahan hasil perikanan	27. Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.920
								28. Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Ton	1.331
			Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	%	3,04	23 (dari tahun 2016)	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	29. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta orang	2,5
		Meningkatkan Produksi Pertanian dan ketahanan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	98,16	100	Meningkatnya produksi pertanian	30. Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Ton	45.822
								31. Jumlah Produksi Tanaman Palawija	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.742
								32. Jumlah Produksi Padi	Jumlah Produksi Padi	Ton	1.020
			Skor pola pangan harapan	skor	83,8	93,5	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	33. Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV < 10
								34. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	93,00



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Tahun
											2021
	Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.	Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	5±1	Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing koperasi dan UKM	35. Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp Milyar	8.100
								36. Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp Milyar	900
								37. Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	Jumlah Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi dibagi Jumlah Koperasi dan UKM dikali 100	%	22,25
	Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.	Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri memanfaatkan bahan baku lokal	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	5±1	Meningkatnya kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal	38. Jumlah industri berbahan baku lokal	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	2.200
								39. Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Juta US \$	1.550,20
							Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	40. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah PDRB sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB dikali 100	%	8,52
	Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian	Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	in	66,97	69,8	Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas	41. Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	Jumlah waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu dibagi Jumlah waduk yang dilakukan pengujian dikali	%	100



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Tahun
											2021
	lingkungan hidup.	hidup					ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan		100		
								42. Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan	Luas RTH publik di kawasan perkotaan dibagi Luas wilayah dikali 100	%	10,99
	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	An	41,15	75	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah	43. Indeks Profesionalitas Pegawai	Nilai Perhitungan IPP ASN Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	80
								44. Nilai hasil evaluasi SAKIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	BB
								45. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala A - E	B
								46. Nilai Keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan informasi publik	Skala nilai 0-100	67,5
								47. Nilai e-government	Nilai e- government	Skala nilai 1-4	2,5
							Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	48. Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,624
								49. Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini	WTP
								50. Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir RPJMD 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Target Tahun
											2021
								Kepulauan Riau			

4.2. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries), menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan pencapaian pembangunan pada periode RPJMN sebelumnya agar sasaran di atas dapat dicapai.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

VISI

*Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong*

MISI



Gambar 4.1 Visi dan Misi Presiden Tahun 2020-2024

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar 4.2 Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024

Berdasarkan RKP tahun 2021, tema pembangunan RKP 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020. Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan tema RKP 2021 “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Target 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5–5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,5–8,2
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2–9,7
Rasio Gini (indeks)	0,377–0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78–72,90
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)*menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)	23,55–24,14
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	3,41–4,26
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	3,35–4,21
Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,20

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), meliputi:



1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain,

inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

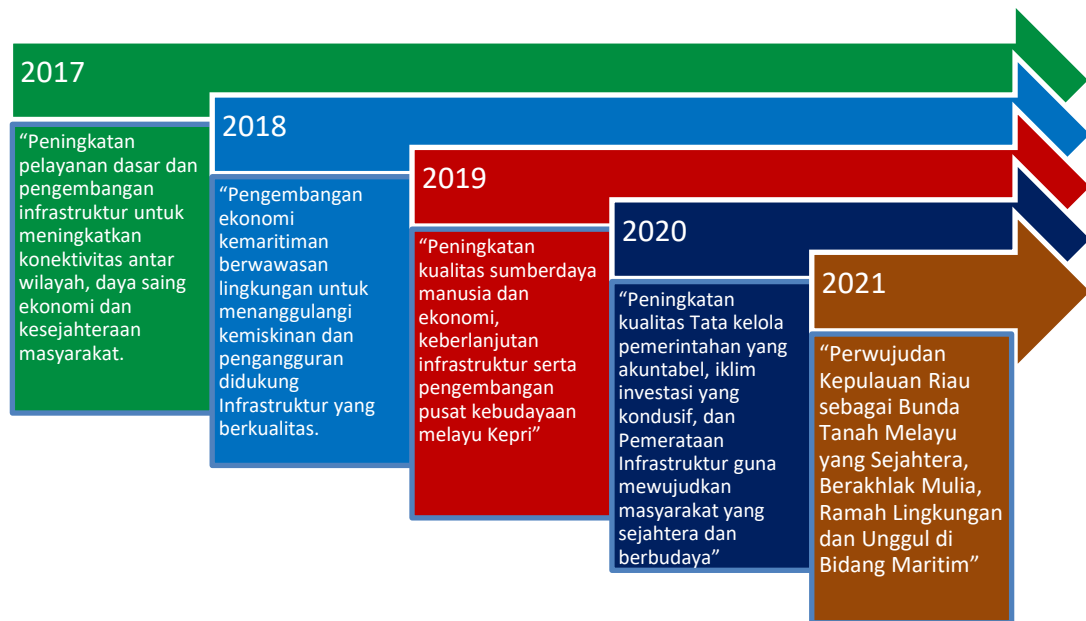
Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

4.3. Arah Kebijakan Tahun 2021 berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD tahun 2016-2021

Berdasarkan dokumen perubahan RPJMD tahun 2016-2021, tahun 2021 sebagai Tahun ke-5 Pelaksanaan RPJMD 2016-2021 yang diarahkan pada “Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”.



Gambar 4.3 Arah Kebijakan Tahunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021

Sesuai dengan dokumen perubahan RPJMD tahun 2016-2021, Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 diarahkan pada **“Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”** yang kemudian disepakati dan berubah menjadi **“Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim Melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan”**. Prioritas pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

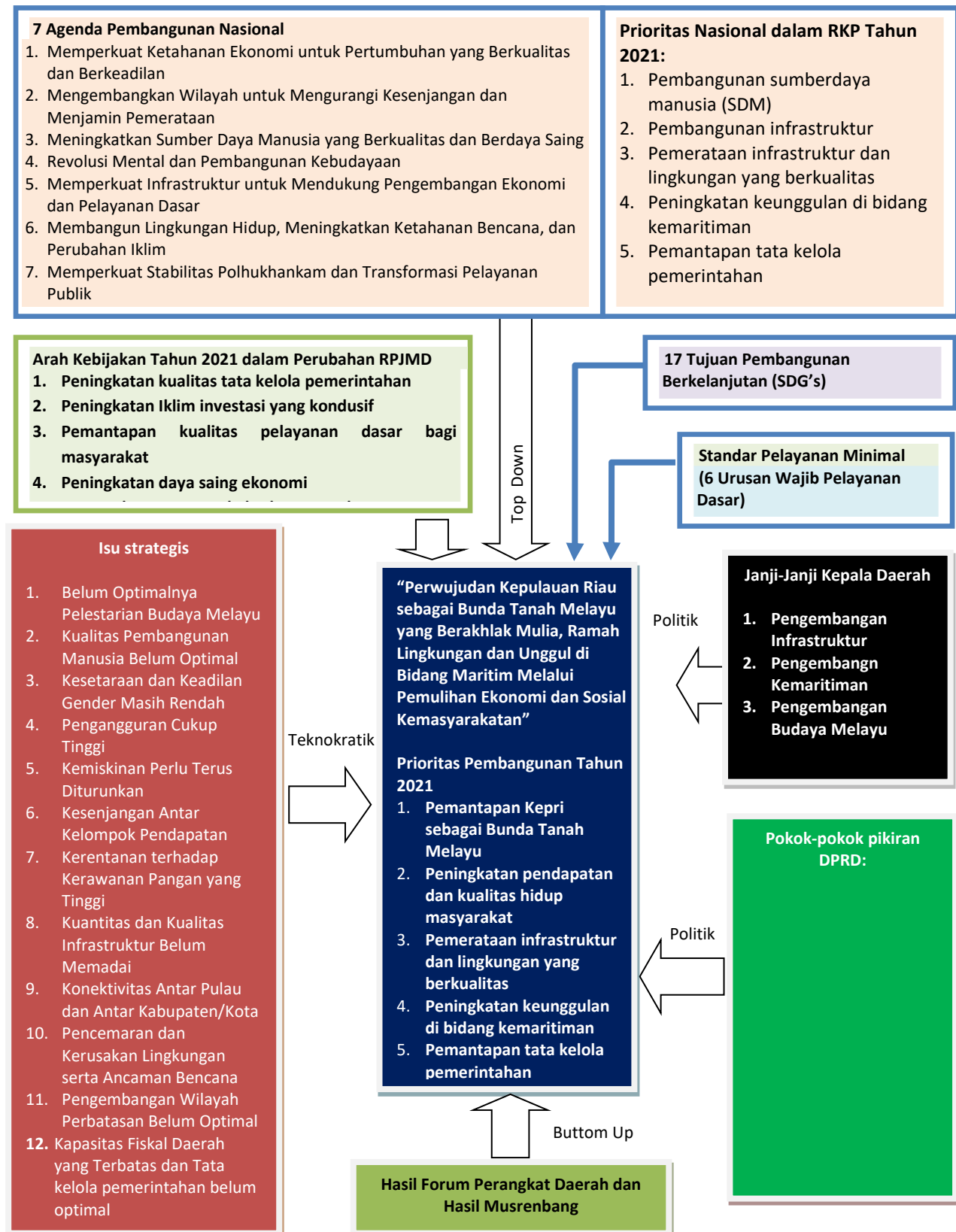
- Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu**, dengan fokus pada optimalisasi pengembangan pusat kebudayaan melayu dan pelestarian adat dan seni budaya melayu; peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan antar umat beragama.
- Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat**, dengan fokus pada peningkatan investasi dengan promosi potensi dan kemudahan perijinan investasi; pengembangan Koperasi dan UMKM; pengembangan industri pengolahan; pengembangan perdagangan; peningkatan profesionalisme tenaga kerja; peningkatan produktivitas

pertanian tanaman pangan dan hortikultura; pemerataan mutu pendidikan menengah atas; penguatan promotif dan preventif kesehatan; pemerataan kualitas SDM kesehatan; optimalisasi pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular; peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan; penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketersediaan, stabilitas harga pangan, dan diversifikasi konsumsi pangan.

- c. **Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas**, dengan fokus pada pemerataan pembangunan jalan provinsi; pemerataan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); dan pemerataan sarana prasarana air bersih; pemerataan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; dan Peningkatan ratio elektrifikasi rumah tangga; peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau, dan Peningkatan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- d. **Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman**, dengan fokus pada: optimalisasi produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, optimalisasi pengembangan pariwisata bahari, dan pemerataan sarana prasarana perhubungan.
- e. **Pemantapan tata kelola pemerintahan**, dengan fokus pada: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, Peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

4.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dilakukan dengan memperhatikan arah Kebijakan Tahun 2021 dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2021, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), Standar Pelayanan Minimal; Isu strategis (pendekatan teknokratik), Janji-janji kepala daerah dan Pokok-pokok Pikiran DPRD (pendekatan Politik), serta hasil Konsultasi publik (pendekatan Bottom up) sebagaimana terlihat pada skema berikut ini.



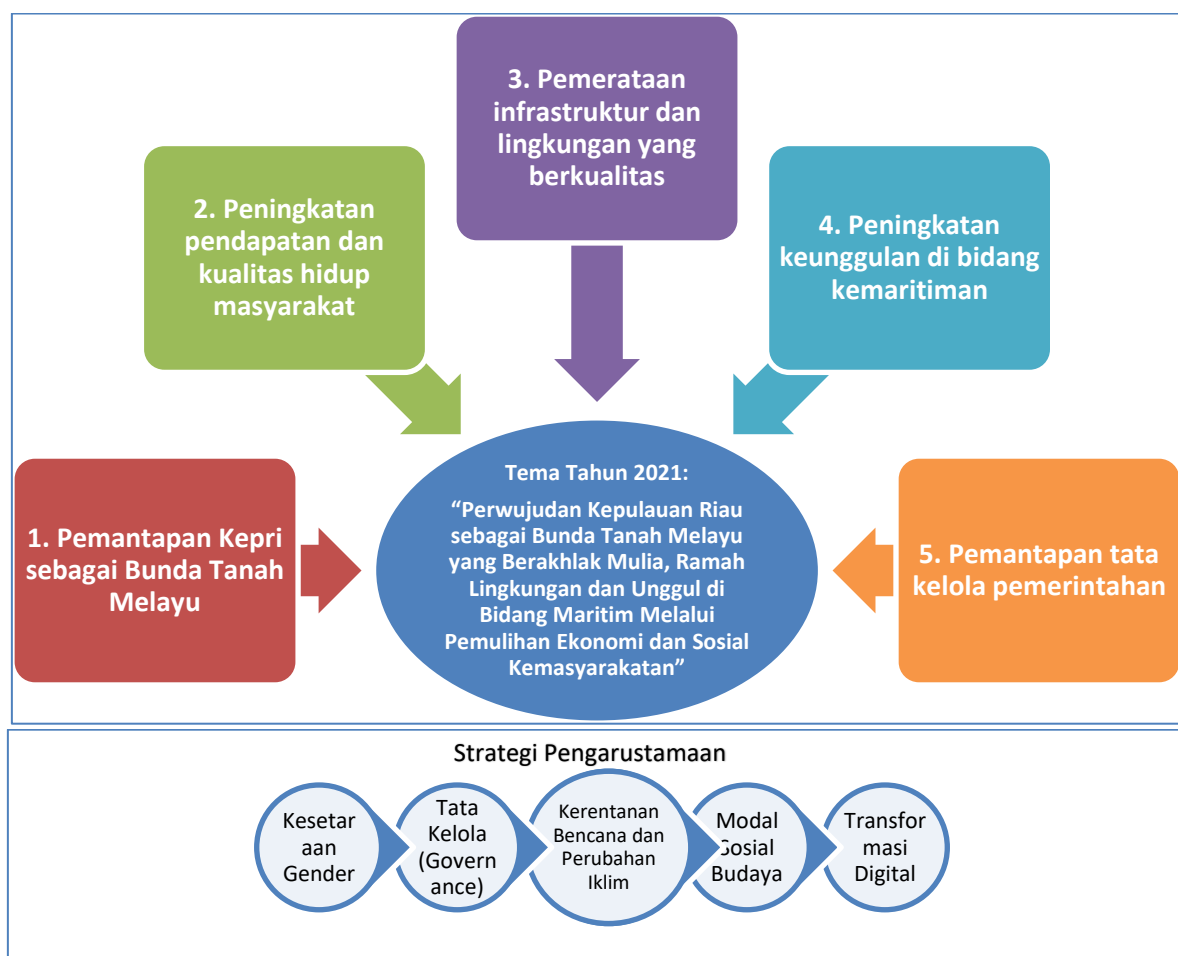
Gambar 4.4 Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 dalam RPJMD, Prioritas RKP tahun 2021, SDG's, SPM, Isu Strategis daerah, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Mendasarkan hasil perumusan prioritas di atas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 yaitu: **“Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim Melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat”**.

Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 yaitu:

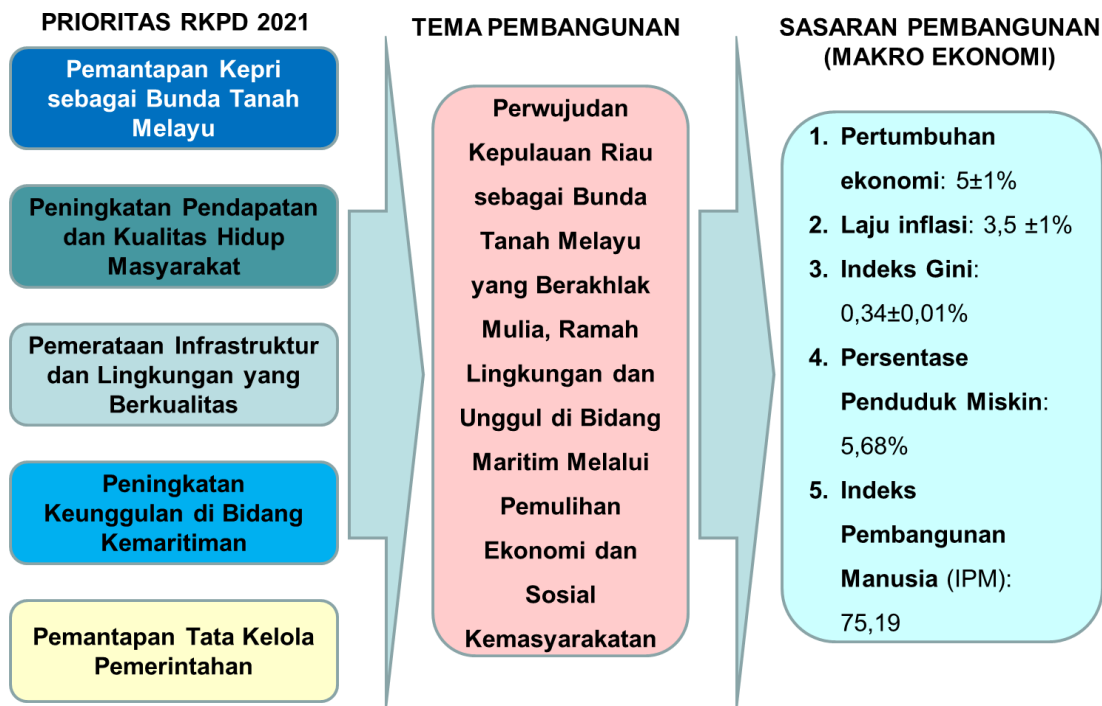
1. Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu
2. Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat
3. Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas
4. Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan

Dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas sektor, dilakukan pengarusutamaan meliputi: Kesenjangan gender; Tata Kelola (Governance); Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim; Modal Sosial Budaya; dan Transformasi Digital.



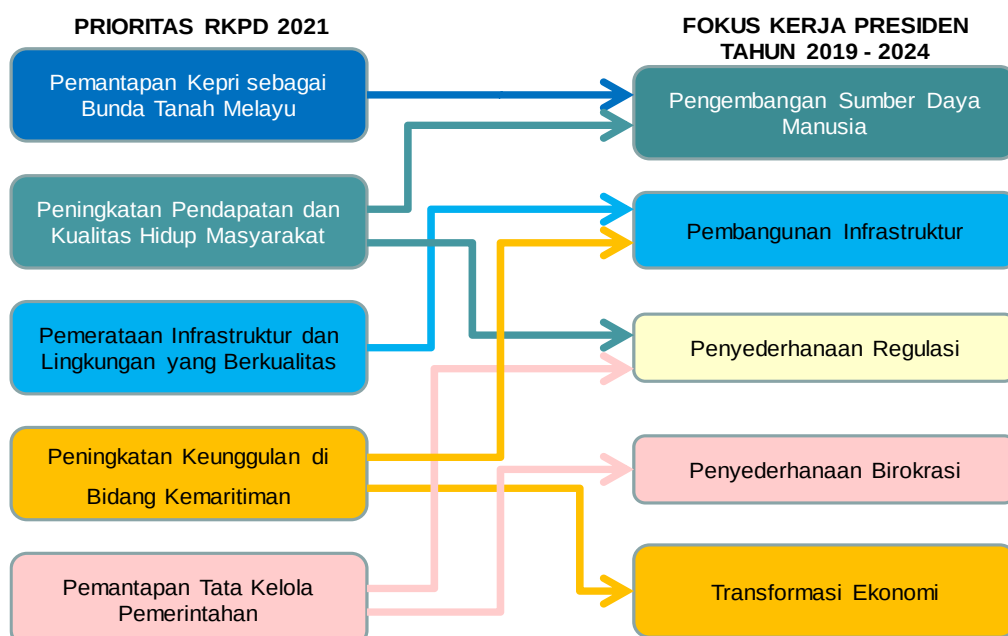
Gambar 4.5 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Tema dan prioritas pembangunan daerah diarahkan pada pencapaian sasaran makro ekonomi tahun 2021 sebagai berikut:



Gambar 4.6 Sasaran Makro Ekonomi Pembangunan Daerah Tahun 2021

Keterkaitan prioritas pembangunan Provinsi Kepri dengan prioritas RKP tahun 2021 sebagai berikut:



Gambar 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 dengan Prioritas RKP tahun 2021

Secara khusus arah kebijakan terkait dengan Pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial Pasca Pandemi Covid-19 diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan sektor kesehatan:



- a. Peningkatan derajat kesehatan melalui upaya promotif dan preventif kesehatan dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif melalui pelaksanaan GERMAS, PHBS, penanganan stunting, penuntasan ODF, dan penguatan peran Posyandu.
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security melalui pengembangan SDM kesehatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar.
2. Penguatan perlindungan sosial:
 - a. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial
 - b. Perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif
 - c. Penyediaan kebutuhan dasar penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan terutama nelayan, petani, buruh, pelaku UKM, dan kelompok rentan lainnya dalam bentuk beasiswa, jaminan kesehatan, beras sejahtera, dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - d. Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan
3. Pembangunan sumberdaya manusia:
 - a. Peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19
 - b. Peningkatan pemerataan layanan berkualitas serta penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual melalui peningkatan keterjangkauan pelayanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum berbasis skill, attitude, dan learning culture, penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi, dan pemenuhan akses inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus
4. Akselerasi investasi:
 - a. Penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi melalui optimalisasi digital promotion potensi dan peluang investasi, serta pemberian kemudahan perijinan investasi menggunakan OSS.
5. Pemulihan industri dan perdagangan:
 - b. Penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor, diversifikasi produk dan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk potensial dan unggulan daerah
 - c. Penguatan daya saing Koperasi dan UMKM melalui fasilitasi akses permodalan modal usaha, pemasaran dan standarisasi kualitas produk, dan penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi.
 - d. Pengembangan usaha perdagangan dan peningkatan efisiensi distribusi dan perdagangan melalui pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan, fasilitasi kerjasama ekspor, dan pemantauan pasokan dan harga pangan pokok
6. Pemulihan pariwisata



- a. Pemulihan pariwisata dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, dan pengembangan kemitraan pelaku usaha dan jasa pariwisata, dan penyelenggaraan event-event pariwisata.
7. Penguatan sistem penanganan bencana
 - a. Penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit).
8. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar
 - a. Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
 - b. Pengembangan infrastruktur ekonomi (konektivitas jalan, pelabuhan, bandara).
 - c. Pengembangan infrastruktur pelayanan dasar (perumahan dan permukiman, air minum dan sanitasi yang layak).
 - d. Pengembangan energi dan ketenagalistrikan.
 - e. Transformasi digital.

Arah kebijakan terkait dengan Pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial Pasca Pandemi Covid-19 diatas selanjutnya akan diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau.



Perincian strategi/arrah kebijakan dan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Prioritas, Strategi / Arrah Kebijakan, Sasaran dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arrah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
1. Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu	a. Penguatan branding Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu dan pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan;	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	70,75	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	Dinas Kebudayaan
	b. Pengembangan bangunan berciri khas budaya melayu		Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	%	22,38		Presentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi	%	Dinas Kebudayaan
	c. Peningkatan pelestarian adat istiadat					Program pengelolaan kekayaan budaya	Persentase warisan budaya tangible yang lestari	%	Dinas Kebudayaan
	d. Peningkatan pementasan seni budaya daerah.					Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju	%	Dinas Kebudayaan
	e. Peningkatan pemahaman						Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	Dinas Kebudayaan
		Meningkatnya	Persentase	%	100	Program	Persentase pelaksanaan	%	Sekretariat



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran	a pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama	Mubaligh yang tersertifikasi			Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	hari-hari besar keagamaan		Daerah
			Persentase santri yang menjadi hafiz	%	100		Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	%	Sekretariat Daerah
2. Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat	e. Peningkatan pemerataan layanan berkualitas serta penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual melalui peningkatan keterjangkauan pelayanan pendidikan,	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	10,47	Program Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Dinas Pendidikan
			Persentase SMA/SMK/SLB yang terakreditasi minimal B	%	84,00		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK	%	Dinas Pendidikan
							Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	Dinas Pendidikan
							Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/MAK	%	Dinas Pendidikan
							Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/MAK	%	Dinas Pendidikan
							Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik	%	Dinas Pendidikan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum berbasis skill, attitude, dan learning culture, penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi, dan pemenuhan akses inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus						Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	%	Dinas Pendidikan
							Jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	unit	Dinas Pendidikan
							Rasio siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	Rasio	Dinas Pendidikan
						Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	%	Dinas Pendidikan
						Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi	%	Dinas Pendidikan
							Persentase lulusan SMK/MAK yang diterima di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	%	Dinas Pendidikan
							Rata-rata Nilai Ujian Nasional(UN) SMA/MA/SMK/MAK	Angka	Dinas Pendidikan
	f. Peningkatan derajat kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	128	Program Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	Dinas Kesehatan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	melalui upaya promotif dan preventif kesehatan dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif melalui pelaksanaan GERMAS, PHBS, penanganan stunting, penuntasan ODF, dan penguatan peran Posyandu. g. Peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security melalui pengembangan SDM		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	30		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	Dinas Kesehatan
			Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	16,2		Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	Dinas Kesehatan
							Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	%	Dinas Kesehatan
			Program pencegahan dan pengendalian penyakit	Prevalensi HIV	%	Dinas Kesehatan			
				Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan			
				Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)	%	Dinas Kesehatan			
				Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan			
				API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan			



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	kesehatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar.						Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	Dinas Kesehatan
							Prevalensi tekanan darah tinggi	%	Dinas Kesehatan
						Program pelayanan kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi	%	Dinas Kesehatan
							Persentase Puskesmas terakreditasi	%	Dinas Kesehatan
							Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	Dinas Kesehatan
							Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS)	Status	RSUD Prov Kepri Tanjungpinang
							Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS)	Status	RSUD Prov Kepri Tanjung Uban
						Program peningkatan kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	RSUD Provinsi Tanjungpinang



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
						pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban	%	RSUD Prov Kepri Tanjung Uban
						Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	Dinas Kesehatan
							Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang	%	Dinas Kesehatan
							Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	RSUD Prov Tanjungpinang
							Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa	%	RSUD Prov Kepri Tanjung Uban
	h. Penguatan kualitas hidup dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,75	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase anggaran responsive gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	melalui pelaksanaan pemberdayaan perempuan, implementasi Kabupaten/kota Layak Anak, pengarusutamaan gender, dan penguatan kualitas layanan rujukan perlindungan perempuan dan anak.		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,5	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000 Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
						Program Perlindungan Anak	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
							Rasio Kekerasan terhadap Anak	Per 10.000 anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	i. Penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor,	Meningkatnya kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	2.200	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Nilai ekspor produk-	Juta US \$	.550,20	Program Pengembangan	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap	%	Dinas Perindustrian



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	diversifikasi produk dan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk potensial dan unggulan daerah	lokal	produk berbahan baku lokal			an Industri Unggulan	PDRB		Dan Perdagangan
							Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas	orang	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
						Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri kecil dan Menengah	unit	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal	%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	j. Pengembangan usaha perdagangan dan peningkatan efisiensi distribusi dan perdagang	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,52	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	juta US \$	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribu US \$	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	an melalui pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan, fasilitasi kerjasama ekspor, dan pemantauan pasokan dan harga pangan pokok						Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor	Jenis	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
						Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
							Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	k. Peningkatan ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Ton	45.822	Program peningkatan kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan petani, dan penyediaan sarana produksi pertanian.		Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.742		Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
			Jumlah Produksi Padi	Ton	1.020 C	Program Peningkatan produksi pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produksi Padi (ton)	ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
							Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
							Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
							Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian,



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
									Kesehatan Hewan
						Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kesehatan Hewan
	l. Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan m. Memperkuat sistem pemantauan pasokan dan harga pangan agar tetap terjangkau	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV < 10	Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan,	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	93,00		Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
						Program Pengembangan Diversifikasi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	skor	Dinas Ketahanan Pangan,



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	n. Peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19 o. Pengembangan kompetensi dan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67.8	dan Pola Konsumsi Pangan			Pertanian dan Kesehatan Hewan
						Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	64	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
							Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja	%	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
							Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman	%	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
						Program Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
							Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	Dinas Tenaga Kerja Dan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) p. Penguatan program link and match antara supply dan demand pasar kerja.								Transmigrasi
	q. Perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif	Angka kemiskinan menurun	Persentase penduduk miskin	%	5,68	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif	%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	r. Penyediaan kebutuhan dasar					Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Unit BUMDesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan terutama nelayan, petani, buruh, pelaku UKM, dan kelompok rentan lainnya dalam bentuk beasiswa, jaminan kesehatan, beras sejahtera, dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni s. Penguatan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi								Pencatatan Sipil
						Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	Dinas Sosial
							Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	Dinas Sosial
							Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	Dinas Sosial
						Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	Dinas Sosial
							Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	Dinas Sosial
							Persentase PMKS	%	Dinas Sosial



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	penduduk miskin dengan pengembangan kewirausahaan, penguatan modal usaha kecil, pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan usaha ekonomi perempuan lainnya. t. Optimalisasi peran kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam						penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)		
							Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	Dinas Sosial
							Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	Dinas Sosial
							Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	Dinas Sosial



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	perencanaan / pelaksanaan dan evaluasi Program Penanggulangan kemiskinan yang terpadu. u. Peningkatan pemanfaatan dana CSR perusahaan dalam penanggulangan kemiskinan v. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial								
	w. Penguatan dukungan kepastian	Meningkatnya realisasi investasi dan	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	Rp Milyar	8.100	Program Peningkatan Iklim Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp Milyar	Dinas Penanaman Modal Dan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	usaha, perluasan investasi melalui optimalisasi digital promotion potensi dan peluang investasi, serta pemberian kemudahan perijinan investasi menggunakan OSS. x. Penguatan daya saing Koperasi dan UMKM melalui fasilitasi akses permodalan modal usaha, pemasaran dan standarisasi kualitas produk, dan penguatan	daya saing UMKM	Penanaman Modal Asing (PMA)			dan Realisasi Investasi			Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp Milyar	900		Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp Milyar	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	22,25	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	nilai	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	kelembagaan dan manajemen koperasi.								Pintu
							Persentase Pelayanan Sesuai SOP	%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							Persentase KSP/USP sehat	%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							Pertumbuhan koperasi	%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif	%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						Program	Persentase Koperasi dan	%	Dinas Koperasi,



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
						Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi	UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi		Usaha Kecil dan Menengah
3. Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas	a. Pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman, penataan kawasan permukiman kumuh, peningkatan akses air bersih dan sanitasi.	Berkurangnya kawasan kumuh dan	Luas Kawasan Kumuh	Ha	255,09	Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan	Luas kawasan kumuh	ha	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	%	88,48	Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi	Cakupan pelayanan Sanitasi:	%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
							Air Limbah	%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
							Persampahan	%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
							Drainase	%	Dinas Perumahan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
									Dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya akses pelayanan air bersih	Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	%	100	Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman	%	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	b. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	%	75,00	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis)	km	Dinas Pekerjaan Umum
							Panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi	km	Dinas Pekerjaan Umum
						Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan Provinsi berkondisi baik	%	Dinas Pekerjaan Umum
							Persentase jembatan Provinsi berkondisi baik	%	Dinas Pekerjaan Umum
	c. Penguatan upaya pencegahan,	Berkurangnya kerusakan lingkungan,	Persentase waduk yang memiliki	%	100	Program Pengawasan dan	Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	%	Dinas Lingkungan Hidup



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	d. Penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.	meningkatkan luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan	kualitas air sesuai baku mutu			Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
			Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan	%	10,99		Persentase kab/kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu	%	Dinas Lingkungan Hidup
							Persentase pelaku usaha / industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar	%	Dinas Lingkungan Hidup
							Persentase Kab/kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai baku mutu	%	Dinas Lingkungan Hidup
							Persentase kabupaten/kota yang memenuhi standar nominasi Adipura	%	Dinas Lingkungan Hidup
	e. Penguatan penyediaan energi yang terjangkau dan pengelolaan energi baru	Meningkatkan rasio elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	%	93,50	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	dan terbaru,								
4. Peningkatan Keunggulan di Bidang Kemaritiman	a. Peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi dan pemerataan sarana prasarana perhubungan dan transportasi laut untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	%	100,00	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	%	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	100		Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	100,00		Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyeberangan perintis	%	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	%	100,00		Persentase pelabuhan penyeberangan terkelola dengan baik	%	Dinas Perhubungan
						Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara	Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis	%	Dinas Perhubungan
							Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara	%	Dinas Perhubungan
							Persentase ketersediaan	%	Dinas



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
							Bandar Udara		Perhubungan
						Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	Dinas Perhubungan
						Program Pembangunan Transportasi Laut	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	%	Dinas Perhubungan
							Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis	%	Dinas Perhubungan
							Persentase pelabuhan laut terkelola dengan baik	%	Dinas Perhubungan
	b. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan melalui peningkatan keterampilan	Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	306.46 ³	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.920		Nilai Tukar Nelayan (NTN)		Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Jumlah produk olahan Hasil	Ton	1.331	Program pengembangan dan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	Dinas Kelautan Dan Perikanan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	nelayan dan pembudidaya ikan, penyediaan sarana dan prasarana penangkapan dan pembudidayaan ikan, peningkatan kapasitas dan kualitas unit usaha pengolahan ikan.		perikanan (Ton)			pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)		Dinas Kelautan Dan Perikanan
						Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan	Jumlah produk olahan Hasil perikanan	Ton	Dinas Kelautan Dan Perikanan
						Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US \$	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	c. Pemulihan pariwisata dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata melalui peningkatan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta orang	2,5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau	hari	Dinas Pariwisata
						Program Pengembangan Industri Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	Dinas Pariwisata
						Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	Juta orang	Dinas Pariwisata
							Jumlah Kunjungan	Juta	Dinas



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, dan pengembangan kemitraan pelaku usaha dan jasa pariwisata, dan penyelenggaraan event-event pariwisata.						Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau	orang	Pariwisata
							Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	Dinas Pariwisata
						Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	%	Dinas Pariwisata
5. Pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan	a. Pemulihan kinerja pelayanan publik dan peningkatan inovasi dalam pelayanan publik yang berorientasi percepatan cakupan layanan dan pelayanan prima yang	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas Pegawai	Nilai	80	Program Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase Jumlah inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah	%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
			Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	BB	Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan standar pelayanan publik	%	Sekretariat Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala A - E	B		Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang	%	Sekretariat Daerah



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	memuaskan seluruh lapisan masyarakat. b. Penguatan sistem pemerintahan yang terbuka (open government) melalui keterbukaan informasi publik, penguatan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. c. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta pengembangan e-government						diselenggarakan oleh kementerian		
			Nilai Keterbukaan informasi publik	Skala nilai 0-100	67,5		Persentase SOP pada seluruh OPD yang tersusun.	%	Sekretariat Daerah
			Nilai e-government	Skala nilai 1-4	2,5		Persentase SOP pada slrh OPD yang telah diimplementasikan	%	Sekretariat Daerah
							Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik	Skor SKM	Sekretariat Daerah
						Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik	Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri	Skala nilai 0-100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
						Program e-government	Nilai e- government Provinsi Kepri	Skala nilai 1-4	Dinas Komunikasi Dan Informatika
							Persentase Domain dan	%	Dinas



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	dalam rangka perbaikan manajemen kinerja dan pelayanan publik pemerintah daerah. d. Peningkatan kualitas ASN menuju Smart ASN, DAN penerapan sistem manajemen pegawai berbasis kompetensi dan merit system secara transparan, obyektif dan akuntabel						Sub Domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang Telah Dimanfaatkan		Komunikasi Dan Informatika
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan	%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat	Kasus	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik	%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
							Indeks Kepuasan Pelayanan ASN	indeks	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi	%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Program perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
							Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
							Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
							Persentase kegiatan prioritas yang didanai	%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
							Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	e. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, dan pemanfaatan aset daerah	Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,624	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
	f. Penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah		Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Opini Level	WTP		Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah	%	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
	g. Peningkatan pengendalian		Level Kapabilitas	Level	3		Persentase tunggakan Pajak Daerah yang	%	Badan Pengelolaan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	intern pemerintah melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), didukung penguatan kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan consulting partner		APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau				tertagih		Pajak dan Retribusi
						Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
							Persentase kepuasan pelayanan	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dilengkapi dengan bukti legalitas kepemilikan	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
							Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah yang tidak bergerak yang dilakukan pengamanan (pagar, patok, papan nama)	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Program	Opini BPK atas LKPD	Status	Inspektorat



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
						Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah	Pemprov Kepri		daerah
							Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	Inspektorat daerah
							Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Zona	Inspektorat daerah
						Program Pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P	%	Inspektorat daerah
							Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri	Status	Inspektorat daerah
	h. Peningkatan penegakan Perda dan Pergub dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban	Meningkatnya penciptaan rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus		Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
	i. Pengendalian potensi konflik sosial dan konflik SARA		Angka kriminalitas	Kasus			Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri	orang	Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
						Program	Persentase demo yang	%	Satpol PP dan



Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi / Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah
	j. Penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit)					Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	berjalan aman		Penanggulang an Kebakaran
						Program pengembang an wawasan kebangsaan	Persentase konflik sosial tertangani	%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi memilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulang an Bencana	Persentase desa/kel tangguh bencana	%	Badan Penanggulang an Bencana Daerah

4.5. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu mencapai target indikator sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka, dengan target sebagai berikut :

Tabel 4.3
Target Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin
dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1	Karimun	6,85	6,10	5,20
2	Bintan	7,50	3,40	6,40
3	Natuna	4,50	3,75	4,50
4	Lingga	6,93	11,49	3,91
5	Kepulauan Anambas	3,00	4,01	5,66
6	Kota Batam	4,60	3,09	5,29
7	Kota Tanjungpinang	5,26	9,10	5,45
	Provinsi Kepulauan Riau	5+1	5,68	6,60

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per kabupaten/kota sebagai berikut :

1) Kabupaten Karimun

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dengan arah kebijakan :
 - (1) Pengembangan pola intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan perkebunan sehingga produksi pertanian dapat berorientasi pasar.
 - (2) Peningkatan intensifikasi produk hortikultura dan agribisnis peternakan dengan pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan di perkotaan.
 - (3) Perlu didukung sarana dan prasarana produksi yang kontinuitas terkait dengan intensifikasi dan diversifikasi pola tanam.
- b) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan produk perikanan dengan arah kebijakan:
 - (1) Peningkatan pemanfaatan lahan non produktif sebagai lahan budidaya perikanan darat (ikan lele, gurame dan nila).



- (2) Pengembangan budidaya perikanan laut dengan sistem jaring apung atau keramba didukung pemenuhan pasokan bibit dan pakan ikan secara kontiniu.
- (3) Intensifikasi produk perikanan air tawar maupun laut serta produk olahannya di kawasan minapolitan.
- c) Mengembangkan industri campuran dan industri strategis padat karya dan berorientasi ekspor (manufaktur).
- d) Membangun akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik (pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat.
- e) Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas terutama kawasan pergudangan.
- f) Mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas pelabuhan bebas, terutama wisata alam, wisata minat khusus dan wisata agro.

2) Kabupaten Bintan

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya khususnya ikan kerapu dan jenis ikan lainnya dengan sistem keramba didukung pemenuhan pasokan bibit dan pakan ikan secara kontinyu.
- b) Mengembangkan industri manufaktur unggulan berorientasi ekspor dan industri pengolahan dengan penataan kawasan industri pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri, pengembangan kawasan sentra-sentra industri kecil, pengembangan industri pengolahan hasil laut, dan pengembangan industri hasil pertanian dan perkebunan.
- c) Mengembangkan kawasan wisata terpadu, eksklusif, kawasan wisata terbuka umum dan wisata minat khusus, dengan prioritas pada rehabilitasi jalan Provinsi yang digunakan sebagai track event internasional di Kabupaten Bintan.
- d) Membangun akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik (pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat, dan menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas.
- e) Meningkatkan konektivitas antar pulau berupa sarana dan prasarana angkutan laut bagi penumpang dan barang khususnya di kecamatan Tambelan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar juga menjaga stabilitas harga barang serta ketahanan pangan.

- f) Meningkatkan prasarana air bersih bagi masyarakat pesisir menggunakan teknik pipa bawah laut dari sumber air bersih di pulau besar ke pulau-pulau kecil disekitarnya.
- g) Meningkatkan ketersediaan listrik di pulau-pulau kecil dengan jaringan kabel udara dan kabel bawah laut agar dapat meningkatkan rasio elektrifikasi dan ketersediaan listrik 24 jam.

3) Kabupaten Natuna

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut :

- a) Mengembangkan kawasan sesuai dengan *Masterplan* Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna;
- b) Mengembangkan infrastruktur secara berkelanjutan untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan yang diarahkan pada simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global;
- c) Mengembangkan pelabuhan transit pelayaran internasional dan pusat pelayanan akses pasar global;
- d) Mengembangkan fasilitas pada alur pelayaran internasional yang melewati Kabupaten Natuna meliputi tempat Bunkering BBM dan STS Oil.
- e) Mengembangkan industri migas, industri perkapalan, industri petrokimia, dan industri berbasis perikanan, dengan arah kebijakan pada Pembangunan sarana dan prasarana pendukung; Pengembangan fasilitas pada alur pelayaran internasional; dan Pembangunan infrastruktur penunjang.
- f) Mengembangkan destinasi dan pemasaran wisata bahari, ekowisata dan minat khusus di Pulau Senoa, Pantai setanau dan sengiap, Pantai teluk depih, Pantai batu kasah, Pantai teluk selahang, Pantai teluk buton, Pantai sisi, Pulau kembang, Batu seduyung, dan Batu catur, dengan mendatangkan investor dan membangun kemitraan antara pelaku usaha dan masyarakat, dan Peningkatan kualitas SDM pariwisata.
- g) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan produk kelautan dengan arah kebijakan :
 - (1) Pengembangan perikanan budidaya air laut, air tawar, air payau, dan rumput laut dengan penyediaan jaring apung atau keramba didukung Pemenuhan obat, bibit dan pakan ikan secara kontinyu, Pengembangan industri maupun sarana dan prasarana pengolahan perikanan, Bantuan modal bagi nelayan melalui koperasi, dan Pelatihan SDM Perikanan.
 - (2) Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan dengan pembangunan Techno Park, BBIP SMK Kelautan dan Perikanan



- (3) di Kecamatan Bunguran Timur; Budidaya Kerapu dan Napoleon di Kecamatan Bunguran Barat; Sentra Rumput Laut di Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga; Sentra Bisnis Perikanan Tangkap Terintegrasi di Kecamatan Pulau Tiga; serta penyediaan sarana prasarana serta sentra bisnis perikanan tangkap di Kecamatan Pulau Tiga.
- (4) Pengembangan Perikanan Tangkap dengan fokus pada Penguatan kelembagaan kelompok dengan kemitraan; Pengembangan armada penangkapan ikan; Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan perikanan; Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap; dan Pembinaan kelompok nelayan.
- h) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dengan arah kebijakan:
 - (1) Penyediaan sarana dan prasarana produksi hasil pertanian dan peternakan yang berkelanjutan.
 - (2) Peningkatan Pelatihan SDM Pertanian, perkebunan dan peternakan, dan pengembangan teknologi hasil pertanian.
 - (3) Pengembangan industri perkebunan
 - (4) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan

4) Kabupaten Lingga

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagai berikut :

- a) Mengembangkan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan pada zona kawasan pertanian Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga, didukung dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil pertanian dan perikanan, dan pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pertanian.
- b) Meningkatkan produksi perikanan dengan mengoptimalkan eksploitasi pada zona Kawasan tangkap terdapat pada seluruh perairan Kabupaten Lingga, dan pengembangan budidaya pada zona Kawasan Perikanan budidaya meliputi Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep Selatan. Peningkatan produksi dengan dukungan prasarana pelabuhan dan dermaga perikanan, penyediaan alat tangkap, dan pemberdayaan nelayan.
- c) Mengembangkan budidaya perikanan dan garam dengan penyediaan sarana dan prasarana budidaya, pelaksanaan pemetaan potensi dan kelayakan lahan tambak.



- d) Mengembangkan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pemasaran wisata untuk mendukung pengembangan kawasan wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam dan wisata bahari dengan prioritas pada:
 - (1) KPP Senayang, meliputi: Kawasan Pulau Benan dan Sekitarnya; Tajur Biru, Pulau Sebangka dan Sekitarnya; Pulau Pena'ah, Batu Berlubang dan Sekitarnya.
 - (2) KPP Lingga, meliputi: Pembangunan dan pengembangan Kawasan Damnah, Mepar, Kawasan Tugu Khatulistiwa, Air Terjun Resun, Pantai Pasir Panjang.
 - (3) KPP Singkep, meliputi: pembangunan dan pengembangan Kawasan Pemandian Air Panas, Batu Ampar, Sergang dan Pulau Berhala.
- e) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan lahan Kawasan Strategis di Kabupaten Lingga.

5) Kabupaten Kepulauan Anambas

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Anambas diuraikan sebagai berikut :

- a) Pembangunan dan pengembangan simpul transportasi udara dan laut sehingga tercipta keterpaduan antarmoda dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas di Kepulauan Anambas, meliputi pengembangan bandar udara, terminal ferry dan terminal angkutan darat yang terletak di Palmatak.
- b) Mengembangkan sumber daya energi alternatif yang bersumber dari energi arus pasang surut air laut, terutama di alur celah antar pulau yang mempunyai kecepatan arus yang cukup besar, serta sumber energi alternatif dari sumber angin dan tenaga surya.
- c) Mengembangkan Pelabuhan Check Point di Kabupaten Kepulauan Anambas (Tarempa) guna mempermudah akses wisatawan luar negeri terhadap pariwisata di Kepulauan Anambas.
- d) Mengembangkan perikanan tangkap dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti Alat Pengangkapan Ikan, pelabuhan perikanan, pabrik es, fasilitasi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar terapung (Solar Packed Dealer Nelayan [SPDN]), meningkatkan kuota ketersediaan BBM untuk nelayan, Pemberdayaan nelayan, dan meningkatkan koordinasi penanganan illegal fishing.
- e) Mengembangkan perikanan budidaya dengan pembangunan BBI, Keramba Jaring Apung/keramba, Fasilitas pendukung paska panen, kapal nelayan, dan Pemberdayaan pembudidaya ikan;



- f) serta Menyiapkan rumput laut dan kerang mutiara sebagai produk unggulan baru.
- g) Mengembangkan produk perikanan hasil olahan.
- h) Mengembangkan pulau Matak sebaga pusat/ sentra pengembangan industri dan ketenagakerjaan, dan pulau Jemaja sebagai pusat/ sentra pengembangan pariwisata, perikanan dan pertanian.
- i) Mengembangkan industri pendukung pertambangan migas lepas pantai, Industri Ship Service, industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah, industri kerajinan rumah tangga untuk mendukung pariwisata, industri pembuatan kapal kecil, dan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.
- j) Membangun titik labuh untuk jalur pelayaran wisata, infrastruktur penunjang pariwisata, mengembangkan tiga destinasi wisata utama, dan melakukan promosi paket wisata bahari, meliputi:
 - (1) Kluster Pulau Jemaja Wisata pantai pelestarian penyu, snorkling, diving, sunset, sunrise, gua burung wallet, Rock Climbing, wiata budaya, air terjun, tracking mangrov, kayaking, kuliner, wisata sepeda wisata hutan.
 - (2) Kluster Pulau Penjalin Wisata pantai snorkling, diving, sunrise, swimming, fishing dan tracking
 - (3) Kluster Pulau Temuruk Wisata pantai, snorkling, diving, sunset, sunrise, tracking swiming, fishing dan wisata kancil.
- k) Melakukan revitalisasi lahan sawah dan mengembangkan pertanian holtikultura dengan memanfaatkan potensi sawah dan lahan dipulau jemaja dan lahan cadangan di kecamatan palmatak dengan prioritas pada penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan, sertifikasi bibit unggul pertanian/ perkebunan, pengembangan pertanian areal tanam padi sawah (cetak sawah), pelatihan/ magang petani untuk peningkatan mutu beras, peremajaan tanaman cengkeh, dan penetapan blok penghasil tinggi tanaman cengkeh.

6) Kota Batam

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai berikut:

- a) Pada Pusat Kota dikembangkan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain), serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.



- b) Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, dilakukan peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing.
- c) Pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistis setempat diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi "pelabuhan internasional hub" (hub international port).
- d) Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang ada di Pulau Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi yang strategis di Pulau Rempang dan/atau Galang.
- e) Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (outlet) utama transportasi (Kawasan Primer), serta ke/dari Kawasan-kawasan Sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (flyover), simpang susun (interchange), jalan lintas bawah (underpass), dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air.
- f) Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman.
- g) Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, tamankota, taman lingkungan, bumi perkemahan dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30% dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota;
- h) Mengembangkan wisata kota, wisata bahari dan wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), wisata minat khusus, wisata terpadu, eksklusif, wisata agro dan wisata alam. Pengembangan kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya pada Pulau-pulau kecil di wilayah Utara Kota Batam seperti P. Lengkana, P. Air Asam, Air Manis, P. Leroy, P. Sekila (Kec.



- i) Belakang Padang), P. Puteri (Kec. Nongsa), dan Pulau-pulau kecil di wilayah Selatan Kota Batam sebagai tempat Rekreasi pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan P. Abang dan P. Petong
- j) Pengembangan Zona peruntukan industri yaitu Tanjung Sauh-Ngenang, Sembulang, Tanjung Gundap, P. Kepala Jeri dan P. Janda Berhias, dan Pengembangan industri Shipyard, Ship repair, Ship building, dan industri pendukung pengeboran lepas pantai, serta industri maritim lainnya di Kawasan Tanjung Gundap dan Pengembangan Kawasan Kabil-Tanjung Sauh.
- k) Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan.

7) Kota Tanjungpinang

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut :

- a) Mengembangkan Pulau Dompok sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Rencana Induk (Masterplan) Istana Kota Piring.
- b) Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi massal perkotaan secara terintegrasi dan terhubung dengan jaringan transportasi laut dan udara.
- c) Mengembangkan Industri automotif, Industri elektronik, Industri konveksi, Industri makanan, Industri pengolahan hasil laut, dan Industri perkapalan.
- d) Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang mampu mengakomodasi pasar tradisional, termasuk kegiatan koperasi dan Usaha mikro kecil Menengah (UMKM).
- e) Mengembangkan kawasan wisata sejarah, wisata budaya dan wisata kreatif.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Elemen utama program prioritas memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, dan Perangkat Daerah pelaksana yang bertanggungjawab.

Rencana program dan kegiatan prioritas juga mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Di dalam perencanaan pembangunan terdapat sejumlah kegiatan yang diusulkan melalui mekanisme forum Musrenbang. Rencana program yang diusulkan dalam Musrenbang tidak mungkin semua akan dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan skala prioritas untuk menentukan mana kegiatan yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak dalam sebuah anggaran pembangunan. Penentuan skala prioritas program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2021 dalam rangka penyelesaian isu strategis dan permasalahan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pada Tahun 2021 merupakan program dan kegiatan yang pendanaannya secara umum bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021. Namun ada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersumber dari luar APBD, yaitu dari APBN dan sumber-sumber lainnya yang datang atas partisipasi masyarakat ataupun dunia usaha.

5.1 Dukungan Program RKPD Terhadap Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tercantum pada tabel berikut ini.



Prioritas Daerah	Strategi/Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Program Yang Mendukung
1. Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu	a. Penguatan branding Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	70,75	Program Pengembangan Nilai Budaya
	b. Pengembangan bangunan berciri khas budaya melayu		Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	%	22,38	Program pengelolaan kekayaan budaya
	c. Peningkatan pelestarian adat istiadat					Program pengelolaan keragaman budaya
	d. Peningkatan pementasan seni budaya daerah.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	%	100	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
	e. Peningkatan pemahaman nilai-nilai agama		Persentase santri yang menjadi hafiz	%	100	
2. Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat	a. Pengembangan mutu pendidikan menengah dan akses pendidikan secara luas agar semua anak dapat sekolah, melalui peningkatan keterjangkauan pelayanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum berbasis <i>skill, attitude</i> , dan <i>learning culture</i> , penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi, dan pemenuhan akses inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	10,47	Program Pendidikan Menengah dan Khusus
			Persentase SMA/SMK/SLB yang terakreditasi minimal B	%	84,00	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
						Program Peningkatan Mutu Pendidikan
	b. Peningkatan	Meningkatnya	Angka	per	128	Program



Prioritas Daerah	Strategi/Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Program Yang Mendukung
	derajat kesehatan melalui upaya promotif dan preventif kesehatan dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif melalui pelaksanaan GERMAS, PHBS, penanganan stunting, penuntasan ODF, dan penguatan peran Posyandu. c. Pemantapan kualitas layanan kesehatan rujukan melalui pengembangan SDM kesehatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar.	kualitas kesehatan masyarakat	Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	100.000 KH		Kesehatan Masyarakat
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	30	
			Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	16,2	
						Program pencegahan dan pengendalian penyakit
						Program pelayanan kesehatan
						Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
						Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
	d. Penguatan kualitas hidup dan pemenuhan hak perempuan dan anak melalui pelaksanaan pemberdayaan perempuan, implementasi Kabupaten/kota Layak Anak, pengarusutamaan gender, dan penguatan kualitas layanan rujukan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,75	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,5	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
						Program Perlindungan Anak



Prioritas Daerah	Strategi/Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Program Yang Mendukung
	perlindungan perempuan dan anak.					
	e. Pengembangan industri melalui diversifikasi produk dan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk potensial dan unggulan daerah	Meningkatnya kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	2.200	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
			Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Juta US \$	1.550,20	Program Pengembangan Industri Unggulan
						Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	f. Pengembangan usaha perdagangan melalui pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan, fasilitasi kerjasama ekspor, dan pemantauan pasokan dan harga pangan pokok	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,52	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
						Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	g. Peningkatan ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan petani, dan penyediaan sarana produksi pertanian.	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Ton	45.822	Program peningkatan kesejahteraan Petani
			Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.742	
			Jumlah Produksi Padi	Ton	1.020 CV < 10	Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan
						Program



Prioritas Daerah	Strategi/Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Program Yang Mendukung
						Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	h. Pengembangan sistem logistik daerah dalam rangka menjamin ketahanan pangan daerah i. Memperkuat sistem pemantauan pasokan dan harga pangan agar tetap terjangkau	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV < 10	Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan,
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	93,00	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
	j. Pengembangan kompetensi dan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) k. Penguatan program link and match antara suply dan demand pasar kerja.	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	67.8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
						Program Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja
	l. Penyediaan kebutuhan dasar penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan terutama nelayan, petani, buruh, pelaku UKM, dan kelompok rentan lainnya dalam bentuk beasiswa, jaminan	Angka kemiskinan menurun	Persentase penduduk miskin	%	5,68	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
						Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
						Program Penanggulangan



Prioritas Daerah	Strategi/Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Program Yang Mendukung
	kesehatan, beras sejahtera, dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni m. Penguatan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi penduduk miskin dengan pengembangan kewirausahaan, penguatan modal usaha kecil, pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan usaha ekonomi perempuan lainnya. n. Optimalisasi peran kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program Penanggulangan kemiskinan yang terpadu. o. Peningkatan pemanfaatan dana CSR perusahaan dalam penanggulangan kemiskinan					an Kemiskinan Program Rehabilitasi Sosial
	p. Peningkatan investasi di berbagai sektor optimalisasi digital promotion potensi	Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing UMKM	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing	Rp Milyar	8.100	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



Prioritas Daerah	Strategi/Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Program Yang Mendukung
	dan peluang investasi, serta pemberian kemudahan perijinan investasi menggunakan OSS. q. Penguatan daya saing Koperasi dan UMKM melalui fasilitasi akses permodalan modal usaha, pemasaran dan standarisasi kualitas produk, dan penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi.		(PMA)			
			Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp Milyar	900	
			Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	22,25	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
						Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
						Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
						Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
3. Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas	a. Penataan kawasan permukiman kumuh, peningkatan akses air bersih dan sanitasi.	Berkurangnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh	Ha	255,09	Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan
		Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	%		Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi



Prioritas Daerah	Strategi/Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Program Yang Mendukung
		Meningkatnya akses pelayanan air bersih	Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	%	100	Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum
	b. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	%	75,00	Program Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan
						Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	c. Pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan	Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	%	100	Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan	%	10,99	
	d. Peningkatan pengelolaan energi baru dan terbarukan	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	%	93,50	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi
4. Peningkatan Keunggulan di Bidang Kemaritiman	a. Pemerataan sarana prasarana perhubungan dan transportasi laut untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	%	100,00	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat
			Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	100	
			Persentase ketersediaan	%	100,00	Program Peningkatan



Prioritas Daerah	Strategi/Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Program Yang Mendukung
			Pelabuhan Laut			Pelayanan Angkutan Laut
			Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	%	100,00	Program Pembangunan Transportasi Laut
	b. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan melalui peningkatan keterampilan nelayan dan pembudidaya ikan, penyediaan sarana dan prasarana penangkapan dan pembudidayaan ikan, peningkatan kapasitas dan kualitas unit usaha pengolahan ikan.	Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	306.463	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.920	
			Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Ton	1.331	Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya
						Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan
						Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
	c. Pengembangan pariwisata bahari dan pariwisata religi melalui penyiapan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, dan pengembangan kemitraan pelaku usaha dan jasa pariwisata, dan penyelenggaraan event-event pariwisata.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta orang	2,5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
						Program Pengembangan Industri Pariwisata
						Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
						Program Pengembangan Kelembagaan



Prioritas Daerah	Strategi/Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Program Yang Mendukung
						Pariwisata
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	a. Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik yang berorientasi percepatan cakupan layanan dan pelayanan prima yang memuaskan seluruh lapisan masyarakat. b. Penguatan sistem pemerintahan yang terbuka (open government) melalui keterbukaan informasi publik, penguatan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. c. Pengembangan e-government dalam rangka perbaikan manajemen kinerja dan pelayanan publik pemerintah daerah. d. Peningkatan kualitas ASN menuju Smart ASN, DAN penerapan sistem manajemen pegawai berbasis kompetensi dan merit system secara transparan, obyektif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas Pegawai	Nilai	80	Program Pengembangan Inovasi Daerah
			Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	BB	Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala A - E	B	
			Nilai Keterbukaan informasi publik	Skala nilai 0-100	67,5	Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik
			Nilai e-government	Skala nilai 1-4	2,5	Program e-government
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
						Program perencanaan Pembangunan Daerah
	e. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, dan pemanfaatan aset daerah f. Penguatan	Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,624	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
			Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan	Opini Level	WTP	Program Peningkatan dan



Prioritas Daerah	Strategi/Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Program Yang Mendukung
	akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah g. Peningkatan pengendalian intern pemerintah melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), didukung penguatan kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan consulting partner	pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Riau			Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah
			Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah
						Program Pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
	h. Peningkatan penegakan Perda dan Pergub dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban i. Pengendalian potensi konflik sosial dan konflik SARA dengan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak j. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan kesiapan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya penciptaan rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus		Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM
			Angka kriminalitas	Kasus		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
						Program pengembangan wawasan kebangsaan
						Program pendidikan politik



Prioritas Daerah	Strategi/Arah Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Program Yang Mendukung
						masyarakat
						Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan-an Bencana

5.3 Dukungan Program RKPD Terhadap Prioritas Nasional

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 mendukung pencapaian prioritas nasional. Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian Prioritas Nasional tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Dukungan Program RKPD Tahun 2021 Provinsi Kepulauan Riau
Terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional
1.	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, yaitu :	
	a. Pemenuhan kebutuhan energy dengan mengutamakan peningkatan energy baru terbarukan (EBT)	• Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi
	b. Penguatan pilar pertumbuhan daya saing ekonomi	• Program Pengembangan Destinasi Pariwisata • Program Pengembangan Industri Pariwisata • Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
	c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	• Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor • Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial • Program Penataan Struktur Industri • Program Pengembangan Industri Unggulan



No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional
		• Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi
	d. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sector riil, dan industrialisasi	• Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja • Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi • Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi • Program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan
	e. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan koperasi	• Program Penguatan Kelembagaan Koperasi • Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan • Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi
	f. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	• Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum
	g. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	• Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan • Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
	h. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan	• Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap • Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan • Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan • Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional
		• Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
2.	Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan kegiatan prioritas	
	a. Pengembangan kawasan strategis	• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	b. Pengembangan sektor unggulan	• Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi
	c. Pengembangan kawasan perkotaan	• Program penataan bangunan dan lingkungan
	d. Pemenuhan pelayanan dasar	• Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan • Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
	e. Pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi	• Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan • Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan • Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna • Program Peningkatan Pembangunan dan Pemerintahan Desa
	f. Kelembagaan dan keuangan daerah.	• Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
3.	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yaitu :	
	a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan	• Program keluarga berencana • Program penataan Administrasi Kependudukan
	b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing	• Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	c. Mengentaskan kemiskinan	• Program Penanggulangan Kemiskinan • Program Rehabilitasi Sosial • Program Pemberdayaan Sosial
	d. Meningkatkan kualitas anak,	• Program Penguatan Kelembagaan



No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional
	perempuan dan pemuda	Pengarusutamaan Gender dan Anak • Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan • Program Perlindungan Anak • Program Kualitas Keluarga • Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan • Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda • Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga • Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
	e. Memperkuat pelaksanaan perlindungan social	• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	f. Meningkatkan pelayanan kesehatan menu cakupan kesehatan semesta	• Program Kesehatan Masyarakat • Program pencegahan dan pengendalian penyakit • Program pelayanan kesehatan • Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan • Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan • Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan • Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
	g. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	• Program Pendidikan Menengah dan Khusus • Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Manajemen Pelayanan Pendidikan • Program Peningkatan Mutu Pendidikan
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, yaitu :	
	a. Memperkuat moderasi beragama	• Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan



No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional
		• Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama
	b. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas	• Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan • Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola perpustakaan • Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan • Program Pengembangan Inovasi Daerah
	c. Revolusi mental dan pembinaan ideology pancasila	• Program pengembangan wawasan kebangsaan
	d. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan	• Program pengembangan nilai budaya • Program pengelolaan kekayaan budaya • Program pengelolaan keragaman budaya
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu :	
	a. Infrastruktur pelayanan dasar	• Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan • Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum • Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi • Program penataan bangunan dan lingkungan
	b. Transformasi digital	• Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik • Program e-government
	c. Energy dan ketenagalistrikan	• Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah • Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara • Program Pengelolaan Ketenagalistrikan • Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan
	d. Infrastruktur ekonomi	• Program Pengelolaan Sumber Daya Air • Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan



No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional
		dan Jembatan • Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan • Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi • Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi • Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi • Program pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	e. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan	• Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat • Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas • Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut • Program Pembangunan Transportasi Laut
6.	Membangun Lingkungan hidup , meningkatkan ketahanan bencana , dan perubahan iklim , yaitu :	
	a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	• Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam • Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup
	b. Pembangunan rendah karbon	
	c. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	• Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana • Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana • Program Pemulihan Pasca Bencana



No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional
7.	Memperkuat Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public, yaitu:	•
	a. Konsolidasi demokrasi	• Program pendidikan politik masyarakat
	b. Menjaga stabilitas keamanan nasional	• Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal • Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan • Program Penanggulangan Kebakaran
	c. Reformasi birokrasi dan tata kelola	• Program kelembagaan organisasi pemerintah daerah • Program pembinaan dan pengembangan aparatur • Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik • Program pembentukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih • Program e-Government • Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan • Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Program e-procurement • Program Penataan Peraturan Perundang-undangan • Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum • Program Pembinaan Hukum • Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum • Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah • Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan • Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan • Program Peningkatan Sistem



No	Prioritas Nasional	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional
		Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah • Program Pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau • Program Perencanaan Pembangunan Daerah • Program perencanaan Perekonomian • Program Perencanaan sosial budaya • Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup • Program Perencanaan Pemerintahan • Program Kerjasama Pembangunan • Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah • Program peningkatan koordinasi pengelolaan dana perimbangan pusat dan daerah • Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi • Program peningkatan Kualitas pelayanan dan informasi Publik • Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah • Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	d. Optimalisasi kebijakan luar negeri	-
	e. Penegakan hukum nasional	• Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM



5.2 Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SPM

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 mendukung pencapaian target SPM. Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SPM tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Dukungan Program RKPD Tahun 2021 Terhadap Pencapaian Target SPM
Provinsi Kepulauan Riau

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target 2021	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
1.	Pendidikan				
	a. pendidikan menengah;	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	90.00	Program Pendidikan Menengah dan khusus
	b. pendidikan khusus;	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	%	100	Program Pendidikan Menengah dan khusus
2.	Kesehatan				
	a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	1) Program pelayanan kesehatan 2) Program pencegahan dan pengendalian penyakit 3) Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
	b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang	%	100	a. Program pelayanan kesehatan b. Program pencegahan dan



No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target 2021	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	kejadian luar biasa daerah provinsi;	mendapatkan layanan kesehatan			pengendalian penyakit c. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100.00	Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum
	b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	%	100.00	Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan
	b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah	%	100	Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan



No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target 2021	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;	Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			
5.	Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat				
	a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	%	100	Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM
6.	Sosial				
	a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	%	100	Program Rehabilitasi Sosial
	b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	%	100	Program Rehabilitasi Sosial
	c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	Program Rehabilitasi Sosial



No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target 2021	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
		dasar lanjut usia di dalam panti			
	d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	%	100	Program Rehabilitasi Sosial
	e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	%	100	a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial b. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana

5.3 Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SDGs

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 mendukung pencapaian target SDGs dengan rincian kegiatan masing-masing program telah tercantum dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SDGs tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3
Dukungan Program RKPD Tahun 2021 Terhadap Pencapaian Target SDGs
Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
1. Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.	a. Program Penanggulangan Kemiskinan b. Program Rehabilitasi Sosial c. Program Kesehatan Masyarakat d. Program Surveilans dan karantina kesehatan e. Program Peningkatan Kualitas dan



Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
	Produktivitas Tenaga Kerja f. Program Keluarga Berencana g. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan h. Program Peningkatan Mutu Pendidikan i. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan j. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana k. Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup l. Program Perencanaan sosial budaya m. Program Perlindungan dan Pengembagangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan	a. Program Kesehatan Masyarakat b. Program Penanganan Kerawanan Pangan c. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan d. Program peningkatan kesejahteraan Petani e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3. Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.	a. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit b. Program Rehabilitasi Sosial c. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba d. Program Pengendalian penyakit tidak menular e. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan f. Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
4. Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.	a. Program Pendidikan Menengah dan Khusus b. Peningkatan Mutu Pendidikan c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui	a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak



Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.	b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Daerah c. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan d. Program Perlindungan Anak e. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan f. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan g. Program Perlindungan Anak h. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
6. Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.	a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Air Minum b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air c. Program Kesehatan Masyarakat d. Program Penelitian, Mitigasi Dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral Dan Air Tanah
7. Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.	a. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan b. Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan Dan Konversi Energi
8. Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.	a. Program perencanaan Perekonomian b. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan c. Program Peningkatan Daya Saing Koperasi Dan UKM d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif e. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata f. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata g. Program Pengembangan Industri Pariwisata h. Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh,	a. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan b. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan



Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.	dan Jembatan c. Program Pembangunan Transportasi Laut d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut e. Program Pengembangan Industri Unggulan f. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah g. Program E-Government
10. Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.	a. Program Penanggulangan Kemiskinan b. Program Perencanaan sosial budaya
11. Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.	a. Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman Dan Perumahan b. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana c. Program Pemulihan Pasca Bencana d. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
12. Pemakaian Yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.	a. Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan
13. Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	a. Program Pemulihan Pasca Bencana
14. Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap b. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
15. Kehidupan di Darat : Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta	a. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan



Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keanekaragaman hayati.	
16. Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.	a. Program Pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri b. Program E-Procurement c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah d. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
17. Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.	a. Program Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah b. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan c. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi d. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor e. Program Penataan Struktur Industri

5.4 Dukungan Program RKPD Terhadap Sasaran Pembangunan

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 mendukung sasaran pembangunan (indikator makro ekonomi) tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.4
Dukungan Program RKPD Tahun 2021 Provinsi Kepulauan Riau
Terhadap Sasaran Pembangunan (Indikator Makro Ekonomi)

No	Sasaran Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Sasaran Pembangunan
1.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	• Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial • Program Pengembangan Industri Unggulan • Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi • Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi • Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non



No	Sasaran Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Sasaran Pembangunan
		Perizinan • Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor • Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri • Program peningkatan kesejahteraan Petani • Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan • Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan • Program Penguatan Kelembagaan Koperasi • Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan • Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi • Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan • Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut • Program Pembangunan Transportasi Laut • Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan • Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan • Program Pengembangan Destinasi Pariwisata • Program Pengembangan Industri Pariwisata • Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata • Program Pengembangan Inovasi Daerah
2.	Pengendalian Inflasi	• Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan, • Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
3.	Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka	• Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja • Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap



No	Sasaran Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Sasaran Pembangunan
		• Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan • Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi
4.	Pengentasan Kemiskinan	• Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan • Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan • Program Penanggulangan Kemiskinan • Program Rehabilitasi Sosial • Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan • Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi • Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum • Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan • Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi

5.5 Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah

Ringkasan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendidikan

a. Program Pendidikan Menengah dan Khusus

- 1) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Tanjungpinang
- 2) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 2 Tanjungpinang
- 3) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 3 Tanjungpinang
- 4) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 4 Tanjungpinang
- 5) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 5 Tanjungpinang
- 6) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Bintan Timur
- 7) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 6 Tanjungpinang
- 8) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Toapaya
- 9) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Teluk Bintan
- 10) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Teluk Sebung
- 11) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Bintan Utara
- 12) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Tambelan
- 13) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Bintan Pesisir
- 14) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Mantang



- 15) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 2 Bintan Pesisir
- 16) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 2 Teluk Bintan
- 17) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Lingga
- 18) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Singkep
- 19) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Singkep Barat
- 20) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Singkep Selatan
- 21) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Senayang
- 22) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Lingga Utara
- 23) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 2 Lingga
- 24) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 3 Lingga
- 25) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 2 Singkep
- 26) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 2 Senayang
- 27) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 3 Senayang
- 28) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 4 Senayang
- 29) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Karimun
- 30) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 2 Karimun
- 31) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 3 Karimun
- 32) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 7 Tanjungpinang
- 33) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 2 Kundur
- 34) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 8 Batam
- 35) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 9 Batam
- 36) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 10 Batam
- 37) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 11 Batam
- 38) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 12 Batam
- 39) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 13 Batam
- 40) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Bunguran Tengah
- 41) Pembangunan Aula SMAN 2 Karimun
- 42) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 2 Tanjungpinang
- 43) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 3 Tanjungpinang
- 44) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 4 Tanjungpinang
- 45) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 5 Tanjungpinang
- 46) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 1 Bintan Utara
- 47) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 1 Bintan Timur
- 48) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 1 Gunung Kijang
- 49) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 1 Sri Kuala Lobam
- 50) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 1 Lingga
- 51) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 2 Lingga
- 52) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 1 Senayang
- 53) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 1 Singkep
- 54) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN Kundur
- 55) Pemasangan Batu Miring SMKN 2 Karimun
- 56) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 8 Batam
- 57) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 1 Bunguran Timur Laut



- 58) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SLBN Natuna
- 59) Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan DAK SMK
- 60) Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan DAK SMA
- 61) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 7 Batam
- 62) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 14 Batam
- 63) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 15 Batam
- 64) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 16 Batam
- 65) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 17 Batam
- 66) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 18 Batam
- 67) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 19 Batam
- 68) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 20 Batam
- 69) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 21 Batam
- 70) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 22 Batam
- 71) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Bunguran Timur
- 72) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 2 Bunguran Timur
- 73) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Bunguran Selatan
- 74) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Midai
- 75) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Pulau Tiga
- 76) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Serasan Timur
- 77) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Bunguran Timur Laut
- 78) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Bunguran Barat
- 79) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Bunguran Utara
- 80) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Pulau Laut
- 81) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Serasan
- 82) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Subi
- 83) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 2 Bunguran Barat
- 84) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Siantan
- 85) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Siantan Timur
- 86) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Palmatak
- 87) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 2 Palmatak
- 88) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Jemaja
- 89) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 1 Tanjungpinang
- 90) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN Kundur Utara
- 91) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 1 Karimun
- 92) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 2 Karimun
- 93) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 1 Moro
- 94) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 1 Batam
- 95) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 2 Batam
- 96) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 3 Batam
- 97) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 4 Batam
- 98) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 5 Batam
- 99) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 6 Batam
- 100) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 7 Batam



- 101) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 1 Bunguran Barat
- 102) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 2 Bunguran Barat
- 103) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 1 Bunguran Timur
- 104) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 1 Anambas
- 105) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 2 Anambas
- 106) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMKN 3 Anambas
- 107) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran Pengawas Sekolah Kota Tanjungpinang
- 108) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran Pengawas Sekolah Kabupaten Bintan
- 109) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran Pengawas Sekolah Kabupaten Lingga
- 110) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran Pengawas Sekolah Kabupaten Karimun
- 111) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran Pengawas Sekolah Kota Batam
- 112) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran Pengawas Sekolah Kabupaten Natuna
- 113) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran Pengawas Sekolah Kabupaten Anambas
- 114) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SLBN 1 Tanjungpinang
- 115) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SLBN 2 Tanjungpinang
- 116) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SLBN Bintan
- 117) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SLBN Karimun
- 118) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SLBN Batam
- 119) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SLBN Lingga
- 120) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SLBN Tanjung Batu Kundur
- 121) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran Pusat Layanan Autis Kota Batam
- 122) Pembangunan Pagar SMAN 22 Batam
- 123) Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKN 1 Bunguran Timur Laut
- 124) Pengadaan Alat Praktek Siswa SMKN 1 Bunguran Timur Laut
- 125) Pemasangan Paving Blok SMKN 2 Karimun
- 126) Pembangunan Mushola SMAN 2 Bintan Pesisir
- 127) Pembangunan Mushola SMAN 2 Bunguran Barat
- 128) Pembangunan Pagar SMKN 1 Bunguran Barat
- 129) Pembangunan Paving Block SMAN 1 Bunguran Selatan Natuna
- 130) Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan DAK SLB
- 131) Pengadaan Meubiler SMKN 1 Tanjungpinang
- 132) Pengadaan Meubiler SMKN 2 Tanjungpinang
- 133) Pengadaan Meubiler SMKN 4 Tanjungpinang
- 134) Revitalisasi SMKN 1 Tanjungpinang
- 135) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 4 Karimun
- 136) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 5 Karimun
- 137) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Kundur



- 138) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 3 Kundur
- 139) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 4 Kundur
- 140) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 5 Kundur
- 141) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 6 Kundur
- 142) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Moro
- 143) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Durai
- 144) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Buru
- 145) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 1 Batam
- 146) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 2 Batam
- 147) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 3 Batam
- 148) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 4 Batam
- 149) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 5 Batam
- 150) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 6 Batam
- 151) Pembangunan 2 RKB SLBN Kundur
- 152) Pembangunan Rumah Dinas SMKN 2 Bunguran Barat
- 153) Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 15 Batam
- 154) Pemasangan Paving Blok SMAN 19 Batam
- 155) Pembangunan Pagar SMAN 4 Senayang
- 156) Pembangunan Rumah Dinas SMKN 2 Anambas
- 157) Pembangunan Rumah Dinas Guru SMKN 1 Senayang
- 158) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMKN 1 Moro
- 159) Pembangunan Pagar SMKN 1 Moro
- 160) Pembangunan Pagar SMKN 4 Tanjungpinang
- 161) Pembangunan Pagar SMKN 1 Bintan Timur
- 162) Rehabilitasi SMKN 1 Karimun
- 163) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 23 Batam
- 164) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 24 Batam
- 165) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN Singkep Pesisir
- 166) Pematangan Lahan SMKN 1 Singkep
- 167) Pemasangan Batu Miring SMKN 1 Gunung Kijang
- 168) Pemasangan Paving Blok SLBN LINGGA
- 169) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 10 Batam
- 170) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 20 Batam
- 171) Pembangunan Pagar SLBN di Natuna
- 172) Pengadaan Meubiler SMKN 1 Karimun
- 173) Pengadaan Meubiler di SLBN Natuna
- 174) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 25 Batam
- 175) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 26 Batam
- 176) Pembangunan Aula SMAN 3 Batam
- 177) Pembangunan Majelis Guru SMKN 2 Lingga
- 178) Pembangunan Pagar SLB Negeri Lingga
- 179) Pembangunan Pagar SLB Negeri Tanjung Batu
- 180) Pembangunan Pagar SLB Negeri Anambas



- 181) Pemasangan Paving Blok SLB Negeri Tanjung Batu
- 182) Pemasangan Paving Blok SLB Negeri Natuna
- 183) Pembangunan 4 RKB SLB Negeri Lingga
- 184) Pembangunan 4 RKB SLB Negeri Tanjung Batu
- 185) Pembangunan RKB SMAN 3 Senayang
- 186) Pembangunan Ruang UKS SLB Negeri Natuna
- 187) Pembangunan Ruang Perpustakaan SLB Negeri Natuna
- 188) Pengadaan Mesin Jahit Industri Untuk SLB Negeri Se-Kepri
- 189) Pemasangan Tralis SLB Negeri Anambas
- 190) Rehab Ruang Kelas SLB Negeri Tanjung Balai Karimun
- 191) Pembangunan Rumah Dinas SLB Negeri Lingga
- 192) Pembangunan Rumah Dinas SLB Negeri Lingga
- 193) Revitalisasi 4 Ruangan Bertingkat SLB Negeri Karimun
- 194) Pembangunan Rumah Dinas SLB Negeri Tanjung Batu Kundur
- 195) Pembangunan Rumah Dinas SLB Negeri Anambas
- 196) Pembangunan Rumah Dinas SLB Negeri Bintan
- 197) Lanjutan Pembangunan USB SLB Negeri Kijang
- 198) Penataan Lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Ramah Disabilitas
- 199) Pengadaan Mobil Operasional SLBN Lingga
- 200) Pengadaan Bus Sekolah SLBN Bintan
- 201) Pengadaan alat labor Ipa jenjang SMA di Prov. Kepulauan Riau
- 202) Pengadaan sarana pembelajaran Laptop SMA di Kepulauan Riau
- 203) Pengadaan Komputer Server Pendukung Pembelajaran Jenjang SMA di Kepulauan Riau
- 204) Monitoring dan Evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana SMA di Kepulauan Riau
- 205) Bimtek Penguatan Kelembagaan SMA menuju Akreditasi A
- 206) Pembangunan Mushola SMAN 1 Siantan
- 207) Pembangunan Mushola SMAN 1 Palmatak
- 208) Pengadaan meubelir SMAN 1 palmatak
- 209) Pembangunan RKB SMAN 2 Palmatak
- 210) Pembangunan Aula SMAN 1 siantan timur anambas
- 211) Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMAN 4 BATAM
- 212) Rehab laboratorium SMAN 8 batam
- 213) Pembebasan lahan sekolah SMAN 10 BATAM
- 214) Pembangunan Rumah Dinas SMAN 10 Batam
- 215) Pembangunan Majelis Guru SMAN 10 Batam
- 216) Pembangunan Laboratorium ipa SMAN 12 batam
- 217) Rehab Ruang Kelas SMAN 12 Batam
- 218) Pembangunan Mushola SMAN 15 Batam
- 219) Pembangunan Ruang Laboratorium SMAN 15 Batam
- 220) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 17 Batam



- 221) Pembangunan Ruang Laboratorium SMAN 17 Batam
- 222) Pemasangan Paving Blok SMAN 20 Batam
- 223) Paving Blok SMAN 21 Batam
- 224) Pembangunan Mushola SMAN 21 Batam
- 225) Pembangunan SMAN 21 Batam
- 226) Pembangunan Majelis Guru SMAN 21 Batam
- 227) Pembangunan Laboratorium IPA SMAN 22 Batam
- 228) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 23 BATAM
- 229) Pengadaan meubelir SMAN 23 Batam
- 230) Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 24
- 231) Pengadaan meubelir SMAN 24 Batam
- 232) Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 26 BATAM
- 233) Pembangunan Laboratorium IPA SMAN 26 Batam
- 234) Pengadaan meubelir SMAN 26 Batam
- 235) Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 27 BATAM
- 236) Pengadaan meubelir SMAN 27 Batam
- 237) Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru MAN 28 BATAM
- 238) Pengadaan meubelir SMAN 28 Batam
- 239) Pengadaan meubelir SMAN 1 Teluk Sebong Bintan
- 240) Pembangunan Aula SMAN 1 Bintan Pesisir, kab. Bintan
- 241) Pembangunan Rumah Dinas SMAN 1 Binan Timur
- 242) Pengadaan meubeler sman 2 karimun
- 243) Pembangunan Jamban SMAN 1 Buru
- 244) Pembangunan Laboratorium SMAN 1 Buru Karimun
- 245) Pembangunan Aula SMAN 4 Kundur
- 246) Pembangunan Mushola SMAN 1 Senayang
- 247) Pembangunan Batu miring SMAN 3 Lingga
- 248) Pembangunan Rumah Dinas Guru SMAN 1 Bungteng Natuna
- 249) Pengadaan meubeler sman 1 tangjungpinang
- 250) Pembangunan Aula SMAN 2 Tanjungpinang
- 251) Paving Blok SMAN 6 Tanjungpinang
- 252) Pematangan lahan Cut and Fill lahan sekolah SMAN 7 Tanjungpinang
- 253) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 7 Tanjungpinang
- 254) Pembangunan Majelis Guru SMAN 7 Tanjungpinang
- 255) Pengadaan meubeler SMAN 7 tangjungpinang
- 256) Pelaksanaan Perizinan SMK
- 257) Revitalisasi SMKN 2 Tanjungpinang
- 258) Rehabilitasi SMKN 2 Tanjungpinang
- 259) Pembangunan Mushola SMKN 3 Tanjungpinang
- 260) Pengadaan Alat Praktek SMKN 3 Tanjungpinang
- 261) Pembangunan RKB SMKN 4 Tanjungpinang
- 262) Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMKN 4 Tanjungpinang
- 263) Pembangunan RPS SMKN 4 Tanjungpinang



- 264) Pengadaan Alat Praktek SMKN 4 Tanjungpinang
- 265) Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga SMKN 4 Tanjungpinang
- 266) Pengadaan Meubiler SMKN 5 Tanjungpinang
- 267) Pembangunan RKB SMKN 5 Tanjungpinang
- 268) Pengadaan Sarana Pembelajaran SMKN 5 Tanjungpinang
- 269) Pembangunan RPS SMKN 1 Seri Kuala Lobam
- 270) Pembangunan Asrama Siswa SMKN 1 Seri Kuala Lobam
- 271) Pengadaan Kapal Latih Penangkap Ikan SMKN 1 Seri Kuala Lobam
- 272) Rehabilitasi SMKN 1 Bintang Utara
- 273) Pembangunan RKB SMKN 1 Bintang Utara
- 274) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMKN 1 Bintang Utara
- 275) Pembangunan Aula SMKN 1 Bintang Utara
- 276) Pemasangan Paving Blok SMKN 1 Gunung Kijang
- 277) Pembangunan RKB SMKN 1 Gunung Kijang
- 278) Pengadaan Peralatan Marching Band SMKN 1 Gunung Kijang
- 279) Pengadaan Peralatan Marching Band SMAN 1 Mantang
- 280) Semenisasi Lapangan Upacara SMKN 1 Bintang Timur
- 281) Pembangunan RKB SMKN 1 Bintang Timur
- 282) Pembangunan Pagar SMAN 1 Mantang
- 283) Pembangunan RPS SMKN 1 Bintang Timur
- 284) Pengadaan Komputer SMKN 1 Bintang Timur
- 285) Rehabilitasi SMKN 1 Bintang Timur
- 286) Pembangunan RKB SMKN 1 Batam
- 287) Pembangunan RPS SMKN 1 Batam
- 288) Pembangunan RKB SMKN 3 Batam
- 289) Pengadaan Meubiler SMKN 3 Batam
- 290) Revitalisasi Ruang Majelis Guru SMKN 4 Batam
- 291) Pembangunan Perpustakaan SMKN 5 Batam
- 292) Semenisasi Jalan Linkungan SMKN 5 Batam
- 293) Pemasangan Paving Blok SMKN 5 Batam
- 294) Pemasangan Batu Miring SMKN 5 Batam
- 295) Penataan Drainase SMKN 5 Batam
- 296) Pembangunan Asrama Siswa SMKN 5 Batam
- 297) Pembangunan RKB SMKN 6 Batam
- 298) Pengadaan Meubiler SMKN 6 Batam
- 299) Rehabilitasi SMKN 6 Batam
- 300) Semenisasi Lapangan SMKN 7 Batam
- 301) Pembangunan RPS TKJ SMKN 7 Batam
- 302) Pembangunan RPS RPL SMKN 7 Batam
- 303) Pembangunan RKB SMKN 8 Batam
- 304) Pembangunan Ruang Laboratorium SMKN 8 Batam
- 305) Pengadaan Alat Praktek SMKN 8 Batam
- 306) Pengadaan Meubiler SMKN 8 Batam



- 307) Pembangunan Ruang Majelis Guru SMKN 8 Batam
- 308) Pengadaan Meubiler SMKN 9 Batam
- 309) Pembangunan RPS SMKN 9 Batam
- 310) Pembangunan Majelis Guru SMKN 9 Batam
- 311) Pemasangan Batu Miring SMKN 1 Karimun
- 312) Pemasangan Paving Blok SMKN 1 Karimun
- 313) Pembangunan RPS Hotel Training SMKN 2 Karimun
- 314) Pembangunan RPS Tata Busana SMKN 2 Karimun
- 315) Pembangunan Pagar SMKN 2 Karimun
- 316) Pengadaan Meubiler SMKN 2 Karimun
- 317) Pembangunan RKB SMKN 2 Karimun
- 318) Pembangunan Kantin Sehat SMKN 2 Karimun
- 319) Pembangunan Rumah Dinas SMKN 1 Moro
- 320) Pembangunan RPS SMKN 1 Moro
- 321) Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kundur
- 322) Pembangunan Gedung Serba Guna SMKN Kundur
- 323) Pembangunan Pagar SMKN Kundur
- 324) Pembangunan Majelis Guru SMKN Kundur Utara
- 325) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMKN Kundur Utara
- 326) Pembangunan Rumah Dinas SMKN Kundur Utara
- 327) Pembangunan Pagar SMKN Kundur Utara
- 328) Pematangan Lahan SMKN Kundur Utara
- 329) Penambahan Daya Listrik SMKN Kundur Utara
- 330) Pembangunan Mushola SMKN 1 Bunguran Timur Laut
- 331) Pemasangan Paving Blok SMKN 1 Bunguran Timur Laut
- 332) Pemasangan Batu Miring SMKN 1 Bunguran Timur Laut
- 333) Pembangunan RKB SMKN 1 Bunguran Timur Laut
- 334) Rehabilitasi SMKN 1 Bunguran Timur
- 335) Pengadaan Alat Praktek Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKN 1 Bunguran Timur
- 336) Perbaikan Kapal Latih SMKN 1 Bunguran Timur
- 337) Rehabilitasi SMKN 1 Bunguran Barat
- 338) Pembangunan RKB SMKN 2 Bunguran Barat
- 339) Semenisasi Lapangan Olah Raga SMKN 2 Bunguran Barat
- 340) Penataan Drainase SMKN 2 Bunguran Barat
- 341) Pengadaan Meubiler SMKN 2 Bunguran Barat
- 342) Semenisasi Jalan Lingkungan SMKN 2 Bunguran Barat
- 343) Pembangunan Majelis Guru SMKN 2 Bunguran Timur
- 344) Pembangunan RPS SMKN 2 Bunguran Timur
- 345) Pembangunan Pelantar SMKN 2 Anambas
- 346) Pembangunan Ruang Majelis Guru SMKN 2 Anambas
- 347) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMKN 2 Anambas
- 348) Pengadaan Jaringan Internet SMKN 2 Anambas



- 349) Pengadaan Meubiler SMKN 3 Anambas
- 350) Pengadaan Laptop Untuk SMKN 3 Anambas
- 351) Pembangunan Majelis Guru SMKN 4 Anambas
- 352) Pemasangan Kramik SMKN 4 Anambas
- 353) Pembangunan RPS SMKN 4 Anambas
- 354) Pematangan Lahan dan Pemasangan Batu Miring SMKN 4 Anambas
- 355) semenisasi Lapangan Upacara SMKN 4 Anambas
- 356) Penataan Drainase SMKN 1 Singkep
- 357) Pengadaan Meubiler Kantor SMKN 1 Singkep
- 358) Pengadaan Alat Praktek SMKN 1 Senayang
- 359) Penataan Drainase SMKN 2 Lingga
- 360) Pengadaan Meubiler SMKN 2 Lingga
- 361) Hibah Pembangunan RKB SMK Budi Mulia Karimun
- 362) Hibah Pembangunan RKB SMK Vidya Sasana Karimun
- 363) Hibah Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK Vidya Sasana Karimun
- 364) Hibah Pembangunan RKB SMK Maarif NU Batam
- 365) Pengadaan Partisi dan Meubiler Sekolah SMA 1 Toapaya
- 366) Pengadaan Meubiler dan Ruang Partisi Guru dan tata Usaha SMAN 1 Teluk Bintan
- 367) Pengadaan Meubiler SMKN 1 Bintan Timur
- 368) Pengadaan alat kesenian tradisional SMA di Prov. Kepri
- 369) Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SMA di Prov. Kepri
- 370) Rehab Ruang Kelas SMAN 4 Batam
- 371) Pembangunan jamban SMAN 8 Batam
- 372) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 19 Batam
- 373) Pembangunan Majelis Guru SMAN 20 batam
- 374) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 21 Batam
- 375) Pembangunan Laboratorium SMAN 21 batam
- 376) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 24 BATAM
- 377) Pembangunan Majelis Guru SMAN 25 batam
- 378) Pembangunan Majelis Guru SMAN 26 batam
- 379) Pembangunan Majelis Guru SMAN 28 batam
- 380) Pembangunan 1 unit jamban SMAN 1 Tambelan
- 381) Pembangunan Laboratorium Biologi SMAN 1 Tambelan
- 382) Pembangunan Laboratorium Biologi SMAN 1 Bintan Utara
- 383) Pembangunan Majelis Guru SMAN 1 TELUK BINTAN
- 384) Pembangunan Laboratorium/Ruang Praktek SLBN Kabupaten Karimun
- 385) Rehabilitasi SLBN Kabupaten Karimun
- 386) Rehabilitasi SLBN 02 Kota Tanjungpinang
- 387) Rehabilitasi SLBN Kota Batam
- 388) Pembangunan 2 RKB SLBN Kabupaten Lingga
- 389) Pembangunan 2 RKB SLBN Kabupaten Bintan



- 390) Pengadaan Meubiler di SLBN Kundur
- 391) Pengadaan Meubiler di SLBN Kota Batam
- 392) Pengadaan Meubiler di SLBN Kabupaten Bintan
- 393) Pengadaan Meubiler di SLBN 02 Kota Tanjungpinang
- 394) Pengadaan Alat Praktek/ Alat Praga SLBN Bintan
- 395) Pengadaan Alat Praktek/ Alat Praga SLBN Karimun
- 396) Pengadaan Alat Praktek/ Alat Praga SLBN Kundur
- 397) Pembangunan Ruang Serba Guna Dinas Pendidikan
- 398) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SLBN Kijang, Bintan Timur
- 399) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN 27 Batam
- 400) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran SMAN Kepulauan Posek
- 401) Penguatan pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 402) Pembangunan SMAN 8 Tanjungpinang
- 403) Pengadaan Lahan SMAN 8 Tanjungpinang
- 404) Pengadaan sarana pembelajaran proyektor SMA di Kepulauan Riau
- 405) Pembangunan Mushollah dan Kelengkapan SMAN 2 Bintan Pesisir
- 406) Pembangunan Rumah Penjaga Sekolah SMAN 1 Bintan Timur
- 407) Paving Block Halaman SMAN 2 Bintan Pesisir
- 408) Pembangunan Rumah Dinas Guru SMAN 4 Senayang
- 409) Pembangunan Mushola SMAN 2 Lingga
- 410) Pembangunan Batu Miring SMAN 2 Lingga
- 411) Pembangunan Rumah Dinas Guru SMAN 3 Senayang
- 412) Pembangunan Rumah Dinas Guru SMAN 2 Senayang
- 413) Pembangunan Rumah Dinas Guru SMAN 3 Lingga, Penuba
- 414) Pembangunan Tempat Berwudhu SMAN 1 Pulau Tiga
- 415) Pembangunan Mushola SMA Negeri 1 Bunguran Tengah
- 416) Paving Block Halaman Sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Tengah
- 417) Pembanguna Drainase SMA Negeri 1 Bunguran Tengah
- 418) Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) MAN Ranai
- 419) Pembangunan Ruang Kepala Sekolah Dan Majelis Guru SMA Negeri 1
- 420) Bunguran Utara
- 421) Pembangunan Labor Fisika SMAN 2 Bunguran Timur
- 422) Pembangunan Labor Fisika SMA 1 Bunguran Selatan
- 423) Pembangunan Laboratorium Kimia SMAN 1 Subi
- 424) Pembangunan Perumahan Penjaga Sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Tengah
- 425) Batu Miring Sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Tengah
- 426) Pembangunan Pagar SMAN 1 Kecamatan Bunguran Timur
- 427) Penimbunan halaman SMA N 1 pulau laut
- 428) Pembangunan WC Guru SMAN 1 Pulau Tiga
- 429) Pembangunan Pagar Sekolah SMA 1 Midai
- 430) Pembangunan SMA Negeri di Kecamatan Seri Kuala Lobam



- 431) Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA RT/RW 1/1, Desa Batu Belubang, Kec.Senayang
- 432) Bantuan Operasional Transportasi Bus SMA di Pancur Desa Sungai Besar Kec. Lingga Utara
- 433) Pengadaan Fasilitas Olahraga di SMAN 3 Desa Penuba Kec. Selayar RT/RW 1/1, Desa Penuba, Kec. Selayar
- 434) Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 1 Kab. Lingga
- 435) Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (SLB) Di kec. Bintan Timur Kab. Bintan
- 436) Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas sekolah SMA 1 Tambelan
- 437) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/kepala sekolah SMA 1 Tambelan
- 438) Bantuan Beasiswa kurang mampu untuk siswa SMA sederajat di Kab. Bintan
- 439) Pengadaan Fasilitas Olahraga di SMAN 03 di Desa Penuba Kec. Selayar
- 440) Pengadaan Fasilitas Olahraga di SMAN 03 Desa Penuba Kec. Selayar
- 441) Pengadaan Fasilitas Olahraga di SMAN di Sungai Lakam Timur
- 442) Pengadaan Meubiler SMA Negeri 2 Teluk Bintan Kabupaten Bintan
- 443) Pembangunan Mushalla SMA Negeri 1 Tanjung Uban Kabupaten Bintan
- 444) Pembangunan Gedung Laboratorium SMA Negeri 1 Tanjung Uban Kabupaten Bintan
- 445) Semenisasi Jalan SMA NEGERI 21 Kota Batam, Kel.Kabil Kec.Nongsa
- 446) Pembangunan Batu Miring SMA NEGERI 21 Kota Batam, Kel. Kabil Kec. Nongsa
- 447) Semenisasi Lapangan SMA NEGERI 21 Kota Batam, Kel. Kabil Kec. Nongsa
- 448) Pengadaan Alat Peraga Laboratorium SMA NEGERI 21 Kota Batam, Kel. Kabil Kec. Nongsa
- 449) Pembangunan Drainase SMA NEGERI 21 Kota Batam, Kel. Kabil Kec. Nongsa
- 450) Pengadaan Sarana Olahraga SMA NEGERI 21 Kota Batam, Kel.Kabil Kec.Nongsa
- 451) Pembangunan Gedung Serbaguna SMA NEGERI 21 Kota Batam, Kel.Kabil Kec.Nongsa
- 452) Pembangunan Pagar SMA N 1 Midai - Kecamatan Suak Midai
- 453) Pembangunan Gerbang SMA M 1 Midai - Kecamatan Suak Midai
- 454) Rehab SMA N 1 Midai - Kecamatan Suak Midai
- 455) Pembangunan Pentas SMA N 1 - Kecamatan Midai
- 456) Pengadaan Meubiler Meja Dan Kursi Siswa SMA N 1 Midai - Kecamatan Midai
- 457) Pengadaan Meubiler Meja Dan Kursi Guru Serta Tu SMA N 1 Midai - Kecamatan Midai
- 458) Pengan Meubiler Lemari Buku Kelas 12 Unit SMA N 1 Midai – Kecamatan Midai



- 459) MEUBILER LEMARI ARSIP DAN BERKAS 10 UNIT SMA N 1 MIDAI - KECAMATAN MIDAI
- 460) PEMBANGUNAN RUMAH PENJAGAAN SMA N 1 BUNGURAN TENGAH - KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
- 461) PENIMBUNAN LAPANGAN SMA N 1 PULAU LAUT - KECAMATAN PULAU LAUT
- 462) PEMASANGN PAVING BLOK LAPANGAN UPACARA SMA N 1 BUNGURAN UTARA - KECAMATAN BUNGURAN UTARA
- 463) PENGADAAN MEUBILER MEJA DAN KURSI SISWA SMA N 1 BUNGURAN UTARA - KECAMATAN BUNGURAN UTARA
- 464) PENGAAN MEUBILER MEJA DAN KURSI GURU SERTA TU SMA N 1 BUNGURAN UTARA -KECAMATAN BUNGURAN UTARA
- 465) PENGAAAN MEUBILER LEMARI KELAS SMA N 1 BUNGURAN UTARA - KECAMATAN BUNGURAN UTARA
- 466) PENGADAAN MEUBILER LEMARI PENYIMPANAN ARSIP DAN BERKAS SEKOLAH 5 UNIT SMA N 1 BUNGURAN UTARA - KECAMATAN BUNGURAN UTARA
- 467) PENGADAAN MEUBILER MEJA DAN KURSI LAB KOMPUTER SMA N 1 BUNGURAN SELATAN - KECAMATAN BUNGURAN SELATAN PENGADAAN MEUBILER MEJA, KURSI, LEMARI GURU SMA N 1 BUNGURAN SELATAN - KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
- 468) PENGAAN MEUBILER MEJA, KURSI, LEMARI ARSIP, RAK FOLDER, FILLING CABINET SMA N 1BUNGURAN SELATAN – KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
- 469) PENGADAAN MEUBILER MEJA, KURSI, LEMARI SISWA 120 UNIT SMA N 1 BUNGURAN SELATAN - KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
- 470) PENGADAAN MEUBILER MEJA DAN KURSI SISWA SMA N 2 BUNGURAN BARAT - KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
- 471) PENGADAAN MEUBILER MEJA DAN KURSI GURU DAN TU SMA N 2 BUNGURAN BARAT - KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
- 472) PENGADAAN MEUBILER LEMARI BUKU SMA N 2 BUNGURAN BARAT KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
- 473) PENGADAAN MEUBILER LEMARI ARSIP DAN BERKAS SMA BUNGURAN BARAT - KECAMATAN
- 474) PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SMK N 1 BUNGURAN BARAT KECAMATAN BUNGURAN BARAT
- 475) PEMASANGAN PAVING BLOK LAPANGAN UPACARA SMK N 1 BUNGURAN BARAT - KECAMATAN BUNGURAN BARAT
- 476) PEMBANGUNAN PINTU GERBANG SMA N 1 BUNGURAN BARAT KECAMATAN BUNGURAN BARAT
- 477) Pengadaan Bus Sekolah untuk Siswa di Desa Resun
- 478) Pembangunan USB SMAN di Desa Pekajang (Desa Resun)
- 479) Pembangunan USB SMAN di Desa Mensanak



- 480) Pengadaan Fasilitas Untuk Taruna SMKN 1 SKL Bintan
- 481) Operasional Transportasi Laut Untuk SMA Selayar Lingga
- 482) Pembangunan Asrama Taruna SMKN Perikanan SKL Desa Busung
- 483) Pengadaan Alat Laboratorium IPS Berbasis Interaktif Untuk SMA Di Provinsi Kepulauan Riau
- 484) Pengadaan Alat Laboratorium Fisika & Biologi Berbasis Simulasi Interaktif Untuk SMA Di Kepulauan Riau
- 485) Pengadaan Peralatan Sistim Informasi Digital Jenjang SMA Di Provinsi Kepulauan Riau
- 486) Pengadaan Alat Prktek Mesin Automotiv jenjang SMK di Provinsi Kepulauan Riau
- 487) Pengadaan Aplikasi Penunjang Laboratorium Biologi IPA Sains IT Jenjang SMA Di provinsi Kepulauan Riau
- 488) Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran untuk SMA Di provinsi Kepulauan Riau
- 489) Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran untuk SMK Di provinsi Kepulauan Riau
- 490) Pembanguan 2 RKB SMAN 1 Batam
- 491) Pembangunan Penataan Lingkungan SMKN 4 Batam
- 492) Pembangunan Lanjutan Masjid SMKN 5 Batam
- 493) Pembangunan Penataan Lingkungan SMAN 5 Batam
- 494) Pembanguan lanjutan Masjid SMA 17 Batam
- 495) Pembangunan Penataan Lingkungan SMAN 19 Batam
- 496) Pengadaan Modul pembelajaran dan sertifikasi TOEIC (Test Of English For International Communication) untuk siswa SMK; di KEPRI
- 497) Pengadaan Modul pembelajaran dan sertifikasi TOEIC (Test Of English For International Communication) untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK;
- 498) Pengadaan Modul pembelajaran dan sertifikasi TOEIC (Test Of English For International Communication) untuk siswa SMA
- 499) Pengadaan Modul pembelajaran dan sertifikasi TOEIC (Test Of English For International Communication) untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA
- 500) Hibah lanjutan Pembangunan SMAIH Hidayatullah Batam
- 501) Pengadaan Alat laboratorium IPA Berbasis IT untuk Jenjang SMA di Kepulauan Riau
- 502) Pengadaan Hardware pendukung sistem penerapan model pembelajaran kelas maya jenjang SMA
- 503) Pengadaan sistem penerapan model pembelajaran kelas maya jenjang SMA
- 504) Pembangunan Sanggar SMAN 02 Batam
- 505) Pembangunan Sarana Lapangan Olahraga SMKN 04 Batam
- 506) RKB SMAN 16 Batam



- 507) Buku Muatan Lokal Kebudayaan Melayu Kepri SMA/SMK
- 508) Pengadaan Alat Media Penunjang Pembelajaran Berbasis TIK di Provinsi Kepulauan Riau
- 509) Pengadaan Media Penunjang Pembelajaran Berbasis IT di Provinsi Kepulauan Riau
- 510) HIBAH PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH YAYASAN FATIMAH AZ ZAHRA
- 511) PENGADAAN KOMPUTER & PRINTER UNTUK SLB SE KEPRI
- 512) PEMBANGUNAN GERBANG DAN POS SATPAM SMKN 2 BATAM
- 513) PEMBANGUNAN PAGAR KELILING SMAN 20 KOTA BATAM
- 514) Blueprint Pendidikan Menengah dan Khusus Provinsi Kepulauan Riau
- 515) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN Posek
- 516) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN Singkep Pesisir
- 517) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN Singkep Selatan
- 518) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 9 Batam
- 519) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 25 Batam
- 520) Komunikasi Sosial dengan Mahasiswa
- 521) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran USB SMAN, SMKN dan SLBN di-Provinsi Kepulauan Riau(Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas)
- 522) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran USB SMAN, SMKN dan SLBN di-Provinsi Kepulauan Riau(Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan)
- 523) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran USB SMAN, SMKN dan SLBN di-Provinsi Kepulauan Riau(Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus)
- 524) Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran USB SMAN, SMKN dan SLBN di-Provinsi Kepulauan Riau(Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus)
- 525) Pengadaan Alat Olah Raga dan Peralatan Pendukung untuk SMAN dan SMKN di Kabupaten Bintan(Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMA)
- 526) Pengadaan Alat Olah Raga dan Peralatan Pendukung untuk SMAN dan SMKN di Kabupaten Bintan(Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMK)
- 527) Pengadaan Alat Kesenian Lain-lain untuk SMA/SMK Di Provinsi Kepulauan Riau(Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMA)
- 528) Pengadaan Alat Kesenian Lain-lain untuk SMA/SMK Di Provinsi Kepulauan Riau(Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMK)
- 529) Pengadaan Perangkat Monitoring Center Untuk SMK/SMA di Provinsi Kepulauan Riau(Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMA)
- 530) Pengadaan Perangkat Monitoring Center Untuk SMK/SMA di Provinsi Kepulauan Riau(Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMK)
- 531) Pengadaan Alat Pengolah Lembar Absensi Untuk SMA/SMK Di provinsi Kepulauan Riau(Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMA)
- 532) Pengadaan Alat Pengolah Lembar Absensi Untuk SMA/SMK Di provinsi Kepulauan Riau(Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMK)



- 533) Pengadaan Alat Digital Penunjang Pembelajaran Sejarah Untuk SMA/SMK Di Provinsi Kepulauan Riau(Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik SMA)
- 534) Pengadaan Alat Digital Penunjang Pembelajaran Sejarah Untuk SMA/SMK Di Provinsi Kepulauan Riau(Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik SMK)
- 535) Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya untuk SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Riau(Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMA)
- 536) Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya untuk SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Riau(Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMK)
- 537) Pengadaan Peralatan Sekolah Bagi Siswa SMA & SMK Di Provinsi Kepulauan Riau (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SMA)
- 538) Pengadaan Peralatan Sekolah Bagi Siswa SMA & SMK Di Provinsi Kepulauan Riau (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SMK)
- 539) Workshop Model Belajar Untuk Guru Di Kabupaten Bintan (Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)
- 540) Workshop Model Belajar Untuk Guru Di Kabupaten Bintan (Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,47
2)	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK	%	90,00
3)	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	71,00
4)	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/MAK	%	77,50
5)	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/MAK	%	0,38
6)	Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik	%	89,00
7)	Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	%	90,00
8)	Jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	unit	50
9)	Rasio siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	Rasio	1:36



b. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Seleksi Olimpiade Guru Nasional (OGN) Se-Provinsi Kepulauan Riau(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)
- 2) Seleksi Olimpiade Guru Nasional (OGN) Se-Provinsi Kepulauan Riau(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)
- 3) Seleksi Olimpiade Guru Nasional (OGN) Se-Provinsi Kepulauan Riau(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus)
- 4) Koordinasi dan Konsolidasi Pendataan Guru SMA Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Pendampingan Pelaksanaan Tunjangan Profesi Guru Seleksi PTK Berprestasi dan Berdedikasi Se-Provinsi Kepulauan Riau(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)
- 6) Seleksi PTK Berprestasi dan Berdedikasi Se-Provinsi Kepulauan Riau(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)
- 7) Seleksi PTK Berprestasi dan Berdedikasi Se-Provinsi Kepulauan Riau(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus)
- 8) Koordinasi dan Konsolidasi Pendataan Guru SMK Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 9) Workshop Pembelajaran Guru SLB Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 10) Verifikasi dan Validasi Data Penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan
- 11) Tambahan Penghasilan (Tamsil)
- 12) Workshop Pengelolaan MGMP SMK
- 13) Aplikasi Penyusunan Kebutuhan Guru SMK
- 14) Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Guru
- 15) Workshop Pengelolaan MKKS SMK
- 16) Pendidikan dan Pelatihan Asesor LSP P1
- 17) Seminar Sehari Pendidikan Dalam Rangka Hardiknas 2021
- 18) Lomba Hadrah Guru SMK se-Provinsi Kepri
- 19) Lomba Penulisan Buku elektronik
- 20) Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Produktif/Peminatan Kejuruan Melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
- 21) Diklat Peningkatan Kompetensi Pengawas dan Guru SMK Dalam Menyusun Perangkat Pembelajaran
- 22) Workshop Mengasah Pola Pikir (Mindsetting) Guru SMK Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0



- 23) Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan Konseling SMK Dalam Menangani Perkembangan Kasus Siswa Di Era Millenial
- 24) Seminar Teknik Pengelolaan Unit Produksi Sekolah/Bisnis Center Bagi Guru Prakarya dan Kewirausahaan
- 25) Workshop Penulisan TIK untuk Guru SLB
- 26) Workshop Penulisan Penelitian Tindakan Kelas bagi Pendidik SLB
- 27) Pelatihan Kompetensi Pedagogik Untuk Guru SLB
- 28) Pembinaan dan Monitoring Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dinas Pendidikan Prov. Kepri
- 29) Peningkatan Kapasitas Manajemen Pengelolaan Pengajaran PK di Provinsi Kepulauan Riau
- 30) Workshop Kemitraan Pendidikan Khusus se-Provinsi Kepulauan Riau
- 31) Workshop Muatan Lokal Pendidikan Khusus se-Provinsi Kepulauan Riau
- 32) Workshop Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus se-Provinsi Kepulauan Riau
- 33) Workshop Kurikulum Pendidikan Inklusi di Provinsi Kepulauan Riau
- 34) Workshop Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan Pendidikan Khusus se- Provinsi Kepulauan Riau
- 35) Workshop Penulisan Soal Ujian pendidikan Khusus se-Provinsi Kepulauan Riau
- 36) Workshop Analisis Soal Ujian Pendidikan Khusus se-Provinsi Kepulauan Riau
- 37) Workshop Pembelajaran Kekhususan Tunanetra Provinsi Kepulauan Riau
- 38) Workshop Pembelajaran Kekhususan Tunarungu di Provinsi Kepulauan Riau
- 39) Workshop Pembelajaran Kekhususan Tunagrahita di Provinsi Kepulauan Riau
- 40) Bimbingan Teknis Assessment Pengajaran Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Riau
- 41) Bimtek Penyusunan Dokumen Kurikulum SMA Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 42) Bimek Penyusunan Penyederhanaan Perangkat Pembelajaran Rencana
- 43) Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SMA Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 44) Bimtek Penyusunan Soal Asesmen Kompetensi Minimal Tingkat SMA Se- Provinsi Kepulauan Riau
- 45) Workshop penyelarasan kurikulum SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri DUDI)
- 46) Bimtek penyusunan dokumen 1, 2 dan 3 kurikulum SMK se-Provinsi Kepulauan Riau
- 47) Workshop pendirian LSP-P1 bagi SMK di Provinsi Kepulauan Riau
- 48) Bimtek Proktor dan teknisi UNBK SMK Se- Provinsi Kepulauan Riau
- 49) Supervisi pelaksanaan revitalisasi SMK di Provinsi Kepulauan Riau
- 50) Bimtek sertifikasi Asesor LSP-P1 di Provinsi Kepulauan Riau
- 51) Workshop penyusunan standar proses pembelajaran SMK di Provinsi Kepulauan Riau
- 52) Kepulauan Riau
- 53) Workshop standar isi pendidikan SMK Provinsi Kepulauan Riau



- 54) Workshop penyusunan standar kompetensi lulusan SMK Provinsi Kepulauan Riau
- 55) Workshop penyusunan standar penilaian pendidikan SMK Provinsi Kepulauan Riau
- 56) Workshop penulisan e-rapor dan ijazah SMK se-Provinsi Kepulauan Riau
- 57) Sosialisasi US SMK Se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020
- 58) Bimtek penyusunan data evaluasi penilaian SMK di Provinsi Kepulauan Riau
- 59) Bimtek Dapodik SMK Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 60) Workshop Peningkatan Kompetensi Pendidik Non ASN(Pengembangan Karir
- 61) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)
- 62) Workshop Peningkatan Kompetensi Pendidik Non ASN(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)
- 63) Workshop Peningkatan Kompetensi Pendidik Non ASN(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus)
- 64) Penyediaan Jasa PTK Non ASN se-Provinsi Kepulauan Riau(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)
- 65) Penyediaan Jasa PTK Non ASN se-Provinsi Kepulauan Riau(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)
- 66) Penyediaan Jasa PTK Non ASN se-Provinsi Kepulauan Riau(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus)
- 67) Pendampingan Kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG)(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)
- 68) Pendampingan Kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG)(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)
- 69) Pendampingan Kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG)(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus)
- 70) Seleksi Administrasi dan Subtansi Calon Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Se-Provinsi Kepulauan Riau(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)
- 71) Seleksi Administrasi dan Subtansi Calon Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Se-Provinsi Kepulauan Riau(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)



- 72) Seleksi Administrasi dan Subtansi Calon Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Se-Provinsi Kepulauan Riau(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus)
- 73) Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Calon Kepala Sekolah SMA/SMK/ SLB Se-Provinsi Kepulauan Riau(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)
- 74) Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Calon Kepala Sekolah SMA/SMK/ SLB Se-Provinsi Kepulauan Riau(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)
- 75) Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Calon Kepala Sekolah SMA/SMK/ SLB Se-Provinsi Kepulauan Riau(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus)
- 76) Bimtek Pemantapan Materi Pengenalan Lingkungan Sekolah PLS)(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)
- 77) Bimtek Pemantapan Materi Pengenalan Lingkungan Sekolah PLS)(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)
- 78) Bimtek Pemantapan Materi Pengenalan Lingkungan Sekolah PLS)(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	%	96,00

c. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) Pendidikan Khusus Se-Provinsi Kepri
- 2) Pelaksanaan Manajemen BOS Dikdasmen
- 3) Pelaksanaan Pelayanan Transportasi Siswa dan Guru Daerah Hinterland
- 4) Festival Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Berseri Pendidikan Khusus Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Verifikasi dan Validasi Penerima Hibah Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA se Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Lomba Keterampilan Siswa Nasional (LKSNI) Pendidikan Khusus se-Prov. Kepri



- 8) Lomba Pembuatan Media Pembelajaran dan Bahan Ajar PKLK se-Prov. Kepri
- 9) Workshop Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa sesuai Kurikulum 2013 yang berwawasan Adiwiyata
- 10) Pendampingan Program Kegiatan Kerjasama antara SPK dan SMA Reguler se- Provinsi Kepulauan Riau
- 11) Pelaksanaan dan Pemantapan Kompetisi Sains Nasional (KSN) Tingkat SD dan SMP Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 12) TC Kompetisi Sains Nasional (KSN) Tingkat SD dan SMP SE-Provinsi Kepulauan Riau
- 13) Pelaksanaan dan Pemantapan Kompetisi olah Raga Siswa Nasional (KOSN) Pendidikan Dasar Se- Provinsi Kepulauan Riau
- 14) TC Kompetisi Olag Raga Siswa Nasional (KOSN) Pendidikan Dasar Se- Provinsi Kepulauan Riau
- 15) Pelaksanaan dan Pemantapan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pendidikan Dasar Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 16) TC Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pendidikan Dasar Se- Provinsi Kepulauan Riau
- 17) Pelaksanaan dan Pemantapan Penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat SMP Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 18) TC Penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat SMP Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 19) Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KO2SN) Pendidikan Khusus Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 20) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Riau
- 21) Lomba Literasi Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Riau
- 22) Jambore Pramuka Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Riau
- 23) Pembangunan Aplikasi Pendidikan Terpadu
- 24) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Tahun 2021
- 25) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Tahun 2021
- 26) TC Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Tahun 2021
- 27) TC Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Tahun 2021
- 28) Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing Siswa SMK Se- Provinsi Kepulauan Riau
- 29) Penguatan Pendidikan Karakter Siswa SMK di Provinsi Kepulauan Riau
- 30) Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMA Tingkat Provinsi Se- Kepulauan Riau
- 31) Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMA tingkat Provinsi Se- Kepulauan Riau
- 32) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter SMA (Spiritual /Kerohanian)
- 33) Training Center Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMA Tingkat Provinsi Se- Kepulauan Riau



- 34) Training Center Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMA tingkat Provinsi Se- Kepulauan Riau
- 35) Training Center Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA tingkat Provinsi Se- Kepulauan Riau
- 36) Kompetisi Sains Kabupaten /Kota (KSK) SMA Provinsi Kepulauan Riau
- 37) Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMA tingkat Kab/Kota
- 38) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA tingkat Kab/Kota
- 39) Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Provinsi / Nasional
- 40) TC Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Provinsi / Nasional
- 41) Lomba Karya Siswa SMK Se- Provinsi Kepulauan Riau
- 42) Pembinaan Penguatan Pendidikan Karakter Siswa SMK
- 43) Pelatihan Pengurus Osis SMK Se- Provinsi Kepulauan Riau
- 44) Lomba Literasi Siswa SMK Tingkat Provinsi Kepulauan Riau
- 45) Pelatihan Kewirausahaan Siswa SMK Se- Provinsi Kepulauan Riau
- 46) Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Obat- obat Terlarang Siswa SMK Se- Provinsi Kepulauan Riau
- 47) Pelatihan Kepemimpinan melalui Kegiatan Pramuka Siswa SMK Se- Provinsi Kepulauan Riau
- 48) Pelatihan Kerohanian dalam Peningkatan Akhlak Siswa SMK Se- Provinsi Kepulauan Riau
- 49) Turnamen Tingkat Pelajar SLTA Se- Provinsi Kepulauan Riau
- 50) Lomba Pembaca dan Mengarang Puisi Kegiatan Siswa SMK Se- Provinsi Kepulauan Riau
- 51) Studi Kelayakan Pendidikan Menengah Kejuruan
- 52) Apresiasi Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Riau
- 53) Implementasi Program Literasi dalam Kurikulum PK di Provinsi Kepulauan Riau
- 54) Parenting dan Bimbingan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Riau
- 55) Gebyar Pendidikan Khusus Provinsi Kepulauan Riau
- 56) Sharing Data dan Informasi Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus
- 57) Festival Seni dan Desain Visual Pendidikan Inklusi se-Provinsi Kepulauan Riau
- 58) Bimtek Pengelolaan Administrasi Dokumen Pelayanan SMA Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 59) Pendampingan Program Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pada SMA Model Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 60) Monitoring Pelaksanaan Kewirausahaan SMA Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 61) Monitoring Proses Pembelajaran di SMA Se-Provinsi kepulauan Riau
- 62) Monitoring Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran (Ujian) SMA Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 63) Supervisi pelaksanaan UKK SMK di Provinsi Kepulauan Riau
- 64) Workshop Pengembangan Kewirausahaan SMA Se-Provinsi Kepulauan Riau



- 65) Implementasi Program Pengembangan Kompetensi Life Skill Vokasi Siswa SMA/MA Kemitraan SMK Provinsi Kepulauan Riau(Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA)
- 66) Implementasi Program Pengembangan Kompetensi Life Skill Vokasi Siswa SMA/MA Kemitraan SMK Provinsi Kepulauan Riau(Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK)
- 67) Workshop Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Kurikulum 2013 berbasis Keunggulan Lokal dan Global(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)
- 68) Workshop Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Kurikulum 2013 berbasis Keunggulan Lokal dan Global(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)
- 69) Workshop Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Kurikulum 2013 berbasis Keunggulan Lokal dan Global(Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus)
- 70) Pembacaan Gurindam Dua Belas Tingkat SMA / SMK dan SLB se- Provinsi Kepulauan Riau(Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA)
- 71) Pembacaan Gurindam Dua Belas Tingkat SMA / SMK dan SLB se- Provinsi Kepulauan Riau(Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK)
- 72) Pembacaan Gurindam Dua Belas Tingkat SMA / SMK dan SLB se- Provinsi Kepulauan Riau(Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SLB)
- 73) Penyelenggaraan Asesmen Tingkat SMP, MTs,SMPLB, SMA/MA/SMK dan SLB Se- Provinsi Kepulauan Riau (Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SMA)
- 74) Penyelenggaraan Asesmen Tingkat SMP, MTs,SMPLB, SMA/MA/SMK dan SLB Se- Provinsi Kepulauan Riau(Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SMK)
- 75) Penyelenggaraan Asesmen Tingkat SMP, MTs,SMPLB, SMA/MA/SMK dan SLB Se- Provinsi Kepulauan Riau(Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SLB)
- 76) Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS)(Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA)
- 77) Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS)(Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK)
- 78) Komunikasi Sosial dengan Pelajar Se Kota Tanjungpinang(Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA)
- 79) Komunikasi Sosial dengan Pelajar Se Kota Tanjungpinang(Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK)
- 80) Bantuan Beasiswa Untuk Anak Kurang Mampu dan Berprestasi(Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas)



- 81) Bantuan Beasiswa Untuk Anak Kurang Mampu dan Berprestasi(Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan)
- 82) Bantuan Beasiswa Untuk Anak Kurang Mampu dan Berprestasi(Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus)
- 83) Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, SMK dan SLBN se-Provinsi Kepulauan Riau(Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik)
- 84) Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, SMK dan SLBN se-Provinsi Kepulauan Riau(Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik)
- 85) Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, SMK dan SLBN se-Provinsi Kepulauan Riau(Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik)
- 86) Turnamen Tingkat Pelajar SLTA Se- Provinsi Kepulauan Riau(Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA)
- 87) Turnamen Tingkat Pelajar SLTA Se- Provinsi Kepulauan Riau(Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK)
- 88) Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hibah / Bantuan Sosial Bidang Pendidikan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi	%	60,00
2)	Persentase lulusan SMK/MAK yang diterima di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	%	60,00
3)	Rata-rata Nilai Ujian Nasional(UN) SMA/MA/SMK/MAK	Angka	54,60

d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Pendidikan
- 2) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dinas Pendidikan Se-Provinsi Kepri
- 3) Penyusunan Bahan Perencanaan Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B	%	84,00

2. Kesehatan

a. Program Kesehatan Masyarakat

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Orientasi Penjaringan Kesehatan bagi Petugas Kesehatan
- 2) Kelas Ibu Hamil Perangkat Daerah Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Pelatihan PMBA (Pemberian Makan Bayi Anak)
- 4) Pelacakan Kasus Gizi Buruk
- 5) Pertemuan dalam rangka penurunan/pencegahan bumil KEK
- 6) Pertemuan LP/LS dalam rangka peningkatan cakupan balita ditimbang (D/S)
- 7) Penyampaian Informasi/ Kampanye Kesehatan langsung kepada Masyarakat
- 8) Pengembangan Media Promkes
- 9) Orientasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Kebijakan PHBS melalui pendekatan keluarga sehat
- 10) Pertemuan Koordinasi dalam mendukung Pemanfaatan Dana Desa untuk UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
- 11) Pengembangan Saka Bakti Husada dalam mendukung PHBS bagi masyarakat potensial
- 12) Pertemuan Advokasi (Seminar) dalam mendukung Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan
- 13) Penguatan Kelembagaan Bidang Kesehatan
- 14) Penguatan Kelembagaan Forum Penyelenggaraan KKS di Kab/Kota Binaan
- 15) Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Kabupaten/Kota Sehat
- 16) Orientasi Sanitarian Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan sanitarian Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- 17) Sosialisasi Program KIA dalam pemanfaatan dana CSR dengan sektor swasta
- 18) Peningkatan kapasitas Nakes dalam PPIA
- 19) Rapid Survei Pelacakan Kasus Kematian Bayi
- 20) Orientasi kader melalui "Rumpi Sehat" mendukung program Germas
- 21) Pengembangan Sekolah Sehat Tingkat Nasional
- 22) Workshop Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	128
2)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	30
3)	Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	%	16,20
4)	Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	%	70,00

b. Program pencegahan dan pengendalian penyakit

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pertemuan validasi data SIHA program HIV
- 2) Peningkatan kapasitas tata laksana program TB di Faskes
- 3) Dukungan dalam pelaksanaan deteksi dini Hepatitis B di Kab/Kota
- 4) Technical dan mentoring POMP Filariasis di 3 Kab/kota endemis
- 5) Penanggulangan PD3i
- 6) Penanggulangan Penyakit Menular dan Berpotensi Wabah
- 7) Peningkatan kapasitas petugas dalam melakukan pembinaan kesehatan
- 8) jemaah haji
- 9) Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji di embarkasi batam
- 10) Screening Kanker Serviks pada Wanita Usia Subur
- 11) Penguatan Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA di Kab/Kota
- 12) Jejaring dan penguatan pengendalian Kanker Serviks dan kanker payudara
- 13) Pelatihan Surveilans Faktor Risiko PTM Tingkat Provinsi Kepri
- 14) Surveilans Terpadu Penyakit Tidak Menular (PTM) di FKTP
- 15) Penanggulangan pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 16) Pelatihan bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dalam upaya implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok UBM)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Prevalensi HIV	%	<0,5
2)	Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000 penduduk	per 100.000	175



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
		penduduk	
3)	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)	%	84,00
4)	Insidens rate DBD Per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	88
5)	API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0,27
6)	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	94,00
7)	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	27,90

c. Program pelayanan kesehatan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Dukungan sarana prasarana alat kesehatan RSUD/RS Jiwa
- 2) Dukungan Badan Pengawas RS (BPRS) Provinsi Kepri
- 3) Orientasi kalibrasi sarana prasarana alat (SPA) kesehatan di Fasyankes
- 4) Dukungan Sarana Prasarana Alat Kesehatan Puskesmas
- 5) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan dengan Metode Pendekatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 6) Pembinaan layanan kesehatan tradisional bagi faskes primer dan rujukan Kabupaten/Kota
- 7) Penyelenggaraan SP3T Prov. Kepri
- 8) Dukungan Pelayanan Kesehatan Aparatur
- 9) Pengelolaan Jamkesda Provinsi Kepulauan Riau (HIBAH)
- 10) Rakor pelaksanaan JKN/KIS dan Jaminan Kesehatan daerah di prov kepri
- 11) Penguatan SDM Pelaku Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS (Penguatan Tenaga Coder RS dalam INA CBG's / Penguatan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Pemanfaatan Dana JKN/KIS
- 12) Pengelolaan Jaminan Pelayanan Penduduk miskin
- 13) Lokakarya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
- 14) Dukungan Pelayanan Kesehatan dalam rangka bakti sosial
- 15) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Kab/Kota Se-Prov Kepri
- 16) Pendampingan Survei Akreditasi Rumah Sakit
- 17) Peningkatan Program Ponik di RS kab/Kota
- 18) Fasilitas Penunjang Program Akreditasi Puskesmas
- 19) Pertemuan Penunjang klinik Terakreditasi
- 20) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK
- 21) Peningkatan Pelayanan Kesehatan di UTD



- 22) Pertemuan Kalibrasi Sarana Prasarana Alat (SPA) di FKTP
- 23) Kontigensi Terpadu Krisis Kesehatan
- 24) Dukungan sarana prasarana alat kesehatan RSUD/RS Jiwa
- 25) Dukungan Badan Pengawas RS (BPRS) Provinsi Kepri
- 26) Orientasi kalibrasi sarana prasarana alat (SPA) kesehatan di Fasyankes
- 27) Dukungan Sarana Prasarana Alat Kesehatan Puskesmas
- 28) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan dengan Metode Pendekatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 29) Pembinaan layanan kesehatan tradisional bagi faskes primer dan rujukan Kabupaten/Kota
- 30) Penyelenggaraan SP3T Prov. Kepri
- 31) Dukungan Pelayanan Kesehatan Aparatur
- 32) Pengelolaan Jamkesda Provinsi Kepulauan Riau (HIBAH)
- 33) Rakor pelaksanaan JKN/KIS dan Jaminan Kesehatan daerah di prov kepri
- 34) Penguatan SDM Pelaku Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS Penguatan Tenaga Coder RS dalam INA CBG's / Penguatan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Pemanfaatan Dana JKN/KIS
- 35) Pengelolaan Jaminan Pelayanan Penduduk miskin
- 36) Lokakarya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
- 37) Dukungan Pelayanan Kesehatan dalam rangka bakti sosial
- 38) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Kab/Kota Se-Prov Kepri
- 39) Pendampingan Survei Akreditasi Rumah Sakit
- 40) Peningkatan Program Ponik di RS kab/Kota
- 41) Fasilitas Penunjang Program Akreditasi Puskesmas
- 42) Pertemuan Penunjang klinik Terakreditasi
- 43) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK
- 44) Peningkatan Pelayanan Kesehatan di UTD
- 45) Pertemuan Kalibrasi Sarana Prasarana Alat (SPA) di FKTP
- 46) Kontigensi Terpadu Krisis Kesehatan
- 47) Pengadaan logistik Perkantoran dan Penunjang Lain RS
- 48) Penyelenggaraan K3 dan sanitasi rumah sakit
- 49) Pengadaan Muebeleur RS
- 50) Pengadaan Muebeleur RS
- 51) Pengadaan Komputer Manajemen, dan Pelayanan RS
- 52) Akreditasi Rumah Sakit
- 53) Pembangunan Gedung Penunjang (IPSRS, Gudang Obat dan Penunjang Lainnya)
- 54) Pengadaan Linen Rumah Sakit
- 55) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
- 56) Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung layanan RS
- 57) Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry RS



- 58) Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Kesehatan dan Penunjangnya
- 59) Pengadaan Obat dan Perlengkapan Pengelolaan Obat
- 60) Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai
- 61) Standarisasi Pelayanan Keperawatan
- 62) Peningkatan Mutu dan Pengembangan Penunjang Medik
- 63) Pengadaan Kelengkapan penunjang medik
- 64) Peningkatan Sarana Prasarana Gedung RS
- 65) Pengadaan Kelengkapan penunjang non medik
- 66) Pengadaan Peralatan Kesehatan
- 67) Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pelayanan Medik
- 68) Recruitement Pegawai BLUD Non PNS
- 69) Pengadaan Partisi Lemari Ruang Laboratorium Patologi Klinik
- 70) Pengadaan Manekin Rumah Sakit
- 71) Pengadaan RollPack Rumah Sakit
- 72) Pengadaan Mobil Operasional Farmasi Rumah Sakit
- 73) Pengadaan Instrumen Kamar Bedah / Kamar Operasi
- 74) Kontrak Service Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Penunjang RS
- 75) Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Pasien
- 76) Pengadaan Mobil Operasional Pelayanan Rumah Sakit
- 77) Pengadaan USG Urologi RSUD Raja Ahmad Tabib
- 78) Pengadaan Bor Elektrik Orthopedi RSUD Raja Ahmad Tabib
- 79) Pengadaan Alat Insentive Care Unit Echo Cardiography RSUD Raja Ahmad Tabib
- 80) Pengadaan Alat Insentive Care Unit Ultrasonografi portable
- 81) Pengadaan Alat echo Cardiografi Portable RSUD Raja Ahmad Tabib

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi	%	71,40
2)	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	70,00
3)	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	85,00
4)	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS)	Status	Paripurna
5)	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS)	Status	Paripurna

**d. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan**

Program ini difokuskan pada kegiatan: Pelayanan Kesehatan BLUD

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	80,00
2)	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban	%	80,00

e. Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Insentif Peserta Internship Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pengangkatan Tenaga Medis Non PNS
- 3) Pengangkatan Tenaga Paramedis Non PNS
- 4) Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Medik
- 6) Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Medik/Non Medik
- 7) Pendidikan dan pelatihan SDM manajemen
- 8) Pendidikan dan Pelatihan Perawat/Bidan
- 9) Pelatihan Kodefikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
- 10) Pengembangan Layanan Rujukan Spesialis/Sub Spesialis

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	67,00
2)	Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang	%	70,00
3)	Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	70,00
4)	Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa	%	90,00

f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Program ini difokuskan pada kegiatan: Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kecil Rumah Sakit (APBD)



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar	%	87,00

g. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pertemuan perencanaan, penganggaran dan evaluasi program tingkat Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Peningkatan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan asistensi pembangunan kesehatan
- 3) Pra-Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 4) Sosialisasi Juknis dan Penyusunan RKA DAK
- 5) Koordinasi kenaikan pangkat PNS Dinkes Provinsi Kepulauan Riau dengan BKPP/BKN
- 6) Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional Kesehatan
- 7) Rapat Koordinasi Kepegawaian Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Asistensi Advokasi, Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 9) Penyusunan Rencana Strategis RS
- 10) Benchmarking Kualitas Pelayanan RS
- 11) Peningkatan mobilisasi dana penerimaan RS
- 12) Dukungan Rumah Sakit Pendidikan
- 13) Koordinasi dan Konsolidasi dengan Instansi Terkait
- 14) Pengadaan Sarana dan Prasarana Surat Menyurat Elektronik

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan	%	100,00
2)	Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik	%	100,00

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Perencanaan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air
- 2) Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Fasilitasi, Koordinasi, Pengawasan, dan Pengendalian Teknis di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air



- 3) Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan, dan Optimalisasi/Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi, dan Daerah Pengairan Lainnya
- 4) Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan, dan Optimalisasi/Rehabilitasi Waduk/Embung dan Bangunan Penampung Lainnya
- 5) Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai
- 6) Kegiatan Pembangunan, Perbaikan, dan Pengaturan Sistem Sungai/Saluran Utama
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kota Tanjungpinang & Kabupaten Bintan
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kota Batam
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Karimun
- 10) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Lingga
- 11) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Natuna
- 12) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Kepulauan Anambas

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	48,64
2)	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	76,10
3)	Jumlah titik rawan banjir	Lokasi	15,00

b. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang (Pemeliharaan Rutin Jalan)
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang (Pemeliharaan Berkala Jalan)
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan (Pemeliharaan Rutin Jalan)
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan (Pemeliharaan Berkala Jalan)



- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Batam (Pemeliharaan Rutin Jalan)
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Batam (Pemeliharaan Berkala Jalan)
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun (Pemeliharaan Rutin Jalan)
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun (Pemeliharaan Berkala Jalan)
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga (Pemeliharaan Rutin Jalan)
- 10) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna (Pemeliharaan Rutin Jalan)
- 11) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna (Pemeliharaan Berkala Jalan)
- 12) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas (Pemeliharaan Rutin Jalan)
- 13) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Jembatan pada ruas status jalan Provinsi (Pemeliharaan Rutin Jembatan)
- 14) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Jembatan pada ruas status jalan Provinsi (Pemeliharaan Berkala Jembatan)
- 15) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan/Jembatan di Kawasan Pulau Dompak (Pemeliharaan Rutin Jalan)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase jalan Provinsi berkondisi baik	%	75,00
2)	Persentase jembatan Provinsi berkondisi baik	%	84,72

c. Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
- 2) Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Fasilitasi, Koordinasi, Pengawasan, dan Pengendalian Teknis di Bidang Bina Marga
- 3) Kegiatan Pendamping DAK
- 4) Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Bintan
- 5) Kegiatan pembangunan jalan di Kota Batam
- 6) Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Karimun
- 7) Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Lingga
- 8) Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Natuna



- 9) Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas
- 10) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan jembatan
- 11) Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kota Tanjungpinang
- 12) Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kabupaten Bintan
- 13) Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kota Batam
- 14) Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kabupaten Karimun
- 15) Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kabupaten Lingga
- 16) Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kabupaten Natuna
- 17) Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas
- 18) Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Antar Pulau (Connectivity) di Kabupaten Karimun
- 19) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan/Jembatan di Kawasan Pulau Dompak

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis)	km	34,45
2)	Panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi	km	58,78

d. Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Rencana Kerja Pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan dan Peraturan Jasa Konstruksi
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan SIPJAKI Provinsi, dan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan IUJK dan SIPJAKI Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Kegiatan Survey Penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlangsungan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- 5) Kegiatan Pembinaan Kapasitas Penyelenggaraan Fasilitasi Pengawasan tertib jasa konstruksi
- 6) Kegiatan Penyusunan Perencanaan/Kajian Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Pemenuhan Nilai Layanan Dasar SIPJAKI	%	100,00

e. Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi/SIBIMA (Belajar Mandiri)
- 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Jasa Konstruksi
- 3) Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Mobile Training Unit MTU)
- 4) Kegiatan Pengoperasian, Pemeliharaan dan Prasarana Pendukung Mobile Training Unit (MTU)
- 5) Pelatihan/Pendidikan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
- 6) Kegiatan Training/Pelatihan/Bintek (Out of Office) peningkatan Kapasitas aparatur tenaga konstruksi internal pemerintahan
- 7) Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Pelatihan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi (tenaga ahli konstruksi)	Orang	200

f. Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Laboratorium Pengujian Konstruksi
- 2) Kegiatan Kalibrasi dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Pengujian Konstruksi
- 3) Kegiatan pengembangan SDM dan Operasional Laboratorium Pengujian Konstruksi
- 4) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Peralatan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase capaian kontribusi retribusi laboratorium pengujian jasa konstruksi terhadap total retribusi daerah	%	0,05

g. Program pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi kepulauan Riau
- 2) Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Penataan Ruang di Provinsi Kepri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	persentase kab/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya	%	100,00

h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Kegiatan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda	perda	4

4. Pertanian

a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Studi LARAP
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Pertanian di Provinsi Kepri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi	%	100,00

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Kep. Anambas
- 2) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Batam
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Bintan
- 4) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Karimun
- 5) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Lingga
- 6) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Natuna
- 7) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Tanjungpinang
- 8) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Perumahan Kawasan Perkotaan di Provinsi Kepri
- 9) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Potensial dan Pesisir di Provinsi Kepri
- 10) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perkotaan di Anambas
- 11) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perkotaan di Batam
- 12) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perkotaan di Bintan
- 13) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perkotaan di Karimun
- 14) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perkotaan di Lingga
- 15) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perkotaan di Natuna
- 16) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kawasan Perkotaan di Tanjungpinang
- 17) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan di Kota Batam



- 18) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan di Kota Tanjungpinang
- 19) Kegiatan Pendataan Perumahan / Permukiman
- 20) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Pesisir/Nelayan
- 21) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Bintan
- 22) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Lingga

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Luas kawasan kumuh	ha	225,09

b. Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Karimun
- 2) Kegiatan Pemeliharaan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Bintan
- 3) Kegiatan Pemeliharaan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Lingga
- 4) Kegiatan Pemeliharaan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kota Tanjungpinang
- 5) Penyiapan Bahan Penyusunan Perencanaan di Bidang Sistem Penyediaan Air Bersih & Air Minum (Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM)
- 6) Penyiapan Bahan Penyusunan Perencanaan di Bidang Sistem Penyediaan Air Bersih & Air Minum (Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi)
- 7) Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kota Tanjungpinang (Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan)
- 8) Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kota Tanjungpinang (Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman)
- 9) Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Natuna (Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan)
- 10) Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Natuna (Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan)
- 11) Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kota Batam (Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan)



- 12) Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kota Batam (Pembangunan unit air baku)
- 13) Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Lingga (Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan)
- 14) Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Lingga (Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan)
- 15) Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Bintan (Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan)
- 16) Pengembangan SPAM dan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Bintan (Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman	%	100,00

c. Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sistem Penanganan Persampahan
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Permukiman Kab/kota
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Drainase di Batam
- 4) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Drainase di Bintan
- 5) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Drainase di Karimun
- 6) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Drainase di Lingga
- 7) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Drainase di Natuna
- 8) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Drainase di Tanjungpinang
- 9) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Drainase di Wilayah Pesisir
- 10) Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah (Penyediaan IPALD)
- 11) Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah (Penyediaan Tangki Septik)



12) Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah (Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Cakupan pelayanan Sanitasi :		72,75
2)	Air Limbah	%	100,00
3)	Persampahan	%	66,00
4)	Drainase	%	52,24

d. Program penataan bangunan dan lingkungan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana Perkantoran Pemerintahan lainnya
- 2) Kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana Perkantoran Pemerintahan Provinsi
- 3) Kegiatan Penyediaan Sarana Ruang Olahraga skala kota/kabupaten
- 4) Kegiatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan
- 6) Perkotaan di Kabupaten Bintan
- 7) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan di Kota Batam
- 8) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan di Kota Tanjungpinang
- 9) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Lingga
- 10) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Anambas
- 11) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Natuna
- 12) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Karimun

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase fasilitas bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun per Tahun	%	25,00



6. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

a. Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPNS Se-Provinsi Kepri
- 2) Kegiatan Koordinasi Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Perda Provinsi Kepri
- 3) Kegiatan Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi Penegakan Perda Provinsi Kepulauan Riau (FORKOMKON)
- 4) Kegiatan Kodifikasi Perda dan Perkada Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Anggota Satpol PP Provinsi Kepri
- 6) Operasi Kendaraan Dinas dan Objek Vital Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Kepri
- 7) Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 8) Kegiatan Pengawasan Dan Penegakan Perda dan perkada Prov Kepri
- 9) Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Produk Hukum Daerah Prov Kepri
- 10) Razia Bersama Kedisiplinan PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 11) Pemantapan Kinerja PPNS se Provinsi Kepri
- 12) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 13) Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 14) Penyuluhan Generasi Muda Sadar Hukum

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	150
2)	Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri	orang	51

b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pengendalian pengawasan dan pengamanan Satpol PP Provinsi Kepri
- 2) Pengamanan dan pengawasan aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak di Wilayah Provinsi Kepri dan Kabupaen/Kota Se-Provinsi Kepri
- 3) Kegiatan Monitoring dan Pendataan Daerah rawan Gangguan Trantib
- 4) Kegiatan pengamanan dan pengawalan Kepala Daerah dan Hari-Hari Besar Nasional serta Keagamaan



- 5) Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Kegiatan fasilitasi pembinaan Trantib dan Tranmas bagi aparat Satpol PP Se-Provinsi Kepri
- 7) Kegiatan Peningkatan Operasional Pengaturan, Pengawasan, dan Patroli (TURJAWALI)
- 8) Kegiatan Peningkatan pelaksanaan Deteksi Dini
- 9) Kegiatan kaji Banding Operasi ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase demo yang berjalan aman	%	100,00

c. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pembangunan Pos Terpadu
- 2) Pendataan dan Pembuatan Kartu Anggota Satlinmas
- 3) Pengadaan Perlengkapan Pos Satlinmas Se-Provinsi Kepri
- 4) Pelatihan Penanggulangan Deteksi Dini Dalam Bencana Bagi Anggota Satlinmas
- 5) Pemberian Penghargaan Kepada Anggota Satlinmas Yang Berprestasi
- 6) Sosialisasi pentingnya kelinmasan
- 7) Pemantapan Program Optimalisasi Kinerja Keamanan Lingkungan
- 8) Pelatihan Dasar Bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan	%	80,00

d. Program Penanggulangan Kebakaran

Program ini difokuskan pada kegiatan: Pemetaan Rawan Kebakaran Di provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Kab/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran	%	100,00

e. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
- 2) Aksesibilitas Rakyat dan Pengusaha Mikro terhadap Lembaga Keuangan dan Perbankan di Provinsi Kepri
- 3) Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
- 4) Peningkatan Peran FKUB
- 5) Pembinaan Generasi Muda di bidang kewaspadaan dini di Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Provinsi Kepri
- 7) Revitalisasi nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Perguruan Tinggi/Pelajar dan Masyarakat
- 8) Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Kesbangpol di Prov. Kepri.
- 9) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kepulauan Riau
- 10) Peningkatan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- 11) FORKOMPIMDA
- 12) Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
- 13) Pemetaan Wilayah Rawan Konflik SARA di Provinsi Kepulauan Riau
- 14) Pembinaan dan Pengembangan Forum Dialog Penyelesaian Konflik di Daerah
- 15) Temu Generasi antar Umat Beragama Se-Provinsi Kepri
- 16) Sosialisasi Peningkatan Budaya dan Etika Politik dalam Rangka Penguatan Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar di Provinsi Kepri
- 17) Sosialisasi Bela Negara bagi Pemuda/Mahasiswa
- 18) Fasilitasi dan Kerjasama Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen
- 19) Pembinaan Kesadaran Bela Negara Bagi Pelajar/Mahasiswa
- 20) Perkemahan Wawasan Kebangsaan
- 21) Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing
- 22) Revolusi Mental Indonesia Bersatu
- 23) Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
- 24) Forum Kesbangpol Se-Provinsi
- 25) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 26) Sosialisasi 4 Konsensus Nasional
- 27) Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Desa Pesisir



28) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Narkotika) di Kab. Natuna

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase konflik sosial tertangani	%	100,00

f. Program pendidikan politik masyarakat

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Monitoring Ormas/LSM Penerima Bansos dan Update Data base Ormas/LSM
- 2) Peningkatan kapasitas Politik kaum Perempuan di Provinsi Kepri.
- 3) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik
- 5) DESK PILKADA di Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Tugas-tugas Kesatuan Bangsa dan Politik
- 7) Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Ormas
- 8) Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	0
2)	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	94,74

g. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Bimbingan Teknis Sekolah/Madrasah Tangguh Bencana Kab/Kota
- 2) Publikasi BPBD
- 3) Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana Se-Provinsi Kepri
- 4) Pemantapan Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Hari Kesiapsiagaan Bencana
- 6) Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit
- 7) Kajian Risiko Bencana Kabupaten Anambas



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase desa/kel tangguh bencana	%	2,64

h. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Siaga Darurat Bencana
- 2) Peningkatan Kapasitas TRC dalam membantu korban bencana
- 3) Pengadaan Logistic dan Peralatan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kab/Kota
- 4) Pendistribusian Logistic dan Peralatan Penanggulangan Bencana ke Kab/Kota
- 5) Pengadaan Perlengkapan TRC dalam Penanggulangan Bencana
- 6) Pembangunan Gedung Pusdalops Dan Gudang Logistik

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase kejadian bencana kab/kota yang tertangani dengan baik	%	100,00

i. Program Pemulihan Pasca Bencana

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pemulihan dampak Sosial/ Ekonomi/ Psikologis Pasca Bencana
- 2) Bimbingan Teknis JITUPASNA (Kajian kebutuhan pasca bencana)
- 3) Pembuatan batas/ tanda aman bencana

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah wilayah pasca bencana yang terpulihkan	Jumlah	3

7. Sosial

a. Program Penanggulangan Kemiskinan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme UEP
- 2) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme KUBE
- 3) Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme UEP
- 4) Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial



- 5) Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme UEP
- 6) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme Bankessos
- 7) Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme Bankessos

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	1,77
2)	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	0,47
3)	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	42,74

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pelayanan Sosial Lanjut Usia
- 2) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- 3) Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)
- 4) Rehabilitasi Sosial Tunasosial dan Korban Perdagangan Orang
- 5) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,33
2)	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	10,89
3)	Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	29,77
4)	Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	2,17
5)	Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi,	%	78,37



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
	dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)		
6)	Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas	%	73,51

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- 2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- 3) Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkesos)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	25,00
2)	Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	60,35

d. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 2) Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)
- 3) Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas	%	62,54
2)	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitas	%	78,17
3)	Persentase pejuang, perintis kemerdekaan, dan	%	100,00



	keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial		

e. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- 2) Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan	unit	3,00
2)	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara	unit	3,00

f. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Penyuluhan Sosial
- 2) Monev Program Kesejahteraan Sosial
- 3) Rapat Koordinasi Program Kesejahteraan Sosial
- 4) Pengendalian Pendistribusian Beras Sejahtera
- 5) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun
- 6) Penerapan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 7) Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Sosial
- 8) Penyusunan Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase pemangku kepentingan yang mendapat penyuluhan sosial	%	10,54
2)	Persentase kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendapat monitoring dan evaluasi	%	50,00



8. Tenaga kerja

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pelatihan Teknik Otomotif
- 2) Pelatihan Garmen Apparel (Menjahit)
- 3) Pelatihan Teknik Listrik
- 4) Pelatihan Operator Alat Berat
- 5) Pelatihan Teknik Manufaktur
- 6) Pelatihan Bubut Logam
- 7) Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes Paramedis
- 8) Pelatihan dan Sertifikasi Quality Control Scaffolding
- 9) Pelatihan dan Sertifikasi Perancah
- 10) Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Listrik
- 11) Pelatihan Akutansi Berbasis Komputer
- 12) Pelatihan dan Sertifikasi Hiperkes Dokter
- 13) Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut
- 14) Pelatihan dan Sertifikasi Sistem Informasi Akuntansi
- 15) Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Pembangkit Level 1
- 16) Pelatihan dan Sertifikasi Auditor SMK3
- 17) Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ikat/Rigger
- 18) Pelatihan dan Sertifikasi Operator K3 Migas
- 19) Pelatihan dan Sertifikasi Rotating Equipment
- 20) Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Maintenance & Repair Scaffolding
- 21) Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Umum
- 22) Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Migas
- 23) Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Akutansi Pratama
- 24) Pelatihan dan Sertifikasi Forklift
- 25) Pelatihan Welding Inspector Level 1
- 26) Pelatihan Servis Sepeda Motor.
- 27) Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan
- 28) Pelatihan Sertifikasi Teknisi Listrik
- 29) Pelatihan satuan Pengamanan (SATPAM)
- 30) Pelatihan Sertifikasi P3K
- 31) Pelatihan Komputer
- 32) Pelatihan teknik Pendingin
- 33) Pelatihan Las Dasar
- 34) Pelatihan Listrik Otomasi (Electrical Otomation)
- 35) Pelatihan Pembuatan Kapal dari Bahan Fiber
- 36) Pelatihan Air Brush
- 37) Pelatihan dan Sertifikasi Las NDT-PT
- 38) Pelatihan dan Sertifikasi Las NDT-MT
- 39) Pelatihan Desain Grafis
- 40) Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Kebakaran Kelas D+C



- 41) Pelatihan dan Sertifikasi Inspektur Pesawat Angkat
- 42) Pelatihan dan Sertifikasi Painting Inspector
- 43) Nebosh International General Certificate - 1,2,3
- 44) Front Officer- Receptionist
- 45) Housekeeping - Room Attendant
- 46) Food & Beverage Service - Waiter
- 47) Food & Beverage Service - Butcher
- 48) Pelatihan Barista
- 49) Metodologi Pelatihan (Instruktur) Level III
- 50) Metodologi Pelatihan (Instruktur) Level IV
- 51) Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi
- 52) Pelatihan Human Resource Officer
- 53) Pelatihan Human Resource Supervisor
- 54) Pelatihan Human Resource Manager
- 55) Pelatihan Web Development
- 56) Pelatihan dan sertifikasi K3 Teknisi Listrik
- 57) Pelatihan dan sertifikasi K3 Operator Forklift level 2
- 58) Pelatihan dan sertifikasi K3 Operator Forklift level 1
- 59) Pelatihan Programmer
- 60) Pelatihan Desainer Multimedia
- 61) Pelatihan Animator
- 62) Pelatihan Web programmer
- 63) Pelatihan Teknisi Instalasi Fiber Optik
- 64) Pelatihan Spesialis Effect Multimedia
- 65) Pelatihan Teknisi Instalasi Listrik
- 66) Pelatihan Junior Digital Artist
- 67) Pelatihan Operator penggerak Mula kelas 1
- 68) Pelatihan Operator Mesin Produksi dan perkakas kelas 1
- 69) Pelatihan Operator Tanur kelas 1
- 70) Pelatihan dan Sertifikasi Las 1G SMAW
- 71) Pelatihan dan Sertifikasi Las 2G SMAW
- 72) Pelatihan dan Sertifikasi Las 3G SMAW
- 73) Pelatihan dan Sertifikasi Las 4G SMAW
- 74) Pelatihan dan Sertifikasi Las 1G PIPA SMAW
- 75) Pelatihan dan Sertifikasi Las 2G PIPA SMAW
- 76) Pelatihan dan Sertifikasi Las 5G PIPA SMAW
- 77) Pelatihan dan Sertifikasi Las 6G PIPA SMAW
- 78) Pelatihan dan Sertifikasi Las 1G FCAW
- 79) Pelatihan dan Sertifikasi Las 2G FCAW
- 80) Pelatihan dan Sertifikasi Las 3G FCAW
- 81) Pelatihan dan Sertifikasi Las 4G FCAW
- 82) Pelatihan dan Sertifikasi Las 1G PIPA FCAW
- 83) Pelatihan dan Sertifikasi Las 2G PIPA FCAW



- 84) Pelatihan dan Sertifikasi Las 5G PIPA FCAW
- 85) Pelatihan dan Sertifikasi Las 6G PIPA FCAW
- 86) Pelatihan dan Sertifikasi Welding Inspector Level II (Welding Inspector
- 87) Standard)
- 88) Pelatihan dan Sertifikasi Welding Inspector Level III (Welding Inspector
- 89) Comprehensive /Senior)
- 90) Pelatihan dan Sertifikasi NDT – UT
- 91) Pelatihan dan Sertifikasi NDT – RI
- 92) Pelatihan Teralis
- 93) Pelatihan Food handler
- 94) Pelatihan Food safety
- 95) Pelatihan Food Hygiene industri
- 96) Pelatihan K3 Rumah Sakit
- 97) Pelatihan Operator genset / diesel
- 98) Pelatihan Operator boiler
- 99) Pelatihan crane operator
- 100) Pelatihan Operatur Mesin Produksi
- 101) Food & Beverage Service - Bakery
- 102) CSWP 3.0 - Visual Welding Inspector - Level 1
- 103) CWIP NDT Lv.2 Dye Penetrant Testing (DPT)
- 104) CSWIP NDT Magnetic Particel Testing (MT)
- 105) BGAS-CWIO Painting Inspector-Grade 2
- 106) Pelatihan 5G GTAW PIPA
- 107) Pelatihan 6G GTAW PIPA
- 108) Biaya Rutin Dukungan BLK Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	48,25
2)	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	43,25
3)	Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja	%	89,00
4)	Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman	orang	16

b. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Bimbingan Teknis Pemandu Wira Usaha Baru
- 2) Pelatihan Kewirausahaan



- 3) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Penempatan di Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Sosialisasi UU Ketenagakerjaan Tentang Wajib lapor Perusahaan, Penyelenggaraan AKAD dan pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing
- 5) Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Pendamping
- 6) Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
- 7) Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
- 8) Pembinaan dan Pengukuran Produktivitas
- 9) Bimbingan Teknis Soft Skill Untuk Pencari Kerja
- 10) Peningkatan Pelayanan dan Informasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
- 11) Pelatihan Peningkatan Kemampuan Calon Peserta Pemagangan Luar Negeri
- 12) Fasilitasi Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	64,00
2)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,80
3)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,60

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan tenaga kerja

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SMK3) di Perusahaan
- 2) Bimtek Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak
- 3) Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
- 4) Rapat Koordinasi Teknis Daerah dan Bedah Kasus Pengawas
- 5) Ketenagakerjaan
- 6) Operasional UPTD Pengawasan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun
- 7) Operasional UPTD Pengawasan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam
- 8) Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja
- 9) Operasional Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau
- 10) Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Tempat Kerja
- 11) Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2021



- 12) Bimbingan Teknis Perhitungan Upah Lembur dan Waktu Kerja Perusahaanperusahaan di Kota Batam
- 13) Koordinasi dan Pembinaan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PJK3
- 14) Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 15) Koordinasi dan Pembinaan Perusahaan Penyedia JasaPekerja/Buruh
- 16) Koordinasi dan Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA)
- 17) Pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan
- 18) Koordinasi Penyelenggaraan dan Pembinaan Kepatutan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 19) Penyelenggaraan Pengaduan/Konsultasi Ketenagakerjaan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	95,00
2)	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3	%	3,50
3)	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	90,00

d. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Bimbingan Teknik negosiasi Penanganan kasus Perselisihan Hubungan Industrial
- 2) Bimbingan Teknis Pembentukan LKS Bipartit
- 3) Bimbingan Teknis Pengelolaan Kelembagaan dan Hubungan Industrial
- 4) Bimtek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di Perusahaan
- 5) Koordinasi dan sinkronisasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Pembinaan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan
- 7) Peningkatan Peran Lembaga Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan LKS Tripartit Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Deteksi Dini Kerawanan ubungan Industrial di Provinsi Kepulauan Riau
- 9) Diseminasi sistem jaminan Sosial Nasional Bagi Pekerja Sektor Informal
- 10) Bimbingan Teknis Untuk Peningkatan Kapasitas SP/SB
- 11) Dukungan Kegiatan Liga Pekerja Indonesia (LIPESIA) dan Peringatan Hari Buruh Internasional
- 12) Bimtek Struktur dan Skala Upah



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	%	28,00

9. Transmigrasi

a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Focus Group Discussion Pembinaan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 2) Fasilitasi Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Monitoring dan Pemuktahiran Data di Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah warga (KK) yang ditempatkan sesuai dengan rencana penempatan	KK	2.730
2)	Jumlah kawasan transmigrasi	Kawasan	3

10. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Forum Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepri
- 2) Pengembangan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG dan PPRG di Provinsi Kepri
- 3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUG dan PPRG di Kab/Kota dan Provinsi Kepri
- 4) Pelatihan TOT PPRG Desa

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase anggaran responsive gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	%	7,00



b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Fasilitasi Pembentukan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- 2) Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan TPPO
- 3) Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan
- 4) Peningkatan Kapasitas Perempuan bidang ekonomi
- 5) Pembinaan Organisasi Perempuan
- 6) Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Perempuan dan Anak
- 7) Pemantapan Perlindungan Hak Tenaga Kerja Perempuan, Situasi Khusus dan
- 8) Kondisi Bencana
- 9) Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepri
- 10) Pelatihan Enterpreneurship bagi pelaku usaha perempuan
- 11) Capacity Building Politik Perempuan di Prov. Kepri
- 12) Koordinasi dan Pemantapan Implementasi SPPT-PPKTP
- 13) Pelayanan Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan Perempuan dan Anak Korban kekerasan
- 14) Pelayanan Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Perempuan dan anak korban kekerasan
- 15) penguatan dan pengembangan kapasitas Dharma Wanita Persatuan prov kepri
- 16) Seminar ketahanan keluarga anggota Dharma Wanita Persatuan
- 17) Pemantapan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan
- 18) Sosialisasi Penguatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (He For She) Tingkat Prov. Kepri
- 19) Pembinaan dan Pengembangan RUMAH TERAMPIL Pemberdayaan
- 20) Perempuan dan Anak di Prov. Kepri
- 21) Pengembangan Industri Rumah Tangga bagi Pelaku Usaha Perempuan Provinsi
- 22) Kepri
- 23) Pelatihan Life Skill bagi Perempuan di Provinsi Kepri
- 24) Kampanye Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- 25) Pembentukan Sekolah Perempuan
- 26) Pelatihan membuat batik bagi perempuan di Provinsi Kepri
- 27) Pembentukan Shelter dan Sarana Prasarana UPTD P2TP2A di Kota Batam
- 28) Pelayanan UPTD P2TP2A Provinsi Kepri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000 Perempuan	28,49

c. Program Perlindungan Anak

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Ajang Temu Anak Provinsi Kepri
- 2) Penguatan dan Pengembangan PATBM
- 3) Pengembangan Kota Layak anak (SRA, PRA, Rapat Gugus Tugas)
- 4) Peningkatan Kapasitas Orangtua dan Anak terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak
- 5) Fasilitasi Pencegahan Perkawinan Anak
- 6) Musrenbang Forum Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 7) Pelatihan KHA untuk tenaga Pendidik dan Kependidikan Tingkat SMA
- 8) Fasilitasi Pembentukan APSAI Kabupaten/Kota
- 9) Pelatihan Keterampilan Anak di LPKA
- 10) Pelatihan Kader PATBM di Provinsi Kepulauan Riau
- 11) Festival Anak Kepulauan Riau
- 12) Pengembangan Pusat Konsultasi Keluarga (PUSPAGA) dan klinik tumbuh kembang anak

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	%	85,71
2)	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Per 10.000 anak	3,66

d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga
- 2) Pengembangan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
- 3) Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK R)
- 4) Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill	%	1,48

11. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program keluarga berencana

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pemantapan dan Pembinaan BKB, BKL, BKR (Tri Bina)
- 2) Sosialisasi dan Advokasi, KIE tentang Pengendalian Penduduk dan KB di Prov. Kepri
- 3) Pengembangan dan Pembentukan Program Kampung KB Terintegrasi
- 4) Pengembangan Program KKBPKD Tingkat Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Penyusunan Grand Design Pembangunan Keluarga (Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Pembentukan Kampung KB	Angka	1
2)	Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR)	%	50,73

12. Pangan

a. Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Cadangan Pemerintah Provinsi
- 2) kegiatan Penyusunan Analisis Ketersediaan Pangan
- 3) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
- 4) Kegiatan Penyusunan Analisis Jaringan Distribusi Pangan Masyarakat
- 5) Kegiatan Identifikasi dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
- 6) Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	93,00
2)	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV < 10



b. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan lahan pekarangan
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- 3) Kegiatan Kampanye B2SA dan Gelar Pangan Lokal
- 4) Kegiatan Promosi Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal
- 5) Analisis Pola Konsumsi Pangan Penduduk
- 6) Pengembangan Pangan Pokok Lokal
- 7) Workshop Ketahanan Keluarga untuk Ketahanan Pangan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	skor	90,00

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Analisis Penanganan Kerawanan Pangan
- 2) Penanganan Kerawanan Pangan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Angka Rawan Pangan	%	16,93

d. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan.
- 2) Kegiatan Peningkatan SDM Keamanan Pangan
- 3) Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan
- 4) Kegiatan Pengawasan Bahan Kimia Berbahaya Pada Produk Pangan
- 5) kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Pangan
- 6) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan
- 7) Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi Produk Pangan



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	80,00

e. Program Pengembangan SDM dan Penyuluh Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Pendampingan Penyusunan Program Penyuluhan
- 2) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan
- 3) Apresiasi Bagi Penyuluh Pertanian Teladan (PNS, THL TB PP, Swadaya), Balai Penyuluhan, Petani dan Kelembagaan Tani Berprestasi
- 4) Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	40,00

13. Pertanian

a. Program peningkatan kesejahteraan Petani

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
- 2) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani
- 3) PENAS Petani Nelayan
- 4) Pemberdayaan manajemen & Teknis perluasan Sawah
- 5) Sekolah Lapang Budi Daya Pertanian

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100,00
2)	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	1,28



b. Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Peningkatan Produksi Padi
- 2) Peningkatan Produksi Palawija
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan
- 4) Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan
- 5) Pengembangan dan Peremajaan Tanaman Cengkeh Rakyat
- 6) Pengembangan Tanaman Lada.
- 7) Pengembangan Kelapa
- 8) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Balai Benih Induk
- 9) Pelayanan Laboratorium Balai Benih Induk
- 10) Pengembangan Tanaman Induk dan Kebun Pembibitan Tanaman Pertanian
- 11) Pengembangan Tanaman Induk dan Kebun Pembibitan Tanaman Perkebunan
- 12) Pengawasan dan Pendampingan Cetak sawah di Provinsi Kepulauan Riau
- 13) Pengembangan Tanaman Pertanian Melalui Bantuan Pupuk Organik Cair untuk Petani
- 14) Pengembangan Tanaman Pertanian Melalui Bantuan Pupuk Dolomit untuk Petani
- 15) Pengembangan Tanaman Pertanian melalui Bantuan Pestisida untuk Petani
- 16) Peningkatan Produksi Hortikultura
- 17) Demplot Budidaya Pertanian
- 18) Peningkatan Layanan Kantor UPTD Balai Benih Induk

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah Produksi Padi (ton)	ton	1.020
2)	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.742
3)	Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	ton	45.822
4)	Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	ton	32.480

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Satwa
- 2) Peningkatan Peranan Pusat Kesehatan Hewan
- 3) Peningkatan Peranan Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan



- 4) Pengembangan Puskesmas dan Laboratorium Diagnostik Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 5) Peningkatan Peranan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 6) Pencegahan Penularan Penyakit Zoonosis dan Penerapan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan)
- 7) Peningkatan Pelayanan UPTD Puskesmas dan Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar	%	0,015
2)	Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Kecil	%	0,001
3)	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	58,50

d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat.
- 2) Pengembangan Pembibitan Ternak
- 3) Peningkatan Pelayanan SPIB (Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan)
- 4) Peningkatan Pelayanan Lab Pakan
- 5) Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Produksi Hasil Peternakan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	5,00

e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Perkebunan
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna.
- 4) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan Dukungan Teknologi Mekanisasi



- 5) Pasar Tani dan Promosi Kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 6) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Peternak yang memanfaatkan teknologi tepat guna	%	6,11
2)	Persentase Kelompok Tani Menerapkan Teknologi pertanian/perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	%	4,73

14. Lingkungan hidup

a. Program Pengawasan dan Pengendalian pada Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Laut di Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Kegiatan Pemantauan Penilaian Kota Bersih dan Hijau (ADIPURA)
- 3) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Komisi Amdal Daerah
- 4) Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Bersih
- 5) Pengelolaan Persampahan Limbah Domestik di Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Kegiatan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3
- 7) Pengawasan Tingkat Ketaatan Peraturan Lingkungan Hidup (PROPER)
- 8) Kegiatan Pengadaan Peralatan Bank Sampah
- 9) Pengadaan Kapal Pembersih dan Pengangkut Sampah
- 10) Kegiatan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional
- 11) Pengelolaan Limbah B3 Akibat Tumpahan Minyak di Provinsi Kepulauan Riau
- 12) Pengadaan Tong Sampah untuk Kawasan Permukiman
- 13) Sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan di daerah permukiman
- 14) Pengadaan Alat Pengukur Indeks Standart Pencemar Udara (ISPU) di Provinsi Kepulauan Riau
- 15) Pengadaan Angkutan Sampah Roda Tiga
- 16) Pengelolaan Rutinitas Laboratorium Lingkungan Hidup

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	69,80
2)	Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	%	100,00
3)	Persentase kab/kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu	%	100,00
4)	Persentase pelaku usaha / industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar	%	19,70
5)	Persentase Kab/kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai baku mutu	%	100,00
6)	Persentase kabupaten/kota yang memenuhi standar nominasi Adipura	%	100,00

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pemulihan Kerusakan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata di Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah Sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional	Sekolah	40
2)	Luas kawasan mangrove yang terehabilitasi	ha	7

c. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Peningkatan Website dan Materi Publik Expose DLHK Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia
- 5) Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Program Kegiatan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 6) Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
- 7) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 8) Penyusunan Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 9) Penyusunan Renstra DLHK Prov.Keprl



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	100,00

15. Kehutanan

a. Program Pengembangan, Pemanfaatan, Rehabilitasi dan Pengawasan Kawasan Hutan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Penyusunan dokumen rencana pengelolaan pada KPHP Bintan-Tanjungpinang
- 2) Penyusunan dokumen rencana pengelolaan pada KPHP Natuna
- 3) Penyusunan dokumen rencana pengelolaan pada KPHL Batam
- 4) Sosialisasi peraturan Pengelolaan hasil hutan kayu
- 5) Monitoring dan evaluasi perizinan didalam kawasan hutan
- 6) Pengendalian, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Usaha Hasil Hutan
- 7) Inventarisasi sumberdaya hutan dalam rangka mendukung program hutan
- 8) Pos Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 9) Koordinasi, pendampingan, fasilitasi dan pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Kemitraan
- 10) koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan pada KPH
- 11) Kordinasi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan serta Pengamanan Kawasan Hutan
- 12) Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Pada KPHL Karimun
- 13) Rehabilitasi Lahan Wilayah KPH Natuna
- 14) Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Wilayah KPH Bintan - Tanjungpinang
- 15) Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Wilayah KPH Batam
- 16) Pendampingan, Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Wilayah KPH Natuna
- 17) Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Batam
- 18) Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Natuna
- 19) Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Bintan Tanjungpinang
- 20) Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Lingga
- 21) Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Karimun
- 22) Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial KPH Anambas



- 23) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Usaha Perhutanan Sosial dan Kemitraan pada KPH
- 24) Pelatihan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- 25) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Batam
- 26) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Bintan Tanjungpinang
- 27) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Karimun
- 28) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Lingga
- 29) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Natuna
- 30) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Wilayah KPH Anambas
- 31) Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Wilayah KPH Bintan tanjungpinang
- 32) Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Wilayah KPH Batam
- 33) Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan Wilayah KPH Natuna
- 34) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 35) Pembinaan, Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan
- 36) Pembuatan (P0) Hutan kota seluas 3 Ha
- 37) Operasionalisasi KPH Bintan-Tanjungpinang
- 38) Operasionalisasi KPH Batam
- 39) Operasionalisasi KPH Karimun
- 40) Operasionalisasi KPH Natuna
- 41) Operasionalisasi KPH Lingga
- 42) Operasionalisasi KPH Anambas

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Presentase terbentuk dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau	%	100,00
2)	Presentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,05
3)	Luas lahan kritis terehabilitasi	ha	230
4)	Persentase KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat	%	100,00
5)	Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	%	95,00



16. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program penataan Administrasi Kependudukan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Hibah pengadaan mobil operasional pelayanan administrasi kependudukan kab/kota
- 2) Operasionalisasi dan Pemeliharaan Data Center SIAK
- 3) Pemberian penghargaan dalam pelayanan publik bidang administrasi kependudukan
- 4) fasilitasi percepatan peningkatan cakupan akte kelahiran
- 6) Konsolidasi Data dan Pemutakhiran Database kependudukan
- 7) Peningkatan Fasilitas Ruang Data Centre Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 8) Hibah Pengadaan Peralatan Perekaman dan Cetak e-KTP
- 9) Persiapan/ Implementasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 10) Sosialisasi Peningkatan Cakupan Akta Kematian dan Akte Perceraian
- 11) Peningkatan Cakupan Akta Perkawinan
- 12) Hibah Pengadaan Peralatan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Kab / Kota

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Rasio penduduk ber-KTP	%	98,00
2)	Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran	%	82,00

17. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pembinaan 10 Program Pokok PKK
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa
- 3) Pembinaan dan Penguatan Sekretariat Pokjanal Posyandu
- 4) Partisipasi kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)
- 5) Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
- 6) Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Lembaga Adat Desa dan Desa Adat
- 7) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
- 8) Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat
- 9) dalam penanggulangan HIV/AIDS dan pemakai narkoba
- 10) Peningkatan Kapasitas BPD



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif	%	58,65

b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan
- 2) Pendampingan penguatan kapasitas kelembagaan BUM Desa
- 3) Monitoring dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- 4) Sosialisasi Pembentukan BumDesa Bersama
- 5) Pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Unit BUMDesa	55,00

c. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Provinsi Kepri
- 2) Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional
- 3) Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)
- 4) Forum Inovator dan Inventor TTG Provinsi Kepri
- 5) Pemetaan dan Pemanfaatan TTG

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah TTG yang memperoleh Paten	Unit	1
2)	Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat	%	33,33

d. Program Peningkatan Pembangunan dan Pemerintahan Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Rapat Kerja Pemerintahan Desa
- 2) Evaluasi Data Profil desa/ kel
- 3) Pembinaan pelaksanaan kewenangan Desa



- 4) Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan
- 5) Rakernis Kepala Desa
- 6) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 7) Pembinaan Penegasan Batas dan Aset Desa

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah Desa Cepat Berkembang	Desa	56

18. Perhubungan

a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat

Program ini difokuskan pada kegiatan: Pengawasan dan Pemantauan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	%	100,00
2)	Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	%	100,00
3)	Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyebrangan perintis	%	100,00
4)	Persentase pelabuhan penyebrangan terkelola dengan baik	%	100,00

b. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pengadaan dan pemasangan APILL
- 2) Perawatan Rutin Prasarana dan Fasilitas LLAJ di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat
- 4) Forum Komunikasi Lalu Lintas Jalan
- 5) Pemilihan Abdi Yasa Teladan
- 6) Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Sosialisasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 8) Pengadaan dan Pemasangan LPJU
- 9) Pengadaan Sarana Transportasi Darat
- 10) Pengadaan dan Pemasangan Alat Perlengkapan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	100,00

c. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
- 2) Pembangunan Halte
- 3) Perawatan Jembatan Penyeberangan Orang
- 4) Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Darat
- 5) Pembangunan Gedung dan Alat Uji Kendaraan Bermotor

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas	%	21,00
2)	Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis	%	100,00

d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Rutinitas Pengelolaan Gedung VIP Bandara RHF Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengkoordinasian Bandar Udara dan Angkutan Penerbangan
- 3) Peningkatan Sisi Darat Bandara di Kepri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis	%	100,00
2)	Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara	%	100,00
3)	Persentase ketersediaan Bandar Udara	%	100,00



e. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Rutinitas Pengelolaan Pelabuhan Se Kepri
- 2) Pemeliharaan Pelabuhan di wilayah kepri
- 3) Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Anambas
- 4) Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Natuna
- 5) Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Lingga
- 6) Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Batam
- 7) Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Tanjungpinang
- 8) Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Karimun
- 9) Peningkatan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Bintan
- 10) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Pelayaran dan Badan Usaha
- 11) Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT Wilayah I
- 12) Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT Wilayah II
- 13) Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT Wilayah III
- 14) Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT Wilayah IV
- 15) Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran UPT Wilayah V

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	100,00

f. Program Pembangunan Transportasi Laut

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Dukungan Kegiatan Angkutan Pelayaran dan Penerbangan di Wilayah Kepulauan Riau
- 2) Pengadaan/Pembangunan Sarana Transportasi Laut
- 3) Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Batam
- 4) Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Tanjungpinang
- 5) Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Karimun
- 6) Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Bintan
- 7) Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Lingga
- 8) Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Natuna
- 9) Pembangunan Dermaga/Pelabuhan/Pelantar di Anambas
- 10) Pembinaan, Pengawasan, Sosialisasi dan Monitoring Wilayah Laut Kepri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	%	100,00
2)	Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis	%	100,00
3)	Persentase pelabuhan laut terkelola dengan baik	%	100,00

g. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan: Optimalisasi Pendapatan retribusi sektor perhubungan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2030
1)	Persentase peningkatan retribusi pendapatan dari urusan perhubungan	%	40,00

19. Komunikasi & Informatika

a. Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Partisipasi media center dalam rangka mendukung festival bahari Kepri
- 2) Pengelolaan aspirasi dan opini publik
- 3) Pengelolaan media pengaduan berbasis teknologi
- 4) Penguatan Kelembagaan PPID
- 5) Penguatan dan Layanan Desk Informasi Publik , Kepri Smart Province, dan co-Working Space
- 6) Penguatan Website Diskominfo Provinsi Kepri
- 7) Pengelolaan Portal Website Pemprov Kepri
- 8) Pembuatan Konten Media dalam Rangka Layanan Komunikasi dan Informasi Publik
- 9) Penguatan dan Pengembangan Komisi Informasi Provinsi Kepri
- 10) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
- 11) Pengembangan Kemitraan dan Hubungan Media Komunikasi Berbasis TIK
- 12) Pengelolaan Komunikasi Publik OPD di Lingkungan Pemprov Kepri
- 13) Diseminasi Informasi Program Pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah Melalui Media Online
- 14) Anugerah Diseminasi Informasi Secara Tradisional Melalui Media Sosial se-Provinsi Kepri
- 15) Pengelolaan dan Monitoring Media Berbasis TIK



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Nilai Keterbukaan informasi provinsi kepri	Skala nilai 0-100	67,50

b. Program e-government

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Sosialisasi dan implementasi e-office di lingkungan pemerintah provinsi Kepri
- 2) Penyelenggaraan Smart Apps Competition
- 3) Pengelolaan Domain dan Subdomain
- 4) Integrasi dan Interoperabilitas SI Publik dan Kepemerintahan API (Application Programming Interface)
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Jaringan TIK
- 6) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan TIK
- 7) Pengembangan Sistem Informasi Publik dan Kepemerintahan
- 8) Penyusunan Arsitektur SPBE Provinsi Kepri
- 9) FGD Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepri
- 10) Perencanaan Induk pengembangan e-government Pemerintah Kabupaten Bintan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Nilai e- government Provinsi Kepri	Skala nilai 1-4	2,50
2)	Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggara negara	%	60,00

20. Statistik

a. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektor

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Survey dan Kompilasi Statistik Sektor
- 2) Forum Satu Data

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral Provinsi Kepri	%	35,00

21. Persandian

a. Program Persandian Untuk pengamanan informasi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pengembangan operasional sandi dan telekomunikasi
- 2) Pelatihan Persandian pada OPD dan Kab/Kota se-Provinsi Kepri
- 3) Pelatihan penerapan sertifikat elektronik pada pemerintah provinsi
- 4) IT Security assesment pada aplikasi dan domain e-gov milik pemerintah daerah provinsi
- 5) Kontra penginderaan pada sarana penting di pemerintah provinsi
- 6) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persandian pada pemerintah daerah kab/kota

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	%	50,00

22. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi
- 2) Penataan dan penguatan Organisasi dan tatalaksana Koperasi
- 3) Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Melalui Pembentukan Koperasi
- 4) Diklat Perkoperasian
- 5) Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP
- 6) Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi Wanita se-Provinsi Kepri
- 7) Pembinaan Penyelenggara RAT Koperasi
- 8) Pendampingan Inventarisasi Dana Bergulir
- 9) Pembinaan SOP Keuangan Koperasi
- 10) Pelatihan Manajemen Perkoperasian
- 11) Pembinaan Pengawasan Koperasi
- 12) Forum Pertemuan Para Pengelola Koperasi se-Provinsi Kepulauan Riau
- 13) Pembinaan Penilaian Kesehatan Bagi Koperasi
- 14) Pembinaan Pedoman Pengawasan Kepatuhan dan Sanksi Koperasi



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Koperasi Aktif	%	62,10
2)	Persentase KSP/USP sehat	%	45,90
3)	Pertumbuhan koperasi	%	3,00

b. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Fasilitasi dan Promosi Hasil Produksi KUKM melalui Pameran
- 2) Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi Koperasi dan Pengusaha wanita
- 3) Peningkatan standarisasi mutu dan sertifikasi produk
- 4) Perluasan dan peningkatan akses pemasaran
- 5) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan data KUKM
- 6) Dukungan biaya pembuatan akta notaris pendirian koperasi dan izin operasional KSP/USP
- 7) Workshop Peningkatan Usaha bagi PKL
- 8) Partisipasi dalam festival Bahari Kepri
- 9) Percepatan Stabilisasi Usaha Bagi UMKM

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif	%	0,75

c. Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Bimtek Evaluasi kebijakan pelaksanaan PUG bidang KUKM
- 2) Pelatihan dan Pengembangan kewirausahaan bagi UKM
- 3) Pelatihan manajemen berbasis online bagi Koperasi
- 4) Pelatihan Pengembangan Kemasan Produk UKM
- 5) Peningkatan Wawasan Pembiayaan Melalui KUR Bagi KUKM
- 6) Pendampingan KUKM
- 7) Peningkatan Daya Saing Produk UKM Berskala Ekspor
- 8) Pelatihan Technopreneur bagi UKM
- 9) Pelatihan Kewirausahaan KUKM se-Prov. Kepri
- 10) Peningkatan Capaian Pelayanan Sertifikasi Produk KUKM
- 11) Sosialisasi Upaya Pemanfaatan Dana Bantuan Wirausaha Pemula
- 12) Pembinaan Pengelolaan Teknologi Keuangan bagi Koperasi



- 13) Pelatihan Manajemen Bagi UMKM
- 14) Penyediaan Sarana Usaha Bagi UMKM
- 15) Peningkatan Kualitas Produk Bagi KUKM

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	22,25

23. Penanaman Modal

a. Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Kebijakan Penanaman Modal
- 2) Kegiatan Updating dan Peyempurnaan RUPM Prov Kepri
- 3) Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal
- 4) Task force, fasilitasi dan asistensi pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal
- 5) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah untuk Pengembangan Penanaman Modal
- 6) Konsolidasi Investasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal
- 7) Survey Indeks Kepuasan Investor Terhadap PTSP

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp Milyar	8.100
2)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp Milyar	900

b. Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Fasilitasi Kerjasama Investasi
- 2) Kerjasama Media Publikasi
- 3) Pembuatan Bahan Promosi
- 4) Promosi Dalam Negeri
- 5) Promosi Investasi Luar Negeri
- 6) Pelatihan Pemasaran dan Promosi Potensi Daerah



7) Pelatihan Teknis Penyusunan Bahan Promosi

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	155
2)	Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	108

c. Program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP
- 2) Sosialisasi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan PTSP
- 3) Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan
- 4) Verifikasi lapangan permohonan Perizinan
- 5) Gelar Sidang Tim Teknis Perizinan
- 6) Rapat Kerja Teknis PTSP dengan Kabupaten Kota dan SKPD Teknis
- 7) Pencegahan dan penyelesaian kasus perizinan dan non perizinan
- 8) Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
- 9) Penyusunan Buku Panduan Pelayanan Perizinan
- 10) Penyusunan Sarana dan Prasarana Pengaduan
- 11) Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
- 12) Workshop Strategi Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- 13) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kebijakan dan Pelaporan Layanan PTSP
- 14) Evaluasi Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 15) Penyusunan Bahan Kebijakan, Harmonisasi Regulasi, dan Advokasi Pelayanan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	nilai	90,00
2)	Persentase Pelayanan Sesuai SOP	%	84,00

24. Kepemudaan dan olah raga

a. Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Paskibraka Provinsi dan Pengiriman Paskibraka Provinsi dan Tingkat Nasional



- 2) Pelatihan pencegahan masuknya paham radikalisme dikalangan generasi muda
- 3) Pelatihan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda dan Mahasiswa
- 4) Pelatihan kepeloporan pemuda
- 5) Pelatihan Kesadaran Bela Negara Tingkat Provinsi
- 6) Bintal Juang Remaja Bahari (BJRB)
- 7) Pembinaan Pramuka

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah pemuda pelopor	Orang	3.275

b. Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program ini difokuskan pada kegiatan: pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah pemuda yang berwirausaha	Orang	40

c. Program pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kejurnas PPLPD Cabang Olahraga Karate
- 2) Kejurnas PPLPD Cabang Olahraga Pencak Silat
- 3) Kejurnas PPLPD Cabang Olahraga Taekwondo
- 4) PPLPD Cabang Olahraga Bola Voli
- 5) PPLPD Cabang Olahraga Karate
- 6) PPLPD Cabang Olahraga Layar
- 7) PPLPD Cabang Olahraga Pencak Silat
- 8) PPLPD Cabang Olahraga Taekwondo
- 9) Sharing PPLPD Cabang Olahraga Bulu Tangkis, Tinju dan Takraw
- 10) PPLPD Cabang Olahraga Sepakbola
- 11) PPLPD Tarung Derajat
- 12) Senam Sehat Bersama dan Bersepeda Bersama
- 13) Kejurnas PPLPD Cabang olahraga Sepakbola
- 14) KEPRI 10 K
- 15) Dukungan Penyelenggaraan Olahraga



- 16) Dukungan pengiriman Atlet/ pelatih perwakilan Kepri
- 17) Try Out PPLPD Tarung Derajat
- 18) Try Out PPLPD Layar
- 19) PPLPD Atletik
- 20) Kejurda Atletik
- 21) Pelatihan Peningkatan SDM Guru Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
- 22) Outbond Atlet PPLP/PPLPD Provinsi Kepulauan Riau
- 23) Try Out PPLPD Sepak Bola
- 24) Piala Soeratin
- 25) Lomba dayung sampan kolek prov. Kepri
- 26) Lomba sampan layar prov. Kepri
- 27) Lomba Jong prov. Kepri
- 28) Lomba memancing prov. Kepri
- 29) Kejurda PPLPD Atletik
- 30) Kejurda Bola Basket Piala Gubernur
- 31) Try Out PPLPD Cabang Olah Raga Bola Voli
- 32) Outbond Atlet PPLPD Cabang Olahraga Bola Voli
- 33) Penataran Pelatih dan Wasit Bola Voli Indoor
- 34) Kejuaraan Bola Voli Piala Gubernur
- 35) PERCASI Kepri Terbuka
- 36) Sepak Bola Kunder Cup
- 37) Sepak Bola Usia Dini
- 38) Pertandingan futsal se-Kota Batam
- 39) Pertandingan voli seksi bapa se-Kota Batam
- 40) turnamen olah raga
- 41) Untuk event olah raga trill se kepri
- 42) untuk event SH Terate se-kepri (seni bela diri)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional	Penghargaan	19
2)	Jumlah event olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan masyarakat	Event	18

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pengadaan alat-alat olahraga
- 2) Pengadaan sarana PPLPD layar
- 3) Pengadaan Meubeler PPLPD Sepakbola
- 4) Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana PPLP Se-Prov. Kepri



- 5) Pemeliharaan Rutin Gedung PPLP Sepak Takraw Prov. Kepri
- 6) Pengadaan Alat-Alat Olahraga Tradisional
- 7) Pengadaan Alat-Alat Olahraga Disabilitas
- 8) Pengadaan Meubeler PPLPD Pencak Silat
- 9) Pengadaan Sarana PPLPD Tarung Derajat
- 10) Pengadaan Sarana PPLPD Pencak Silat
- 11) Pengadaan Sarana PPLPD Karate
- 12) Pengadaan Sarana PPLPD Taekwondo
- 13) Pembangunan tribun lapangan sepak bola
- 14) Rehabilitasi stadion Hang Lekir Belakang Padang
- 15) Pengembangan Lapangan Bola Kaki Sei Harapan
- 16) Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Pendamping
- 17) Pekerjaan Pembangunan GOR Mini
- 18) Pekerjaan Pembangunan Stadion Mini Ungar
- 19) Pekerjaan Pematangan Lahan Komplek Badang Perkasa
- 20) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (pembangunan lapangan futsal), Dusun III RT,007 RW. 001 Desa Mepar, kecamatan Lingga Kabupaten Lingga
- 21) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (pembangunan lapangan futsal), Dusun Narekeh RT. 002 RW. 001 Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga
- 22) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (penimbunan lapangan bola), Dusun 02 Desa pulau Duyung Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga
- 23) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (pembangunan lapangan volly dan pembangunan podium), Dusun II RT. 004 RW. 003 Kp. Kador, Desa Mepar, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga
- 24) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (penimbunan Lapangan Bola Kaki) Desa Merawang, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga
- 25) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (pembangunan lapangan Bola volly), Dusun II Pelanduk Desa Musai, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga
- 26) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Podium Lapangan Bola Kaki), Dusun III Rt 007, RW. 001 Desa Mepar
- 27) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (pembangunan Pagar Lapangan Volly) Dusun III RT. 007, RW. 001 Desa Mepar
- 28) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Lapangan Futsal) Dusun I Pulau Lalang, Kecamatan Singkep Selatan



- 29) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (pembangunan Tribun Lapangan Sepakbola), Dusun III RT. 007 RW. 001 Desa Mepar, Kecamatan Lingga
- 30) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (pembangunan lapangan Futsal), Dusun I RT. 005 RW. 003 Cenut Desa Mepar, Kecamatan Lingga
- 31) Pembangunan Kolam Renang (Water Sport Centre) Pendukung Kegiatan POPDA
- 32) Pembangunan Gedung Pemuda Bersama
- 33) Pembangunan Bumi Perkemahan
- 34) Peningkatan Lapangan Tenis Lapangan Kec. Serasan
- 35) Peningkatan Lapangan Volly kec Bunguran Timur Laut
- 36) pembangunan Lapangan Bola Kaki
- 37) Pengadaan Kursi Tribun GOR Indoor
- 38) Pembangunan Stadion Sport Center
- 39) Pembangunan Kolam Renang/ Aquatic
- 40) Pembangunan Mess Atlet
- 41) Peningkatan Lapangan bola Kaki, Kec, Bunguran Timur
- 42) Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (Alat-alat Olahraga)
- 43) Pembangunan Taman dan Lapangan Parkir
- 44) Pembangunan Lintasan Atletik Sport Center
- 45) Peningkatan Lapangan Tenis Lapangan
- 46) Pembangunan Lintasan Lari, sarana olahraga dan taman bermain di lapangan Dewaruci TNI AL
- 47) Perbaikan Pagar kawat Harmonika, KM/WC dan Pengecoran Tempat parkir lapangan Tenis TNI AL Jl. Ciku
- 48) Perbaikan Sport Hall Lantamal IV
- 49) Revitalisasi Lapangan Futsal Mantang Besar
- 50) Revitalisasi Lapangan Volly Mantang Besar
- 51) Renovasi dan Peremajaan Lapangan Volly dan Sarana Olahraga
- 52) Bantuan Pembangunan Lapangan Volly di Dusun 2 Desa Sungai Besar
- 53) pembangunan gedung olahraga desa kuala raya di kab. Lingga
- 54) semenisasi lapangan volly kampung mansyur kec. teluk bintang kab. Bintan
- 55) pengadaan peralatan drumband untuk pesantren di kec. toapaya kab. Bintan
- 56) Rehabilitasi lapangan Volly di perumahan lobam mas asri II.
- 57) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Perum Alam Tirta Lestari Kec Tanjungpinang Timur
- 58) Pembangunan Lapangan Volly Perum Citra Pelita 3 Kec Tanjungpinang Timur
- 59) Peningkatan Lapangan Volly Kampung Kolam Kel Sei Jang Kec Bukit Bestari



- 60) Peningkatan Lapangan Olahraga Perum Bintang Permata Indah Kec Tanjungpianng Timur
- 61) BANTUAN PRASARANA LAP. BOLA VOLY KAMPUNG MELAYU KELURAHAN SENGGARANG
- 62) Peningkatan sarana dan prasarana Lapangan Sepak Bola Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan
- 63) Bantuan Fasilitas Olahraga Untuk Kec. Nongsa, Sei.Beduk, Bulang dan Galang
- 64) Pembangunan Lapangan Voli RW.13 Kel.Kabil Kec.Nongsa
- 65) Pembangunan sarana olah raga 21 x 12 m - RT/RW 9/10, Desa Tembesi, Kec. Sagulung
- 66) Pembangunan saana olah raga - RT/RW 2/11, Desa Tembesi, Kec. Sagulung
- 67) Pembangunan Sarana Olah Raga - RT/RW 4/24, Desa Buliang, Kec. Batu Aji
- 68) Penyelesaian pembuatan lapangan Bola Bengkong laut
- 69) Bola Kaki Pelawan Ka.Karimun
- 70) Pembangunan lapangan futsal, - RT/RW 0/0, Desa Tanjung Kilang, Kec. Durai
- 71) SARANA OLAHRAGA - KECAMATAN SUAK MIDAI
- 72) SARANA OLAHRAGA MIDAI - KECAMATAN MIDAI
- 73) PEMBANGUNAN LAPANGAN TENNIS - KECAMATAN MIDAI
- 74) PENIMBUNAN LAPANGAN BOLA DESA AIR LENGIT – KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
- 75) Pembangunan Sarana Olahraga berupa Lapangan Voli dan Futsal untuk Pemuda Dusun Linmas
- 76) Hibah Lapangan Volly Desa Sungai Harapan
- 77) Hibah Lapangan Volly Desa Mentuda
- 78) Pembangunan lapangan futsal, - RT/RW 0/0, Desa Selayar, Kec. Selayar
- 79) Lapangan Sulaiman Abdullah Jl.Yudowinangun
- 80) Faillitas Olahraga Perum.Bintan Permai
- 81) Pengadaan Alat - alat Olah Raga Untuk Kelompok Masyarakat Kota Batam
- 82) Sarana dan Prasarana Olahraga, RT/RW 1/3, Desa Tanjung Piayu, Kec. Sei Beduk
- 83) rehab/revitalisasi lapangan bola usman harun sei pancur, - RT/RW 0/0, Desa Tanjung Piayu, Kec. Sei Beduk
- 84) rehab/revitalisasi lapangan bola kp. Bagan - RT/RW 0/0, Desa Tanjung Piayu, Kec. Sei Beduk
- 85) rehab/revitalisasi lapangan bola garuda mangsang - RT/RW 0/0, Desa Mangsang, Kec. Sei Beduk
- 86) rehab/revitalisasi lapangan bola sakura, duriangkang - RT/RW 0/0, Desa Duriangkang, Kec. Sei Beduk



- 87) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 0/2, Desa Tanjung Piayu, Kec. Sei Beduk
- 88) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 0/3, Desa Tanjung Piayu, Kec. Sei Beduk
- 89) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 0/0, Desa Duriangkang, Kec. Sei Beduk
- 90) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 0/0, Desa Tanjung Piayu, Kec. Sei Beduk
- 91) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 0/7, Desa Tanjung Piayu, Kec. Sei Beduk
- 92) pembangunan lapangan olah raga- RT/RW 5/7, Desa Tanjung Piayu, Kec. Sei Beduk
- 93) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 0/25, Desa Mangsang, Kec. Sei Beduk
- 94) pembangunan lapangan olah raga- RT/RW 0/4, Desa Mangsang, Kec. Sei Beduk
- 95) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 5/21, Desa Mangsang, Kec. Sei Beduk
- 96) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 8/2, Desa Mangsang, Kec. Sei Beduk
- 97) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 0/0, Desa Tanjung Piayu, Kec. Sei Beduk
- 98) pemasangan karpet vinyl lapangan futsal, buana garden, tanjung piayu -RT/RW 0/0, Desa Tanjung Piayu, Kec. Sei Beduk
- 99) hibah matras seni bela diri
- 100) hibah alat olah raga
- 101) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 0/0, Desa Kabil, Kec. Nongsa
- 102) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 0/21, Desa Kabil, Kec. Nongsa
- 103) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 0/20, Desa Kabil, Kec. Nongsa
- 104) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 0/13, Desa Kabil, Kec. Nongsa
- 105) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 0/15, Desa Kabil, Kec. Nongsa
- 106) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 0/16, Desa Kabil, Kec. Nongsa
- 107) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 0/3, Desa Kabil, Kec. Nongsa
- 108) pembangunan lapangan olah raga - RT/RW 4/12, Desa Tanjung Piayu, Kec. Sei Beduk
- 109) LAPANGAN SEPAKBOLA TANJUNG SENGKUANG KOTA BATAM



- 110) Pekerjaan Rehab Atap Stadion Badang Perkasa
- 111) Pekerjaan Peremajaan Rumput Stadion Badang Perkasa
- 112) Bantuan Lapangan Volly di Dusun II Desa Sungai Besar Kec. Lingga Utara

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase sarana dan prasarana yang dibangun terhadap kebutuhan masyarakat	%	100,00

e. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pelatihan Pencegahan Penggunaan Narkoba dan Bahaya HIV/AIDS di Kalangan Generasi Muda
- 2) Untuk kegiatan pencegahan dan penyuluhan tentang bahaya Narkoba

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah kader pemuda anti narkoba	Orang	70

25. Kebudayaan

a. Program pengembangan nilai budaya

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Gita Bahana Nusantara
- 2) seri pengenalan budaya
- 3) Bedah Gurindam Dua Belas
- 4) Pelatihan Teknik Pembuatan Tudong Manto
- 5) Pencatatan dan Pengusulan Karya Budaya Takbenda Provinsi Kepulauan Menjadi WBTB Indonesia
- 6) Pengembangan Data dan Dokumentasi Kebudayaan
- 7) Perekaman dan Digitalisasi Kebudayaan
- 8) Kajian Sejarah Cagar Budaya di Provinsi Kepulauan Riau
- 9) Penulisan Sejarah di Kepri
- 10) Pelatihan Pembuatan Tanjak
- 11) Penyelenggaraan Upacara Adat Melayu Kepulauan Riau
- 12) Sosialisasi perda bangunan berciri khas melayu
- 13) Pengadaan Ornamen Berciri Khas Melayu
- 14) Percepatan Pulau Penyengat sebagai Warisan Dunia
- 15) Kajian Akademis Budaya Tak Benda Provinsi Kepulauan Riau



- 16) Sayembara penulisan cerita rakyat melayu
- 17) Workshop sejarah adat dan tradisi
- 18) Naskah akademik pelestarian budaya melayu
- 19) Penguatan muatan lokal bidang kebudayaan
- 20) Pagelaran Seni Silat Tradisi
- 21) Pelatihan pembuatan tulang belut baju melayu teluk belanga
- 22) Bimtek tata kelola data dan dokumentasi kebudayaan
- 23) Publikasi bidang kebudayaan
- 24) Pembuatan Film Dokumenter Kebudayaan Kepulauan Riau
- 25) Lokakarya indeks pembangunan kebudayaan
- 26) Napak tilas Raja - Raja islam melayu di Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	70,75
2)	Presentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi	%	71,91

b. Program pengelolaan kekayaan budaya

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pelestarian Cagar Budaya
- 2) Penyelamatan Benda-Benda Bersejarah
- 3) Penyusunan peraturan Gubernur kepulauan Riau di Bidang Pelestarian pengelolaan CB
- 4) Studi teknis pelestarian Cagar Budaya
- 5) Penilaian Penetapan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Bimtek Cagar Budaya dan Permuseuman
- 7) Pengembangan Sistem Informasi Teknologi dan Informasi Publikasi Kebudayaan
- 8) Diklat ASN Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman
- 9) Pengelolaan Koleksi Museum/Gallery
- 10) Kajian story line museum provinsi kepri
- 11) Penyusunan rencana induk pelestarian cagar budaya Provinsi Kepri
- 12) Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan permuseuman kab/kota
- 13) Pembuatan E- katalog Galeri/Museum
- 14) Monitoring tenaga cagar budaya dan permuseuman



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase warisan budaya tangible yang lestari	%	22,38

c. Program pengelolaan keragaman budaya

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Festival Zapin Kepulauan Riau
- 2) Parade Tari Daerah dan Nusantara
- 3) Pekan Seni Budaya Melayu Pelajar Se- Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Workshop Tari tradisi
- 5) Pagelaran Tradisi Pesisir
- 6) Penyelenggaraan Event Lembaga Penggiat Seni dan Budaya
- 7) Partisipasi Event Bidang Kebudayaan
- 8) Penghargaan bagi pelestari dan penggiat seni
- 9) Gelar budaya nusantara
- 10) Festival marawis dan qasidah
- 11) Lokakarya Manajemen Seni Pertunjukan
- 12) Workshop Sastra
- 13) Pekan Raya Melayu Kepulauan Riau
- 14) Pengadaan Alat Musik Tradisional
- 15) Pemberian Penghargaan Kepada Tokoh Sejarah dan Tradisi
- 16) Workshop seni media
- 17) Survey dan Monitoring bidang kesenian
- 18) Festival Puisi Internasional
- 19) Workshop Tenaga Kesenian
- 20) Pengadaan Pakaian Melayu
- 21) Lomba Seni Musik Kerawitan
- 22) Pelatihan Marawis dan Rebana

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju	%	72,46
2)	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	72,03



26. Perpustakaan

a. Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pengadaan Bahan Pustaka Umum Provinsi Kepulauan
- 2) Kerjasama Dengan Pengarang
- 3) Pemeliharaan, Perawatan Buku Perpustakaan dan Arsip
- 4) Bedah buku
- 5) Lomba Minat Baca
- 6) Peningkatan Pelayanan Perpustakaan dan Arsip
- 7) Pengolahan Bahan Pustaka
- 8) Pengadaan Buku untuk sekolah SMA, SMK sederajat
- 9) Pengadaan Bahan Pustaka untuk Kabupaten /Kota
- 10) Alih Media dan Alih Bahasa Naskah Kuno Perpustakaan dan Arsip
- 11) Pendataan Perpustakaan umum dan Tenaga Perpustakaan
- 12) Khusus, sekolah, dan perguruan Tinggi
- 13) Pendampingan lomba
- 14) Penguatan Pelayanan Kearsipan
- 15) Kerjasama Perpustakaan Provinsi dengan Perpustakaan Lain
- 16) Akreditasi Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Riau
- 17) Transformasi Perpustakaan Berbasis Layanan Inklusi Sosial
- 18) Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka
- 19) Pemilihan Duta Baca Provinsi Kepulauan Riau
- 20) Penyusunan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi (Penerbitan Katalog Induk Daerah)
- 21) Penyusunan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi (Penerbitan Bibliografi Daerah)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	32,91
2)	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka	%	71,43

b. Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola perpustakaan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pemilihan Pustakawan Berprestasi Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Gerakan Masyarakat Minat Baca
- 3) Jurnal Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	IKM Pelayanan Perpustakaan	poin	90

27. Kearsipan

a. Program Pengelolaan dan Pengolahan Arsip

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Lomba Tertib Arsip dan Pengelola Arsip Terbaik
- 2) Pameran Arsip
- 3) Penelusuran, Pendataan dan Penarikan Arsip
- 4) Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)
- 5) Pengelolaan Arsip Prov Kepri
- 6) Pendataan Perusahaan Ormas/Orpol dan Lembaga Pendidikan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan	%	2,62

b. Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola Kearsipan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Peningkatan Mutu SDM Arsip
- 2) Bimtek Pengolahan dan Penataan Arsip
- 3) Orientasi Kerja Kearsipan
- 4) Pembinaan dan pengawasan Kearsipan
- 5) Penataan dan pengelolaan arsip OPD dan BUMD
- 6) Diorama Arsip
- 7) Pemilihan LKD dan Unit Kearsipan Terbaik

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase perangkat daerah provinsi dan BUMD provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku	%	100,00

28. Kelautan dan Perikanan

a. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan
- 2) Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
- 3) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Antang



- 4) Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil
- 5) Pengembangan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
- 6) Pengembangan Kapal Perikanan
- 7) Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan
- 8) Dukungan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan
- 9) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Natuna
- 10) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Lingga
- 11) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas
- 12) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan di Kota Batam
- 13) Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan
- 14) Rutinitas Kantor UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)
- 15) Rutinitas Kantor UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (Penyediaan Alat Tulis Kantor)
- 16) Rutinitas Kantor UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	306.463,67
2)	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		110,57

b. Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya
- 2) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
- 3) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
- 4) Pengembangan Budidaya Rumput Laut
- 5) Peningkatan Kapasitas Unit Perbenihan (UPTD Provinsi BBI Pengujan)
- 6) Peningkatan Mutu Benih dan Sistem Budidaya Ikan
- 7) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)
- 8) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan (Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan)
- 9) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan (Penyediaan Alat Tulis Kantor)
- 10) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan (Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)
- 11) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan (Penyediaan Bahan Logistik Kantor)
- 12) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan (Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah)



- 13) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan (Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan)
- 14) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan (Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor)
- 15) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan (Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.920,50
2)	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		108,47

c. Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 2) Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan
- 3) Promosi dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan	Ton	1.331,54

d. Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
- 2) Pengembangan Sistem Jaminan Mutu Hasil Perikanan
- 3) Rutinitas UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMPPKP) (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)
- 4) Rutinitas UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMPPKP) (Penyediaan Alat Tulis Kantor)
- 5) Rutinitas UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMPPKP) (Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)
- 6) Rutinitas UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMPPKP) (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)
- 7) Rutinitas UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMPPKP) (Penyediaan Bahan Logistik Kantor)



- 8) Rutinitas UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMPPKP) (Penyediaan Makanan dan Minuman)
- 9) Rutinitas UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMPPKP) (Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan)
- 10) Rutinitas UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMPPKP) (Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah)
- 11) Rutinitas UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMPPKP) (Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US \$	31.798.767

e. Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
- 3) Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III	Kawasan	4
2)	Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Dokumen/ Peraturan	1 (Pergub Rencana Aksi WP3K)

f. Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pengawasan dan Penertiban Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 2) Pelaksanaan Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Karimun
- 3) Pelaksanaan Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna
- 4) Pelaksanaan Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lingga
- 5) Pelaksanaan Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan



Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas

- 6) Pelaksanaan Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kota Batam

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	% Jumlah kasus Iuu Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100,00

g. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pendamping Perikanan Lapangan
- 2) Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase kelompok (KUB, Poklahsar, Pokdakan) yang dibina disuluh	%	18,19

29. Pariwisata

a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Penataan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Kabupaten/Kota
- 2) Peningkatan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata
- 3) Pengadaan Sarana dan Fasilitas Pendukung Daya Tarik Wisata
- 4) Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona
- 5) Revitalisasi Kawasan, Objek, dan Sarana Prasarana Pariwisata
- 6) Pembinaan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata
- 7) Penganugerahan Kelompok Sadar Wisata, Desa Wisata dan Pengelola Daya Tarik Wisata
- 8) Bimbingan Teknis Tata Kelola Homestay
- 9) Bimbingan Teknis Tata Kelola Destinasi Wilayah Perbatasan
- 10) Pembinaan dan Pengembangan Satuan Karya (Saka) Pariwisata
- 11) Media campaign pada media massa lokal (cetak) dan elektronik tentang sadar wisata
- 12) Identifikasi Data Potensi Pengembangan Objek Wisata di Kepulauan Riau



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau	hari	2,20

b. Program Pengembangan Industri Pariwisata

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Bimtek Penerapan Pendaftaran Usaha dan Standar Usaha Pariwisata
- 2) Advokasi Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata (TDUP)
- 3) Pengembangan Pola Perjalanan Wisata Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Penganugerahan Industri Pariwisata Daerah
- 5) Fasilitasi Sertifikasi Auditor Pariwisata
- 6) Rapat Koordinasi Industri Pariwisata
- 7) Pelatihan Kemudahan Investasi dan Perizinan Pariwisata
- 8) Pelatihan Peningkatan Daya Saing Industri Bidang Akomodasi dan MICE
- 9) Pelatihan Peningkatan Daya Saing Industri Bidang Makan Minum

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,55

c. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Promosi Pariwisata Nusantara
- 2) Promosi Pariwisata Mancanegara
- 3) Pengadaan Direktori Pariwisata
- 4) Penyelenggaraan Festival Bahari Kepri
- 5) Festival Gunung Daek
- 6) Penyelenggaraan Familiarization Trip
- 7) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
- 8) Kampanye Wonderful Riau Islands di Luar Daerah
- 9) Kampanye Wonderful Riau Islands Pada Event Pariwisata Daerah
- 10) Peningkatan Branding Wonderful Riau Island Pada Event Internasional di Bintan dan Batam
- 11) Festival Pulau Penyengat
- 12) Festival Pulau Senoa
- 13) Festival Padang Melang
- 14) Penyelenggaraan Festival Barongsai



15) Forum Koordinasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	Juta orang	2,50
2)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau	Juta orang	1,63
3)	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	16.809

d. Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
- 2) Penyusunan Kajian Bidang Pariwisata
- 3) Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Laporan Analisa dan Evaluasi Kunjungan Wisman dan Wisnus
- 5) Operasional Crisis Center Bidang Pariwisata Provinsi Kepri
- 6) Revisi SOP
- 7) Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata
- 8) Sosialisasi Kajian Pariwisata Kepulauan Riau
- 9) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata
- 10) Pelatihan Media Sosial Bagi Pelaku Kelembagaan Pariwisata Kepri
- 11) Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
- 12) Forum Kelembagaan Pariwisata

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	%	52,00

e. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kepri Creative Food
- 2) Penyediaan Sarana Ruang Kreatif
- 3) Kepri Carnival
- 4) Gelar Produk Ekonomi Kreatif
- 5) Partisipasi Pada acara Karnaval Indonesia
- 6) Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif
- 7) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif



- 8) Pengadaan Souvenir Kreatif
- 9) Sertifikasi Profesi untuk Pelaku Ekonomi Kreatif
- 10) Pembinaan, Pengembangan dan Pendukungan kepada Komunitas Kreatif
- 11) Identifikasi Produk & Pelaku Ekonomi Kreatif
- 12) Sosialisasi tentang pemasaran melalui daring (online) produk ekonomi kreatif
- 13) Forum Pelaku Ekonomi Kreatif

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif aktif	%	40,00

30. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah
- 2) Penyusunan Kajian Akademis Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Penyusunan Zona Konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah
- 4) Identifikasi Cekungan Air Tanah
- 5) Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG)
- 6) Inventarisasi Potensi Air Tanah Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Penyusunan Kajian Potensi Sumber Daya Mineral
- 8) Pembinaan Pemanfaatan Air Tanah (Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah)
- 9) Pembinaan Pemanfaatan Air Tanah (Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	%	100,00

b. Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Umum



- 2) Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan
- 3) Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
- 4) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Teknis Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
- 5) Bimbingan Teknis Keselamatan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan Pertambangan
- 6) Bimbingan Teknis Pengelolaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
- 7) Pendataan Penambangan Tanpa Izin (PETI)
- 8) Monitoring Pelaksanaan Produksi dan Penjualan Mineral Bukan Logam Batuan
- 9) Bimbingan Teknis Sistem Pembayaran E-PNBP
- 10) Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan Mineral
- 11) Pengelolaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat
- 12) Pengelolaan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Pertambangan Mineral
- 13) Penyusunan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kepri (Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan)
- 14) Penyusunan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kepri (Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam batuan)
- 15) Penyusunan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kepri (Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan logam dan Batuan)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	%	95,00
2)	Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	95,00
3)	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah	%	1,50

c. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Penyediaan Listrik Rumah Penduduk Miskin
- 2) Pemeliharaan Listrik Desa di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Penyediaan Pembangkit Listrik Genset di Provinsi Kepulauan Riau



4) Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Rasio Elektrifikasi	%	93,50
2)	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	100,00

d. Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Fasilitasi dan Koordinasi Pengusahaan Ketenagalistrikan
- 2) Dukungan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
- 3) Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan se-Provinsi Kepri (Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi)
- 4) Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan se-Provinsi Kepulauan Riau (Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi)
- 5) Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan se-Provinsi Kepulauan Riau (Penentuan dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen)
- 6) Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan se-Provinsi Kepulauan Riau (Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi)
- 7) Bimbing Usaha tenaga listrik seProv. Kepri (Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dr Pemegang Izin yg Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi)
- 8) Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan se-Provinsi Kepulauan Riau (Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri)
- 9) Pengawasan Ketenagalistrikan se-Prov Kepri (Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi)
- 10) Pengawasan Ketenagalistrikan se- Provinsi Kepulauan Riau (Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi)



- 11) Pengawasan Ketenagalistrikan se- Provinsi Kepulauan Riau (Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen)
- 12) Pengawasan Ketenagalistrikan se- Provinsi Kepulauan Riau (Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi)
- 13) Pengawasan tenaga listrik Prov Kepri (Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dr Pemegang Izin yg Ditetapkan Daerah Prov)
- 14) Pengawasan Ketenagalistrikan se- Provinsi Kepulauan Riau (Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri)
- 15) Penyusunan Pengelolaan Data listrik Kepri (Pengumpulan Pengolahan Data Informasi Harga Jual Tenaga Listrik Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dr Pemegang Izin Ditetapkan Daerah Prov)
- 16) Penyusunan dan Pengelolaan Data Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau (Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen)
- 17) Peningkatan Keselamatan tenaga listrik Kepri (Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kpd Penyedia Tenaga Listrik dlm Daerah Prov)
- 18) Peningkatan Keselamatan Teknis dan Lingkungan Ketenagalistrikan di Provinsi Kepri (Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan	%	100,00

e. Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Inventarisasi Pemanfaatan Energi
- 2) Bimbingan Konservasi Energi



- 3) Pengadaan dan Pembangunan Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Pendataan, Pembinaan, Sosialisasi dan Peningkatan Penerapan Konservasi Energi
- 5) Peningkatan Efisiensi Pemakaian dan Pengolahan Energi
- 6) Kompetensi Hemat Energi
- 7) Monitoring dan Inventarisasi Data Potensi Pembangkit Aneka Energi Baru
- 8) FS dan DED Potensi Energi Baru Terbarukan
- 9) Pemeliharaan Aset Energi Baru Terbarukan
- 10) Pengawasan, Pembinaan, Inventarisasi dan Sinkronisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi
- 11) Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan di Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (<i>Energy Mixed</i>)	%	0,0010

31. Perdagangan

a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pengendalian dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang strategis
- 2) Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Pelatihan dan Sosialisasi Sistem Informasi Antar Pulau (SIPAP) dan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT)
- 4) Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
- 5) Partisipasi Pada Pameran Perdagangan dalam Negeri
- 6) Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar
- 7) Pengadaan papan digital informasi harga
- 8) Pengadaan Coldstorage Permanen
- 9) Bantuan Cold Box Bagi Pedagang
- 10) Bantuan Gerobak bagi Pedagang Kuliner



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	persen	< 10%
2)	Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	Persen	100,00

b. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- 2) Pengawasan dan Penyidikan Barang Beredar dan Jasa
- 3) Pembinaan dan penegakan hukum
- 4) Sosialisasi Peraturan Perdagangan bagi Pelaku Usaha perdagangan di Kepri
- 5) Edukasi Konsumen Cerdas dalam Rangka Rangkaian Peringatan Hari Konsumen Nasional
- 6) Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan, Kosmetik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)	%	25,00
2)	Persentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen (melalui BPSK)	%	100,00
3)	Persentase jenis komoditas dan atau alat yang mendapat pelayanan pengujian mutu barang atau kalibrasi	%	67,00

c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Desiminasi Regulasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
- 2) Pelatihan Pemasaran dan Perdagangan Umum bagi pengusaha di Provinsi Kepri
- 3) FGD Pengembangan Ekspor Prov. Kepri
- 4) Pameran Dagang dan Promosi Luar Negeri
- 5) Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pengusaha Untuk Pasar Ekspor
- 6) Koordinasi Antar Lembaga
- 7) Pengembangan Database Ekspor Impor Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Pembuatan Video Audio Visual prosedur Ekspor Impor



- 9) Sosialisasi Perjanjian Perundingan Internasional
- 10) Business Matching dan Partisipasi pada Trade Expo Indonesia Jakarta
- 11) Partisipasi pada Pameran World Expo Dubai 2020
- 12) Kegiatan penyelenggaraan Kepri Expo
- 13) Pelatihan Pemasaran Ekspor Secara Online
- 14) Identifikasi Produk Potensial Ekspor
- 15) Penguatan Pencitraan dan Branding Produk Potensial Ekspor Provinsi Kepri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	juta US \$	1.550,2
2)	Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribu US \$	10.000.000
3)	Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA	11.250
4)	Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor	Jenis	25
5)	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,52

32. Perindustrian

a. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Sentra Industri Potensial
- 2) Masterplan dan FS Pembangunan Sentra (Komplek Industri) Pengolahan Rumput Laut dan Gudang Bahan Baku Pendukung di Provinsi Kepri.
- 3) Masterplan dan FS Pembangunan Sentra (Komplek Industri) Pengolahan berbasis Hasil Perkebunan/Pertanian (Kelapa,Sagu,Karet, dll) di Provinsi Kepri
- 4) Penyusunan Masterplan, FS dan Business Plan Sentra Industri Pengolahan Sagu

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	10

b. Program Penataan Struktur Industri

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Database Sektor Industri Manufaktur di Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pelatihan Peningkatan Skill Kompetensi SDM di Sektor Industri Manufaktur



- 3) Pemetaan Potensi Sektor Industri Manufaktur Berbasis Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Industri Agro dalam rangka peningkatan koordinasi dan kerjasama pengembangan industri agro antar Kab/Kota dan antar Provinsi di Provinsi Kepri.
- 5) Perda RPIP Provinsi Kepri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah Industri Besar	Unit	795
2)	Jumlah kawasan industri	kawasan	27
3)	Jumlah Kelompok Klaster Industri	Klaster	1

c. Program Pengembangan Industri Unggulan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Forum Koordinasi dan Kerjasama Antar Stakeholder dalam Pengembangan Produk Unggulan Daerah
- 2) Business Plan Industri Pengolahan Hasil Laut (Perikanan, rumput laut, dll) dan komoditas agro unggulan lainnya (pertanian/perkebunan) di Provinsi Kepri.
- 3) Pelatihan Diversifikasi dan Pengembangan Produk Pengolahan berbasis komoditas unggulan agro lainnya (pertanian/perkebunan) di provinsi Kepri.
- 4) Pelatihan Peningkatan Skill dan Kompetensi SDM Pembina/Tenaga Kerja Industri dalam mengembangkan produk unggulan daerah di Provinsi Kepri.
- 5) Pendampingan dalam rangka meningkatkan PenataKelolaan Sentra Industri dan pemanfaatan sarana dan prasarana industri di Provinsi Kepri.

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	38,50
2)	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas	orang	136.970



d. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pelatihan Peningkatan Mutu dan Design Produk Sandang
- 2) Dukungan Operasional Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Kegiatan Pelatihan bagi para Fasilitator GKM bagi aparat Pembina Kab/Kota dan pelaku IKM se Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Bimbingan Teknis dan Penerapan Standar Mutu Produk Aneka Industri
- 5) Pameran dan promosi IKM baik lokal / Nasional
- 6) Pelatihan kewirausahaan CEFE dan AMT bagi Pelaku IKM
- 7) Pelatihan Keterampilan Resparasi Alat Elektronik
- 8) Peningkatan Produk IKM sektor pangan melalui Revitalisasi Industri Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
- 9) Bantuan Sertifikasi Halal dan PIRT bagi Produk Pangan IKM
- 10) Partisipasi dalam Pameran Produk Kepri di Dalam Daerah
- 11) Fasilitasi Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah
- 12) Kegiatan Fasilitas dan Dukungan Operasional dan Pengembangan Klinik Kemasan & Design
- 13) Peningkatan Mutu Olahan Pangan Berbahan Baku Ikan/Hasil Laut
- 14) Pelatihan Pembuatan Aneka Produk Furnitur dari Bahan Kayu
- 15) Partisipasi dalam Pameran Jakarta Fair
- 16) Partisipasi Pameran Produk Kepri di Luar Daerah
- 17) Pendataan dan Pengembangan Database IKM Provinsi Kepulauan Riau
- 18) Gelar Produk IKM Kepri
- 19) Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Baku Sagu
- 20) Pelatihan Pembuatan Cendera Mata Berbahan baku Lokal bagi Pelaku IKM/Wirausaha Baru
- 21) Pelatihan Aneka Kerajinan Bagi IKM
- 22) Partisipasi pada Pameran Produk Kerajinan dan Industri Kreatif
- 23) Pelatihan Peningkatan Mutu Industri Pangan dan Bantuan Peralatan bagi IKM
- 24) Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Olahan Pangan Bagi IKM Pangan
- 25) Partisipasi pada Pameran Produk Unggulan Daerah
- 26) Bantuan Peralatan dan Mesin bagi IKM
- 27) Naskah Akademis Pembentukan UPT Rumah Kemasan
- 28) Sayembara Batik Kepri
- 29) Penyusunan Profil Batik dan Songket Kepri
- 30) Pelatihan Aneka Sandang Bagi IKM
- 31) Pelatihan Aneka Industri Bagi IKM
- 32) Pameran dan Bazar MTQ/STQ
- 33) Partisipasi pada Pameran Produk Aneka Industri
- 34) Pelatihan Pengolahan Pangan Bagi IKM



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah industri kecil dan Menengah	unit	3.000
2)	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	2.200
3)	Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal	%	12,38

e. Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Teknologi Informasi dan Elektronika
- 2) Pengembangan sistem informasi Geografi Industri Provinsi Kepri
- 3) Workshop Pengembangan Kapasitas SDM Industri berbasis kompetensi
- 4) Pelatihan Animasi dan Telematika di Provinsi Kepri
- 5) Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Teknologi dan Design melalui Pemanfaatan Media Informatika dan e-market

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Industri yang bersertifikasi di Provinsi Kepri	persen	0

33. Fungsi Perencanaan Pembangunan

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Sosialisasi RPJMD
- 2) Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) Prov. Kepri
- 3) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- 4) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
- 5) Rapat Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja OPD
- 6) Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022
- 7) Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2021
- 8) Penyusunan KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022
- 9) Penyusunan Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2021
- 10) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
- 11) Penyusunan Ranperda RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026



- 12) Fasilitasi Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
- 13) Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)
- 14) Penyusunan KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah)
- 15) Penyusunan Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2021 (Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah)
- 16) Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) (Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100,00
2)	Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	87,00
3)	Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	%	100,00
4)	Persentase kegiatan prioritas yang didanai	%	82,00
5)	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	%	>36,00

b. Program perencanaan Perekonomian

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	100,00



c. Program Perencanaan sosial budaya

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pemutakhiran Database Kemiskinan berbasis Sistem Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Perencanaan dan Koordinasi Dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Penguatan Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Perencanaan dan Pembinaan Urusan Pangan dan Gizi Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Penguatan perencanaan dan pemantauan Penanggulangan HIV AIDS
- 6) Penguatan Kualitas Perencanaan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan Penanggulangan Bencana
- 7) Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Penguatan Perencanaan dan Pembinaan Urusan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 9) Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Kab/Kota Sehat se Provinsi Kepulauan Riau
- 10) Penguatan Prioritas Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan
- 11) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kebudayaan
- 12) Monitoring dan Evaluasi Pendidikan untuk Semua (Monev PUS)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	100,00

d. Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Penguatan Perencanaan Urusan Perumahan dan Pemukiman di Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Penguatan Perencanaan Bidang Air Minum, Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Penguatan Perencanaan Bidang Transportasi dan Telekomunikasi Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Forum OPD Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan



- 5) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD GRK
- 6) Penguatan Perencanaan Program Pembangunan Bidang Energi, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan
- 7) Forum OPD Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian)
- 8) Forum OPD Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam)
- 9) Forum OPD Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)
- 10) Forum OPD Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan)
- 11) Penguatan Perencanaan Bidang Transportasi dan Telekomunikasi Provinsi Kepulauan Riau (Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan)
- 12) Penguatan Perencanaan Urusan Perumahan dan Pemukiman di Provinsi Kepulauan Riau (Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakarya dan Kewilayahan)
- 13) Penguatan Perencanaan Bidang Air Minum, Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan di Provinsi KEPRI (Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup sesuai amanat pemerintah	%	100,00

e. Program Perencanaan Pemerintahan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Forum Perencanaan OPD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
- 2) Sinkronisasi Penguatan Perencanaan dan Kebijakan Sektor Pemerintahan Umum



- 3) Forum Perencanaan OPD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan (Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan)
- 4) Forum Perencanaan OPD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan (Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pemerintahan sesuai amanat pemerintah	%	100,00

f. Program Kerjasama Pembangunan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebijakan Gubernur se-Sumatera
- 2) Kerjasama Penyusunan Perencanaan Kebijakan Provinsi Kepulauan
- 3) Penyusunan Perencanaan Kebijakan Kerjasama Sosek Malindo

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase kerjasama yang diimplementasikan	%	100,00

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini difokuskan pada kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	100,00

h. Program Pengendalian dan Evaluasi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah



- 2) Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Pembangunan Daerah Prov. Kepri
- 3) Pengendalian terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten / Kota
- 4) Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten / Kota
- 5) Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
- 7) Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
- 8) Evaluasi RPJMD Provinsi Kepri
- 9) Evaluasi RPJMD Kab/Kota
- 10) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 11) Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau (Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM)
- 12) Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Pembangunan Daerah Prov. Kepri (Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan	%	100,00

34. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

a. Program Penelitian dan Pengembangan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kajian Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Provinsi Kepri
- 2) Kajian Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Kepri.
- 3) Penelitian Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Pengembangan Jejaring Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Kajian tentang Identifikasi Produk Inovasi unggulan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Fasilitasi Penguatan Fungsi Kelitbangan
- 7) Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah



- 8) Kajian tentang strategi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau
- 9) Rapat Koordinasi Kelitbangan Se Provinsi Kepulauan Riau
- 10) Reformulasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bagi Daerah Kepulauan
- 11) Dampak Dana Desa Terhadap Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Kepulauan Riau
- 12) Survey Wawasan Kebangsaan Pelajar Daerah Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau
- 13) Penelitian Analisis Pengaruh Pembangunan Jembatan Batam-Bintan Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
- 14) Kajian Strategi Pemulihan Sektor-Sektor yang Terdampak Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau
- 15) Penyusunan Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Kemaritiman Berbasis Spasial di Provinsi Kepulauan Riau
- 16) Analisis Strategi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kepulauan Riau
- 17) Konsep Water Front City Kepri dan Upaya Penerapannya (Analisis Strategi Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase dokumen hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%	70,00

b. Program Pengembangan Inovasi Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Revisi Roadmap Sistem Inovasi daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Jumlah inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah	%	30,00

35. Fungsi Keuangan Daerah

a. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Fasilitasi dan Koordinasi Penerimaan Pajak Daerah
- 2) Optimalisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan
- 3) Verifikasi dan Monitoring Keberatan Pajak
- 4) Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah
- 5) Optimalisasi Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PBB-KB dan PAP)



- 6) Forum Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam rangka penggalian sumber - sumber PAD Prov. Kepri
- 7) Penagihan Pajak Daerah Melalui Upaya Paksa
- 8) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT PPD Tanjungpinang
- 9) Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT PPD Tanjungpinang
- 10) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT PPD Karimun
- 11) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Karimun
- 12) Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT PPD Karimun
- 13) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB UPT PPD Bintan
- 14) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Bintan
- 15) Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT PPD Bintan
- 16) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB UPT PPD Lingga
- 17) Pengelolaan Samsat Layanan Unggulan UPT PPD Lingga
- 18) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB UPT PPD Natuna
- 19) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Natuna
- 20) Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT PPD Natuna
- 21) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT PPD Batu Aji
- 22) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Batu Aji
- 23) Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT PPD Batu Aji
- 24) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB UPT PPD Kijang
- 25) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Kijang
- 26) Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT Kijang
- 27) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT PPD Tanjung Batu
- 28) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Tanjung Batu
- 29) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT PPD Anambas
- 30) Revisi Perda Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 31) Revisi Perda Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 32) Penagihan aktif PKB, BBN-KB, dan ABT/AP UPT PPD Lingga
- 33) Penagihan aktif PKB, BBN-KB, dan ABT/AP UPT PPD Tanjungpinang
- 34) Kajian Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif
- 35) Penyusunan dan Updating Data NJKB Provinsi Kepri
- 36) Penyusunan Target dan Bagi Hasil Pajak Daerah
- 37) Operasi Penertiban PKB dan BBN-KB di UPT PPD Batam Centre
- 38) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Anambas
- 39) Penagihan Aktif PKB, BBN-KB dan AP UPT PPD Batam Centre
- 40) Pengelolaan Layanan Samsat Unggulan UPT PPD Batam Centre

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,624
2)	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah	%	39,93
3)	Persentase tunggakan Pajak Daerah yang tertagih	%	25,00

b. Program peningkatan koordinasi pengelolaan dana perimbangan pusat dan daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Supervisi Dana Alokasi Khusus
- 2) Evaluasi dan rekonsiliasi Penerimaan Dana Transfer Daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase realisasi penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun berjalan	%	90,00

c. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pemeliharaan dan Manajemen Website dan Media Informasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
- 2) Pemeliharaan Sistem Kesamsatan
- 3) Pengadaan Perangkat Teknologi Kesamsatan
- 4) Pengembangan sistem notifikasi
- 5) Sinkronisasi Sistem Kesamsatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Polda Kepri
- 6) Pengembangan Layanan Samsat Elektronik

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	jumlah jenis inovasi pelayanan berbasis Teknologi Informasi	Jenis Layanan	e Samsat dan e payment
2)	Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat	%	50,00



d. Program peningkatan pelayanan dan informasi Publik

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Penyebaran Informasi Pajak Daerah dan Layanan Samsat Dispenda Kepri
- 2) Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan PAD Lainnya

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Rata- rata lamanya waktu pelayanan Samsat (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor)	waktu (menit)	20
2)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SAMSAT	kategori (scoring)	Sangat Baik (8.50)

e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- 2) Rekonsiliasi dana bergulir
- 3) Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Triwulan Seluruh OPD(baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung)
- 4) Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran
- 5) Penyusunan Pedoman RKA-PD
- 6) Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran
- 7) Pengelolaan Penggajian PNS Prov Kepri
- 8) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 9) Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10) Forum Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 11) Peningkatan Pengendalian Pengelolaan Kas Daerah
- 12) Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah
- 13) Pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Daerah
- 14) Pengendalian Pelaksanaan APBD
- 15) Intensifikasi dan koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dalam Perencanaan Keuangan Daerah
- 16) Koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Transfer Pemerintah Provinsi Kep. Riau
- 17) Penyusunan Kebijakan di Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah
- 18) Sinkronisasi dan Verifikasi Saldo Awal Pada OPD Pemerintah Provinsi Kep. Riau
- 19) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir di Kab/Kota Se-Prov. Kepri
- 20) Sinkronisasi Penatausahaan Keuangan dan Kekayaan Daerah



- 21) Penyusunan APBD Provinsi Kepulauan Riau
- 22) Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau
- 23) Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
- 24) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 25) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
- 26) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD Provinsi Kepulauan Riau
- 27) Penerapan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 28) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Anggaran
- 29) Rekonsiliasi Kas Daerah Dengan Pihak Bank
- 30) Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Online
- 31) Peningkatan Kerja Sama Pengelolaan Kas Daerah dengan Pihak Bank
- 32) Peningkatan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik di Bidang Perbendaharaan
- 33) Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan dan Evaluasi Anggaran
- 34) Focus Group Discussion (FGD) Menekan Resiko Kredit Macet Koperasi dan UMKM
- 35) Inventarisasi Data Penerima Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Riau
- 36) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Pelaksanaan APBD)
- 37) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	100,00
2)	Persentase kepuasan pelayanan	%	97,00

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pengembangan / Peningkatan Kapasitas manajemen BMD
- 2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD
- 3) Rapat Kerja Pengelola Barang Milik Daerah Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Peningkatan Status Kepemilikan Aset Tanah Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



- 6) Optimalisasi Aset Sebagai Potensi Peningkatan PAD
- 7) Monitoring Barang Milik Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- 9) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 10) Appraisal Barang Milik Daerah
- 11) Update Simda BMD Provinsi Kepulauan Riau
- 12) Pengamanan Aset Tanah Provinsi Kepulauan Riau
- 13) Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 14) Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dilengkapi dengan bukti legalitas kepemilikan	%	84,36
2)	Persentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah yang tidak bergerak yang dilakukan pengamanan (pagar,patok,papan nama)	%	100,00

g. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kabupaten/Kota
- 2) Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/ Kota
- 3) Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Bagi Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Penyusunan Data Keuangan Daerah Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- 6) Evaluasi APBD Kabupaten/ Kota

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Rata-rata Nilai hasil evaluasi APBD dan LPP APBD Kabupaten/Kota	Skor	A



36. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pengelolaan Website
- 2) Pembiayaan PNS Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Pengurusan Administrasi Pemberhentian Pegawai
- 4) Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Penilaian Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 6) Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai
- 7) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Pengurusan Administrasi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 9) Administrasi Kepangkatan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 10) Kepengurusan Layanan Administrasi Kepegawaian
- 11) Seleksi Penerimaan dan Pengangkatan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 12) Pemberian Tanda Kehormatan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 13) Gelar Sidang dan Mutasi Pegawai
- 14) Pengelolaan e-Kinerja dan e-Disiplin
- 15) Ujian Dinas dan penyesuaian Ijazah PNS se-Provinsi Kepulauan Riau
- 16) Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan
- 17) Akreditasi pelatihan
- 18) Pengembangan Aplikasi Manajemen ASN
- 19) Rapat koordinasi penyusunan formasi jabatan formasi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 20) Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau
- 21) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
- 22) Kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Tugas Belajar dan Izin Belajar

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	75,00
2)	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai	%	85,00



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
	dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan		
3)	Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat	Kasus	8 Kasus
4)	Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik	%	95,00
5)	Indeks Kepuasan Pelayanan ASN	indeks	B

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Diklat Revolusi Mental
- 2) Diklat Peningkatan Kompetensi ASN Ketenagakerjaan
- 3) Diklat Legal Drafting
- 4) Pelatihan Kurikulum Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah
- 5) Diklat Tata Naskah Dinas
- 6) Pelatihan Publikasi Ilmiah dan Karya Inovasi Pembelajaran
- 7) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Kompetensi Inti
- 8) Diklat Penyidik PNS
- 9) Diklat Manajemen Pemerintah Daerah bagi Aparatur Pemerintah Daerah
- 10) Pelatihan E-Learning

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi	%	36,35

37. Sekretariat DPRD**a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Fasilitasi Pimpinan DPRD
- 2) Fasilitasi Kehumasan dan Dokumentasi Anggota DPRD
- 3) Hearing/dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh
- 4) Masyarakat/Tokoh Agama
- 5) Pembuatan Profil DPRD Provinsi Kepri
- 6) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- 7) Penunjang Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kepri
- 8) Penyusunan Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
- 9) Publik Hearing DPRD Provinsi Kepri



- 10) Rapat - rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Riau
- 11) Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD bersama TAPD
- 12) Rapat Kerja Pimpinan DPRD Se-Indonesia
- 13) Kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD Provinsi Kepri
- 14) Penguatan Peran dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP	%	96,00
2)	Persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD sesuai SOP	%	96,00
3)	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Skor	70,00
4)	Persentase Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	%	100,00

b. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pembuatan Naskah Akademis
- 2) Pembahasan Ranperda dan Produk Hukum DPRD
- 3) Pembuatan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Sosialisasi Peraturan Daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP	%	96,00
2)	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	Angka	14,00

c. Program Peningkatan Publikasi, Komunikasi dan Informasi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Kegiatan Parlementaria
- 2) Kegiatan Reses

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah Media Massa yang berkerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	MoU	95
2)	Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi	Orang Kali	135

38. Sekretariat Daerah

a. Biro Pemerintahan dan Perbatasan

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- a) Asistensi Asosiasi Pemerintah Provinsi Se Indonesia (APPSI)
- b) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kepri
- c) Refleksi Hari Otonomi Daerah
- d) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- e) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- f) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
- g) Pembuatan Sistem Aplikasi Administrasi Pelayanan Elektronik Government
- h) Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
- i) Asistensi dan Koordinasi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan
- j) Pembinaan Penyusunan LPPD Kab/Kota
- k) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- l) Pembinaan Penyelenggaraan Urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Provinsi Kepulauan Riau
- m) Pembinaan Penyelenggaraan Urusan di Bidang ketertiban Umum se Provinsi Kepulauan Riau
- n) Koordinasi Penerapan SPM se- Provinsi Kepri
- o) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
- p) Penataan Wilayah Kec/ Kel/ Desa di provinsi Kepulauan Riau
- q) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan dibidang ketentraman dan Ketertiban Umum Se Provinsi Kepri
- r) Penyusunan Kajian Administrasi Penyelenggaraan Urusan dibidang Ketentraman dan Ketertiban umum
- s) Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Kecamatan
- t) Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Kelurahan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Peringkat	Tinggi
2)	Presentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	%	100,00

2) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- a) Seminar Perbatasan
- b) Penegasan Batas Daerah
- c) Sosialisasi Pengelolaan Batas Antar Negara
- d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Fasilitas Penyelesaian Batas Darat Kab/Kota	%	100,00
2)	Persentase lokasi prioritas dan PKSN yang didata/dikaji/diedukasi dalam pengembangan kawasan perbatasan	%	100,00

b. Biro Hukum

1) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- a) Penyusunan Peraturan Daerah
- b) Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Produk Hukum Daerah
- c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- d) Fasilitas Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
- e) Fasilitas Penyusunan Keputusan Kepala Daerah
- f) Fasilitas Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama dan Hibah Daerah
- g) Evaluasi dan Implementasi Produk Hukum Daerah
- h) Penyusunan Naskah Akademis Perda
- i) Pendampingan Penyusunan Perda Provinsi Kepri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan	Jumlah	7

2) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Produk Hukum Kabupaten/Kota
- Monitoring Produk Hukum Kabupaten/Kota.
- Kajian Produk Hukum Kab / Kota
- Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota
- Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota
- Rakor bidang Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota
- Rapat Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyusunan Promperda Kab/Kota

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi	%	100,00

3) Program Pembinaan Hukum

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Penyusunan PROPEMPERDA (Program Pembentukan Peraturan Daerah)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase ranperda yang diusulkan pemrakarsa yang diakomodir dalam propemperda	%	85,00



4) Program Fasilitas Bantuan dan Layanan Hukum

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Penyuluhan Hukum
- Rakor Penegakan Hukum Provinsi Kepulauan Riau
- Fasilitas penyelesaian permasalahan hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di pengadilan (Litigasi)
- Fasilitas penyelesaian sengketa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau daerah di luar pengadilan (Non litigasi)
- Monitoring Penyelesaian Sengketa Hukum Kab/Kota
- Bantuan Hukum untuk orang miskin
- Pemberian Bantuan Hukum kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	persentase perkara perdata dan TUN yang dihadapi oleh pemprov yang tertangani	%	60,00
2)	jumlah kasus masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum oleh pemprov kepri	Kasus	5
3)	Jumlah MoU antara Gubernur Kepri dengan LBH dan atau OBH yang terverifikasi	Dokumen	3

c. Biro Administrasi Pembangunan

1) Program e-Government

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Pengelolaan Aplikasi Single Base Map Pembangunan Provinsi Kepri
- Pengelolaan Dashboard Development Summary
- Pengelolaan Website Biro Administrasi Pembangunan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah sistem informasi administrasi pembangunan yang terintegrasi	Unit Sistem	7

2) Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Pengendalian Umum Program Kegiatan Pembangunan



- b) Penguatan Sistem Pengendalian Kinerja Pembangunan
- c) Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan se-Provinsi Kepulauan Riau
- d) Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan terkait Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBN
- e) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- f) Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
- g) Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- h) Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	%	Fisik 100,00 Keu 95,00

3) Program Peningkatan Administrasi Pembangunan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- a) Koordinasi, Sinkronisasi Perumusan dan Kebijakan Isu Strategis Pembangunan
- b) Penyusunan Capaian Pembangunan Provinsi Kepri
- c) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
- d) Pelaksanaan Tugas Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan
- e) Berusaha Provinsi Kepulauan Riau
- f) Optimalisasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase dokumen administrasi pembangunan tersusun tepat waktu	%	100,00

4) Program Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Program ini difokuskan pada kegiatan: Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Kepri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah	Kab/Kota	7

d. Biro Administrasi Layanan Pengadaan

1) Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Penyusunan Katalog Lokal
- Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
- Lokakarya Terkait Proses Barang dan Jasa Pemerintah
- Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa
- Peningkatan Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemprov Kepri
- Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa
- Visitasi Pembuktian Faktual Kualifikasi, Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	%	87,00

2) Program e-procurement

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Peningkatan Pelayanan LPSE Kepri
- Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE KEPRI
- Peningkatan Pengguna SPSE
- Peningkatan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
- Peningkatan Pelaksanaan E-Purchasing dan Katalog Elektronik
- Peningkatan Penyusunan Perencanaan Pengadaan pada SIRUP
- Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Se-Provinsi Kepulauan Riau
- Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi
- Pengelola Website Biro Pengadaan Barang/Jasa

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (E-Procurement)	%	85,00

e. Biro Umum**1) Program Pelayanan KDH/WKDH yang difasilitasi**

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah
- Kunjungan Kerja/Inspeksi Wakil Kepala Daerah
- Pengadaan Kelengkapan Rumah Tangga Rumah Dinas Jabatan Gubernur
- Pengadaan Kelengkapan Rumah Tangga Rumah Dinas Jabatan Wakil Gubernur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jabatan Gubernur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jabatan Wakil Gubernur
- Kegiatan harian Kepala Daerah
- Kegiatan Harian Wakil Kepala Daerah
- Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah layanan kedinasan KDH/WKDH yang sesuai prosedur	layanan	2
2)	Jumlah layanan rumah tangga KDH/WKDH yang dilayani sesuai prosedur	layanan	2

2) Program Dukungan Pelayanan Umum

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Makan dan Minum
- Penyediaan Jasa Transportasi
- Penyediaan Jasa Sewa Sarana Perkantoran/Ruang/Tempat/Gedung Perkantoran
- Rutinitas Gedung Daerah dan Wisma Daerah
- Penyediaan BBM dan Kebutuhan Kendaraan Dinas/Jabatan
- Kebutuhan Rumah Tangga Wisma Daerah



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase pelaksanaan pelayanan umum sesuai SOP	%	100,00
2)	Skor Kepuasan Masyarakat	Skor	90

3) Program Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan sekretariat daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Pemeliharaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- Asuransi Barang Milik Daerah
- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Bangunan Milik Daerah
- Pendukung Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda Provinsi Kepulauan Riau
- Pengamanan Aset Milik Daerah
- Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda Prov. Kepri
- Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda Prov. Kepri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase barang milik daerah dilingkungan sekretariat daerah yang terjamin keamanannya	%	100,00
2)	Persentase barang milik daerah dilingkungan sekretariat daerah yang dikelola sesuai dengan standar	%	90,00

f. Biro Kesejahteraan Rakyat

1) Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Pelaksanaan Safari Ramadhan
- Pengajian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- Pelaksanaan TC Peserta STQ/MTQ Kafilah Provinsi Kepulauan Riau
- Pelaksanaan STQ/Mtq Tingkat Provinsi Kepulauan Riau
- Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan
- Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional
- Pembinaan Remaja Mesjid Se-Kepri
- Tabligh Akbar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



i) Pembinaan Mubaligh Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase pelaksanaan hari-hari besar keagamaan	%	100,00
2)	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	%	100,00

2) Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Rakor Kesra Se-Provinsi Kepulauan Riau
- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau
- Rakor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Rakor Pemberdayaan dan Pengembangan Majelis Taklim Provinsi Kepulauan Riau
- Pembinaan Pola Hidup Masyarakat Sehat

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat tingkat provinsi	%	100,00
2)	Persentase Pembinaan , Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan	%	100,00
3)	Persentase Pembinaan , Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan	%	100,00

3) Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Seminar Nasional Kerukunan Antar Umat Beragama

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase kegiatan dialog/seminar antar umat beragama yang difasilitasi	%	1



g. Biro Administrasi Perekonomian

1) Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Asistensi Pembangunan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan/ CSR di Provinsi Kepri
- b) Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Bidang Statistik
- c) Koordinasi, Sinkronisasi Perumusan dan Kebijakan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepri.
- d) Koordinasi, Sinkronisasi Perumusan dan Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri.
- e) Koordinasi, Sinkronisasi Perumusan dan Kebijakan di Bidang Industri dan Perdagangan Provinsi Kepri.
- f) Koordinasi, Sinkronisasi Perumusan dan Kebijakan di Bidang Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri.
- g) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Produksi dan Distribusi Perekonomian Dalam Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepri
- h) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Di Provinsi Kepri
- i) Koordinasi, Sinkronisasi Perumusan dan Kebijakan di Bidang Kominfo, Persandian dan Statistik.
- j) Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- k) Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Penanaman Modal Dan PTSP
- l) Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Urusan Koperasi Dan UMKM
- m) Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Urusan Pariwisata
- n) Pemberdayaan Pelaku Usaha Terkait Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan	rekomendasi	8
2)	Jumlah koordinasi bidang perekonomian yang terlaksana	Angka	14
3)	Jumlah monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian yang dilaksanakan	Laporan	7



2) Program peningkatan kinerja BUMD dan Lembaga Perekonomian

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan BUMD Provinsi Kepulauan Riau
- Fasilitasi Persiapan Pendirian dan Pengoperasian PT. Jamkrida Kepri
- Fasilitasi Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus BUMD
- Penyusunan Kebijakan Bidang BUMD

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Rata-rata Tingkat Kesehatan BUMD	Skor	45,00
2)	Jumlah BUMD baru yang terbentuk	BUMD	1

h. Biro Organisasi dan Korpri

1) Program kelembagaan organisasi pemerintah daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Pendampingan Penerapan Pergub tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Prov. Kepri
- Penataan Pembentukan Cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Provinsi Kepulauan Riau
- Evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja
- Workshop Budaya kerja Provinsi Kepri
- Rapat Koordinasi Bidang Organisasi Kab/ Kota
- Rapat Kerja dan Monev Pengurus Korpri
- Penataan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	%	100,00

2) Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Penyediaan dan pengembangan Sistem informasi jabatan Provinsi Kepulauan Riau
- Rapat Kerja Bidang Analisa Jabatan Provinsi Kepulauan Riau
- Monitoring dan Evaluasi Analisa Jabatan Kab/Kota se Prov. Kepri
- Rapat Kerja Penerapan dan Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Jabatan
- Bimtek Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
- Bimtek dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Jabatan yang telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja	%	97,00
2)	Persentase Perangkat daerah yang telah memiliki dokumen evaluasi jabatan	%	97,00
3)	Persentase jabatan struktural yang telah disusun standar kompetensi Jabatan managerial sesuai ketentuan	%	99,00

3) Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- a) Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelayanan Publik Provinsi dan kab/Kota
- b) Pembinaan dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Provinsi Kepri
- c) Pembinaan Penerapan Tata Naskah Dinas Prov. Kepri
- d) Koordinasi Pembinaan Publik dan Pengembangan Kualitas Aparatur Pelayanan Publik
- e) Forum Konsultasi Publik tentang Rancangan Kebijakan Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Riau
- f) Forum Konsultasi Publik tentang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- g) Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penerapan SOP Prov. Kepri
- h) Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penerapan SOP Kab/Kota se Prov. Kepri
- i) Pembinaan dalam Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kab/Kota
- j) Pembinaan Peningkatan Pelayanan Administrasi yang Prima dalam memberikan Pelayanan
- k) Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan
- l) Pembinaan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
- m) Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- n) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Kepri
- o) Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan standar pelayanan publik	%	100,00
2)	Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh kementerian	%	100,00
3)	Persentase SOP pada seluruh Opd yang tersusun.	%	100,00
4)	Persentase SOP pada slrh OPD yang telah diimplementasikan	%	100,00
5)	Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik	Skor SKM	83,00

4) Program pembentukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau
- Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi Sekretaris Daerah Se-Provinsi
- Kepri
- Pembinaan Reformasi Birokrasi Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
- Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab/Kota Se-Provinsi Kepri

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Angka	75

5) Program Kesejahteraan Anggota Korpri

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Peningkatan Partisipasi Anggota Korpri
- Senam sehat bersama anggota KORPRI/ ASN
- Peningkatan Keterampilan Bidang Kerohanian pada anggota ASN Provinsi Kepulauan Riau
- Kepulauan Riau
- Pembinaan MTQ Kopri Kab/Kota
- Pembinaan Olahraga Atlit Kopri Provinsi Kepri
- Pekan Olahraga Tk. Provinsi KORPRI
- Pembinaan Olahraga Atlit Korpri Kab/Kota
- Pekan Olahraga Nasional KORPRI
- Pembinaan Seni Budaya Bagi Anggota Korpri
- Pelepasan ASN/Anggota Korpri yang akan Menunaikan Ibadah Haji



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Provinsi	Angka	20
2)	Jumlah anggota korpri yang memperoleh prestasi dalam mengikuti kompetisi berbagai cabang olahraga tingkat Nasional	Angka	6

i. Biro Humas, Protokol dan Penghubung

1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDh/WKDH

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- a) Pembuatan dan Pendokumentasian Naskah Sambutan KDh/WKDH
- b) Pengelolaan Manajemen Tamu di Kantor Gubernur Kepri
- c) Pembuatan Buku Jadwal Kerja Harian Pemerintah Daerah Tahun 2017
- d) Peningkatan Pelayanan KDh/ WKDH dan Unsur Pimpinan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Melakukan Kunjungan Kerja dan Aktivitas Kerja di Dalam Daerah Maupun di Luar Daerah
- e) Pelayanan Kunjungan Tamu
- f) Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- g) Pelayanan Acara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Pelayanan KDh/WKDH Bidang Kehumasan, Keprotokolan, dan Penghubung dan Kerjasama Yang Sesuai Dengan SOP	%	100,00

2) Program Pengembangan Publikasi, Komunikasi dan informasi

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- a) Penyediaan Kegiatan Publikasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- b) Pengelolaan Sarana Informasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- c) Pameran Foto Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- d) Penunjang Penyusunan Strategi Humas, Peliputan dan Pengelolaan Informasi Media Center serta Pemantauan Media Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- e) Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- f) Peliputan Media Massa Kegiatan KDh/ WKDH



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Jumlah Media Massa Yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Media Massa	10,00
2)	Persentase Media Informasi Yang Digunakan	%	100,00

3) Program Fasilitas dan Kerjasama dengan Berbagai Pihak

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Monitoring dan Evaluasi Paguyuban Masyarakat Kepri
- Pengelolaan Asrama Mahasiswa/Mahasiswi Kepri di Luar Prov Kepulauan Riau
- Pelaksanaan Pameran dan Promosi Lainnya di Luar Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- Pengelolaan, Pemeliharaan, Promosi Budaya, dan Operasional Anjungan Daerah Prov Kepri di TMII Jakarta
- Fasilitas Kerjasama Antarlembaga/Daerah
- Penyediaan Rapat Internal dan Eksternal Kantor dengan OPD dan Instansi Vertikal Terkait Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri yang Difasilitasi di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri	Kegiatan	4
2)	Jumlah Kerjasama Yang Difasilitasi Oleh Bagian Penghubung dan Kerjasama di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri	Mou	10

39. Fungsi Pengawasan

a. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- Pelatihan Kantor Sendiri / In House Training
- Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Se- Provinsi Kepulauan Riau
- Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Tenaga pemeriksa
- Peningkatan Kompetensi Tenaga Penunjang Pengawasan/ Aparatur Pengawasan



Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang memiliki sertifikasi	%	100,00
2)	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	Level	3
3)	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau	%	100,00

b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pengembangan Program Sistem E-Audit
- 2) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Manajemen Pengawasan
- 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR)
- 4) Klinik Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Klinik Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Persentase Pelaksanaan Tugas pada Inspektorat yang memiliki SOP yang memadai	%	80,00

c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) pada Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu/ Audit On Call dan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat di Wilayah Pemprov Kepri
- 3) Peningkatan Koordinasi Dengan Aparat Pengawasan Pemerintah dan Instansi Terkait Lainnya (Itjen Kemdagri, KPK, BPK, BPKP, MENPAN, dan Itjen Terkait Serta Instansi Lainnya)
- 4) Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.



- 5) Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- 6) Pemeriksaan Reguler Komprehensif pada SKPD di lingkungan Pemprov Kepri
- 7) Intensifikasi Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah
- 8) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri
- 9) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 10) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
- 11) Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- 13) Pemutakhiran Data Tindak Lanjut APIP dan BPK
- 14) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Provinsi Kepulauan Riau
- 15) Monev Dana Desa
- 16) Evaluasi PPRG
- 17) Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 18) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- 19) Reviu Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai
- 20) Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021
1)	Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri	Status	WTP
2)	Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3
3)	Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Zona	Hijau

d. Program Pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Program ini difokuskan pada kegiatan:

- 1) Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Sosialisasi Anti KKN dalam rangka pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri
- 3) Monev Laporan Gratifikasi
- 4) Survey Penilaian Integritas
- 5) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)



- 6) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi
- 7) Aksi Saber Pungli
- 8) Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1)	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P	%	95,00
2)	Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri	Status	Hijau

40. Program Rutin Pada Tiap Perangkat Daerah

Selain program-program pembangunan, setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan beberapa program rutin sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain:

- 1) Penyediaan jasa administrasi Keuangan;
- 2) Penyediaan jasa tenaga pendukung; dan
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain:

- 1) Pengadaan peralatan gedung Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor Penyediaan,
- 3) Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana/Ruangan Perkantoran;
- 4) Penyediaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana/Ruangan Perkantoran.

c. Program Peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain: pengadaan pakaian dinas dan pakaian hari-hari tertentu.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain: Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, Non Formal, BinteK dan Kursus.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain:

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan perangkat daerah.

f. Program pengembangan data/informasi

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain:



- 1) Pengelolaan Website;
- 2) Pengelolaan sistem informasi.

g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain: Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah.

h. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Hasil Pengawasan

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain: Monitoring Evaluasi dan Pelaporan hasil pembangunan.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU atau *Key Performance Indikator* adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi (PermenPAN Nomor 09/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU Instansi Pemerintah). Sementara itu berdasarkan PermenPAN No. 53 Tahun 2014, Indikator Kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dijabarkan dari misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Kinerja Tahun 2021
1.	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta yang berciri khas melayu dibagi Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta dikali 100	%	70,75
2.	Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	Jumlah warisan budaya yang lestari dibagi jumlah warisan budaya dikali 100	%	22,38
3.	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	Jumlah mubaligh yang lulus kompetensi dibagi mubaligh yang dibina x 100	%	100
4.	Persentase santri yang menjadi hafiz	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di kepulauan riau dikali 100	%	100
5.	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	150
6.	Angka kriminalitas	Jumlah kasus kriminalitas	Kasus	4.860



No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Kinerja Tahun 2021
7.	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	Panjang jalan provinsi berkondisi baik dibagi panjang jalan dikali 100	%	75,00
8.	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang tersedia dibagi Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang seharusnya tersedia dikali 100	%	100,00
9.	Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	Jumlah Kapal Penyeberangan (roro) yang tersedia dikali 100	%	100
10.	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Laut yang tersedia dibagi jumlah Pelabuhan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	100,00
11.	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	Jumlah Kapal Angkutan Laut yang tersediadibagi Kapal Angkutan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	100,00
12.	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	Luas wilayah yang memiliki Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan) layak dibagi Luas wilayah dikali 100	%	88,48
13.	Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	Luas wilayah yang memperoleh akses air bersih dibagi Luas wilayah dikali 100	%	100
14.	Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	Ha	255,09
15.	Rasio Elektrifikasi	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	93,50
16.	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 ke atas	tahun	10,47
17.	Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B	Jumlah sekolah SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi B dibagi Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB dikali 100	%	84,00
18.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja dibagi Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja yang terdaftar dikali 100	%	67,8
19.	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari kerja yang terdaftar dikali 100	%	64
20.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Jumlah Kematian Ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000	per 100.000 KH	128
21.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	Jumlah Kematian Bayi (AKB) dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000	per 1.000 KH	30
22.	Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita)	Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dengan statis gizi kurus (underweight) dibagi jumlah Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dikali 100	%	16,2



No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Kinerja Tahun 2021
23.	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	5,53
24.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,75
25.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,5
26.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	306.463,67
27.	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.920,50
28.	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Ton	1.331,54
29.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta orang	2,5
30.	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Ton	45.822
31.	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.742
32.	Jumlah Produksi Padi	Jumlah Produksi Padi	Ton	1.020
33.	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV < 10
34.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	93,00
35.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp Milyar	8.100
36.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp Milyar	900
37.	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	Jumlah Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi dibagi Jumlah Koperasi dan UKM dikali 100	%	22,25
38.	Jumlah industri berbahan baku lokal	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	2.200
39.	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Juta US \$	1.550,20
40.	Kontribusi sektor	Jumlah PDRB sektor perdagangan	%	8,52



No	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Kinerja Tahun 2021
	perdagangan terhadap PDRB	dibagi jumlah PDRB dikali 100		
41.	Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	Jumlah waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu dibagi Jumlah waduk yang dilakukan pengujian dikali 100	%	100
42.	Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan	Luas RTH publik di kawasan perkotaan dibagi Luas wilayah dikali 100	%	10,99
43.	Indeks Profesionalitas Pegawai	Nilai Perhitungan IPP ASN Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	80
44.	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	BB
45.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala A - E	B
46.	Nilai Keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan informasi publik	Skala nilai 0-100	67,5
47.	Nilai e- government	Nilai e- government	Skala nilai 1-4	2,5
48.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,624
49.	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini	WTP
50.	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3

6.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) maupun indikator sasaran (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik



wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 tertuang pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2021	Perangkat Daerah
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1)	Pertumbuhan Ekonomi	(Jumlah PDRB tahun n dikurangi PDRB tahun sebelumnya) dibagi PDRB tahun sebelumnya dikali 100	%	5±1	Seluruh PD
2)	Laju Inflasi	Laju Inflasi	%	3,50±1	Seluruh PD
3)	Indeks Gini	Indeks Gini	Indeks	0,34±0,01	Seluruh PD
4)	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100	%	5,68	Seluruh PD
5)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,19	Seluruh PD
B	Aspek Pelayanan Umum				
1.	Pendidikan				
6)	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 ke atas	tahun	10,47	Dinas Pendidikan
7)	Persentase SMA/MA/SMK/SMAK/SLB yang terakreditasi minimal B	Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB yang terakreditasi B dibagi Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB dikali 100	%	84,00	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan				
8)	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Jumlah Kematian Ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000	per 100.000 KH	128	Dinas Kesehatan
9)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	Jumlah Kematian Bayi (AKB) dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000	per 1.000 KH	30	Dinas Kesehatan



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2021	Perangkat Daerah
10)	Persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita)	Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dengan statis gizi kurus (<i>underweight</i>) dibagi jumlah Jumlah anak bayi usia 0-59 bulan 29 hari dikali 100	%	16,2	Dinas Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
11)	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	Panjang jalan provinsi berkondisi baik dibagi panjang jalan dikali 100	%	75,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pertanahan
4.	Pertanahan				
12)	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi	Jumlah permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi dibagi Jumlah permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikali 100	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pertanahan
5.	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
13)	Cakupan pelayanan Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan)	Luas wilayah yang memiliki Sanitasi (Air Limbah perkotaan, drainase, persampahan) layak dibagi Luas wilayah dikali 100	%	88,48	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14)	Persentase pelayanan akses air bersih yang aman	Luas wilayah yang memperoleh akses air bersih dibagi Luas wilayah dikali 100	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15)	Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	%	255,09	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16)	Proporsi RTH publik di kawasan perkotaan	Luas RTH publik di kawasan perkotaan dibagi Luas wilayah dikali 100	%	10,99	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2021	Perangkat Daerah
6.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat				
17)	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	kasus	150	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
18)	Persentase konflik sosial tertangani	Jumlah potensi konflik sosial tertangani dibagi jumlah potensi konflik sosial dikali 100	%	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19)	Persentase desa/kel tangguh bencana	Jumlah desa/ kel yang tangguh dalam menghadapi bencana dibagi Jumlah desa/ kel dikali 100	%	2,64	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Sosial				
20)	Persentase keluarga miskin yang meningkat pendapatannya melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Jumlah keluarga miskin yang meningkat pendapatannya melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibagi jumlah populasi keluarga miskin dikali 100	%	2,53	Dinas Sosial
8.	Tenaga kerja				
21)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	Jumlah Pengangguran Terbuka dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100	%	6,60	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
22)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja dibagi Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja yang terdaftar dikali 100	%	67,8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
9.	Transmigrasi				
23)	Jumlah warga (KK) yang ditempatkan sesuai dengan rencana penempatan	Jumlah warga (KK) yang ditempatkan sesuai dengan rencana penempatan	KK	2.730	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan				



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2021	Perangkat Daerah
Anak					
24)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
26)	Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR)	Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi dibagi Jumlah PUS dikali 100	%	50,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12. Pangan					
27)	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	CV<10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
28)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	93,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2021	Perangkat Daerah
13. Pertanian					
29)	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Jumlah Produksi tanaman Komoditas Holtikultura	Ton	45.822	Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan dan Ketahanan Pangan
30)	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.742	Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan dan Ketahanan Pangan
31)	Jumlah Produksi Padi	Jumlah Produksi Padi	Ton	1.020	Dinas Pertanian, Kesehatan Hewan dan Ketahanan Pangan
14. Lingkungan hidup					
32)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69,80	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15. Kehutanan					
33)	Luas lahan kritis terehabilitasi	Luas lahan kritis terehabilitasi	ha	230	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
16. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
34)	Rasio penduduk ber-KTP	Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah mendaftarkan KTP dibagi Jumlah penduduk wajib KTP dikali 100	%	98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35)	Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran	Jumlah anak (0-18 tahun) berakte kelahiran dibagi Jumlah anak (0-18 tahun) dikali 100	%	82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan dan



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2021	Perangkat Daerah
					Pencatatan Sipil
17.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
36)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	BUMDesa	55,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18.	Perhubungan				
37)	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang tersedia dibagi Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (roro) yang seharusnya tersedia dikali 100	%	100,00	Dinas Perhubungan
38)	Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (roro)	Jumlah Kapal Penyeberangan (roro) yang tersedia dikali 100	%	100,00	Dinas Perhubungan
39)	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Laut yang tersedia dibagi jumlah Pelabuhan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	100,00	Dinas Perhubungan
40)	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	Jumlah Kapal Angkutan Laut yang tersediadibagi Kapal Angkutan Laut yang seharusnya tersedia dikali 100	%	100,00	Dinas Perhubungan
19.	Komunikasi dan Informatika				
41)	Nilai Keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan informasi publik	Skala nilai 0-100	67,5	Dinas Komunikasi dan Informatika
42)	Nilai e-government	Nilai e- government	Skala nilai 1-4	2,5	Dinas Komunikasi dan Informatika



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2021	Perangkat Daerah
20.	Statistik				
43)	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral Provinsi Kepri	Jumlah data/statistik sektoral Provinsi Kepri yang disusun dibagi jumlah sektor dikali 100	%	35	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Persandian				
44)	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100	%	50	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	Koperasi dan UKM				
45)	Persentase UKM yang naik kelas/aktif	Jumlah UKM yang naik kelas/aktif dibagi jumlah UKM dikali 100	%	0,75	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
46)	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	Jumlah Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi dibagi Jumlah Koperasi dan UKM dikali 100	%	22,25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23.	Penanaman Modal				
47)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp Milyar	8.100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
48)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp Milyar	900	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24.	Kepemudaan dan olah raga				
49)	Jumlah atlet	Jumlah atlet berprestasi	Pengha	19	Dinas



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2021	Perangkat Daerah
	berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/ internasional	olahraga tingkat regional/ nasional/ internasional	rgaan		Kepemudaan dan olah raga
25. Kebudayaan					
50)	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta yang berciri khas melayu dibagi Jumlah bangunan milik Pemerintah dan swasta dikali 100	%	70,75	Dinas Kebudayaan
51)	Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	Jumlah warisan budaya yang lestari dibagi jumlah warisan budaya dikali 100	%	22,38	Dinas Kebudayaan
26. Perpustakaan					
52)	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	(Jumlah Pengunjung Perpustakaan yang tahun sekarang dikurangi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2015) dibagi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2015 dikali 100	%	32,91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27. Kearsipan					
53)	Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan	(Jumlah arsip tahun sekarang dikurangi jumlah arsip tahun 2015) dibagi jumlah arsip tahun 2015 dikali 100	%	2,62	
28. Kelautan dan Perikanan					
54)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	306.463,67	Dinas Kelautan dan Perikanan
55)	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.920,50	Dinas Kelautan dan Perikanan
56)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Jumlah produk olahan Hasil perikanan (Ton)	Ton	1.331,54	Dinas Kelautan dan Perikanan



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2021	Perangkat Daerah
29.	Pariwisata				
57)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta orang	2,5	Dinas Pariwisata
30.	Energi dan Sumber Daya Mineral				
58)	Rasio Elektrifikasi	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	93,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
31.	Perdagangan				
59)	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	Juta US \$	1.550,20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
60)	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah PDRB sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB dikali 100	%	8,52	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
32.	Perindustrian				
61)	Jumlah industri berbahan baku lokal	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	2.200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33.	Perencanaan Pembangunan				
62)	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	Jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dibagi jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang di kali 100	%	>36,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
63)	Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	Jumlah kegiatan dalam renja Perangkat Daerah (PD) yang sama dengan renstra PD dibagi jumlah kegiatan dalam renja PD dikali 100	%	87,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
34.	Penelitian dan Pengembangan				
64)	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder dibagi Jumlah	%	65,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2021	Perangkat Daerah
	oleh stakeholder	hasil kelitbangan dikali 100			Pengembangan
35.	Keuangan				
65)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	1,624	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
66)	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	Opini	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah
36.	Sekretariat DPRD				
67)	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	%	70	Sekretariat DPRD
37.	Kepegawaian				
68)	Indeks Profesionalitas Pegawai	Nilai Perhitungan IPP ASN Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	80	Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
38.	Sekretariat Daerah				
69)	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	Jumlah mubaligh yang lulus kompetensi dibagi mubaligh yang dibina x 100	%	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
70)	Persentase santri yang menjadi hafiz	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di kepulauan riau dikali 100	%	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
71)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala A - E	B	Biro Organisasi dan Korpri
72)	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Angka	75	Biro Organisasi dan Korpri
39.	Pengawasan				
73)	Nilai hasil evaluasi	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategor	BB	Inspektorat,



No	Indikator Kinerja Daerah	Formula	Satuan	Target Tahun 2021	Perangkat Daerah
	SAKIP		i		Barenlitbang, Biro Organisasi dan Korpri
74)	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	3	Inspektorat Daerah
75)	Level Maturitas SPIP Provinsi Kepulauan Riau	Level Maturitas SPIP Provinsi Kepulauan Riau	Level	3	Inspektorat Daerah
C	Aspek Daya Saing				
76)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	nilai	90	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan Daerah yang berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pada tahap perencanaan, RKPD disusun dengan berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam hal ini prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung visi misi Gubernur Kepulauan Riau dan arah kebijakan tahun 2021 dalam RPJMD, serta prioritas dan program strategis nasional tahun 2021.

Pada tahap penganggaran, RKPD akan menjadi pedoman dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan akan disepakati dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan penyusunan RAPBD yang dilengkapi dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, dan pada tahap akhir ditetapkan menjadi APBD dan Daftar Penetapan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Dalam tahap pelaksanaan, APBD yang ditetapkan berdasarkan pada RKPD dan KUA-PPAS akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya unsur pemerintah daerah melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui efektivitas pencapaian target kinerja dan efisiensi masing-masing program dan kegiatan.



Untuk menjamin penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan RKPD berjalan dengan baik, maka diatur kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD agar disosialisasikan kepada semua masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait agar bisa diketahui oleh semua pihak.
2. Penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 agar berpedoman pada RKPD Tahun 2021.
3. Perangkat Daerah (PD) berkewajiban melaksanakan program-program RKPD Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
4. Dalam upaya meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah agar menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021 berpedoman pada RKPD Tahun 2021.
5. Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau agar mempedomani RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten/Kota tahun 2021.
6. Guna menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan kegiatan pemantauan secara berkala, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2021.
8. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah harus bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD 2021.

Penjabaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 perlu didukung komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Masing-masing pihak sesuai



dengan kewenangannya berperan dalam pencapaian visi jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 yaitu: **"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"**.